

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

MENCARI MODEL KEPEMIMPINAN

PROFETIK TRANSFORMATIF:

MENUJU INDONESIA BERDAULAT

Diselenggarakan Dalam Rangka memperingati Dies UNY ke 49
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
13 April 2013

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
MENCARI MODEL KEPEMIMPINAN
PROFETIK TRANSFORMATIF: MENUJU INDONESIA BERDAULAT**

Editor:

Utami Dewi, M.PP

Layout isi dan Cover:

Tim Azzagrafika

Cetakan Pertama:

Mei 2013

xii + 192 hlm; 25 x 17 cm, 2013

ISBN 978-602-777-719-4

Penerbit

Azzagrafika

Jalan Seturan 2 No. 128 Caturtunggal, Depok, Sleman

Yogyakarta 0274-486466

Anggota IKAPI

Hak Pengarang Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

SAMBUTAN KETUA FISTRANS

Diskusi tentang konsep model kepemimpinan profetik memiliki beberapa urgensi bagi ilmuwan sosial dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY). Urgensi tersebut antara lain:

- a. FIS sebagai fakultas yang menggeluti ilmu-ilmu sosial memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memberikan kontribusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, lebih khusus lagi masalah yang terkait dengan masalah kepemimpinan nasional yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.
- b. Komitmen moral dan akademis itu dapat direalisasikan melalui forum ilmiah antara lain seminar nasional yang diselenggarakan oleh FIS UNY dalam rangka Dies Natalis UNY ke-49. Adapun tema yang diangkat “Mencari Model Kepemimpinan Profetik Transformatif: Menuju Indonesia Berdaulat” merupakan tema yang tepat dan strategis.
- c. Melalui forum seminar nasional dapat didorong pemahaman yang lebih mendalam dan lebih sistemik berkaitan dengan gagasan kepemimpinan profetik di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam forum tersebut mempertemukan para akademisi, praktisi dan beberapa tokoh nasional yang memiliki *track record* dan integritas yang kuat seperti mantan ketua MK, Prof. Dr. Mahfud, MD, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Syafii Ma’arif, dan Rektor UNY Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

Dilihat dari sisi tema diskursus tentang kepemimpinan profetik memiliki peluang untuk memberikan kontribusi dan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia semenjak reformasi dinilai oleh berbagai kalangan mengalami krisis kepemimpinan nasional. Bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membebaskan dari berbagai macam kolonialisme (proses liberasi) dan melakukan program-program pembangunan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan (humanism) yang mana kedua

hal tersebut dilandasi oleh prinsip transedensi. Perpaduan antara tiga hal tersebut yaitu liberasi, humanism dan transedensi dikenal dengan model kepemimpinan yang profetik.

Yogyakarta, 13 April 2013
Ketua FISTRANS

Nasiwan

SAMBUTAN DEKAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas perkenan-Nya pula, akhirnya proceeding yang memuat paper yang dipresentasikan dalam rangka Seminar Nasional untuk memperingati Dies Natalis UNY ke-49, dengan tema “Mencari Model Kepemimpinan Profetik-Transformatif menuju Bangsa yang Berdaulat” dapat disusun oleh panitia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadapan pemimpin teladan, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga kita dapat meneladani kepemimpinan beliau.

Munculnya tema seminar di atas, berawal dari bincang-bincang panitia kecil di ruang dekanat Fakultas Ilmu Sosial tentang situasi mutakhir kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama di republik tercinta ini. Gejala yang terbaca dari situasi itu antara lain banyaknya kerusakan sosial, munculnya keresahan sosial, dan kegalauan masyarakat mengenai masa depan bangsa. Akhirnya pembicaraan pun mengerucut pada tema tentang ‘kewibawaan negara’.

Pada saat yang sama, berkembang pula pemikiran ‘liar’ dan bersifat menduga-duga, jangan-jangan melemahnya kewibawaan negara ini dikarenakan bangsa dan negara ini sudah dalam keadaan tergadai. Pengertian ‘tergadai’ yang dimaksudkan adalah meskipun pada hakikatnya kita adalah pemilik sah dari tanah air dan republik tercinta ini, tetapi sering kali tergambar bahwa kita ‘seakan’ tidak punya kuasa mutlak atas kepemilikan tersebut. Seakan kedaulatan negara ini telah tersandera oleh pihak lain.

Dari dua hal yang telah disebutkan di atas, yaitu ‘kewibawaan negara’ di satu pihak dan ‘kedaulatan negara yang tersandera’ di pihak lain, akhirnya perbincangan mengarah pada masalah ‘kepemimpinan’. Tampaknya, agar negara ini bisa ‘berdiri dengan tegak, berdaya, dan berdaulat’, dibutuhkan sosok kepemimpinan dengan karakteristik tertentu. Untuk mengubah situasi bangsa ini ke depan, karakteristik ‘kepemimpinan yang transformatif’ mutlak diperlukan, karena hal itu memang merupakan suatu keniscayaan dan bagian dari ‘sunnatillah’.

Terilhami oleh konsep ISP (Ilmu Sosial Profetik) yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, 'kepemimpinan' yang dibutuhkan, selain memiliki karakteristik transformatif, kepemimpinan tersebut harus pula dilengkapi dengan karakteristik yang lain, yaitu karakteristik profetik. Dalam hal ini, sebagai seorang Muslim, kepemimpinan profetik adalah 'kepemimpinan yang ada dan melekat pada diri para Nabi', termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, salah satu model kepemimpinan tersebut, dengan mengacu pada kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, saya sebut dengan '*SHAFT Leadership Model*'.

Kata '*SHAFT*', selain menyerupai nama salah satu surat dalam al-Quran, yaitu surat yang ke-37 (al-Shaffaat), yang berarti 'bershaf-shaf', kata ini merupakan rangkuman dari empat sifat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu *Shidiq, Amanat, Fathanah, dan Tabligh*'. Akhirnya, untuk masa depan dan kemandirian republik tercinta ini, Fakultas Ilmu Sosial mengangkat tema "Mencari Model Kepemimpinan Profetik-Transformatif: Menuju Indonesia Berdaulat".

Meminjam konsep Max Weber tentang '*kharisma*', model kepemimpinan yang profetik-transformatif ini, insya Allah akan memiliki 'kewibawaan' yang kuat. Demikian pula, dengan menggunakan konsep Sartono Kartodirjo tentang '*mesianisme*', kepemimpinan profetik-transformatif ini akan menjadi (dalam tanda petik) "*Ratu Adil*", yang insya Allah akan membawa kejayaan dan kesejahteraan masa depan bangsa ini, *wallahu a'lam*. Akhirnya, perlu direnungkan adanya ungkapan yang menyatakan bahwa '*leader is born not made*' (pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat).

Atas nama panitia, kami mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada dan terima kasih atas partisipasinya, serta selamat membaca proceeding.

Yogyakarta, 13 April 2013
Dekan FIS, UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

PENGANTAR

Seminar Nasional dengan tema “**Mencari Model Kepemimpinan Profetik Transformatif: Menuju Indonesia Berdaulat**” merupakan bagian dari serangkaian acara memperingati Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta yang ke-49. Seminar ini bertujuan untuk: *pertama*, memberikan sumbangsih bagi upaya melahirkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. *Kedua*, melakukan sharing ide yang melibatkan banyak pihak guna mewujudkan kepemimpinan nasional yang bersifat profetik transformatif. Terakhir, melalui seminar ini diharapkan dapat memperkuat jaringan kerjasama Ilmuwan yang peduli bagi tegaknya kedaulatan Indonesia.

Proseding ini hadir sebagai pelengkap dari kegiatan Seminar Nasional “**Mencari Model Kepemimpinan Profetik Transformatif: Menuju Indonesia Berdaulat**” yang terdiri dari dua sesi diskusi, yaitu diskusi pleno dan diskusi paralel berdasarkan subtema. Sesi diskusi pleno menghadirkan tiga pembicara utama, yaitu Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Prof. Dr. Syafei Maarif, Guru Besar Emeritus Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta; dan Prof. Dr Rohmad Wahab, M.Pd, MA, selaku pemerhati masalah kependidikan sekaligus Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Sesi presentasi paralel menghadirkan para akademisi dan pemerhati masalah kepemimpinan dan keterkaitannya dengan perspektif politik, sejarah dan pendidikan. Oleh karena itu diskusi presentasi terbagi dalam tiga subtema, yaitu kontribusi partai politik dalam mewujudkan kepemimpinan profetik transformatif di Indonesia; kepemimpinan profetik dan transformatif dalam perspektif historis di Indonesia; dan peran pendidikan dalam mewujudkan kepemimpinan nasional yang profetik dan transformatif.

Dalam subtema pertama, kontribusi partai politik dalam mewujudkan kepemimpinan profetik transformatif di Indonesia, terdapat enam makalah pendamping. Makalah yang pertama disampaikan oleh Pak Nasiwan berjudul **Muslim Negarawan, Sebuah Refleksi Pemikiran Profetik**, menjelaskan bahwa di Indonesia sampai saat ini belum muncul sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah kehidupan yang berkemajuan. Model kepemimpinan

yang muncul sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi belum menunjukkan kriteria negarawan baik pada level nasional maupun lokal.

Selanjutnya Dr. Hardiansyah mengulas tentang **Kontribusi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan Kepemimpinan Profetik Transformatif di Indonesia**. Menurut Dr. Hardiansyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu bersaing dengan partai-partai lainnya dalam percaturan politik di Indonesia. Pada pemilu 2009 PKS masuk ke dalam 4 besar perolehan suara nasional. Bahkan PKS telah mampu melahirkan kepemimpinan yang profetik transformatif melalui sistem pengkaderan yang dilakukannya. Berbagai posisi strategis telah diraih oleh kader PKS seperti Ketua MPR RI, Gubernur Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa bupati/walikota di Indonesia.

Sementara itu, Yanuardi dengan tulisannya berjudul **Model Kepemimpinan Profetik Transformatif: Upaya Mencari Model Kepemimpinan yang Ideal Demi Menata Indonesia**, menguraikan bahwa model kepemimpinan profetik transformatif merupakan sebuah model kepemimpinan yang menekankan nilai dan sekaligus tugas yang harus diemban seorang pemimpin yaitu humanisasi, liberasi dan transedensi. Dalam mewujudkan model kepemimpinan ini dalam konteks Indonesia telah teridentifikasi sejumlah tantangan baik kultural seperti budaya patron klien dan budaya citra, maupun struktural seperti sistem politik yang menciptakan oligarki politik.

Sub tema kedua, kepemimpinan profetik dan transformatif dalam perspektif historis di Indonesia, Zulkarnain dalam papernya berjudul **Nasionalisme dalam Konsep Kepemimpin Profetik Transformatif (Kajian Sejarah)** menjelaskan bahwa dalam sejarah Indonesia paling tidak ada delapan fase pertumbuhan nasionalisme bila dikaitkan dengan kepemimpinan profetik transformatif di Indonesia yakni: nasionalisme akan teritori, kebangkitan nasionalisme yang ditandai dengan gerakan budi utomo; kepemimpinan profetik transformatif yang ditandai dengan kebangkitan nasionalisme tahun 1928, gerakan revolusi fisik kemerdekaan, perkembangan nasionalisme tahun 1966, kebangkitan angkatan tahun 1970-an, kebangkitan angkatan 1980-an, dan angkatan 1990-an.

Panji Hidayat dalam paper berjudul **Pemimpin Generik Organik di Era Mabuk Demokrasi** menyatakan bahwa selama proses demokrasi berlangsung yang terjadi justru pembodohan dan pendangkalan kesadaran politik masyarakat. Elite politik mengajarkan masyarakat dengan politik uang, mendidik masyarakat dengan pragmatisme dan oportunisme, mengajarkan masyarakat berperilaku korup dan bertindak amoral, membangun politik *divide et impera* varian baru. Dari itulah saatnya dimunculkan pemimpin **generik organik** untuk mengatasi bangsa yang sedang krisis kepemimpinan ini.

Sementara itu, pada sub tema ketiga, yaitu **Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Kepemimpinan Nasional yang Profetik dan Transformatif**, Laila Fatmawati dengan paper berjudul **Integrasi Nilai Profetik dalam Pendidikan Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Pemimpin Profetik Transformatif**, me-

ngatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pemimpin yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Melalui pengintegrasian nilai-nilai profetik dalam pendidikan diharapkan dapat membekali generasi muda dengan dengan spirit profetik transformatif yang akan membawa bangsa ini menuju bangsa yang berdaulat.

Priadi Surya dalam paper berjudul **Penanaman Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik Melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan** menilai bahwa guru dan staf pendidiklainnya menjadi sosok yang penting dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang teladan. Nilai-nilai kepemimpinan profetik pendidik dapat ditanamkan melalui pembahasan kepemimpinan pendidikan bagi semua mahasiswa kependidikan. Penanaman dilakukan dengan pemberian wawasan teoritis terkait teori kepemimpinan dari literatur Barat dan contoh-contoh nyata kepemimpinan nabi dan rasul.

Selanjutnya, Ali Imron dalam paper berjudul **Strategi Mewujudkan Kepemimpinan Profetik Transformatif Melalui Pendidikan Demokrasi Menuju Civil Society**, menguraikan pentingnya pendidikan demokrasi sebagai upaya mengkonstruksi kepemimpinan profetik transformatif dalam ruang *civil society*. Model pendidikan demokrasi yang dimaksud menitikberatkan pada upaya membangun jiwa kepemimpinan yang dilandasi nilai-nilai profetik dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Pada paper bertema pendidikan dengan judul **Menanamkan Jiwa Kepemimpinan dalam Pembelajaran Ekonomi**, Enung Hasanah menjelaskan salah satu cara untuk menanamkan jiwa kepemimpinan khususnya melalui pembelajaran ekonomi adalah dengan memberikan berbagai kesempatan dan pilihan bagi peserta didik supaya memahami inti pembelajaran dan melatih mereka untuk dapat menyelesaikan masalah ekonomi di masyarakat. Selain itu, jiwa kepemimpinan dapat ditanamkan melalui pembelajaran ekonomi dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan dan melatih kepercayaan diri.

Sementara itu, dari sisi *linguistik*, Margana dalam paper **Multilingualisme dan Pemimpin Profetik Transformatif** menyatakan bahwa menguasai aneka bahasa atau yang dikenal dengan multilingualisme merupakan salah satu properti sebagai pemimpin profetik transformatif. Dengan bahasa, para pemimpin dapat mengendalikan pengikutnya untuk mengikuti ide-ide atau wawasan yang mereka memiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan dan mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Penyebab terjadinya konflik antara pemimpin dan pengikutnya ditinggalkan oleh ketidakmampuan para pemimpin memilih bahasa yang tepat dalam melakukan tindak komunikasi antar sesama. Dengan menguasai lebih dari satu bahasa tersebut, para pemimpin dapat melakukan pemilihan bahasa yang sesuai dengan konteksnya (topik, partisipan, dan setting) sehingga miskonsepsi dan miskomunikasi dapat diminimasi.

Demikian sekelumit penggalan tulisan para pemakalah pendamping dalam seminar nasional dalam rangka memperingati Dies Universitas Negeri Yogyakarta yang ke-49 dan diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial. Semoga proceeding ini bermanfaat dan menjadi media guna melahirkan kepemimpinan profetik transformatif dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat.

Yogyakarta, 13 April 2013

Editor

Utami Dewi, M.PP.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA FISTRANS	iii
SAMBUTAN DEKAN	v
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi

I. Kontribusi Parpol dalam Mengembangkan Kepemimpinan

Model Kepemimpinan Profetik Transformatif : Upaya Mencari Model Kepemimpinan yang Ideal dalam Menata Indonesia (Yanuardi)	3
Kontribusi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan Kepemimpinan Profetik Transformatif di Indonesia (Hardiyansyah)	8
Muslim Negarawan: Sebuah Refleksi Pemikiran Profetik (Nasiwan)	17
Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia: Transaksional atau Transformatif? (Utami Dewi)	27
Peran Partai Politik dalam Mengembangkan Kepemimpinan Transformatif (Marita Ahdiyana)	37
<i>Entrepreneurial Leadership</i> : Menuju Transformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi (Kurnia Nur Fitriana)	51

II. Kepemimpinan dalam Perspektif Historis di Indonesia

Nasionalisme dalam Konsep Kepemimpinan Profetik Transformatif (Kajian Sejarah) (Zulkarnain)	65
---	----

Meraih Berkah Bukan Rupiah (Kepemimpinan Profetik Transformatif Pondok) (H. Haikal)	80
Figur Pemimpin Teladan (Syakdiah)	91
Pemimpin Generik Organik di Era Mabuk Demokrasi (Panji Hidayat)	99
Membangun Keluarga Sebagai Madrasah untuk Penggemblengan Calon Pemimpin Berkarakter Profetik (Muawanah Zulaikhah)	106

III. Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Kepemimpinan Nasional Profetik Transformatif

Strategi Mewujudkan Kepemimpinan Profetik Transformatif Melalui Pendidikan Demokrasi Menuju <i>Civil Society</i> (Ali Imron)	117
Integrasi Nilai Profetik dalam Pendidikan Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Pemimpin Profetik Transformatif (Laila Fatmawati)	123
Penanaman Nilai-nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik Melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan (Priadi Surya)	132
Implementasi Sikap Tanggung Jawab Sebagai Wujud Nilai-nilai Profetik dalam Evaluasi Perkuliahan di Jurusan Pendidikan Geografi (Muhammad Nursa'ban)	138
Pemimpin Bervisi Spasial untuk Membangun (Kembali) Kejayaan Indonesia (Bambang Syaeful Hadi)	148
Menanamkan Jiwa Kepemimpinan dalam Pembelajaran Ekonomi (Enung Hasanah)	157
Pendidikan Kepemimpinan dalam Pembelajaran IPS (Supardi)	164
Bermula pada Guru: Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Humanis (Rias Antho Rahmi Suharjo)	173
Multilingualisme dan Pemimpin Profetik Transformatif (Margana)	179

**SUBTEMA:
KONTRIBUSI PARPOL DALAM
MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN**

MODEL KEPEMIMPINAN PROFETIK TRANSFORMATIF : UPAYA Mencari Model Kepemimpinan yang Ideal DALAM Menata Indonesia

Yanuardi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Email: andy_yanuardi@yahoo.com

Abstrak

Paper ini akan menguraikan tentang sebuah model kepemimpinan yaitu profetik transformatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menata Indonesia. Model ini dikembangkan dari literatur studi kepemimpinan dan ide Ilmu Sosial profetik dari Kuntowijoyo. Selain menawarkan sebuah model kepemimpinan paper ini juga menguraikan tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan model kepemimpinan ini di Indonesia. Dari studi literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Profetik Transformatif adalah sebuah model kepemimpinan yang menekankan nilai dan sekaligus tugas yang harus diemban seorang pemimpin yaitu humanisasi, liberasi dan transe-densi. Dalam menjalankan tugas ini pemimpin harus dapat mentransfor-masikan menjadi sebuah kesadaran kolektif yang dijalankan oleh peng-ikutnya. Dalam mewujudkan model kepemimpinan ini dalam kontek Indoesia telah teridentifikasi sejumlah tantangan baik kultural seperti budaya *patron client* dan budaya *citra*, maupun hambatan struktural seperti sistem politik yang menciptakan oligarki politik.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, profetik transformatif*

Pendahuluan

Reformasi politik yang berjalan sejak tahun 1998 telah mampu mengubah sistem politik Indonesia dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang demo-kritis. Harapan besar rakyat Indonesia dari perubahan ini adalah terwujudnya sebuah Indonesia baru, yaitu negara dengan kondisi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di Indonesia. Namun setelah belasan tahun reformasi politik bergulir, harapan tersebut belum juga tercapai, Kondisi-kondisi yang memprihatinkan tetaplah muncul seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ketimpangan hukum dan kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat.

Salah satu penyebab belum terwujudnya Indonesia baru tersebut adalah proses demokratisasi di Indonesia tidak diikuti dengan kepemimpinan yang kuat. Akibatnya kesempatan ini tidak dibarengi dengan adanya orang-orang yang mampu mengarahkan dan mengorganisir semua komponen anak bangsa untuk bersama-sama mencapai Indonesia yang baru. Tulisan ini akan menawarkan sebuah model kepemimpinan yang disebut dengan model kepemimpinan profetik transformatif. Model ini diharapkan mampu berkontribusi bagi upaya mewujudkan kepemimpinan nasional yang mampu menggerakkan anak-anak bangsa untuk menata kondisi ini saat ini menjadi Indonesia baru.

Kepemimpinan profetik transformatif

Model kepemimpinan profetik transformatif ini merupakan gabungan dari dua ide yaitu ide profetik dan transformatif. Inspirasi dan ide-ide nilai dan spirit profetik mengacu pada pendapat Kuntowijoyo yang menyatakan manusia mengemban tugas profetik di muka bumi yaitu untuk melakukan humanisasi, liberasi dan transedensi (Kuntowijoyo, 1991). Pemimpin seperti ini mengemban tugas humanisasi yaitu upaya memanusiakan manusia; liberasi mengacu pada upaya mewujudkan sistem yang membebaskan manusia dari penindasan; dan transedensi yaitu spiritualitas yang mampu mengarahkan semua tindakan manusia berorientasikan pada yang Maha Pencipta.

Sedangkan kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang melakukan transformasi visi-visinya sebagai kekuatan moral dan intelektual sehingga mampu mempengaruhi dan menginspirasi pengikutnya. Dalam model kepemimpinan ini para pemimpin mempunyai visi yang kuat, mampu mengkomunikasikan visi tersebut sehingga mampu menginspirasi pengikutnya dan menstimulasi intelektual dan mensupport pengikutnya. Dengan demikian kepemimpinan transformatif ini akan dapat memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang juga mampu melakukan transformasi secara moral dan intelektual di setiap lini dan lapisan organisasi yang dipimpinnya. Dengan kepemimpinan seperti ini maka para anggota organisasi akan bergerak tidak hanya karena berdasarkan program ataupun upah melainkan berdasarkan pada spirit untuk mencapai cita-cita bersama.

Jadi kepemimpinan profetik transformatif adalah kepemimpinan yang mengemban spirit untuk memanusiakan manusia, menciptakan tata sosial, politik dan ekonomi yang mampu membebaskan manusia dari ketidakadilan dan penindasan serta mempunyai kekuatan spiritual yang kuat. Kepemimpinan model ini sekaligus mampu mentransformasikan spirit tersebut secara moral dan intelektual sehingga akan menginspirasi pengikutnya.

Dengan mengaplikasikan model ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kepemimpinan transformataif akan mengarahkan bangsa untuk bergerak bersama mencapai tujuan bangsa yaitu Indonesia baru yang berkemanusiaan, adil dan berdaulat, tanpa mementingkan diri sendiri, kelompok dan golongan semata dengan berlandaskan pada ketakwaan pada sang Pencipta.

Mewujudkan kepemimpinan profetik transformatif

Model kepemimpinan profetik transformatif diatas adalah gambaran ideal pola kepemimpinan. Meskipun untuk mendapatkan model pemimpin ideal itu sepertinya sulit di Indonesia, namun bukan berarti suatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kepemimpinan profetik transformatif dapat terwujud bila tantangan-tantangan yang menjadi penghambat kemunculan kepemimpinan seperti ini dapat diatasi. Kondisi Indonesia saat ini memunculkan banyak tantangan yang dapat menimbulkan rasa pesimis. Para pengamat politik menyebutkan kondisi yang muncul saat ini adalah terjadinya proses pembajakan oleh elite terhadap reformasi yang sedang berjalan. Reformasi yang seharusnya melahirkan kondisi yang berpihak pada rakyat telah dibajak oleh elite. Oleh karena itu dalam memunculkan kepemimpinan profetik transformatif harus menghadapi sejumlah tantangan. Adapun tantangan yang harus diatasi dalam mewujudkan pemimpin profetik transformatif di Indonesia adalah, *Pertama*, masih berakarnya budaya politik yang berdasarkan pola hubungan *patron client*. Menurut Affan Gaffar (1999) Pola hubungan *patron client* adalah pola hubungan dua individu, yaitu si *patron* dan si *client* yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. *Patron* mempunyai sumberdaya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian atau kasih sayang dan tidak lupa juga sumberdaya berupa materi. Sedangkan *client* mempunyai sumberdaya berupa dukungan, tenaga serta loyalitas. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pola hubungan ini adalah yang paling menikmati hubungan ini adalah *patron*.

Dengan demikian, dalam budaya politik ini pilihan-pilihan pada pemimpin oleh masyarakat lebih berdasarkan pada latar belakang tradisional seorang elite yang mereka anggap bisa menjadi patronnya. Biasanya pertimbangan ini lebih didasarkan pada penilaian berbasis faktor keturunan dan posisi sosial ekonomi seseorang, sebaliknya pertimbangan penilaian terhadap kualitas dan kinerja seorang untuk menjadi pemimpin menjadi nomor dua.

Kedua, kemunculan budaya politik baru yang lebih mempertimbangkan popularitas melalui citra daripada kinerja yang sungguh-sungguh untuk bangsanya. Budaya politik baru ini muncul sebagai akibat perkembangan media yang mampu membangun citra seseorang. Salah satu bentuk kerja politik yang membangun citra adalah survei yang dapat dipesan dan kemudian diekspos besar-besaran oleh media massa. Budaya politik baru ini mengakibatkan hanya orang-orang yang mampu membangun citra melalui jaringan sosial, politik, ekonominya dapat memiliki kesempatan untuk muncul meskipun ia belum menunjukkan sebuah keseriusan kinerja dan keberpihakan pada rakyat. Tentunya budaya politik baru ini telah menenggelamkan orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh namun tidak terekpos melalui media tidak dapat muncul dalam peta kepemimpinan nasional. Singkat kata budaya politik citra telah mengelabui para pemilih, sehingga pemilih tidak dapat mengenali pemimpin yang bervisi profetik.

Ketiga, politik transaksional baik dalam bentuk uang dan bantuan pembangunan semakin marak. Politik ini terjadi karena menguatnya pragmatisme politik baik di elite dan di dalam masyarakat. Budaya politik transaksional ini muncul dalam bentuk sebagian masyarakat yang bersedia mentransaksikan suaranya dengan uang ataupun proyek-proyek pembangunan jangka pendek dengan para elite. Dalam jangka pendek politik transaksional memang menguntungkan masyarakat, namun untuk jangka panjang cara-cara ini mengakibatkan elite politik yang terpilih menjadi pemimpin sudah merasa tidak mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat ketika sudah terpilih. Akibat jangka panjangnya mengakibatkan ketika bekerja para elite lebih berupaya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan yang pada akhirnya bisa berujung pada praktek korupsi dan penciptaan sistem yang tidak berpihak pada rakyat karena pesanan penyokong dana politik. Dengan demikian politik transaksional yang semakin marak berjalan ini telah memberikan peluang muncul dan menguatnya kebijakan-kebijakan yang tidak humanis dan berkeadilan.

Keempat, belum terinstitusionalisasikannya lembaga atau mekanisme pengkaderan yang dapat melahirkan pemimpin yang mempunyai visi profetik transformatif dan aturan main yang bisa mewujudkan sirkulasi elit yang memberikan kesempatan munculnya pemimpin baru berkualitas. Sebagaimana kita ketahui, saat ini partai politik sebagai tulang punggung untuk melahirkan kader-kader berkualitas masih belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Proses kaderisasi melalui partai politik sering tidak berjalan. Lebih parah lagi, sebagaimana telah diketahui oleh umum, Partai politik saat ini hanya memerankan dirinya sebagai kuda tunggangan bagi elit untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya. Misalnya Partai politik secara terbuka tidak mencalonkan kader-kadernya, tetapi memilih orang-orang yang dapat memberikan sejumlah dana kepada elitnya. Singkat kata, kaderisasi yang tidak berjalan pada partai politik telah mengakibatkan partai-politik tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh politik yang bervisi politik dan transformatif, yang terjadi adalah partai hanya menjadi lembaga kepanitiaan bagi munculnya orang-orang yang mampu membayar tiket untuk menjadi elite politik.

Selain itu, hambatan politik ini ditambah lagi aturan-aturan main yang diciptakan oleh elite partai politik telah membuat terbentuknya oligarki baru dalam politik Indonesia. Oligarki baru ini muncul karena keengganan elite partai politik untuk berkompetisi secara *fair* akibatnya mereka menciptakan aturan-aturan yang dapat membelenggu elite. Contoh aturan main yang diciptakan oleh elite parpol ini adalah aturan tentang pemilihan presiden. Dalam aturan ini mereka telah berusaha membatasi orang-orang potensial untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden dan menciptakan aturan yang berpihak kepada kepentingan mereka. Singkat kata yang muncul saat ini adalah oligarki elite yang diciptakan oleh elite untuk menjamin status quo.

Dari berbagai tantangan tersebut, bukan berarti harus membuat kita pesimis. Tantangan tersebut harus dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bersama-sama, tentunya melalui kepemimpinan yang kuat. Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pembaruan dan perbaikan dalam pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan ini diarahkan untuk mengubah Budaya politik sekaligus melakukan kaderisasi bagi munculnya pemimpin-pemimpin profetik transformatif. Perubahan budaya politik diarahkan pada upaya untuk mengubah budaya patron klien, politik membangun popularitas melalui pencitraan serta budaya politik uang agar menjadi sebuah budaya politik yang mempunyai kesadaran akan hak-hak warga negara. Upaya kaderisasi dilakukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin mempunyai spirit profetik yang kuat dan kemampuan transformasi yang mumpuni.

Kedua, menciptakan sistem yang membuka ruang kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk tampil memimpin. Dengan terciptanya sistem seperti ini, maka orang-orang yang mempunyai visi serta spirit profetik dan kemampuan transformatif akan mampu tampil memimpin Indonesia. Dengan demikian harapan mewujudkan Indonesia baru dapat terwujud melalui kepemimpinan yang kuat.

Daftar Pustaka

- Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan.
- Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan.
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Offset.
- Sulistiyani, Ambar T., 2008, *Kepemimpinan Profesional: Pendekatan Leadership Games*, Penerbit Gava Media.
- Thoha, Miftah, 1983, *Kepemimpinann dalam Manajemen; Suatu Pendekatan Perilaku*, Rajawali Pers.
- Frinces, Z. Heflin, 2009, *Kepemimpinan Berbasis Kewirausahaan*, Mida Pustaka.
- Rafferty, Alannah E., Griffin Mark A., 2004, *Dimensions of Transformational Leadership: Conceptual and Empirical Extentions*, *Journal The leadership Quarterly* 15 (2004) 329 - 354.

KONTRIBUSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN PROFETIK TRANSFORMATIF DI INDONESIA

Hardiyansyah

Dosen Kopertis Wilayah II dpk pada Univ. Bina Darma Palembang
dempo66@gmail.com dan hardiyansyah@mail.binadarma.ac.id

Abstrak

Selama lebih dari tiga puluh tahun pemerintah orde baru, relatif hanya satu orang yang muncul sebagai pemimpin nasional yang paling dominan, yaitu Presiden Soeharto. Bahkan tidak hanya pada tingkat nasional, pada tataran lokal pun sangat sulit muncul seorang pemimpin. Salah satu indikator keberhasilan pemimpin adalah kemampuan pemimpin mengkader atau menyiapkan calon pemimpin. Negara saat itu mengalami krisis kepemimpinan. Kondisi tersebut sangat dirasakan pada tahun 1998 saat terjadinya reformasi. Bangsa Indonesia terkesan kebingungan menentukan siapa yang akan menggantikan kepala pemerintahan/ kepala negara pasca lengsernya Soeharto. Munculnya B.J. Habibie sebagai presiden karena tuntutan konstitusi yang mengharuskan posisi beliau sebagai wakil presiden untuk menggantikan Soeharto. Pada era Habibie, diberikan keleluasaan munculnya partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999. Ada 48 parpol peserta pemilu yang sebelumnya hanya diikuti 2 parpol dan 1 golongan (golkar). Salah satu parpol peserta pemilu adalah Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mampu bersaing dengan partai-partai lainnya dalam percaturan politik di Indonesia. Pada pemilu 2009 PKS masuk kedalam 4 besar perolehan suara. Bahkan PKS telah mampu melahirkan kepemimpinan yang profetik transformatif melalui sistem pengkaderan yang dilakukannya. Lembaga MPR RI pernah diketuai oleh PKS, demikian juga dengan gubernur Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa bupati/walikota.

Kata kunci: *PKS, Kepemimpinan, Profetik, Transformatif*

Pendahuluan

Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat urgen, karena menyangkut eksistensi sebuah komunitas, sebuah organisasi, bahkan menyangkut eksistensi sebuah bangsa dan negara. Keberhasilan sebuah bangsa dalam meng-

hasilkan pemimpin dan kepemimpinan akan dapat menjadi pilar dalam mengantarkan bangsa tersebut kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama, sebaliknya ketidakmampuan sebuah bangsa melahirkan pemimpin akan berdampak negatif bagi perkembangan kemajuan bangsa tersebut. Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang telah melahirkan banyak pemimpin, bahkan jauh sebelum lahirnya negara Indonesia. Sebut saja misalnya Balaputeradewa dari Sriwijaya, Patih Gajahmada dari Majapahit, Teuku Umar dari Aceh, Sisingamangaraja dari Tapanuli, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau, Sultan Syarif Kasim dari Riau, Sultan Thaha Saifuddin dari Jambi, Sultan Mahmud Badaruddin dari Palembang, Pangeran Diponegoro dari Jawa, Sultan Hasanuddin dari Makasar dan banyak lagi pemimpin yang lain, baik skala lokal, nasional dan bahkan skala internasional. Pada masa awal kemerdekaanpun, bangsa Indonesia telah banyak melahirkan pemimpin. Ada pemimpin yang nasionalis, seperti Soekarno, ada yang berideologi agama (Islam) seperti Haji Ahmad Dahlan, K.H. Hasjim As'ari, Haji Agus Salim, H.O.S. Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusuma, Mohammad Natsir, bahkan ada yang berideologi komunis, seperti D.N. Aidit. Apapun ideologinya, mereka telah disebut sebagai pemimpin, dengan segala sepaik terjanganya dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada masa itu, lahirnya pemimpin sebagian besar hasil pengkaderan organisasi-organisasi sosial masyarakat dan keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain. Selain itu, banyak pula pemimpin yang lahir melalui pengkaderan partai politik, seperti Partai Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan juga Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai lainnya.

Pada masa itu, sebenarnya partai politik telah mampu mengembangkan kepemimpinan profetik transformatif, terutama dari partai-partai yang berideologi Islam, seperti Partai Masjumi. Partai ini telah melahirkan pemimpin yang telah mengarah kepada model kepemimpinan yang profetik transformatif, sekedar contoh ada Kasman Singodimejo, Mr. Syafruddin Prawiranegara yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer Belanda II dan menyebabkan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi dan beliau dipercaya menjadi presiden PDRI. Masjumi juga telah melahirkan bapak pemimpin bangsa yang sangat dikenal di dunia Islam internasional yaitu Mohammad Natsir yang pernah menjadi Perdana Menteri pertama dalam negara Republik Indonesia Serikat. Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Mukhtar Islam Internasional, di Pakistan; Anggota Dewan Pendiri dan Sekjen Rabithah Alam Islami (*World Moslem League*), Anggota Majelis *Ala Al-Alamy lil Masajid* (Dewan Masjid Sedunia); Pendiri UII (Universitas Islam Indonesia) bersama Moh. Hatta, Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, dll. Dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan

Perjuangan, George McTurnan Kahin, Indonesianis asal Amerika yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, bercerita tentang pertemuan pertama yang mengejutkan. Natsir, waktu itu Menteri Penerangan, berbicara apa adanya tentang negeri ini. Tapi yang membuat Kahin betul-betul tak bisa lupa adalah penampilan sang menteri. "Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah manapun," kata Kahin. Mohammad Natsir orangnya santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang (Tim Pembina Al Islam dan Kemuhammadiyah, 1978)

Persoalan kepemimpinan menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk terus dibicarakan, karena dimana ada komunitas maka dibutuhkan pemimpin. Bahkan dalam hadits shahih, Rasulullah saw menegaskan bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan kalian harus bertanggung jawab atas apa-apa yang dipimpinnya; seorang imam adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas makmum yang dipimpinnya (H.R. Bukhari dari sahabat Ibn Umar). Dalam hadits lain, Rasulullah memberikan arahan, bahwa apabila tiga orang dalam perjalanan atau bepergian, maka hendaklah ditunjuk salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin. Artinya, sang pemimpin harus muncul dalam kelompok orang. Dalam skala yang lebih besar, pemimpin itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, melalui pendidikan, pengalaman, dan pengkaderan. Organisasi pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi politik menjadi wadah yang sangat strategis bagi lahirnya pemimpin. Persoalannya adalah pemimpin yang bagaimana yang dibutuhkan Indonesia saat ini dan hingga masa jauh yang akan datang? Melihat kondisi dan situasi yang ada, dimana mayoritas penduduk bangsa ini beragama Islam, tentu secara logika adalah pemimpin yang sesuai dengan agama mayoritas yang dipeluk bangsa ini. Sama halnya bila ada pertanyaan, budaya apa yang harus dikembangkan bagi bangsa Amerika Serikat? Jawabannya tentu adalah budaya Amerika Serikat, bukan budaya Jepang atau budaya Indonesia. Demikian juga dengan negara Indonesia. Bentuk kepemimpinan yang bagaimana yang paling tepat dikembangkan di Indonesia? Tentu jawabannya adalah Kepemimpinan Profetik Transformatif sesuai dengan model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak pemimpin yang muncul dan hadir di NKRI, namun mayoritas masih jauh dari ideal yang diinginkan, yaitu kepemimpinan profetik transformatif. Hadirnya Partai Keadilan Sejahtera yang berasaskan Islam dan menjadikan kader sebagai aset utama partai dengan sistem pengkaderan yang jelas dan rapi, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya kepemimpinan Profetik Transformatif sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju, berperadaban, sejahtera dan berdaulat di tengah-tengah masyarakat dunia.

Kontribusi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan Kepemimpinan Profetik Transformatif di Indonesia

Secara etimologi, menurut Pamudji (1995:5) istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun kemudian melahirkan kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda pemimpin yang berarti orang yang berfungsi untuk memimpin. Kemudian diberi imbuhan ke--an menjadi kepemimpinan yang berarti kelakuan atau tindakan pemimpin. Menurut Henry Pratt Faiechild (dalam Kartono, 2003), pemimpin ialah yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Dalam pengetahuan yang terbatas, pemimpin ialah seseorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasif dan akseptansi penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Sementara menurut Siagian (1991:75) kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata pada pencapaian tujuan organisasi.

Kepemimpinan profetik adalah model kepemimpinan yang digali dari cara rasul/nabi memimpin umatnya. Para nabi dan rasul, sebagai pemimpin umat manusia di muka bumi ini, memiliki beberapa karakter dan sifat yang sangat agung dan mulia. Berbekalkan sifat dan karakter tersebut, maka semua nabi dan rasul sukses membawa perubahan dan kemajuan membangun sikap hidup pengikut dan masyarakatnya sesuai dengan zamannya masing-masing. Kepemimpinan profetik dipandang sebagai pola kepemimpinan yang paling sukses dalam membentuk sebuah tatanan kehidupan manusia yang berkualitas. Nilai-nilai kepemimpinan profetik seyogyanya dapat ditransformasikan ke dalam model kepemimpinan pada lingkup organisasi sosial keagamaan, pendidikan, bahkan tata pemerintahan sekalipun (Mujtahid, 2011). Kepemimpinan profetik ditandai setidaknya dengan empat ciri sebagai berikut: sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah.

Kepemimpinan Soekarno pada awal pemerintahannya telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Pada masa ini (baca: orde lama), banyak lahir pemimpin bangsa dari berbagai latar belakang budaya, etnis, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan bahkan organisasi politik. Namun beberapa dekade kemudian, Soekarno ingin menjadikan dirinya sebagai pemimpin satu-satunya yang harus eksis dengan memberikan berbagai sebutan dan panggilan yang terkesan kurang lazim, seperti Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bahkan kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Munculnya

ketetapan MPRS tersebut merupakan bentuk dari upaya meredam atau mematikan proses alami akan lahirnya pemimpin. Berbagai bentuk dan upaya akan lahirnya pemimpin yang akan menjadi saingan Soekarno saat itu, dianggap sebagai bentuk perlawanan. Tokoh-tokoh politik dan tokoh agama yang berani mengeluarkan *statement* yang bertentangan dengan ketetapan MPRS di atas, akan berhadapan dengan Soekarno. Akhirnya banyak pemimpin organisasi sosial dan organisasi politik yang dipenjara oleh Soekarno, terutama tokoh-tokoh yang berasal dari Partai Masjumi, seperti Mohammad Natsir, Hamka, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan banyak lagi yang lain. Pada era orde lama, relatif hanya Soekarno saja yang menjadi pemimpin. Seiring makin lamanya Soekarno menjadi presiden, maka semakin menjadi-jadilah gaya kepemimpinan yang otoriter. Lawan-lawan politiknya tidak berkutik berhadapan dengan penjara yang telah dipersiapkan oleh Soekarno bersama-sama dengan pendukung-pendukungnya. Negara seperti sudah menjadi hak milik pribadinya, peraturan dan perundang-undangan ada dalam genggamannya dan akhirnya terjadi krisis kepercayaan pada Soekarno. Puncaknya adalah dengan terjadinya apa yang disebut dengan G30S PKI tahun 1965 dengan gugurnya beberapa orang jenderal di kalangan Tentara Nasional Indonesia. Lalu, terjadilah demonstrasi besar-besaran di kalangan pelajar dan mahasiswa menuntut agar Soekarno mundur sebagai presiden. Tahun 1966, keluarlah Supersemar (surat perintah Sebelas Maret) dan Soeharto diberikan mandat untuk mengambil alih pemerintahan.

Lengsernya Soekarno menandai berakhirnya kekuasaan rezim era orde lama. Setelah itu, Indonesia masuk pada babak pemerintahan berikutnya dengan hadirnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Semula pemerintahan orde baru adalah sebuah pemerintahan yang diharapkan mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari berbagai bentuk keterpurukan dan krisis menuju Indonesia maju dan berperadaban dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan termasuk masalah kepemimpinan. Sepuluh tahun pertama kepemimpinan Soeharto memang menunjukkan kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang kehidupan. Indonesia seakan-akan berubah total ketika Soekarno, yang memerintah dengan demokrasi terpimpinnya yang gegap-gempita, akhirnya digantikan Soeharto. Para pencinta demokrasi memang terpikat, menggantungkan banyak harapan kepada perwira tinggi pendiam itu. Soeharto membebaskan tahanan politik, termasuk Natsir dan kawan-kawannya.¹ Tapi tidak cukup lama Soeharto memikat para pendukung awalnya. Pada tahun 1980-an ia memperlihatkan watak aslinya, seorang pemimpin yang cenderung otoriter.² Terkesan bahwa yang boleh jadi presiden di Indonesia hanyalah Soeharto. MPR juga telah membuat kriteria calon presiden untuk beberapa periode ke

¹ http://pustakadigital-buyanatsir.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

² http://www.sabilulhuda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:m-natsir-untuk-buya-hamka-seri-biografi-ulama&catid=46:tulisan-dari-santri&Itemid=83

depan yang mensyaratkan bahwa calon presiden adalah yang berpengalaman. Tidak ada orang yang berpengalaman menjadi presiden kecuali Soeharto. Akhirnya selama 32 tahun tidak ada yang berani maju untuk menjadi calon presiden. Karena siapa saja yang akan maju, maka dengan segala cara, pemerintah saat itu akan menjegal dan menghalangi calon tersebut.

Gambaran tentang orde baru dalam kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Rais (1999) sebagai berikut:

Pada masa itu, korupsi kekuasaan telah kita saksikan dalam berbagai bentuknya dan berlangsung selama jangka waktu yang lama. Sampai-sampai, kekuasaan yang korup itu terjelma dalam diri seorang patron. Begitu kuasanya sang patron sehingga seluruh negeri ini tidak lebih dari perluasan, *extension*, dari rumah tangga sang patron dan sanak keluarganya. Anak, menantu, keponakan, cucu, ipar, dan istri sang patron kerap diutamakan dan diberi *privelese*. Misalnya, dalam tender-tender proyek, para kerabat itulah yang dimenangkan berdasarkan koneksi, bukan kepakaran. Dalam peristilahan ilmu politik, bentuk korupsi kekuasaan ini dikenal dengan nama "*neopatrimonialisme*." Dapat dikatakan bahwa negara Orde Baru adalah negara yang cukup ideal dilihat dari sudut korupsi kekuasaan ini.

Karena sangat lama berkuasa, maka seolah tidak bisa dibedakan antara negara dan pemerintah, antara negara dengan presiden, terkesan seolah negara adalah milik Soeharto dan kroni-kroninya. Akhirnya, dengan segala kesewang-wenangannya, rakyat tidak mau lagi dipimpin oleh Soeharto, puncaknya pada tahun 1998 terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa dan pelajar menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian posisi Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai wakil presiden. Pada masa Habibie inilah banyak regulasi dikeluarkan, diantaranya regulasi tentang kebebasan pers, pelaksanaan desentralisasi, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan kebebasan mendirikan partai politik. Suasana yang kondusif seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendirikan partai politik baru, diantaranya adalah dengan lahirnya Partai Keadilan pada tanggal 20 Agustus 1998. Pada pemilu 1999, PK memperoleh 1,4 persen suara nasional dan 7 kursi di parlementer. Pada tahun 2003, dipaksa oleh aturan yang menetapkan bahwa hanya partai yang melampaui dua persen suara dalam pesta demokrasi 1999 yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2004, PK akhirnya berubah menjadi PKS (Bubalo dkk, 2012:50).

Keikutsertaan PKS pada pemilu 2009, telah terjadi lonjakan perolehan suara yang sangat signifikan sehingga mengantarkan PKS menjadi partai 4 besar dan dapat mendudukkan kader-kadernya sebagai anggota legislatif dengan mendapatkan 57 kursi (10%) di DPR, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu-satunya partai, yang mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara selain Partai Demokrat. Kemudian, hasil dari koalisi dengan

Partai Demokrat pada pemilihan presiden dengan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono, kader PKS mendapat jatah 4 menteri, masing-masing Menteri Sosial dijabat oleh Dr. H. Salim Segaf al-Jufri, Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Suswono, MMA., Menteri Komunikasi dan Informasi Ir. H. Tifatul Sembiring, dan Menteri Ristek Drs. H. Suharna Surapranata, M.T.

Kemampuan PKS menembus 4 besar pada pemilu 2009, semakin meyakinkan masyarakat bahwa PKS merupakan partai alternatif pilihan masyarakat yang akan terus bertahan. Bila kehebatan Partai Demokrat sangat tergantung pada figur SBY sebagai pendiri partai, demikian juga dengan PDIP sangat tergantung dengan figur Megawati, maka PKS sangat tergantung dengan kader yang telah terbina dalam kurun waktu yang lama. Kekuatan PKS tidak tergantung dengan figur sang ketua (presiden partai) tetapi sangat dipengaruhi dari sistem pengkaderan yang rapi dan berkesinambungan. PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.³

Telah banyak analisis para pengamat dan para ahli bahwa kasus impor daging sapi yang diduga melibatkan presiden partai (baca: konspirasi) akan merontokkan kepercayaan publik terhadap PKS. Bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa PKS akan tamat riwayatnya. Tidak lama setelah prahara dan badai menimpa PKS, pilkada Gubernur Jawa Barat ternyata dimenangkan oleh kader terbaik PKS, demikian juga dengan pilkada gubernur Sumatera Utara dimenangkan oleh kader PKS. Ternyata PKS mampu menepis berbagai anggapan dan pernyataan para pengamat bahwa PKS akan habis, PKS mampu melakukan konsolidasi terhadap kader-kadernya yang militan dan disiplin sehingga cepat kembali *recovery* dan berhasil mengokohkan barisan dan dapat memenangkan pilkada pada provinsi terpadat penduduknya di Indonesia dan provinsi terpadat penduduknya di pulau Sumatera.

Sistem pengkaderan PKS telah mampu melahirkan banyak tokoh yang disenangi masyarakat. Kader-kader PKS di tingkat cabang/kecamatan sebagian besar merupakan tokoh masyarakat di wilayahnya, mereka tampil dengan sosok yang alim, aktivis pengajian di masjid kecamatan, masjid kampus, dan menampilkan kesederhanaan. Demikian juga dengan kader-kader PKS pada tingkat kabupaten/kota, apabila mereka terpilih menjadi anggota DPRD, mereka tampil dengan baik dan amanah, jarang sekali terdengar kader PKS yang duduk sebagai anggota DPRD yang korupsi. Kader-kader PKS pada tingkat provinsi ternyata juga sama "setali tiga uang" mereka dikenal sebagai kader partai yang baik, sebagai anggota DPRD yang santun, yang alim dan yang amanah. Bila mereka terpilih sebagai kepala daerah, mereka menampilkan sosok kepala daerah yang baik pula. Kader-kader PKS pada tingkat pusat ternyata juga sama, tidak ber-

³ <http://pk-sejahtera.nl/about/>

beda dengan kader pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Kalaupun ada kasus/masalah, dan ini biasanya tidak banyak. Struktur PKS langsung melakukan tindakan terhadap kader yang bermasalah tersebut.

Kader-kader PKS yang menjadi pimpinan diberbagai level, baik sebagai anggota DPRD atau DPR RI, menjadi kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), menjadi menteri, atau pejabat eksekutif lainnya, mereka mampu menjadi sosok pemimpin yang kita sebut dengan istilah "Kepemimpinan Profetik Transformatif," mereka tidaklah lahir dengan sendirinya tanpa melalui proses yang panjang. Lahirnya kader tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya yang dikelola sedemikian rupa dalam sistem pengkaderan yang rapi, berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman dalam pertemuan pekanan yang dalam istilah PKS disebut dengan "liqo." Hasil liqo inilah yang menjadi dasar penilaian bagi para anggota/kader PKS. Banyak indikator yang harus dipenuhi agar kader PKS menjadi kader inti. Bila telah masuk menjadi kader inti, maka yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban dalam partai. Kader inti inilah yang mampu tampil sebagai pemimpin profetik trasformatif, yang menampilkan nilai-nilai kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mampu menyesuaikan diri pada situasi yang penuh dinamika dengan tetap menjunjung nilai-nilai ajaran Islam.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak partai di Indonesia, setelah Partai Masjumi pada masa orde lama, maka pada masa reformasi sekarang ini, partai yang mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan "Kepemimpinan Profetik Transformatif" di Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera. Kepemimpinan profetik tersebut memiliki indikator sebagai berikut: *sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah*. Fakta telah menunjukkan demikian, berbagai jabatan legislatif dan eksekutif yang diisi oleh kader PKS telah mampu menampilkan sosok pemimpin yang baik yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya. Misalnya saat MPR dipimpin oleh Dr. H. Hidayat Nurwahid, M.A., beliau mampu menampilkan sosok yang cerdas, sederhana, bersahaja dan anti korupsi dalam kepemimpinannya, demikian juga dengan sosok Ahmad Heryawan, sebagai gubernur Jawa Barat, Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur Sumatera Utara, Dr. Irwan Prayitno sebagai gubernur Sumatera Barat dan pejabat eksekutif dan legislatif lainnya. Wallahu a'lam.

Daftar Pustaka

Bubalo, Anthony, Greg Fealy, & Whit Mason (2012) *PKS dan Kembarannya Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir & Turki*. Depok: Komunitas Bambu.
<http://pk-sejahtera.nl/about/> (diakses tgl. 18/03/2013)

- http://pustakadigital-buyanatsir.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
(diakses tgl. 18/03/2013)
- http://www.sabilulhuda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:m-natsir-untuk-buya-hamka-seri-biografi-ulama&catid=46:tulisan-dari-santri&Itemid=83 (diakses tgl. 18/03/2013)
- Kartono, Kartini (2003). *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mujtahid (2011). *Tujuh Karakteristik Kepemimpinan Profetik*. melalui http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2682:tujuh-karakteristik-kepemimpinan-profetik&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210
- Pamudji, S. (1995). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rais, M. Amien (1999). *Kuasa, Tuna Kuasa, dan Demokratisasi Kekuasaan*.
- Pidato pengukuhan guru besar ini diucapkan M Amien Rais pada 10 April 1999 di depan Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. P. (1991). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tim Pembina Al Islam dan Kemuhammadiyah (1978). *Muhammad Natsir : 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Antara

MUSLIM NEGARAWAN: SEBUAH REFLEKSI PEMIKIRAN PROFETIK

Nasiwan

Email : nasiwan 3@Gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia membutuhkan kehadiran profil pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Namun pada sisi realitas politik bangsa ini menyaksikan bahwa selama Indonesia berdiri belum kunjung datang sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah kehidupan yang berkemajuan.

Eksperimentasi model kepemimpinan pada era Orde Lama 1959-1966 serta pada era Orde Baru 1966-1998, serta era Reformasi politik pasca tahun 1998, memberikan bacaan belum hadirnya sosok kepemimpinan yang berkarakter negarawan (muslim negarawan) baik pada level nasional maupun lokal yang mampu memberikan inspirasi kemajuan Indonesia.

Adalah sebuah keniscayaan hadirnya sosok pemimpin yang mampu membebaskan Indonesia (liberasi) dari berbagai penajajahan baik ekonomi, politik, budaya. Melakukan humanisasi, emansipasi semua langkahnya dikerangkai oleh transendensi.

Kata Kunci: *Politik Profetik, Muslim Negarawan*

Muslim Negarawan: Lentera Kecil menuju Politik Profetik

Penulis memiliki hipotesis bahwa spirit dari diskursus tentang 'Muslim Negarawan', adalah untuk counter hegemoni, dari diskursus 'muslim bukan partisipan dari negara', dan sebaliknya orang Islam (komunitas Islam) memiliki hak yang sama dengan elemen bangsa lain untuk memakai predikat negarawan, yang disebut sebagai 'muslim itu negarawan'. Spirit tersebut dapat dibaca sebagai *standing position* untuk melakukan ikhtiar dekonstruksi terhadap diskursus yang selama ini sudah mapan. Diskursus yang diproduksi oleh negara dan para aktor negara yang selama beberapa periode berkemampuan mengelola negara Indonesia.

Dari sisi positif *standing position* ini juga dapat dibaca bahwa seorang muslim yang hidup di Indonesia memiliki niatan yang positif untuk memberikan kontribusi demi kebaikan, kemajuan dan kemaslatan bangsa Indonesia. Memberikan kontribusi 'amal sholeh' bagi bangsa Indonesia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari beramal sholeh bagi ummat manusia, beramal sholeh bagi kemaslatan bangsa Indonesia juga dalam kerangka kemaslatan ummat sebagaimana dianjurkan dan kompatible dengan misi kenabian yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ikhtiar dan kerja-kerja intelektual untuk melakukan pembongkaran terhadap diskursus yang sudah mapan, sangat penting untuk memberikan payung intelektual bagi membuka keterlibatan Muslim dalam menggunakan dan mengelola negara yang bernama Indonesia. Basis argumentasi yang mapan bagi keerlibatan dan hak moral orang Islam dalam menggunakan negara atau bekerja dalam rangka negara sangat penting dan strategis. Hal tersebut antara lain dikarenakan selama Indonesia berdiri ada semacam diskursus yang tidak *balance*, tentang penggunaan kata negarawan, seolah-olah bukan untuk para aktivis Islam, mengapa?

Dalam kontestasi antar ideologi yang hidup di suatu bangsa, khususnya untuk konteks Indonesia dalam waktu yang panjang demikian jika Islam diposisikan sebagai ideologi, sementara itu juga ada ideologi lain seperti nasionalisme, sosialisme, maka kemusliman-keislaman seseorang sering kali menjadi barier untuk tampil dalam politik Indonesia.

Ideologi Islam yang biasanya dipadankan dengan perjuangan menegakkan syariah Islam (piagam Jakarta), yang diangkat oleh para aktivis Islam khususnya partai-partai Islam, seolah-olah menjadi langkah untuk membentuk citra tidak berhak atau setidak-tidaknya dipertanyakan jika para aktivisnya memakai sebutan negarawan. Pendek kata pintu syariah versus non syariah dalam wacana hampir selalu dimenangkan oleh kelompok non syariah. Para aktivis yang mengusung non syariah seolah lebih berhak menjadi negarawan.

Problematika negara Islam? berkaitan dengan isu syariah Islam, hal ini ada kaitannya dengan problematika Negara Islam. Yakni dengan label negara Islam tidak serta merta ajaran Islam dan ummat Islam menjadi semakin berkualitas, jika Islam itu hanya dijadikan sebagai komoditas saja. Maksudnya Islam hanya dijadikan sebagai mobilisasi loyalitas umat dalam momen-momen politik.

Masuk pada pertanyaan mendasar yang menjadi tema sentral diskusi menurut penulis perlu dipertanyakan, Muslim negarawan mungkinkah? Jawabannya adalah Mengapa tidak? Persoalannya pada sisi empiris politik di Indonesia, oleh berbagai kekuatan politik yang ada, dijumpai suatu realitas politik yang menyatakan kurang lebih bahwa Politik Islam selalu dipersepesi sebagai partisisan, faksional.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan wacana peminggiran politik Islam mengapa wacana – pengetahuan kolektif – masyarakat Indonesia berpandangan bahwa Islam itu partisan kelompok tertentu bukan aktor yang pantas mewakili negara. Sekiranya ada aktor dari kalangan Islam yang mewakili negara atau masuk bekerja dalam ranah negara tetap saja ada semacam gugatan atas kenegarawannya. tetap ada tanda tanya?

Mengapa wacana itu melekat? Hal tersebut antara lain dapat dijelaskan melalui struktur pemaknaan politik Islam yang diposisikan hanya sebagai sub dari politik negara, gambaran tersebut antara lain terlukiskan dalam buku klasik karya Lance Caslte dan Herbet Fieth, “Pemikiran Politik Indonesia”, dan karya-karya para sarja lain yang datang sesudahnya, berbeda dengan pandangan komunitas Muslim dalam banyak pengajian yang berkeyakinan ‘Islam kaffaah’ fakta emperisnya belum sejalan dengan keyakinan umat Islam.

Padahal sebagaimana diketahui Wacana itu merupakan software untuk menggiring perilaku konkrit. Hal tersebut didukung oleh adanya kenyataan banyak orang merasa tidak bersalah memiliki pandangan atau setuju dengan pandangan bahwa politik Islam adalah sub dari institusi lain, itu bukti bahwa wacana mengendalikan perilaku.

Warisan sekulerisme hadir di Indonesia dan mengkerangkai cara berfikir kita tentang negara. Bukti adanya kekuatan sekularisme dapat dilacak pada adanya kenyataan terjadinya ketegangan Islam dan nasionalis pada tahun 1950-an yang efeknya masih terasa sampai hari-hari ini. Dalam kontestasi ini ternyata Umat Islam tidak bisa mengendalikan frame yang digunakan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia, khususnya para elitnya.

Dengan demikian tidak salah kiranya jika dinyatakan bahwa Muslim negarawan itu merupakan perjuangan pada arus lembut (software) untuk perjuangan diaras lain, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Jika umat Islam tidak berhasil membongkar hegemoni pemikiran – diskursus – yang selama ini bercokol dalam benak pemikiran masyarakat Indonesia maka keberhasilan perjuangan pada aspek lainnya menjadi sempit peluang keberhasilannya. Dalam jangka panjang ketika secara akumulatif diskursus politik kenegaraan tertutup bagi peran-peran aktivis Muslim, maka tinggal soal waktu peran-peran secara real dalam politik kenegaraan akan tertutup.

Bagaimana cara membongkarnya? Pembongkarannya dapat dirunut dengan membaca ulang secara kritis bahwa kehadiran negara kebangsaan ‘*nation state*’ yang pada saat nanti menjadi pijakan –lapangan bermain (kompetisi) antara berbagai aktor yang menisbahkan dirinya dengan negara, dalam kehidupan politik modern dikerangkai dengan tatanan sosial yang disebut demokrasi. Dengan kata lain pintu masuk untuk bisa menggunakan insturmen negara secara syah adalah hanya melalui tatanan demokrasi (*the only one game in town*).

Dalam frame nation state yang dirangkai dengan tatanan demokratis, peluang pintu masuk untuk menggunakan instrumen negara bagi berbagai

kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Islam adalah melalui partai politik. Tidak banyak tersedia pilihan lain kecuali lewat partai politik. Disinilah titik persoalan dan dilema mulai ditemukan. Menagapa yakni karena muslim harus lewat pintu partai, dalam memasuki ranah negara, oleh karenanya menjadi berpeluang dan diberi cap partisan. Tidak merupakan wakil seluruh warga bangsa dan karena hal tersebut menjadi banyak kendala untuk lahir menjadi Muslim Negarawan dari kalangan aktivis Partai Islam di Indonesia.

Menghadapi kondisi yang kompleks ini, kita perlu bertanya masih adakah secercah harapan untuk memulai langkah-langkah dekonstruksi? Dalam pandangan penulis sebenarnya dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia cukup tersedia eksperimen yang bisa menjadi inspirasi untuk melakukan dekonstruksi hegemoni yang memingirkan Islam. Eksperimen yang dimaksud adalah adanya strategi gerakan dakwah politik kultural yang lebih populer dengan istilah kembali ke khittah NU 26. Dalam konteks pembahasan ini gerakan kembali ke khittah 26 dapat dibaca sebagai benih-benih pemikiran agar keislaman seseorang tidak menjadi *barrier* untuk menjadi negarawan di Indonesia (Islam subtansial). Demikian juga angkah yang sama dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kembali ke khittah 1971, serta gerak Dewan Dakwah Indonesia pada era pemerintahan Orba dalam batas tertentu dapat dibaca sebagai untuk melakukan dekonstruksi hegemoni yang memonopoli pengelolaan negara untuk kelompok tertentu.

Mempertimbangkan delimma dan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam mungkin bermanfaat untuk dipertimbangkan suatu pandangan bahwa keislaman itu tidak harus dinilai dari syariah, tetapi keislaman itu dapat dimulai dari sisi akhlak, yang kemudian menjadi kenyataan sosiologis, menjadi perilaku masyarakat yang kemudian pada tahapannya menjadi norma, lembaga, dan struktur sosial, ekonomi dan harus diakomodasi dalam berbagai kebijakan negara.

Partai-partai Islam seperti halnya PKS, PPP dll berada dalam posisi unik karena pada satu sisi masuk wilayah partai siap untuk dicap sektarian tetapi *inline* untuk menjadi negarawan, dengan demikian tingkat kesulitan yang dihadapinya menjadi lebih rumit. Pintu masuk ke wilayah negara bisa melalui organisasional (semisal partai, ormas) dengan demikian kehadirannya dalam ranah negara bukan hanya kebetulan tetapi didisain, dengan segala perlengkapan intelektual yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini maka kaderisasi pemimpin perlu dilakukan dengan dua wajah, yakni melalui partai, agar tahu mendan politik (keakuan) sebagai kelompok umat, tetapi juga pada saat lain menduduki jabatan simbolik sebagai representasi negara, supaya muncul 'kekamian' keindonesiaan? Apakah partai partai Islam (PKS, PPP, PBB, PAN, PKB) dan lainnya sudah melakukan pengkaderan model itu.

Perlu disadari bahwa negara yang demokratis tidak akan terwujud jika setiap faksi berhenti dan selesai pada berfikir model faksi 'keakuan' saja, melupa-

kan berfikir kekamian. Memperkuat pernyataan di atas dapat disimak bahwa agenda reformasi yang telah dikumandangkan menjadi berceceran karena hampir setiap orang berfikir keakuan saja (banyak orang membuat partai hanya dalam kerangka keakuan kelompoknya saja) dan ini cermin miskinnya negarawan di Indonesia. Kecenderungan praktek politik sekarang lebih banyak memperagakan pintu politik yang faksionalis

Bagaimana dengan aktor politik yang disebut 'Tentara', tentara dilihat dari historisnya itu berasal dari gerakan rakyat. Oleh karenanya TNI legitimet berpolitik atas nama negara, tetapi ketika berpolitik berubah menjadi faksi yang menyusup melalui DPR pada jaman Orde Baru. Dan baru pada era reformasi sampai sekarang kembali ke barak. Di era pasca reformasi kalau kembali berpolitik tentara berpolitik dengan politik "negara". Patut dicermati pula bahwa ada sinyalemen bahwa tentara seolah-olah membagi peran yakni pensiunan masuk politik sebagai katup pengaman, jika terjadi perkembangan yang tidak dikehendaki tentara sudah ada yang berada dalam wilayah politik. Terkait dengan peran sentral tentara perlu dicermati ulang bahwa tawaran format menjadi negarawan ala orde baru, yang berlangsung sekitar 30 tahun adalah bukan melalui partai. Bahkan dengan cara melumpuhkan partai. Seakan memperagakan bahwa keutuhan Indonesia dikelola oleh tentara melalui lembaga yang zatnya partai tetapi namanya bukan partai. Karena tatanan seperti itu tidak diterima secara luas maka tentara diminta kembali ke barak, tentara profesional tapi juga menghadapi masalah baru tidak punya anggaran.

Bagaimana negarawan secaa real ada dalam politik indonesia? Kiranya dapat dinyatakan bahwa negarawan tidak bisa lepas dari politik. Siapapun yang akan menjadi negarawan harus mampu mengarungi medan politik. Sampai sejauh ini Muslim belum bisa menjadi icon negarawan, *karena terjebak politik identitas*, politik muslim, dipertontonkan lebih untuk menggalang mobilitas loyalitas secara periodik untuk kursi, politik muslim terseret loyalitas kelompok, tidak menggarap nilai substansi Islam, termasuk politik identitas negara Islam.

Muslim negarwan adalah mengelola negara dengan akhlak Islam. Dalam konteks berfikir negara maka mensubsidi orang miskin melalui birokrasi, melalui data based yang jelas, melalui anggaran, yang kemudian hadir dalam kebijakan, serta standar operasional. Orang bisa menjadi Indonesia (nasionalis, negarawan) dan menjadi muslim yang baik. Kecuali ada eksepsi dalam hal aqidah.

Birokrasi selama ini belum bekerja untuk menjadi instrumen negara menjadi orang Islam menjadi negarawan, kalau ada instrumen negara untuk menjalankan membela orang Miskin dan sejenisnya maka berimpit dengan nilai-nilai Islam. Kemudian berujung pada kebijakan publik, tidak disadari oleh partai, seharusnya materi pengkaderan partai menuju agar birokrasi menjadi inrtumen bagi pembela orang miskin. Negara bisa menjadi instrumen. Bisa di nilai dengan nilai-nilai apapun. Hal teresebut menjadi mungkin jika aktivis partai juga nenjadi

social movement dan motor sosial movement bisa dari kalangan partai, betapa indahnyanya negeri ini kalau menjadi penggerak memproduksi nilai.

Ada kerangka advanced politik dan penguatan negara. Dengan merujuk pada perspektif diatas kiranya perlu disadari bahwa Negara Islam bisa terjatuh pada perilaku membajak negara untuk kepentingan Islam, tetapi kalau akhlak Islam ada lebih dahulu sebagai referensi sosiologis baru dibuat pasalnya, selama ini sering kali diberi nama dulu sementara itu secara sosiologis belum ada.

Di satu sisi ada nilai nilai konsep yang abstrak di sisi yang lain ada kenyataan bahwa kepemimpinan yang diterima adalah kepemimpinan intelektual leadership, karena itu perlu ada prosedur yang dibakukan, dioperasionalkan. Islam menjadi manifes sebagaimana negara, tetapi tidak harus diberi label Islam. Contoh tentang bujecting sebagai kholifah para aktivis Islam maka membuat anggaran negara yang memihak kaum dhu'afa, menjaga lingkungan, yang perlu dijabarkan dalam operasionalisasi di birokrasi. Untuk keperluan itu maka analisis dampak lingkungan perlu dipertimbangkan menjadi materi pengkaderan.

Pada akhir tulisan ini kiranya perlu ditegaskan pernyataan bahwa Teologi Islam menjadi referensi dan negara menjadi instrumen untuk mewujudkan, negara bukan untuk sekedar diduduki. Agenda tersebut walaupun tidak langsung dilakukan oleh partai, tetapi bisa menjadi supporting agenda setting. Siapa aktornya? apakah dosen, politisi, pengusaha, kaum profesional, atukah mejelis syuro, terbuka banyak pilihan.

Simpulan mewujudkan Muslim Negarawan merupakan agenda yang perlu dikawal kedepan. Cara mengawal dengan mempraktekan hal-hal yang bisa diwujudkan, mengaktualkan ajaran Islam secara kontekstual. Supaya kenegaraan Muslim terus bisa dipertahankan maka yang dilakukan bukan hanya mendudukan tokoh Islam tetapi reproduksi wacana Islam yang operasional, semua itu bisa terwujud jika menyepakati framework intelektual leadership, bukan merujuk pada orang tetapi dipimpin oleh ide intelektualitas.

Route pemikiran Cendekiawan Muslim Kuntowijoyo (1943-2005) yang ingin dipaparkan dalam tulisan ini hanyalah pemikiran beliau yang berkaitan dengan tema-tema masalah politik khususnya politik Islam. Pengambilan posisi yang demikian mengingat beberapa pertimbangan pertama karena tema politik adalah merupakan tema kajian yang akrab bagi penulis serta demi memungkinkannya kajian ontologi pemikiran Kuntowijoyo ini menjadi fokus pada engle-engle tertentu, sehingga sajian menjadi enak untuk dinikmati.

Kesan kuat pertama yang ada pada penulis ketika ingin menuliskan pemikiran Kuntowijoyo di bidang pemikiran politik Islam, adalah kokohnya landasan teoritis pemikiran beliau dipadu dengan kejernihan berpikir dan akhirnya mampu melahirkan perspektif alternatif yang ia namakan dengan *Ilmu Sosial Profetik*. Sebagai contoh kecil penulis pernah membaca salah satu tulisan beliau yang dibuat pada tahun 1980-an, tulisan tersebut merefleksikan betapa beliau kokoh dalam penguasaan teori-teori social besar, penulis menemukan tulisannya yang

dimuat di jurnal Prisma tahun 1980-an beliau sudah fasih dengan teori sosial kritis dari Gramsci, Habermas, padahal saat itu masih sedikit pengamat yang menggunakan pemikiran kritis mengingat situasi politik di Indonesia yang berada di bawah regim otoriter Orde Baru.

Kekokohan pijakan kerangka teoritis yang beliau miliki sangat terasa misalnya ketika kita membaca analisis tulisan beliau yang berkaitan dengan masalah perubahan sosial, perubahan budaya dan implikasinya pada perubahan politik. Lebih khusus lagi keterkaitan antara perubahan sosial-budaya dengan pergeseran dan peranan politik umat Islam di Indonesia. Para pembaca dan pemerhati pemikiran politik Islam dapat merasakan betapa Cendekiawan Kuntowijoyo sangat menguasai teori-teori sosial besar dalam bukunya yang sangat monumental yang terbit pada awal tahun 1990-an, *Paradigma Islam*, demikian juga buku "*Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*", yang terbit pada tahun 1994.

Karakteristik lain yang menjadi kelebihan dari pemikiran dan analisis yang dibuat oleh Kuntowijoyo, sejauh yang dapat penulis tangkap adalah dalam *stand of point*, posisi pijak pemikiran Kuntowijoyo sekali pun familier dan fasih mengutip dan menggunakan teori-teori sosial barat tetapi secara substansi gagasan pemikirannya tidak menunjukkan ketundukan pada arus besar pemikiran barat yang sekuler. Kuntowijoyo sebagai intelektual tidak mau menyerah dan tunduk pada mainstream pemikiran yang sekuler bebas nilai. Dan dalam waktu yang sama. Ia juga tidak terjebak pada posisi eksklusif hanya bersedia menjadikan Islam sebagai satu-satunya alternatif pemikiran, tanpa pengayaan dan dialog yang cerdas dengan khazanah pemikiran peradaban dunia lainnya. Menghadapi posisi dunia pemikiran yang cenderung tunduk pada perspektif pemikiran Barat yang sekuler dan bebas nilai, yang tidak sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya (Islam) dari sisi pemikiran Pak kunto, telah melakukan ikhtiar yang cerdas, kreatif dan jernih yaitu dengan gagasannya untuk melahirkan suatu paradigma ilmu yang dapat mempertemukan antara tradisi pemikiran Barat yang rasional dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat industri dan tradisi pemikiran timur yang dekat dengan nuansa religius-mitos sangat kuat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat agraris. Itulah yang beliau sebut dengan nama *ilmu sosial profetik*.

Dalam pandangan ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kunto berpandangan bahwa teks suci Al Qur'an dapat diposisikan sebagai nilai/norma, yang kemudian dapat diturunkan menjadi *grand theory*, *middle theory* sampai ke praxis. Dengan rumusan lain ia menganjurkan agar Umat Islam melakukan proses objektivikasi pada ajaran Islam sehingga dapat diterima secara universal lantaran berpijak pada titik temu nilai-nilai yang objektif yang memang dibutuhkan oleh semua manusia dengan baju primordial agama apapun. Atau dapat juga ditempuh jalan sebaliknya yaitu berangkat dari fenomena dan fakta sosial politik yang ada kemudian didialogkan dengan teks normatif al Qur'an. Pemikiran Kuntowijoyo tentang objektivikasi Islam dapat dicermati pada bukunya "*Identitas*

Politik Umat Islam”, khususnya pada Bab VI dan VII yang secara mendalam tema objektifikasi Islam. Buku ini terbit bulan Juni tahun 1997, oleh penerbit Mizan, beberapa saat sebelum bergulirnya era reformasi, dimana munculnya fenomena berseminya musim kebebasan untuk mendirikan partai politik, termasuk juga tumbuhnya partai-partai politik Islam.

Dalam pandangan Kuntowijoyo bahwa dalam politik umat Islam seperti penumpang prahu yang berlayar di laut lepas, tanpa bintang tanpa kompas, tidak tahu tujuan dan tidak tahu cara berlayar.⁴ Kunto menuliskan bahwa kepentingan politik Umat Islam bukan hanya kekuatan moral, tetapi politik adalah kekuatan pemaksa (*coercion*) dan bukan hanya sekedar kekuatan moral. Politik menyangkut *publik policy*, bukan kesalehan personal.⁵ Adapun aspek-aspek dari kepentingan politik Umat Islam meliputi aspek moralitas, perubahan struktural, mekanisme politik, reorientasi psikologi. Strategi yang diusulkan oleh Kunto untuk mencapai kepentingan politik Umat Islam adalah melalui tiga strategi yaitu struktural, kultural dan mobilitas sosial.

Kuntowijoyo tidak secara spesifik menyebut strategi perjuangan Islam melalui instrumen partai politik, juga tidak memasukan dalam strategi perjuangan umat melalui jalur struktural. Hal ini nampaknya sesuai dengan keyakinan teoretis Kunto, bahwa pada era sekarang seharusnya umat Islam sudah berpindah dari perjuangan yang berpijak pada mitos dan ideologi ke perjuangan yang berbasis pada ilmu. Posisi pandangan Kunto ini jika ditelusuri konsisten sejak awal pemikiran beliau sampai tahun-tahun akhir kehidupan Beliau sebagai intelektual Islam. Hal tersebut misalnya dapat kita baca pada orasi/pidato ilmiah untuk pengukuhan guru besar Kuntowijoyo, dibidang ilmu sejarah tahun 2001, Kuntowijoyo tetap konsisten dengan pendiriannya bahwa pentingnya umat Islam menyadari tahapan-tahapan perkembangan sejarah yang mengharuskan dilakukannya reorientasi strategi perjuangan umat dari berbasis pada ideologi bergeser pada paradigma Islam sebagai Ilmu. Menurut hemat penulis, mengingat pandangan Kuntowijoyo tersebut dikemukakan di forum ilmiah yang sangat penting maka nampaknya hal tersebut dapat juga dimaknai sebagai pandangan khususnya dalam hal pemikiran politik Islam, keterkaitannya dengan konteks dinamika sejarah umat Islam yang memformulasikan paradigma Islam sebagai ilmu sudah selesai (*khatam*) dan tidak akan mengalami perubahan pandangan yang berarti sampai akhir hayatnya.

Dengan kata lain, partai politik Islam, lebih kental nuansa simbol dan ideologinya maka beliau tidak memberikan rekomendasi untuk berjuang melalui partai Islam, tentu mempunyai argumen untuk posisi pandangannya ini. Kuntowijoyo memberikan rekomendasi untuk berjuang melalui partai politik yang secara substantif memperjuangkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, membelaan pada orang tertindas, pemberantasan korupsi, pembelaan kaum perempuan,

⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, hlm. 219

⁵ *Ibid.*, hlm. 206

kebebasan berpendapat, berpolitik dan lain-lain. Tetapi bukan partai politik yang secara vulgar mengeksploitasi simbol-simbol Islam. Posisi pandangan Kunto ini tentu bertentangan dengan pandangan tokoh-tokoh Islam yang berpandangan pentingnya berjuang melalui partai Islam. Untuk menilai pandangan mana yang benar, sejarahlah yang akan memberikan jawabannya kepada kita.

Dalam kaitannya dengan posisi politik ummat Islam secara makro Kuntowijoyo telah meninggalkan warisan pemikiran yang merupakan embrio dari ilmu sosial profetik. Beliau mencoba untuk melakukan teoritisasi tentang politik Islam dari Al Qur'an surat Ali imron ayat 104 dan 110 serta surat Fushilat ayat 51-53. Dari teks normatif tersebut dapat diambil semacam proposisi aksioma. Bahwa kejayaan suatu ummat akan ditentukan oleh empat hal mendasar; *pertama*, tentang adanya kesadaran sejarah (untuk mengambil 'itibar); *kedua*, pentingnya untuk melakukan upaya emansipasi (*al amr bil ma'ruf*); yang *ketiga*, keharusan melakukan liberasi, pembebasan manusia dari kejahatan (*anahy 'anil munkar*); *keempat*, pentingnya melakukan transendensi (*tu'minuna billah*). Berdasarkan nilai aksiomatik yang diambil dari ayat di atas maka Islam dan umat Islam seharusnya mampu memenangkan pertarungan menjadi ummat terbaik tidak berada dalam dominasi dan posisi ketundukkan pada ideologi kapitalisme ataupun sosialisme seperti dialami oleh umat Islam semenjak beberapa abad semenjak lebih khusus lagi setelah terjadinya revolusi industri abad 16 di negara barat.

Dari gap antara realitas politik umat Islam dengan proposisi yang ada dalam teks normatif kemudian dapat disusun suatu pertanyaan mengapa ummat Islam mengalami keterbelakangan, kemunduran, kekalahan? Jawaban atas pertanyaan sentral ini dapat dipandu dan diturunkan dari nilai-nilai normatif teks al Qur'an dengan kombinasi dari data real dan fenomena sosial, politik penyebab kemunduran dan keterbelakangan ummat Islam. Persoalan besar tadi dapat dirinci dalam pertanyaan yang lebih spesifik apa penyebab kemunduran ummat Islam? Apakah faktor pemahaman dan kesadaran Islam yang lemah telah dipelembatkan oleh ideologi kapitalisme dan sosialisme pada hampir seluruh aspek kehidupannya sehingga pada kenyataannya ummat Islam telah jauh dari Islam, sehingga sebenarnya yang bertarung dalam realitas politik dan ekonomi bukan lagi antara Islam dengan ideologi kapitalisme ataupun sosialisme. Tetapi antara ummat Islam yang tidak memiliki ideologi dengan bangsa barat yang sangat yakin dengan ideologi kapitalisme yang sudah diperjuangkan semenjak abad pencerahan dengan pengorbanan yang sangat besar baik tenaga, pikiran bahkan nyawa. Ataukah kemunduran tersebut lebih karena faktor intrumental karena ummat Islam tidak menguasai ilmu dan teknologi. Atau bahkan kelemahan ummat Islam ada pada dua faktor itu sekaligus yakni kelemahan pada pemahaman Islam yang sudah tercerabut dan banyak friksi serta tidak menguasai dan menggegap ilmu dan teknologi.

Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa kemunduran politik umat Islam dalam persaingan secara makro adalah lebih sebagai konsekuensi dari kelemahan pada penguasaan pemahaman keislaman dan kesadaran sejarah dan instrumen. Maka langkah perbaikan yang perlu dipertimbangkan adalah perbaikan pada kedua aspek itu sekaligus. Pendalaman pada ajaran Islam tanpa menafikan dan kemaun untuk belajar hal-hal yang berdifat intrumental dari berkah kemajuan Barat.

Dalam konteks pemikiran yang makro ini maka kiranya dapat dipahami mengapa sampai akhir hayatnya Kunto, tetap istiqomah dengan pilihan strategi perjuangan umat Islam melalui jalur Islam kultural beliau tidak terlalu memberikan rekomendasi pada umat Islam untuk melakukan pilihan perjuangan melalui jalur struktural atau yang lebih populer dikenal melalui jalur politik, Islam politik.

Dalam pandangan Kunto, sepanjang bacaan yang dapat ditelusuri oleh penulis, ada beberapa keterbasan pilihan perjuangan melalui jalur partai politik yaitu; 1. Pilihan perjuangan melalui jalur partai politik membuka peluang untuk merusak soliditas umat Islam karena terkotak-kotak dalam berbagai partai dan friksi; 2. Pilihan perjuangan melalui partai politik akan menggeser alokasi sumber daya umat tersedot kepolitik dan berpeluang menelantarkan pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, moral dll; 3. Pilihan melalui jalur partai politik bisa mendorong munculnya pemikiran yang hanya berjangka pendek-kerdil dan miskin pemikiran yang memiliki visi jangka panjang; 4. Pilihan perjuangan melalui jalur politik tidak dapat diandalkan untuk memberikan solusi pada persoalan kompleks yang dihadapi oleh umat Islam; 5. Pilihan perjuangan melalui jalur politik dengan mengabaikan pembinaan aqidah, infrastruktur intelektual umat sebagaimana dibuktikan oleh sejarah (kasus dilarangnya partai Masyumi) tidak akan mencapai kesuksesan; 6. Dalam sejarah modern belum ada bukti empiris yang meyakinkan bahwa umat ini akan meraih kejayaan yang menyeluruh dengan menggunakan partai politik sebagai instrumen perjuangan.

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN POLITIK INDONESIA: TRANSAKSIONAL ATAU TRANSFORMATIF?

Utami Dewi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNY

Email: dewiutamie@yahoo.com

Abstrak

Pemilihan umum 2014 merupakan tonggak penting bagi penentuan nasib bangsa Indonesia karena melalui pemilu ini akan muncul pemimpin baru untuk lima atau bahkan sepuluh tahun mendatang. Pola kepemimpinan hasil pemilu 2014 menjadi salah satu kunci penentu kesatuan dan kedaulatan bangsa ditengah tuntutan globalisasi dan berbagai masalah disintegrasi. Paper ini bermaksud untuk melakukan refleksi pola kepemimpinan nasional Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Reformasi dalam rangka memunculkan kepemimpinan transformatif melalui pemilu 2014. Sejak Indonesia dinyatakan merdeka dan diakui oleh dunia, pemimpin Indonesia memiliki karakteristik yang relatif hampir sama yaitu administrator dan transaksional. Pola kepemimpinan transformatif dan pemersatu sesungguhnya juga muncul dalam diri para pemimpin Indonesia seperti Sukarno, Suharto, Habibie ataupun para penggantinya. Namun demikian, selama kurun waktu mereka berkuasa tampaknya kepemimpinan model transaksional dengan kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan serta menguntungkan diri dan kelompoknya lebih dominan di Indonesia terutama ketika Suharto berkuasa. Oleh karena itu, melalui pemilihan secara langsung dalam pemilu 2014, rakyat Indonesia akan menentukan nasib bangsa guna memilih kepemimpinan yang ideal bagi kedaulatan negara.

Kata kunci: *pemilu, kepemimpinan, transaksional, transformatif*

Pengantar

Tak lama lagi Indonesia akan memiliki pemimpin nasional baru melalui pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 yang akan datang. Meskipun masih satu tahun lagi, namun gegap gempita menyongsong perhelatan besar pesta demokrasi ini sudah mulai terlihat saat ini. Hiruk pikuk para politikus sudah mulai kentara ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi untuk mengikuti ajang pemilihan umum tahun depan.

Sesungguhnya upaya partai politik untuk menggalang dukungan publik telah jauh hari dilakukan oleh partai politik (parpol) di Indonesia melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di seluruh pelosok negeri. Dengan terpilihnya kepala daerah dari satu partai politik tertentu diharapkan akan mampu mendulang suara termasuk mobilisasi massa untuk meraih kemenangan pada pemilu 2014. Sehingga, kemenangan Joko Widodo dan Ahok pada Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan memberi angin segar bagi kemenangan parpol pengusungnya untuk meraup kemenangan di daerah-daerah lain. Walaupun usaha parpol tersebut kurang membuahkan kemenangan pada pilkada di daerah selain DKI Jakarta, namun geliat partai oposisi pemerintah tersebut tampaknya mulai kelihatan.

Apakah pilkada di Indonesia selama ini atau pemilu 2014 akan mampu menghasilkan pemimpin yang transformatif di Indonesia? Pertanyaan tersebut selalu mengemuka karena pesta demokrasi melalui pemilihan umum, baik pilkada atau pemilihan umum, membutuhkan dana dan mnguras energi yang luar biasa besar. Jika meleset dari harapan, kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya, bukan pemimpin transformatif yang muncul akan tetapi masalah stabilitas bangsa dan negara yang menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kini saatnya mengembalikan semangat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden kepada tujuan awal, yaitu menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan mampu membawa perubahan (tranformatif) menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Paper ini berupaya untuk menganalisis tipe kepemimpinan di Indonesia sebagai refleksi dalam melahirkan pemimpin transformatif bagi Indonesia pada masa mendatang. Pada bagian pertama penulis akan menjelaskan karakteristik pemimpin transformatif. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden sejak masa Orde Baru hingga pasca Orde Baru menjadi paparan pada bagian kedua sementara prospek pemilu 2014 dalam melahirkan pemimpin yang transformatif menjadi analisis bagian ketiga dari paper ini. Pada bagian penutup, penulis percaya bahwa pemilu 2014 akan mampu menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan transformatif jika seluruh lapisan masyarakat Indonesia mampu berpikir jernih dalam memilih pemimpin pilihan mereka. Bukan karena uang, tahta dan jabatan yang menjadi pertimbangan tetapi kapasitas dan kredibilitas yang menjadi tolak ukur utama dalam memilih seorang kandidat.

Kepemimpinan Transformatif: Sebuah Tinjauan Wacana

Menurut teori peran (*role theory*), setiap anggota masyarakat menempati posisi tertentu, begitu pula halnya pada lembaga-lembaga dan organisasi. Dalam hal ini Jennings (1944) memandang kepemimpinan muncul sebagai suatu cara berinteraksi yang melibatkan tingkah laku oleh dan untuk individu.

Sementara itu, berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, O'Donnel (1955) memandang kepemimpinan sebagai aktivitas membujuk manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu pemimpin juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi (Veithzal Rivai, 2007: 3).

Pemimpin mempunyai peran strategis dalam melakukan optimalisasi organisasi. Pemimpin memiliki fungsi vital dalam membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai organisasi. Kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi kinerja anggota organisasi mengakibatkan posisinya menjadi sentral dalam pengambilan keputusan, maupun kebijakan yang akan diambil. Pembuatan kebijakan juga memungkinkan seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kinerja beserta solusi dalam setiap problema organisasi.

Seorang pemimpin yang ideal dituntut untuk mampu mengetahui konteks perubahan dan tantangan organisasi. Sehingga dalam diri seorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk menangkap gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian perubahan yang seharusnya dilakukan dalam organisasi akan segera dapat dilakukan.

Kepemimpinan transformatif menurut Burn (1978), terkadang dipertentangkan dengan model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Untuk memotivasi bawahannya agar melakukan tanggung jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya (Venkat R. Krishnan dan Ekkirala S. Srinivas, 1998: 4). Lebih lanjut dijelaskan oleh Matthew R. Fairholm (2001: 3) bahwa kepemimpinan transaksional merupakan model kepemimpinan dimana satu orang berinisiatif untuk membuat kontak dengan orang lain dengan untuk tujuan pertukaran yang dihargai, fokus kepada imbalan atau hukuman dengan proses tawar menawar kinerja.

Sebaliknya, James MacGregor Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus mengakui (Venkat R. Krishnan dan Ekkirala S. Srinivas, 1998: 4).

Pemimpin transformasional juga mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi dan masa depan organisasi dengan bawahannya, serta meningkatkan

kebutuhan bawahannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan. Menurut Yammaniro dan Bass (1990) pemimpin transformative harus mampu membujuk bawahannya melakukan tugas-tugasnya melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Yammaniro dan Bass (1990) juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistis, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, dan menaruh perhatian pada perbedaan yang dimiliki bawahannya. Dengan demikian seperti yang diungkapkan Tichy dan Devanna (1990), keberadaan para pemimpin transformatif mempunyai efek transformasi baik pada tingkat organisasi atau pada tingkat individu.

Lebih lanjut, Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai *the Four I's*.

- a. Dimensi yang pertama disebut *idealized influence* (pengaruh ideal). Dimensi pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.
- b. Dimensi yang kedua yaitu sebagai *inspirational motivation* (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya, terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme.
- c. Dimensi yang ketiga disebut *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual). Pemimpin transformasi harus mampu menumbuhkan ide-ide baru memberi solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahannya, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- d. Dimensi yang terakhir yaitu menguraikan karakteristik pemimpin disebut *individualized consideration* (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan dan secara khusus. (Jan Stewart, 2006, hal 12).

Sesungguhnya, perbedaan antara pemimpin transaksional dan transformatif hanya salah satu perbedaan tentang tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang lain adalah pemimpin "tipe pengelola" (*administrator*) dan "tipe pemersatu" (*solidarity maker*). Menurut Feith (1962) pemimpin dengan tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang mampu mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka.

Lalu, bagaimana dengan para pemimpin di Indonesia, apakah mereka masuk dalam tipe kepemimpinan transformatif atau transaksional? Uraian berikut ini mencoba menjelaskan karakteristik pemimpin Indonesia dan kaitannya dengan pemilu.

Tipe Kepemimpinan di Indonesia

Keterkaitan antara tipe kepemimpinan dengan pemilihan umum memang tidak mudah untuk dipahami. Perbedaan sistem pemilihan umum, apakah itu sistem proporsional atau sistem distrik, dengan tipe kepemimpinan tidak serta merta akan teruji. Namun, analisis ini mencoba melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat penguasa saat pemilihan umum tersebut sedikit banyak dapat mencerminkan karakter kepemimpinan yang berkuasa masa itu. Misalnya, pemilu pertama tahun 1955 mencerminkan bagaimana karakter transformatif yang dianut oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kala itu.

Sebagai pemilihan umum pertama di Indonesia, pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum multi partai yang pertama dan diikuti oleh lebih dari 100 parpol. Pemilu pertama ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal demokrasi. Pemilu ini juga menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa saat itu tidak sekedar hanya ingin melanggengkan kekuasaannya tetapi berupaya tetap mendorong semangat perubahan untuk kepentingan organisasi. Pada pemilu ini setiap individu berhak untuk mengikuti pemilu melalui kebebasan untuk mendirikan partai politik. Walaupun pemilihan presiden belum dilakukan secara langsung, tetapi diyakini oleh banyak pengamat politik bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis di Indonesia.

Berkaitan dengan pola kepemimpinan masa ini, Feith dalam bukunya *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (1962), menyebutkan bahwa Muhammad Hatta selaku wakil presiden merupakan pemimpin dengan tipe pengelola, sementara Presiden Soekarno merupakan pemimpin tipe pemersatu. Dua karakter kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Para pemimpin dengan tipe pemersatu biasanya mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil mempengaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, para pemimpin dengan tipe pengelola umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan tapi kurang mendapat dukungan dari rakyat. Karena kurang menguasai retorika atau tak memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa, tipe pemimpin pengelola biasanya sering disalahpahami orang. Tentu saja, yang ideal adalah jika kedua karakter ini bersatu dalam satu tokoh.

Berkaitan dengan jenis kepemimpinan yang lain, transformatif-transaksional, Soekarno, menurut Liddle, adalah jenis pemimpin transformasional yang mengubah Indonesia dari satu fase (penjajahan) kepada fase lain (kemerdekaan). Namun demikian, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional Soekarno

hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah tahun itu, Soekarno menjadi pemimpin yang tak lagi punya visi transformatif (Muhammad, 2013).

Pasca pemilu 1955-1965, tampuk kepemimpinan berada di tangan Sukarno. Dengan kemampuan Sukarno sebagai orator yang handal, beliau mampu mendapatkan dukungan dari rakyat selain kemampuan Sukarno untuk meredam gejolak disintegrasi bangsa yang mulai mengancam kedaulatan RI saat itu. Namun demikian, Sukarno kurang berhasil dalam mengelola pemerintahan apalagi ketika terjadi “friksi” antara Sukarno dan Hatta kala itu. Kemampuan administrator Hatta dalam mengelola pemerintahan kala itu, mulai ditinggalkan Sukarno yang tampak mulai melenggang menjadi pemimpin tunggal setelah mengadopsi demokrasi terpimpin.

Kekuasaan Orde Lama dibawah kepemimpinan Sukarno runtuh ketika meletus peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui G 30 S/PKI yang menurunkan Sukarno dari kursi kepresidenan. Selanjutnya masa Orde Baru dengan kendali Suharto mulai berkuasa sejak tahun 1967 ketika Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di mandatkan kepada beliau. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, selama masa Orde Baru telah dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pemilu pertama, tahun 1971, diwarnai oleh munculnya serangkaian peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mengamankan perolehan suara Golongan Karya (Golkar) di mana Presiden Suharto berperan sebagai Dewan Pembina (Imawan, 1997). Peraturan tersebut adalah permendagri No 12/1971 dan *Floating mass policy* yang bertujuan untuk menggiring massa pemilih dalam memilih partai peserta pemilu tahun 1971.

Pemilu kedua, 1977, pemerintah sudah tidak secara langsung melakukan intervensi ke partai politik. Ciri penting dari pemilu 1977 adalah menurunnya jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari 10 di tahun 1971 menjadi 3 OPP di tahun 1977 sebagai kelanjutan dari fusi partai pada tahun 1973. Pada satu sisi, fusi partai merupakan kelanjutan dari tekad bangsa untuk menyederhanakan kehidupan partai melalui Tap XXII/MPRS/1966 yang ditegaskan lagi dalam TAP XXII/MPR/1973. Partai telah divonis sebagai sumber terjadinya instabilitas politik pada masa Orde lama dan awal Orde baru. Pada sisi yang lain, penyederhanaan partai ini telah menurunkan kuantitas konflik, tetapi meningkatkan kualitas konflik di antara partai yang melakukan fusi (Imawan, 1997). Misalnya, konflik terjadi di antara partai-partai berideologi Islam yang berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pemilu ketiga tahun 1982 ditandai dengan upaya pemerintah untuk mempersempit ruang gerak partai politik dengan mewajibkan semua OPP mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orpol dan Organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, PPP dan Partai demokrasi Indonesia (PDI) tidak mampu lagi menunjukkan jati dirinya dengan menganut ideologi

Islam dan nasionalis. Hal ini menghilangkan “label” yang selama ini sudah melekat pada dua parpol tersebut, sehingga mereka tidak mampu lagi menjual ide-ide mereka.

Pemilu selanjutnya yaitu tahun 1987, 1992 dan 1997 nyaris tanpa gejolak di masyarakat dengan kemenangan Golkar secara mutlak pada setiap pemilu. Golkar meraih lebih dari 75% suara di lembaga legislatif yang menempatkan orang-orang dekat Presiden Suharto di tampuk kekuasaan dengan menguasai lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Alhasil, yang terjadi di Indonesia adalah kepemimpinan otoriter di bawah Suharto sebagai Presiden serta disokong oleh kekuasaan militer pada lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat nasional maupun lokal dan pengusaha di lini sektor ekonomi.

Kepemimpinan masa Orde Baru menghasilkan pola kepemimpinan transaksional dimana pemimpin berusaha untuk menjalankan roda kepemimpinannya sebagai bentuk transaksi terutama untuk melanggengkan kekuasaannya serta kelompok-kelompok pendukungnya. Alhasil Suharto mampu berkuasa selama 32 tahun melalui berbagai kebijakan yang disusun selama Orde Baru. Namun demikian, dalam tingkat tertentu Soeharto juga merupakan tipe pemimpin transformatif yang berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi yang dipimpinnya. Suharto juga memiliki kemampuan mengelola pemerintahan yang mumpuni. Kemampuan administrator yang andal ditunjukkan beliau melalui serangkaian kemajuan Indonesia di bidang ekonomi dan stabilitas politik nasional.

Secara ekonomis, Indonesia memang mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan ekonomi sehingga sering disebut sebagai macan Asia Tenggara. Namun demikian, hasil pembangunan ekonomi ini seperti api dalam sekam yang akan meledak setiap saat jika kondisi ekonomi negara memburuk. Hal ini menjadi kenyataan, ketika krisis ekonomi melanda Asia khususnya Asia Tenggara dan begitu besar dampaknya di Indonesia, masyarakat bak macan yang menginginkan kebebasan.

Krisis ekonomi multi dimensi tersebut telah menyebabkan Orde Baru kehilangan kepercayaan masyarakat yang berakibat pada jatuhnya rezim yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun tersebut. Orde Baru runtuh pada tahun 1998, setahun setelah Suharto meenduduki kursi kepresidenan sebagai hasil dari kemenangan Golkar pada pemilu 1997. Karakter kepemimpinan Suharto yang berwibawa, kalem dan *njawani* ternyata tidak mampu meredam gejolak sebagian besar masyarakat yang menuntut perubahan pada masa itu. Hal ini ditandai dengan mundurnya beberapa orang kepercayaan beliau dari kursi kabinet bentukan Suharto pasca pemilu 1997. Bahkan pasca Suharto turun dari kursi kepresiden dan menyerahkannya kepada B.J Habibie selaku Wakil Presiden untuk melanjutkan kepemimpinan nasional hingga tahun 2002 pun gagal mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Habibie dianggap masih memiliki keterikatan dengan Orde Baru dan tuntutan rakyat saat itu adalah untuk segera menyelenggarakan

pemilu untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Alhasil, pada tahun 1999 diselenggarakan pemilihan umum pertama pasca mundurnya rezim Orde Baru.

Di bawah kepemimpinan Habibie yang cukup singkat, Habibie berusaha memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin transformatif. Dengan kekuasaan yang tiba-tiba didapatkannya (setelah mundurnya Soeharto), dia tidak tampak berusaha mempertukarkannya dengan imbalan yang dapat memperpanjang usia kekuasaannya. Menurut Liddle, Habibie seperti sebuah lilin yang kebijakan-kebijakannya memberikan jalan bagi demokrasi dan kebebasan di Indonesia tapi kebijakan-kebijakannya itu membuat Habibie tidak terpilih lagi dalam pemilu 1999. Berbagai kebijakan yang dihasilkan misalnya memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk melakukan referendum apakah memilih bergabung dengan Indonesia atau berdiri menjadi negara sendiri. Alhasil, Timor Timur lepas dari Indonesia berdasarkan hasil referendum tersebut.

Selain itu, kebijakan Habibie yang transformatif juga tampak ketika tuntutan diadakannya pemilihan umum mengemuka. Bahkan pemilu masa Habibie dikatakan merupakan pemilu demokratis kedua setelah pemilu 1955 dengan mengadopsi sistem multipartai. Pemilu 1999 merupakan pemilu multipartai yang pertama pasca keruntuhan Orde Baru. Pada pemilihan ini, sebanyak 48 partai politik yang mengusung berbagai ideologi turut meramaikan proses demokrasi dalam rangka memilih pemimpin ideal untuk Indonesia saat itu. Pemilu 1999 dengan sistem multipartai membawa konsekuensi pada munculnya banyak fraksi di lembaga legislatif. Partai-partai politik baru yang merupakan bentukan *orang lama* mampu muncul ke permukaan sebagai kuda hitam, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam hal kepemimpinan, pemilu 1999 mampu memunculkan pemimpin baru di Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarno Putri sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua pemimpin tersebut merupakan tokoh yang pada masa kepemimpinan Suharto mendapatkan pembatasan ruang gerak. Sebagai tokoh agama sekaligus keturunan pendiri Nahdatul Ulama, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selalu dianggap ancaman bagi kepemimpinan Suharto. Begitu juga dengan Megawati, sebagai putri *the founding father* sekaligus presiden RI yang pertama, beliau selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif pada masa Orde Baru berkuasa. Perlakuan tidak adil sering dialami oleh Megawati misalnya saat pemilihan ketua umum partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kepemimpinan Suharto mampu memunculkan kekuatan tandingan dalam tubuh PDI hingga memunculkan Surjadi sebagai Ketua umum terpilih PDI untuk menghalangi naiknya Megawati.

Runtuhnya kepemimpinan Suharto telah memberikan ruang demokratisasi yang lebih pada masa itu terutama dalam kebebasan berpendapat, berafiliasi dan berpolitik. Tidak hanya berhenti dalam bidang eksekutif, dalam lembaga

legislatif pun muncul pemimpin-pemimpin baru yang notabene merupakan para pengkritik rezim Orde Baru. Dalam lembaga legislatif Amien Rais menjabat sebagai Ketua MPR/DPR sebagai hasil dari pemilu 1999. Kepemimpinan masa ini tampaknya lebih merupakan tipe pemimpin transaksional, yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Selain itu, kepemimpinan pasca Orde Baru merupakan tipe pemimpin “administrator” atau pengelola dan ‘transaksional’ yang berusaha mempertukarkan kekuasaan untuk mendapatkan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Ketika roda kekuasaan bergulir kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih melalui pemilihan umum 2004 serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2009, tampaknya pola kepemimpinan belum berubah secara signifikan. Tipologi kepemimpinan transaksional dan pengelola masih kental mewarnai gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono maupun wakil-wakilnya yaitu Jusuf Kalla dan Budiono. Jusuf Kalla barangkali dinilai memiliki sedikit prestasi terutama dalam mengubah pola pengambilan keputusan yang relatif cepat dan transformatif jika dibandingkan dengan para wakil presiden sebelumnya yang dianggap kurang memiliki *power* dan berada di bawah bayang-bayang presiden dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tampaknya selama ini kepemimpinan di Indonesia masih didominasi oleh kepemimpinan tipe administrator dan transaksional, sangat jarang terjadi kepemimpinan yang mampu menunjukkan sikap pemersatu dan transformatif. Hal ini berlaku di hampir semua level pemerintahan dan birokrasi baik dari level pusat maupun daerah, bahkan hingga dalam tubuh partai politik.

Penutup

Pemilihan Umum 2014 dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengubah pola kepemimpinan terpilih Indonesia untuk menjadi lebih transformatif. Ada beberapa tokoh yang saat ini menjadi perhatian publik berkaitan dengan gaya kepemimpinannya yang dinilai transformatif dan berupaya mengubah keadaan tanpa selalu memikirkan keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya, seperti terlihat pada sosok Joko Widodo, Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Dahlan Iskan, Anies Baswedan, dan tokoh-tokoh lain. Mereka menjadi calon kandidat yang diprediksikan akan muncul dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014.

Untuk menentukan apakah pemimpin hasil pemilu 2014 adalah pemimpin transformatif, tentunya kita dapat menilai setelah sang pemimpin menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi untuk memunculkan pemimpin yang transformatif tentunya dapat dilihat dari kemampuan dan prestasi yang telah mereka raih selama ini. Oleh karena itu pemilu 2014 menjadi perhelatan yang sangat penting dalam menentukan nasib bangsa ditengah derasnya arus globalisasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan. Yang saat ini dibutuhkan Indonesia adalah

pemimpin yang transformatif, yang senantiasa berupaya memajukan bangsa dan tidak mementingkan kelompoknya demi kesatuan dan kedaulatan negara. Jika salah dalam memilih pemimpin, bisa jadi Indonesia akan menjadi jauh terbelakang dibanding negara-negara lain atau bahkan menjadi terpecah-belah karena permasalahan disintegrasi bangsa.

Daftar Pustaka

- Fairholm, Matthew R 2001, *The Themes and Theory of Leadership James MacGregor Burns and the Philosophy of Leadership*, Working Paper CR01-01, Center for Excellence in Municipal Management, Center for Excellence in Municipal Management.
- Immawan, Riswanda 1997, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Krishnan, Venkat R. and Ekkirala S. Srinivas 1998, *Transactional and Transformational Leadership An Examination Of Bass's (1985) Conceptualization In The Indian Context*, Paper presented at Asia Academy of Management Meeting, Hong Kong, Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur, India.
- Muhammad, Gunawan (ed) 2012, *Calon Presiden Kita*, Jakarta, Majalah Indonesia 2014.
- Rivai, Veithzal 2007, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada.
- Stewart, Jan 2006, Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood, *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #54, June 26.
- Western, Simon 2008, *Leadership A Critical Text*, London, Sage Publication.

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF

Marita Ahdiyana

Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNY

Abstrak

Persoalan kepemimpinan penting dibicarakan di tengah atmosfer politik pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 yang sudah mulai terasa. Dalam sejarah praktik penyelenggaraan negara, seringkali terjadi benturan kepentingan pemimpin publik. Pejabat publik dari tingkat pusat hingga di daerah tidak dapat membedakan posisinya sebagai pemimpin yang harus mengayomi rakyat dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin partai politik (parpol). Apalagi sepak terjang para pemimpin publik yang dihadirkan lewat pemberitaan media akhir-akhir ini sungguh membuat masyarakat prihatin. Beberapa pihak mensinyalir bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan di negeri ini.

Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen politik. Sehingga parpol seharusnya dapat memainkan peran penting bagi kaderisasi calon pemimpin untuk seluruh tingkatan sampai dengan jabatan presiden. Namun demikian terjadinya konflik kepentingan dan berbagai persoalan dalam kepemimpinan publik menunjukkan bahwa parpol belum berhasil menjalankan peran utamanya dalam menyiapkan kader kepemimpinan transformatif. Tulisan ini akan membahas tipe kepemimpinan masa depan dan peran yang dimainkan parpol dalam mengembangkan kepemimpinan transformatif.

Kata Kunci: *Partai Politik, Kepemimpinan Transformatif, Tipe Kepemimpinan.*

Pendahuluan

Atmosfer politik pelaksanaan pemilu tahun 2014 sudah mulai terasa. Masyarakat segera disuguhi berbagai intrik dan manuver para elite, tokoh politik, dan atraksi para calon pemimpin serta para calon legislator dalam meraih simpati massa. Tak jarang berbagai manuver tersebut dilakukan dengan saling menjatuhkan lawan politik dan menebar janji-janji manis. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah mereka akan menepati janji yang mereka kumandangkan?

Kajian Putra (2003), yang melakukan analisis terhadap kongruensi janji politik partai dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, menunjukkan bahwa walaupun secara cantuman teks bahasa formal sudah terdapat kongruensi dalam produk kebijakan, namun jika dilihat dari substansinya masih terdapat ketidaksesuaian. Artinya janji-janji pada masa kampanye masih merupakan *lip service* untuk menarik simpati massa pemilih dan sedikit berkorelasi dengan usaha elit untuk mewujudkannya dalam produk kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Persoalan kepemimpinan penting dibicarakan di tengah bangsa dan terutama parpol yang sedang bersiap menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2014. Seringkali terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara, pejabat publik dari tingkat pusat hingga di daerah tidak dapat membedakan posisinya sebagai pemimpin yang harus mengayomi rakyat dan menjalankan tugas kepemimpinan dengan kedudukannya sebagai pemimpin parpol. Apalagi sepak terjang para pemimpin publik yang dihadirkan lewat pemberitaan media akhir-akhir ini sungguh membuat masyarakat prihatin. Kalau dahulu penjara banyak dihuni oleh pelaku kejahatan dan tindak kriminalitas, maka saat ini penjara banyak dihuni oleh para pejabat koruptor. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan di negeri ini. Perilaku para elit politik yang *notabene* adalah pemimpin publik saat ini sungguh kontras. Bagaimana tidak, pemimpin sebuah parpol yang selama dua kali masa pemilu berhasil menarik simpati masyarakat pemilih karena memiliki ikon politik bersih dan peduli ditangkap dan dijadikan tersangka kasus korupsi. Belum lagi mantan ketua parpol yang berkuasa juga menjadi tersangka kasus korupsi. Politikus yang tertangkap tetap menebarkan senyum dan bersikap *cool* di hadapan sorotan semua media berita. Tidak ada lagi rasa malu atau rasa bersalah yang mereka tunjukkan. Yang mereka perhitungkan hanya kemungkinan celah hukum yang akan meringankan sanksi mereka. Hal tersebut menunjukkan satu hal: kemerosan moral. Sangat ironis dengan fenomena ketika HOS Tjokroaminoto (Ketua Sarikat Islam) dan Mohammad Natsir (Ketua Umum Masyumi) dipenjara karena mempertahankan idealisme politiknya (Suara Muhammadiyah, Maret 2013).

Parpol seharusnya dapat memainkan peran penting bagi kaderisasi pemimpin. Karena salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, mulai dari tingkat desa, bupati dan wali kota, gubernur, hingga presiden. Kepemimpinan bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki integritas dalam membangun negeri, bukan mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Kepemimpinan adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan, karena pemimpinlah yang pada akhirnya akan menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil (Allen dalam Nugroho, 2008: 582). Bahkan dalam pemahaman umum, faktor kepemimpinan juga merupakan faktor penentu utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu negara. Kita tentu tertegun ketika di jalan menemukan truk atau *pick up* berlukiskan

mantan Presiden Soeharto dan bertuliskan “*piye le.. isik kepenak jamanku biyen to...*” yang berarti: bagaimana Nak, masih enak zaman (pemerintahan) saya dulu kan... Fenomena tersebut mendorong kesadaran kita berpikir, pemimpin seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk membangun negeri ini. Mungkin kita memiliki pemimpin nasional masa depan yang merupakan karakteristik gabungan sebagaimana dikemukakan Utomo (2011:38), sebagai pemilik *national solidarity makers* seperti Soekarno, teknokrat seperti Habibie, demokratis seperti Gus Dur, tapi juga mengutamakan sekuritas seperti Soeharto. Atau jangan-jangan kita malah membutuhkan seorang *benevolent autokrat* (otokrat yang bijaksana). Karakteristik kepemimpinan seperti apa yang kita harapkan dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Bagaimana pula peran parpol dalam mengembangkan kepemimpinan transformatif untuk masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera?

Tulisan ini akan membahas tentang enigma kepemimpinan publik diantara kepentingan parpol dan kepentingan rakyat, tipe kepemimpinan masa depan, dan peran parpol dalam mengembangkan kepemimpinan transformatif.

Enigma Kepemimpinan Publik: Kepentingan Parpol dan Kepentingan Rakyat

Sorotan tajam berbagai media terhadap Presiden SBY setelah mengambil komando kepemimpinan Partai Demokrat beberapa waktu lalu nampaknya cukup beralasan. Figur SBY sebagai orang nomor satu di negeri ini, membuat publik mengkhawatirkan konsentrasi SBY mengurus republik ini. Pada sisi lain, SBY dihadapkan pada situasi partainya yang sedang banyak mengalami permasalahan internal. Apalagi parpol harus segera bersiap dan berkonsolidasi menghadapi pemilu 2014. Sehingga akhirnya perhatian dan energi yang dimiliki harus terbagi antara mengurus partai dan mengurus negara. Konflik kepentingan memang seringkali terjadi.

Banyak kalangan juga berpendapat, para menteri di KIB II tidak solid dan hanya mendahulukan kepentingan partai dan kelompoknya saja. Sebagai gambaran, dalam Kabinet Bersatu jilid II terdapat 17 menteri yang berasal dari parpol dari 34 menteri (Suara Muhammadiyah, Maret 2013). Sistem politik yang dianut di Indonesia memang memungkinkan mereka untuk, duduk dalam kabinet dan tetap menjalankan perannya dalam parpol masing-masing. Artinya tindakan mereka menurut ketentuan formal bersifat sah. Namun persoalan yang muncul kemudian adalah lebih pada sering terjadinya konflik kepentingan, dan budaya politik yang semakin bersifat pragmatis. Menteri dan pejabat tinggi negara lainnya juga masuk ke ranah politik. Hampir setiap hari menjadi pemberitaan media, sehingga mereka sering menampakkan diri sebagai sosok yang bercitra hebat dan layak menjadi pimpinan publik masa depan. Hal tersebut dapat berdampak pada kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena sebagai pejabat publik mereka dituntut untuk fokus mengurus negara demi kepen-

tingan bangsa. Sehingga seringkali muncul sebuah enigma dalam posisi pejabat atau pemimpin publik.

Sebagaimana dikemukakan Gabris *et. all* (1998: 341), bahwa kepemimpinan publik dapat bersifat enigmatik pada beberapa alasan:

1. Adanya tensi tanggungjawab antara ruang administratif dan ruang politik. Pada satu sisi pimpinan publik diharapkan untuk melakukan advokasi solusi kreatif dan inovatif bagi permasalahan yang kompleks. Namun dengan bertindak seperti advokat, mereka rentan terhadap resiko bertindak bodoh. Model kepemimpinan konservatif ini mungkin menjadikan pemimpin publik bertahan dengan tanpa mengambil resiko, tanpa harus bersifat entrepreneur, dan tanpa harus ada yang menghalangi kenyamanan mereka dalam zona aman.
2. Harus bertindak sebagai agen perubahan dan sebagai manajer, memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan tugas-tugas yang bersifat rutin. Dua peran yang harus dimainkan ini tidak selalu dapat dijalankan dengan baik.

Pimpinan yang mampu membangun visi strategis, memotivasi bawahan, dan mendorong pencapaian tujuan bersama sangat dibutuhkan. Pada saat yang sama banyak energi yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan dan mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi, termasuk ketidakpastian untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam hal ini birokrasi yang bersifat rutin kadang menjadi tujuan itu sendiri daripada alat untuk mencapai tujuan, dan dapat berdampak pada stagnasi. Sehingga pimpinan yang dinamis sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Konflik kepentingan memang sering terjadi, dan merata di semua tingkatan jabatan. Pejabat dari mulai presiden, menteri, atau petinggi lembaga negara sering bermanuver dan berbicara politik daripada berfokus melaksanakan tanggung jawab yang diembannya sebagai pemimpin publik.

Dalam konteks kepemimpinan publik, pejabat yang berasal dari partai politik, ataupun yang berasal dari profesional, seringkali tidak dapat memisahkan kepentingan pribadi (*parpol*), dengan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga terjadi kerancuan ketika pejabat mengatasi suatu permasalahan publik, apakah seorang pemimpin sedang menjalankan tugas pengabdianya pada masyarakat atau dari kepentingan politiknya. Nampaknya para elit *parpol* dan pejabat publik masih harus belajar dari ungkapan terkenal John F Kennedy: *"my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins"*. Bahwa sebagai seorang pemimpin publik, maka kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai, artinya tidak ada lagi kepentingan ganda yang saling menarik, yang membuat seorang pejabat negara melalaikan tugas, bahkan melakukan penyimpangan kekuasaan. Jiwa kenegaraan, baik bagi pejabat negara dari partai politik maupun non partai. Sehingga tuntutan terhadap pejabat publik adalah sikap berkomitmen penuh dalam mengurus bangsa dan negara, tidak

lalai, bahkan menyalahgunakan kekuasaan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan parpolnya.

Tipe Kepemimpinan Masa Depan

Dalam dunia yang saling terkait dan tergantung, kepemimpinan publik telah menjadi lebih dari sekedar pemain penting organisasi publik. Organisasi sering digambarkan sebagai lamban dalam menangani masalah baru, diwarnai banyak hambatan, serta memiliki kerangka waktu yang sangat pendek, biasanya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Berbagai macam persoalan yang terjadi salah satunya berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan yang tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. Sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk menemukan model kepemimpinan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Feldman, sifat dinamis, kompleks dan saling keterkaitan berbagai masalah yang dihadapi organisasi merupakan faktor pendorong kedaruratan organisasi masa depan (2010: 159). Sehingga perlu diperhatikan adanya tiga hal yaitu kepemimpinan, akuntabilitas dan pemberdayaan. OECD (2001) dalam Broussine (2003: 176), mengemukakan bahwa menekankan kemampuan manajerial saja tidaklah cukup untuk menghadapi tantangan masa depan, sehingga adanya perubahan lingkungan mensyaratkan tipe baru kepemimpinan karena empat hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan perhatian bagi masalah yang saling terkait dalam konteks kebijakan publik
2. Kepemimpinan merupakan komponen kunci bagi pekerja kompetitif di sektor publik.
3. Sektor publik dan pengetahuan ekonomi membutuhkan tipe baru kepemimpinan yang menginspirasi orang lain untuk menciptakan dan membagi pengetahuan.
4. Kebutuhan yang berkelanjutan bagi organisasi sektor publik untuk adaptasi yang mensyaratkan kepemimpinan diantara pimpinan pada semua level.

Menurut Fairholm berbicara kepemimpinan adalah berbicara tentang perubahan (2007: 105). Dengan mengeksplorasi studi Burns (1978) pada kepemimpinan transaksional dan transforming serta keterkaitannya dengan kemunculan teori transformasional, Fairholm menggunakan prefix *trans-* untuk membantu memahami teknik, skill, dan filosofi yang berbeda dalam mengawal perubahan. Prefix *trans-* berarti "across," "through," atau "beyond." Menggabungkannya kemudian dengan kata-kata *action*, *formation*, dan *forming* dan kemudian mengaitkannya dengan kepemimpinan adalah merupakan rangkaian yang sangat potensial dan berharga. Sehingga Fairholm membahas kepemimpinan dalam tiga cara: melalui *action*, melalui formasi, dan melalui *forming*. Salah satu teori baru yang populer kemudian disebut sebagai kepemimpinan transformasional.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, James Mc. Gregor (1978) dalam Sedarmayanti (2010: 184-185), mengemukakan dua tipe kepemimpinan, yaitu kepe-

mimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan model bagi seorang pemimpin yang cenderung memberi motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik dan menitikberatkan pada perilaku membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Sedangkan kepemimpinan transaksional adalah model dimana seorang pemimpin cenderung memberikan arahan kepada bawahan. Kepemimpinan transaksional digambarkan sebagai suatu rangkaian pertukaran antara pimpinan dan pengikut, kepemimpinan transformasional melampaui pertukaran dorongan untuk keinginan kinerja dengan pengembangan, rangsangan intelektual, menginspirasi pengikut untuk melebihi kepentingan diri mereka sendiri bagi tujuan kolektif yang lebih tinggi. Poin penting kebutuhan perilaku kepemimpinan transformasional adalah *visioning*, rangsangan intelektual, *team building*, *coaching*, and *inspiring*. Sebagai contoh pemimpin menciptakan '*intellectual stimulation*' dengan ketentuan gagasan baru dan menyebabkan orang untuk berpikir ulang cara melakukan sesuatu. Kepemimpinan adalah tentang perubahan, perubahan yang tidak hanya bersifat abstrak.

Sosok pemimpin transformatif, digambarkan Gingrich (2007: 27-28), melekat pada diri Ronald Reagan. Secara gemilang, Reagan berhasil melakukan tiga hal penting dalam membawa kejayaan bangsa dan negara AS:

1. Membangkitkan suatu kepercayaan baru dalam budaya rakyat Amerika sehingga mereka kembali menjadi bangga menjadi orang Amerika,
2. Melakukan pemotongan pajak sehingga perekonomian dapat tumbuh,
3. Menaklukkan kekaisaran Soviet.

Schultz dari The Hoover Institution menggambarkan Reagan sebagai orang yang sangat piawai luar biasa dalam memusatkan perhatian (fokus) terhadap hal kecil namun kemudian menjadi bermakna sangat besar, dan sangat jarang orang yang demikian. Dia adalah seorang yang sangat lembut dan tidak diragukan keparannya. Dia adalah seorang tenang, berhati-hati, tidak tergesa, menyenangkan dan sederhana di hadapan publik. Menurut Schultz, kekuatan Reagan juga terletak pada bahwa dia sangat tahu apa yang dia percayai, dia adalah negosiator kesatuan buruh yang memimpin pemogokan pada tahun 1940an, dan dia telah mempelajari memahami Gorbachev selama satu tahun di hampir setiap malam, sehingga dapat memahaminya lebih baik dari staf tetapnya. Schultz kemudian menggambarkan dengan sangat menarik bagaimana Reagan sukses melewati pertemuan empat mata pertamanya dengan Gorbachev pada musim dingin di Genewa. Khalayak yang menyaksikan pertemuan mereka melalui media dapat menilai, siapa yang sungguh-sungguh lebih cerdas memusatkan perhatian pada suatu hal. Walaupun bukan hal yang luar biasa besar, namun berhasil memulai hubungan yang selama ini selalu bersifat konfrontatif adalah sangat membantu untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang.

Sedangkan Nugroho (2008: 591-592), menggambarkan sosok pemimpin Singapura Goh Tjok Tong sebagai sosok yang mampu memberikan harapan

bagi rakyat dan bangsanya. Figur yang awalnya diberi label lebih lembek, serta dikhawatirkan tidak mampu mempertahankan kejayaan Singapura yang dibangun oleh Lee Kuan Yew, ternyata memiliki keunggulan ketajaman amatan yang diwarisi dari Lee. Pendapatan per kapita Singapura menjadi lebih dari dua kali lipat dibandingkan ketika dipimpin Lee. Ketajaman amatan Goh membuatnya memiliki visi untuk *one step ahead*, yang membuat kemajuan Singapura jauh melampaui negara di kawasan ASEAN, bahkan berhasil mengembangkan kawasan perdagangan bebas dengan negara-negara Amerika Latin dan Australia. Ditambahkan Nugroho bahwa kriteria legal, prosedural, dan professional bagi seorang pemimpin adalah sesuatu yang wajib. Namun yang lebih dikedepankan adalah sejauh mana pemimpin dapat memberikan harapan bagi organisasinya, menjadi pelita yang berjalan di depan, dan rela berkorban.

Karakteristik kepemimpinan masa depan lainnya adalah kepemimpinan profetik. Deutsch (1966) dalam Milner dan Joyce (2005: 117), dalam studi terhadap komunikasi politik dan pengawasan pelayanan publik mengemukakan dua tipe kepemimpinan. Pertama, pemimpin *prophetic*, yaitu pemimpin dalam terminologi pada gagasan baru. Sedangkan yang kedua adalah tipe pemimpin *continuing*, yaitu yang melaksanakan kekuasaan dalam mengimplementasikan gagasan tersebut. Dalam hal ini kepemimpinan profetik menekankan pada inti peran pemimpin adalah dalam gagasan yang dipegangnya, sehingga dapat diterjemahkan masyarakat atau pengikutnya demi kemanfaatan orang banyak. Menurut Kuntowijoyo, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang membawa misi humanis, liberasi, dan transedensi. Misi terakhir merupakan manifestasi atau hasil dari dua misi pertama yang bisa menggerakkan manusia untuk senantiasa berbuat ikhlas dengan apa yang telah dilakukannya. Misi terakhir ini merupakan misi *ilahiyah* yang membebaskan manusia dari keinginan duniawi yang sesaat yang semata-mata segala perbuatan yang telah dilakukan hanya ditujukan untuk pemilik alam semesta ini (www.ppsdms.org). Dalam teori kepemimpinan Collins (Sedarmayanti, 2010: 211), seorang pemimpin profetik berada pada level 5, dari 5 tingkatan tipe kepemimpinan. Seseorang dikatakan menjadi *great leader* karena orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya mengikuti disebabkan mereka tahu 'siapa' pemimpinnya dan apa yang ia berikan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia ada dalam ranah spiritual dalam arti memacu orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya senantiasa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Menurut Mahfud MD bahwa hal yang paling menonjol dari model kepemimpinan profetik adalah nilai moral yang sangat tinggi yang diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu juga kita kenal kepemimpinan pelayan (*servant leadership*). Robert K. Greenleaf (1970) dalam Russel (2001: 78) mengemukakan konsep kepemimpinan pelayan di antara teori organisasi modern melalui *The Servant as Leader*. Kepemimpinan pertama sekali harus sesuai dengan keinginan banyak pihak.

Beberapa penulis lain juga mendukung kepemimpinan pelayan sebagai teori modern yang valid bagi kepemimpinan organisasi. Covey (1998) misalnya mengemukakan bahwa “konsep kepemimpinan pelayan adalah sebuah dasar, sebuah hukum alami dan menjadi sistem nilai sosial dan kebiasaan individu yang hidup yang bersama-sama dengan prinsip tersebut. Motivasi yang paling dasar bagi seorang pemimpin adalah keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa karakteristik pemimpin pelayan menurut Russel dan Stone (2000) dalam Russel (2001: 79) yaitu adanya visi, kredibilitas, *trust*, pemberdayaan, pelayanan, modeling, pionir, menghargai orang lain,

Hal yang wajib dipenuhi oleh seorang pimpinan adalah kapasitas dan karakteristik kepemimpinan yang akan membantu keberhasilan kepemimpinan seseorang. Sebagaimana dikemukakan Kouzes dan Posner (1988) dalam Gabris *et. all*, (1998), untuk menjadi pemimpin yang sukses, diperlukan beberapa kompetensi yang harus dimiliki yaitu:

1. Menantang proses: mencari peluang dan mengambil resiko
2. Membangkitkan visi untuk dibagi: memimpikan masa depan, mengabaikan hal lain.
3. Memungkinkan orang lain bertindak: kerjasama, memperkuat orang lain
4. Membuat model cara: menyeting contoh-contoh, merencanakan kemenangan kecil
5. Mendorong hati: mengakui kontribusi individual, merayakan pencapaian.

Sedangkan Utomo mengemukakan pemimpin yang memiliki karakteristik, yang tercermin dalam tujuh hal berikut (2012: 94): transformatif- mendorong kemitraan, memusatkan pada visi dan misi, mengenali SWOT, memimpin, pemberdayaan, berjiwa demokratis, dan adil. Barendsen dan Gardner (2006: 265) masih mensyaratkan tiga E's yang harus dimiliki oleh pemimpin terbaik, yaitu individu yang dalam bekerja menunjukkan kemampuannya dalam tiga makna: suatu kualitas dan kompetensi professional dan teknis yang ekselen, suatu orientasi etis, dan berperan serta (*engaged*) secara sempurna.

Namun demikian yang lebih penting dari karakteristik kemampuan pemimpin tersebut adalah bagaimana kepemimpinan dapat memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakatnya, serta kemajuan bagi negara dan bangsanya. Hal yang harus diperhatikan kemudian adalah tentang nilai. Topik tentang nilai telah menjadi masalah perdebatan yang penting dalam banyak wilayah khususnya dalam bidang kepemimpinan. Sebagaimana dikemukakan Woodward dalam Russel (2001: 76), bahwa “para pemimpin memimpin dari nilai-nilai dan kepercayaan mereka”, namun demikian kita menjumpai krisis kepemimpinan karena motivasi kepentingan pribadi beberapa pemimpin. Russel mereviu keberadaan literatur yang berkaitan dengan nilai dalam kepemimpinan serta mengidentifikasi isu yang berkaitan dengan nilai personal dan

nilai organisasional (2001: 76). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa nilai sangat berpengaruh pada perilaku pemimpin sebaik pada kinerja organisasi.

Dari pembahasan tipe-tipe kepemimpinan masa depan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepemimpinan pelayan, nilai merupakan dasar dari kepemimpinan pelayan. Secara mendasar nilai pemimpin adalah merupakan faktor yang mendasari yang membedakan pemimpin pelayan dengan tipe kepemimpinan yang lain. Sedangkan dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin dapat mempengaruhi orang dan organisasi dapat untuk bekerja dengan baik. Tipe kepemimpinan masa depan yang lain yaitu profetik, juga sangat mengutamakan nilai moral yang sangat tinggi yang diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tipe kepemimpinan transformatif sesungguhnya dapat kita jumpai dalam baik tipe kepemimpinan profetik maupun tipe kepemimpinan pelayan. Karena pada dasarnya beberapa tipe kepemimpinan masa depan yang telah diuraikan di atas, mencerminkan pentingnya seorang pemimpin untuk mentransformasikan nilai-nilai positif yang ada dalam organisasi ke dalam perilaku setiap anggotanya untuk mencapai tujuan kemajuan dan keberhasilan organisasi.

Peran Parpol dalam Mengembangkan Kepemimpinan transformatif

The Saliency theory adalah gagasan yang menyatakan bahwa partai pemenang pemilu adalah merupakan tulang punggung pemerintahan pada masa pasca pemilu (Putra, 2003:). Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa parpol seharusnya dapat diharapkan untuk memainkan perannya mempersiapkan kader pemimpin. Jika karakter unggul adalah sebagai satu hal yang wajib dimiliki pemimpin, maka sebagaimana dikemukakan Nugroho (2008: 592), yang patut dipertanyakan kemudian adalah bagaimana ia mampu memberikan harapan bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Hubungan pemimpin dengan yang dipimpin adalah hubungan yang saling mengikat dalam bingkai pertanggungjawaban. Pemimpin mengemban amanah dari rakyat sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Namun hubungan tersebut semakin melemah dari budaya perpolitikan kita yang semakin pragmatis, ditandai dengan meruyaknya budaya korupsi serta persoalan rapuhnya integritas kepemimpinan bangsa ini.

Dikemukakan Latif, untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, kita harus kembali memikirkan peran kepemimpinan dalam mengaktualisasikan kapasitas transformatif dari kekuasaan. Walaupun kepemimpinan merupakan fitur permanen yang selalu diperlukan setiap masyarakat dalam segala zaman, harus dicatat tidak ada pemimpin yang cocok untuk segala musim. Hal tersebut yang mendorong munculnya teori kepemimpinan kontingensi pada tahun 1980-an, yang menghubungkan pemimpin pada situasi yang dikembangkan dalam teori yang terintegrasi dalam kepemimpinan (Nollenberger, 2007: 151). Bahwa tidak ada satu jenis model kepemimpinan terbaik yang dapat diterapkan pada semua situasi, namun lebih pada model yang berbeda bagi situasi yang berbeda.

Pemimpin yang berorientasi pada tugas dan pemimpin yang berorientasi pada hubungan adalah merupakan respon pada situasi yang berbeda. Struktur tugas digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang sangat mendesak yang dihadapi dan mencari penyelesaiannya, misalnya menurunkan angka kejahatan, memberantas korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik. Juga digunakan untuk mengatasi masalah pada suatu situasi, masa krisis, serta *chaos*.

Pada masa krisis seharusnya muncul *great men* yang memiliki kharisma. Namun demikian harapan tersebut tak kunjung menjadi nyata sehingga terjadi krisis kepemimpinan. Menurut Latif, hal tersebut terjadi karena rekrutmen kepemimpinan yang dikembangkan lebih mengandalkan sumber daya alokatif (kemampuan kontrol atas fasilitas-fasilitas material) daripada sumber daya otoritatif (kemampuan kontrol atas aktivitas manusia lain berdasarkan kewibawaan visi dan ideologis). Fokusnya bukan pada kapasitas transformatif dari kekuasaan, melainkan daya beli dari para pemimpin. Akibatnya, partai politik gagal menghasilkan pemimpin yang dibutuhkan, sedangkan para pemimpin yang punya bibit-bibit kharismatik sebagai pemimpin organisasi masyarakat terpaksa mengikuti logika 'alokatif', yang kemudian perlahan tapi pasti kewibawaannya. Padahal demokrasi harus dipimpin, dan tidak boleh berkembang menjadi ajang pragmatisme 'asal menang' atau 'asal dapat uang' demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Langkah perubahan harus dimulai, bahwa kekuasaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan sarana memperjuangkan kebajikan bersama (*virtues*). Untuk mencapainya, diperlukan kehadiran pemimpin transformatif, yang mengakhiri gerak sentripetal kekuasaan bersifat narsistik, menuju gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum, sejalan dengan gagasan kepemimpinan profetik.

Persoalan lain yang muncul adalah belum berhasilnya sistem pemilu menghasilkan pimpinan terbaik. Sebagai pilar demokrasi, parpol seharusnya berperan sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Peran tersebut dimanifestasikan dalam proses penggantian kepemimpinan nasional dan daerah saat pemilukada. Namun demikian menurut Mahfud MD walaupun sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sudah baik tapi belum menghasilkan pemimpin yang baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya kepala daerah dan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat terlibat kasus korupsi. Bahkan tercatat sebanyak 243 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sudah disidik, dan banyak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Eko Prasajo mengaitkan masalah tersebut dengan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang biaya penyelenggaraannya sangat mahal (Jawa Pos, 10 Februari 2009). Biaya tersebut tentu saja harus dibayar masyarakat melalui APBD, tetapi juga oleh calon kepala daerah dan partai politik pengusung. Mengutip penelitian yang dilakukan Manor dan Crook, pilkada menyebabkan praktik pemda yang buruk (*bad governance*). Pertama, tidak berfungsinya secara efektif kontrol politik dari DPRD terhadap

kepala daerah. Kedua lembaga itu sama-sama memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Di Indonesia, berdasar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Sehingga fungsi pengawasan DPRD jadi mandul, sedangkan pengawasan oleh pemerintah pusat tidak berjalan efektif karena keterbatasan kompetensi dan jumlah personel. Sehingga kepala daerah tidak terawasi baik oleh DPRD maupun pemerintah pusat. Kedua, kecenderungan elite politik lokal di negara berkembang yang bersifat tertutup dan selalu mengooptasi kekuasaannya. Ketiga, kesadaran, pengetahuan, dan jaringan masyarakat dalam mengontrol pemerintahan daerah sangat minim dan terbatas. Di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, masyarakat cenderung tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol kebijakan kepala daerah dan implementasinya. Terjadinya *Bad governance* pada akhirnya akan memiliki implikasi langsung pada kegagalan parpol dalam mengembangkan karakter kepemimpinan transformatif. Sehingga Mahfud juga mengemukakan lima hal yang harus dilakukan untuk menyehatkan pemilu di Indonesia (www.investor.co.id), yaitu:

1. Tersedianya sistem dan aturan penyelenggaraan pemilu yang lebih operasional untuk menjamin pelaksanaan demokrasi multi aspek.
2. Kemampuan dan integritas penyelenggara pemilu.
3. Terbukanya peluang bagi kandidat pemimpin ideal untuk masuk dalam pertarungan pemilu yakni figur yang berkarakter kuat, visioner, jujur dan berani, serta memiliki idealisme tak pernah menipu rakyat.
4. Budaya politik dan partisipasi masyarakat.
5. Budaya hukum masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kita perlu merevitalisasi peran dan fungsi partai politik. Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Pamungkas memaknai hal tersebut mencakup tiga hal: bagaimana kandidat potensial ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, bagaimana kandidat terpilih dari kumpulan kandidat potensial (seleksi kandidat), serta rekrutmen legislatif, yaitu bagaimana kandidat yang dinominasikan partai terpilih menjadi pejabat publik (2011: 92). Parpol harus dapat melakukan pendidikan politik dan kaderisasi secara selektif untuk menemukan kader-kader yang memiliki karakter transformatif, dengan melakukan rekrutmen calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, mulai dari tingkat desa, bupati dan wali kota, gubernur, hingga presiden. Karena partai politik merupakan sarana untuk melahirkan calon pemimpin, sehingga parpol dituntut melakukan kaderisasi secara selektif. Hal tersebut mensyaratkan pimpinan partai yang bervisi demokrasi (Putra, 2003:16). Yaitu yang mengelola parpol dengan memahami demokrasi sebagai upaya memanusiakan kekuasaan (*humanizing power*), bukan sekedar kompetisi tetapi juga kompetensi. Pengelolaan parpol

juga harus tanpa pragmatisme, memanusiaikan pengguna kekuasaan, merupakan sarana pencerahan masyarakat, dan dengan moralitas publik yang jelas sehingga dengan tegas serta menolak praktik KKN.

Parpol juga harus melakukan pendidikan politik pada masyarakat, tidak hanya pendidikan yang bersifat formal, tapi juga contoh-contoh yang dihadirkan media kepada publik. Parpol seharusnya membawa aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Namun kebanyakan parpol di Indonesia hanya sibuk mengurus kepentingan subyektif mendapatkan kursi di lembaga perwakilan. Bahkan mempertontonkan tindakan tidak mendidik yang mengabaikan etika dan perilaku tidak etis dalam percaturan politik. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi kegagalan parpol dalam memainkan peran penting mengembangkan kepemimpinan transformatif.

Penutup

Kriteria kemampuan dan sikap profesional adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun demikian yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan dapat memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakatnya, serta kemajuan bagi negara dan bangsanya. Sebagai pengemban amanah rakyat pemimpin harus bertanggungjawab terhadap tugas kepemimpinan yang dilaksanakannya. Namun hubungan tersebut semakin melemah dari budaya perpolitikan kita yang semakin pragmatis, ditandai dengan meruyaknya budaya korupsi serta persoalan rapuhnya integritas kepemimpinan bangsa.

Peran parpol dalam mengembangkan kepemimpin transformatif ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditandai dengan masih sering terjadinya konflik kepentingan pemimpin, serta rekrutmen kepemimpinan yang lebih mengembangkan pada mengandalkan sumber daya alokatif daripada sumber daya otoritatif. Sebagai pilar demokrasi, parpol seharusnya berperan sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Peran tersebut dimanifestasikan dalam proses penggantian kepemimpinan nasional dan daerah saat pemilu. Namun demikian ternyata sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia belum menghasilkan pemimpin yang baik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi partai politik dalam melahirkan kader pemimpin transformatif, pendidikan politik, serta perbaikan sistem pemilu.

Daftar Pustaka

Barendsen, Lynn, dan Howard Gardner. 2006. "The Three Elements of Good Leadership in Rapidly Changing Times ", dalam Hesselbein, Frances, dan Marshall Goldsmith (Eds.). *The Leader of the Future 2 Visions, Strategies, and Practices for the New Era*. Published by Jossey-Bass. A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741 www.josseybass.com

- Broussine, Mike. 2003. "Public Leadership", dalam *Public Management and Governance*. Bovaird, Tony, and Elke Loffler (Eds). London and New York. Routledge Taylor & Francis Group.
- Fairholm, Matthew R. 2007. "Trans-leadership Linking Influential Theory and Contemporary Research", dalam Morse, Ricardo S., Terry F. Buss, dan C. Morgan Kinghorn (Eds.). *Transforming Public Leadership for the 21st Century*. M.E.Sharpe Armonk, New York, London, England.
- Feldman, Martha S. 2010. *Managing the Organization of the Future*. Public Administration Review 70 supp 1 D 2010 p. s159-s163 0033-3352 American Society for Public Administration 1301 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 840, Washington, DC 20004.
- Gabris, Gerald T., Stephen A. Maclin, and Douglas M. Ihrke. *The Leadership Enigma. Toward a Model of Organizational Optimism*. Journal of Management History. Vol. 4. No. 4, 1998, pp. 334-349. © MCB University Press, 1355-252X.
- Gingrich, Newt. 2007. "Transformational Leadership", dalam Morse, Ricardo S., Terry F. Buss, dan C. Morgan Kinghorn (Eds.). *Transforming Public Leadership for the 21st Century*. M.E.Sharpe Armonk, New York, London, England.
- Milner, Eileen, and Paul Joyce. 2005. *Lessons In Leadership. Meeting the Challenges of Public Services Management*. London and New York: Routledge. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN.
- Nollenberger, Karl. 2007. "Leadership and Management in Local Government", dalam Morse, Ricardo S., Terry F. Buss, dan C. Morgan Kinghorn (Eds.). *Transforming Public Leadership for the 21st Century*. M.E.Sharpe Armonk, New York, London, England.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik. Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Russel, Robert F. *The Role of Values in Servant Leadership*. Leadership & Organization Development Journal. 22/2 (2001)76-83. © MCB University Press Limited.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refik Aditama.
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia. Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utomo Warsito. 2011. *Dinamika Administrasi Publik. Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suara Muhammadiyah. Edisi N0. 06 Th. ke-98 Maret 2013. *Tajuk: Komitmen Pejabat Publik*.

Suara Muhammadiyah. Edisi N0. 05 Th. ke-98 Maret 2013. *Tajuk: Prahara Moral Politik Islam*.

Situs Web dan SKH:

Harian Singgalang. Kepemimpinan Transformatif Solusi Masalah Bangsa. Tersedia di <http://hariansinggalang.co.id/> 20/03/2013.

Investor Daily. Rakyat Indonesia Rindukan Pemimpin Profetik. Tersedia di <http://www.investor.co.id/home/>. 18/03/2013.

Investor Daily. Pemilu Indonesia Belum Hasilkan Pemimpin Terbaik. Tersedia di <http://www.investor.co.id/home/42267>. 18/03/2013.

Latif, Yudi. Kepemimpinan Transformatif. Tersedia di <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/03/20/mjxoh4/>. 20/03/2013

Prasojo, Eko. *Bad Governance Salah Satu Ekses Pilkada*. Jawa Pos, 10 Februari 2009

ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP: MENUJU TRANSFORMASI BIROKRASI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Kurnia Nur Fitriana

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNY

Abstrak

Tulisan ini ingin mendiskusikan secara teoritis mengenai transformasi kepemimpinan melalui pendekatan *entrepreneurial leadership* dalam kepemimpinan sektor publik menuju transformasi birokrasi sebagai inspirasi dalam pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi yang tengah berlangsung dalam tata pemerintahan di Indonesia ternyata belum mampu menghapus tindak korupsi dalam tubuh birokrasi. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini justru terjadi kenaikan trend terjadinya tindak pidana korupsi di level daerah. Fenomena sosial yang terjadi, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia justru dilakukan oleh para pejabat publik di daerah (khususnya kepala daerah). Pejabat publik yang merupakan *public figure* dalam masyarakat ternyata tidak mampu memberikan contoh transformatif kepada masyarakat dan memberikan stigma negatif dalam reformasi tata pemerintahan (*governance reform*) menuju *good governance*. Pemimpin birokrasi publik yang saat ini dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mentransformasi dan memotivasi secara sinergis sehingga mampu menginspirasi seluruh sumber daya yang ada dalam birokrasi dan publik melalui visi dan misi yang visioner untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah dan transformasi lingkungan global dibutuhkan kepemimpinan transformasional dan demokratis yang salah satunya melalui model *entrepreneurial leadership* sebagai ujung tombak pemberantasan tindak korupsi dalam birokrasi dan dapat menjadi motivasi bagi publik untuk bersinergi dengan pemerintah dalam pemberantasan korupsi menuju terwujudnya *good governance* secara nyata.

Kata kunci: *Entrepreneurial leadership, transformasi birokrasi, pemberantasan korupsi*

Pendahuluan

Reformasi birokrasi yang tengah berlangsung dalam tata pemerintahan di Indonesia ternyata belum mampu menghapus tindak korupsi dalam tubuh birokrasi. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini justru terjadi kenaikan trend terjadinya tindak pidana korupsi di level daerah. Fenomena sosial yang terjadi, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia justru dilakukan oleh para pejabat publik di daerah (khususnya kepala daerah). Pejabat publik yang merupakan *public figure* dalam masyarakat ternyata tidak mampu memberikan contoh transformatif kepada masyarakat dan memberikan stigma negatif dalam reformasi tata pemerintahan (*governance reform*) menuju *good governance*. Dengan arti lain, dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang berdampak pada *chaos*-nya negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Melalui pemikiran entrepreneurial leadership diharapkan dapat menjadi pemecah kebuntuan krisis kepemimpinan di Indonesia dengan melakukan transformasi birokrasi. Entrepreneurial leadership mempunyai peran penting dalam mendobrak berbagai patologi birokrasi yang ada melalui inovasi kebijakan dan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan nilai-nilai entrepreneurial government yang lebih demokratis dalam pemberantasan korupsi dan adil dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mendiskusikan secara lebih mendalam bagaimana pengimplementasian *entrepreneurial leadership* dalam proses transformasi birokrasi untuk pemberantasan korupsi, serta sumbang saran alternatif pemberantasan korupsi dari aspek kepemimpinan.

Entrepreneurial Leadership

Kepemimpinan dalam organisasi publik memegang aspek penting untuk melakukan transformasi birokrasi, sehingga dibutuhkan transformasi kepemimpinan dari model kepemimpinan yang tidak responsif, paternalistik, dan birokratis ke model kepemimpinan yang berorientasi kepada warga negara, fleksibel, berorientasi kualitas, dan responsif (Clarke dan Newman, 1997; Du Gay, 2000, dalam Purbokusumo dan Utomo, 2009: 250). Responsivitas pemimpin publik sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan global yang cepat. Menurut Currie, et. al. (2008) dalam Purbokusumo dan Utomo (2009: 250) menyebutkan bahwa model kepemimpinan yang cocok untuk transformasi birokrasi adalah model kepemimpinan dengan konsep kepemimpinan *entrepreneurialship*. Kepemimpinan entrepreneur sebenarnya ditandai dengan inovasi yang luar biasa atau *innovativeness*, mau mengambil resiko atau *risk-taking*, dan proaktif atau *pro-activity* dari seorang pemimpin (Miller, 1983; Covin dan Slevin, 1991; Morris dan Sexton, 1996; Morris dan Jones, 1999) dalam Purbokusumo dan Utomo (2009: 250). Dalam hal ini inovatif bisa berarti

menggunakan cara kreatif dan cara yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai masalah publik, seperti misalnya dalam pelayanan dengan mengenalkan cara-cara pelayanan baru, merevisi visi misi, membentuk organisasi baru, dan mengembangkan proses-proses baru sebagai terobosan terhadap kebuntuan penyelesaian persoalan pelayanan. Lebih lanjut, menurut Purbokusumo dan Utomo (2009: 250) pemimpin organisasi publik harus memiliki kesadaran penuh untuk mengambil resiko yang paling mungkin dilakukan dengan resources uang dimiliki ditengah-tengah sempitnya kesempatan yang ada. Pada sisi yang lain, seorang pemimpin juga dituntut untuk bersikap proaktif dapat berarti mampu mencegah dan mengantisipasi persoalan tersebut muncul melalui ketekunan, adaptasi, dan kemampuan membangun premis-premis terhadap datangnya kegagalan yang mungkin akan terjadi (Currie, et.al. 2008, dalam Purbokusumo dan Utomo, 2009: 250).

Fadel Muhammad (2011) mendefinisikan *entrepreneurial leadership* sebagai persoalan bagaimana melakukan investasi *human capital, social capital, organizational capital* untuk meningkatkan kecerdasan organisasi publik agar mampu berinovasi dan menawarkan *public value*. Secara lebih lanjut, Fadel Muhammad (2011) juga mengidentifikasi karakteristik dalam *entrepreneurial leadership* sebagai berikut.

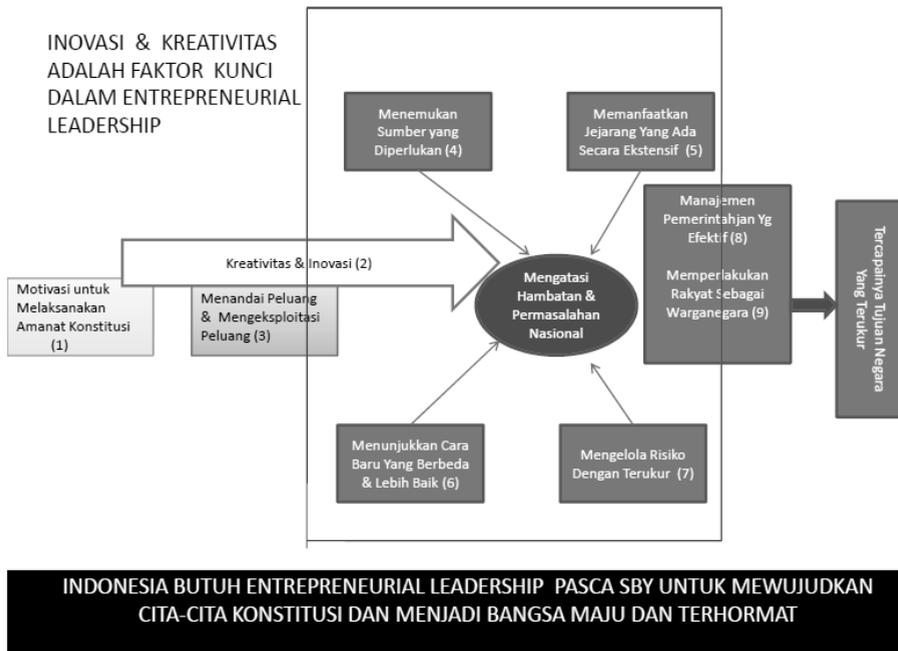
Tabel 1 Karakteristik *entrepreneurial leadership*

Tahun	Penulis	Gagasan
1934	J. Schumpeter	Inovasi, Inisiatif
1961	David McClelland	Risk-taking, need for achievement
1983	Pavelt dan Lau	Conceptual, human, political competence; technical familiarity in a specialized field
1985	MacMillan, Siegel dan Subbha Narisimha	Familiarity with market, a capacity for intense effort leadership ability
1987	Aldirch dan Zimmer	Networking with people who control importance resource and who have relevant skills and abilities
1989	Wheeler dan Hunger	Ability to implement strategy with programs, procedures, budgets, evaluation, etc.

Sumber: Fadel Muhammad, 2011.

Fadel Muhammad mengilustrasikan implementasi *entrepreneurial leadership* dalam organisasi publik dalam bagan berikut ini.

Bagan 1 Transformasi *entrepreneurial leadership* dalam organisasi publik

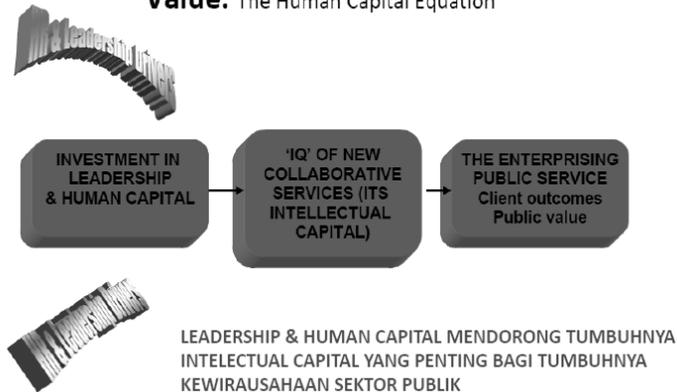


Sumber: Fadel Muhammad, 2011.

Bagan 2 *Leadership* dalam organisasi publik

The Romance of Leadership and Public

Value: The Human Capital Equation



Sumber: Fadel Muhammad, 2011.

Dalam membentuk karakter *entrepreneurial-leadership* dalam birokrasi harus mengimplementasikan prinsip-prinsip *entrepreneurial government* dengan mengadopsi nilai-nilai dalam *reinventing government* (Osborne dan Gaebler, 1996) sebagai berikut:

1. Pemerintahan katalis. Pada prinsip ini, terjadi pemisahan fungsi pemerintah sebagai pengarah (*policy maker*) dengan fungsi sebagai pelaksana (*policy executor*). Menggunakan berbagai metode untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, menerapkan metode yang paling tepat untuk mencapai efisiensi, efektivitas persamaan, pertanggungjawaban, dan fleksibilitas.
2. Pemerintahan milik masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus mendelegasikan kewenangan kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Melakukan pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat agar mampu mengontrol pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pada birokrasi untuk melaksanakan komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam melayani dan memecahkan persoalan masyarakat.
3. Pemerintahan kompetitif. Prinsip ini bertujuan untuk mengkondisikan persaingan diantara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk bersaing secara kompetitif berdasarkan kinerja dan harga. Pada konteks ini juga mempertegas bahwa kekuatan fundamental untuk memaksa birokrasi untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkesinambungan.
4. Pemerintahan berorientasi pada visi dan konsisten melakukan misi. Prinsip ini dicapai dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi internal secara radikal, menyederhanakan sistem administratif, menemukan cara terbaik untuk mewujudkan visi dalam batas-batas legal.
5. Pemerintahan berorientasi pada hasil. Prinsip ini diimplementasikan dengan cara mengubah *input oriented* ke *output oriented* yaitu mewujudkan akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Dalam perspektif pemerintahan, hal ini lebih kepada hasil capaian pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah.
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan. Berdasarkan prinsip ini birokrasi diharuskan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan (dalam perkembangannya posisi masyarakat ditempatkan tidak lagi hanya sebagai pelanggan tetapi berubah sebagai warga negara-red). Tahapan berikutnya ialah menetapkan standar pelayanan, memberi jaminan dan terbuka terhadap keluhan masyarakat, bersedia menata ulang organisasi, dan tata kerjanya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.
7. Pemerintah wirausaha. Makna fundamental dari pemerintah wirausaha adalah memfokuskan energinya untuk menghasilkan uang atau keluaran yang manfaatnya dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat bukan sekedar hanya menghabiskan anggaran. Selain itu, juga perlu dilakukan membangun kesadaran kepada masyarakat yang meminta pelayanan untuk membayar agar bisa melakukan re-investasi pelayanan yang lebih baik.

8. Pemerintahan antisipatif. Dalam hal ini *entrepreneurial government* mengarahkan pada pemerintahan yang visioner dan berfikir ke depan untuk mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah.
9. Pemerintahan inovatif. Salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan inovatif adalah mendorong perangkat pemerintahan yang langsung melakukan pelayanan atau pelaksana, untuk lebih berani membuat keputusan sendiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.
10. Pemerintahan berorientasi pasar. Dalam ciri pemerintahan yang berorientasi pasar adalah berani memanfaatkan pasar untuk memecahkan masalah publik dan memenuhi kebutuhan publik daripada menggunakan mekanisme administratif. Selain itu, upaya ini juga dapat ditempuh dengan menciptakan insentif keuangan, mengajak organisasi swasta, atau anggota masyarakat untuk berpikir dan berperilaku yang mengarah pada kemandirian pemecahan masalah sosial (diolah dari Fadel Muhammad, 2006:30-34).

Transformasi Birokrasi

Transformasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku birokrat, yang memberikan kesadaran baru, bahwa pemerintah dibentuk tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat (Kurniawan, 2009). Akar konsep transformasi birokrasi adalah memberikan pemahaman bahwa aparatur negara adalah pelayan rakyat. Dalam hal ini, aparatur negara dituntut untuk dapat bersikap netral dan profesional dalam mengemban amanah dan melayani rakyat. Transformasi birokrasi mencakup ranah perubahan sebagai berikut (Kurniawan, 2009):

1. Strategi dan kebijakan transformasi diarahkan untuk berbagi peran dengan rakyat serta menghapus manipulasi kekuasaan dan dominasi negara.
2. Transformasi birokrasi tidak hanya perubahan perilaku aparat tetapi cara pandang dalam mensikapi perubahan sosial dan politik, serta perkembangan lingkungan lokal, nasional maupun global yang sangat dinamis.
3. Transformasi birokrasi membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan mentransformasi, menginspirasi, dan memotivasi organisasi publik serta mampu mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dengan berdasarkan pada aspek transparansi, akntabilitas, dan penegakan hukum.
4. Transformasi birokrasi tidak hanya memperbaiki mekanisme perumusan kebijakan publik, tetapi untuk menemukan akar konflik di masyarakat, serta kesanggupan untuk mengelola konflik dengan 'mempertemukan pluralitas' dan mendialogkan perbedaan kepentingan yang ada.

Dalam perkembangan New Public Management atau di Amerika Serikat lebih dikenal dengan gerakan *reinventing government* ini, dipandang sebagai upaya mentransformasikan pendekatan sektor swasta dan bisnis khususnya *entrepreneurial spirit* ke tubuh pemerintah dikarenakan sumberdaya publik yang

semakin langka (Osborne & Gaebler, 1996). Tjokrowinoto (1996) menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi birokrasi ke depan agalah bagaimana dapat memainkan perannya yang optimal di dalam konteks, di satu pihak, menguatnya peranan sektor swasta sebagai akibat dari proses liberalisasi tadi, dan dipihak lain adanya tuntutan normative untuk mewujudkan keadilan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Peranan ini akan dapat dilaksanakan apabila birokrasi memainkan peranannya dalam kapasitas sebagai *entrepreneurial government* dan *empowering government*. Salah satu contoh implementasi *entrepreneurial leadership* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah melakukan transformasi birokrasi melalui inovasi kebijakan dan pelayanan publik adalah Jokowi (Joko Widodo) sebagai Gubernur DKI Jakarta yang telah membuat inovasi kebijakan dibidang pelayanan kesehatan dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Provinsi DKI Jakarta.

Selain dari aspek kepemimpinan, dalam menerapkan prinsip-prinsip *entrepreneurial government* diperlukan transformasi sistem dan organsiasi pemerintahan secara fundamental melalui pembaruan strategi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Strategi dalam implementasi *entrepreneurial government*

Pendongkrak	Strategi	Pendekatan
Tujuan	Strategi Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan 2. Kejelasan peran 3. Kejelasan arah
Insentif	Strategi Konsekuensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan terkendali 2. Manajemen perusahaan 3. Manajemen kinerja
Pertanggungjawaban	Strategi Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilihan pelanggan 2. Pilihan kompetitif 3. Pemastian mutu pelanggan
Kekuasaan	Strategi Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan organisasi 2. Pemberdayaan pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat
Budaya	Strategi Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghentikan kebiasaan 2. Menyentuh perasaan 3. Mengubah pikiran

Sumber: Osborne dan Plastrik, 2000.

Korupsi: Merunut penyebab dan alternatif tawaran pemberantasan korupsi dari aspek kepemimpinan

Makna korupsi secara harfiah berasal dari bahasa latin *corruptus* yang berawal dari akar kata *corrumpere* yang berarti merusak dan menghancurkan (Soetandyo, 2004: 270) dan Santosa (2007: 88). Menurut Azra (2004: 88) dalam

Santosa (2007: 88) istilah korupsi mengacu kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Sedangkan, Philp (1997) dalam Santosa (2007: 88-89) menyatakan adanya tiga pengertian korupsi yaitu: Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office centered corruption*) yang diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku seperti keluarga, famili, dan teman. Pengertian ini mencakup kolusi dan nepotisme.; Kedua, korupsi dimaknai sebagai pengertian korupsi yang berdampak terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam hal ini korupsi terjadi apabila seorang pemegang kekuasaan melakukan penyalahgunaan wewenang karena ada orang yang akan memberikan imbalan (uang atau materi lain) kepadanya. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*). Berdasarkan pengertian ini korupsi adalah “lembaga” ekstra-legal yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. dalam kaitan ini korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapat tambahan pendapatan dari masyarakat. Posisi birokrasinya telah dijadikan ladang bisnis untuk memperoleh tambahan pendapatan.

Untuk merunut penyebab terjadinya perilaku koruptif, sebelumnya perlu dijabarkan jenis-jenis tindak korupsi. Menurut Alatas (dalam Zain, 2004: 65-66 dan Santosa, 2007: 89) mengidentifikasi enam jenis korupsi, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*Transactive Corruption*) ialah korupsi yang dilakukan oleh kedua pihak dalam bentuk suap untuk memperoleh keuntungan bersama.
2. Korupsi ekstortif (*Extortive Corruption*) berupa pungutan paksa oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang telah diberikannya kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi agar tidak rugi sendiri.
3. Korupsi investif (*Investive Corruption*) adalah pemberian dari pihak luar kepada pejabat tapi bukan untuk mendapatkan balas jasa saat ini melainkan untuk memperoleh kemudahan fasilitas di masa datang.
4. Korupsi nepotistic (*Nepotistic Corruption*) ialah yang berhubungan dengan pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik dari kalangan sahabat atau keluarga.
5. Korupsi otogenik (*Autogenik Corruption*) ialah korupsi yang terjadi apabila pejabat memberikan informasi kepada pihak luar (misalnya proyek yang ditenderkan) dengan imbalan suap.
6. Korupsi supportif (*Supportive Corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan melindungi atau mempertahankan praktik korupsi yang mereka lakukan.

Berdasarkan beberapa definisi korupsi dan jenis-jenis korupsi tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak korupsi merujuk kepada birokrasi peme-

rintah dengan melakukan jenis korupsi yang variatif tergantung pada konteks permasalahan yang ditangani, sasaran yang hendak dicapai dari tindakan korupsi tersebut dan keterlibatan pelaku.

Proses korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya kemungkinan kesempatan dari kelonggaran peraturan perundang-undangan yang ada dan kelengahan dari publik dalam melakukan kontrol sosial-politiknya secara aktif. Zain (2004: 66-68) dalam Santosa (2007: 90) menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi dalam bentuk berikut ini: Pertama, dalam bentuk pencurian aset negara; Kedua, distorsi APBN misalnya penggelembungan (mark-up) nilai proyek, proyek dibuat-buat padahal sebenarnya tidak ada, dan kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tetapi melalui sogokan kepada petugas pajak; Ketiga, disebut Patronism atau Clientelism, korupsi yang terjadi apabila seseorang memperoleh jabatan dengan membayar kepada pendukungnya. Ini disebut juga dengan istilah *money politics*. Fenomena korupsi di Indonesia telah terjadi hingga daerah dengan melibatkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengungkapkan, sejak tahun 2004 sampai Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik gubernur/bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi, dengan rincian sebagai berikut: Gubernur 21 orang, Wakil Gubernur 7 Orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Walikota 41 orang, dan Wakil Walikota 20 orang. Selain kepala daerah, korupsi di daerah juga menjerat anggota parlemen/legislatif, adapun anggota legislatif yang terjerat korupsi di DPRD kabupaten/kota tercatat sebanyak 431 orang dan DPRD Provinsi 2.545 (Sumber: <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2013/02/17/300-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi>, diakses tanggal 10 April 2013, pukul 12.30).

Melihat kecenderungan korupsi yang semakin banyak, kita bisa melihat kecenderungan praktik *governance* secara keseluruhan. Dilihat dari banyaknya pengungkapan kasus tersebut, kita bisa memaknai sebagai berikut: Pertama, praktik korupsi semakin hari semakin marak; Kedua, ada keseriusan dalam pengendalian terhadap tindakan korupsi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa penilaian masyarakat terhadap praktik *governance* (*voice and accountability, government effectiveness, rule of law, political stability, regulatory quality, control of corruption*) menunjukkan penilai positif (Pramusinto, 2009: 9). Apabila dirunut, akar permasalahan dari tindakan korupsi adalah budaya. Pengaruh pemimpin yang profetik dengan pendekatan *entrepreneurial leadership* dapat mendorong pemberantasan korupsi dalam birokrasi. Dalam pendekatan organisasi publik Blackburn, Bose, dan Haque (2006) dalam Susanto (2009: 21) secara khusus mendefinisikan korupsi dalam sektor publik sebagai penyalagunaan wewenang oleh pejabat publik melalui eksploitasi kewenangan diskresi yang didelegasikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya, dengan melakukan tindakan-tindakan pencarian keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Oleh

karena itu, pendekatan perilaku organisasi digunakan untuk menjelaskan secara teoritis mengapa seseorang ketika masuk dalam struktur kekuasaan (organisasi publik) bisa terjebak untuk berperilaku koruptif melalui pengadopsian *social information processing theory*. Berdasarkan teori tersebut perilaku koruptif terjadi ketika seseorang dihadapkan pada kondisi sosial di mana perilaku koruptif mendapatkan legitimasi sosial (Susanto, 2009: 27). Persepsi dan opini tentang legitimasi sosial tersebut dibentuk melalui pengolahan informasi sosial yang datang padanya dalam durasi yang lama dan bersifat intensif.

Dalam pemberantasan korupsi dari aspek kepemimpinan dimulai dari pembentukan karakter seorang pemimpin publik yang bersifat profetik, transformatif, dan demokratis yang salah satunya melalui pendidikan karakter kepemimpinan sektor publik. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam *entrepreneurial government* adalah:

1. Memiliki komitmen yang kuat dan berani untuk efisiensi dalam menyelesaikan masalah publik dan memberantas tindak korupsi serta mengeliminir *personal interest*;
2. Memiliki pemahaman dan apresiasi yang tinggi terhadap inovasi kebijakan dengan penerapan teknologi informasi;
3. Mampu mengintegrasikan semua urusan publik dalam satu kesatuan sistem (diolah dari Purbokusumo dan Utomo, 2009: 250).

Penutup: Kesimpulan dan Saran

Mengacu pada konteks definisi *entrepreneurial leadership* dalam birokrasi dapat dirumuskan bahwa dalam mewujudkan *entrepreneurial leadership* seorang pemimpin publik harus menerapkan nilai-nilai fundamental yang meliputi

1. Inovatif dan kreatif dalam menciptakan berbagai produk kebijakan dan produk pelayanan publik, serta dalam melakukan perubahan organisasional sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan global dan kebutuhan masyarakat.
2. Kritis dalam merumuskan kebijakan publik dan menyikapi permasalahan publik yang kompleks
3. Visioner dalam menetapkan visi dan misi organisasi, menginvestasikan sumber daya manusia dalam organisasi, menerapkan semangat kewirausahaan dalam pelayanan publik, dan memetakan kebutuhan publik yang berorientasi ke depan.
4. Berani mengambil resiko ketika dihadapkan pada penyelesaian permasalahan publik yang membutuhkan skala prioritas dengan mengutamakan kepentingan publik.
5. Responsif terhadap berbagai keluhan atau pengaduan dari publik atas permasalahan yang ada.

Adapun yang dapat dijadikan sumbang saran alternatif rekomendasi kebijakan melakukan transformasi birokrasi melalui *entrepreneurial leadership* dalam rangka pemberantasan korupsi yaitu:

1. Membangun jejaring antara jejaring kerja secara multisektoral dan multi-*stakeholders* mulai dari level pejabat publik hingga *street level bureaucrat* dan *grass root*, serta meningkatkan posisi tawar masyarakat melalui pendidikan anti korupsi.
2. Melakukan pembentukan karakter kepemimpinan melalui pendidikan karakter dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) untuk membentuk pemimpin yang berkomitmen kuat agar tidak koruptif .
3. Melakukan inovasi kebijakan dan pelayanan publik dengan memposisikan masyarakat sebagai warga negara secara inovatif, transparan, adil, responsif, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, Agung. 2009. Transformasi Birokrasi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Muhammad, Fadel. 2006. Mempraktekkan Entrepreneurial Government: Pengalaman Gorontalo. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Muhammad, Fadel, 2011. Entrepreneurial Leadership Untuk Membangun Daya Saing Bangsa. Dalam <http://www.definit.asia/PDF/Entrepreneurial%20Leadership%20untuk%20Membangun%20Daya%20Saing%20Bangsa%20.pdf>, diakses tanggal 10 April 2013, pukul 12.30.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1996. Mewirusahaakan Birokrasi. Jakarta: PPM
- Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. Memangkas Birokrasi. Jakarta: PPM.
- Pramusinto, Agus. 2009. Mencari Alternatif Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Jurnal Keijakan dan Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 1 (Mei 2009). Yogyakarta: MAP UGM.
- Purbokusumo, Yuyun dan Puguh Prasetya Utomo. 2009. Kepemimpinan Entrepreneur Di Era E-Government dalam Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto (Editor). 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Santosa, Amir. 2007. Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi Di Indonesia, dalam Jurnal Keijakan dan Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 1 (Mei 2007). Yogyakarta: MAP UGM.
- Susanto, Ely. 2009. Memahami Korupsi dari Perspektif Perilaku Organisasi: Mengapa Seseorang Terjebak Dalam Perilaku Korup? dalam Jurnal Keijakan dan Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 1 (Mei 2009). Yogyakarta: MAP UGM.

Tjokroaminoto, Muljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Referensi Website:

<http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2013/02/17/300-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi>, diakses tanggal 10 April 2013, pukul 12.30.

**SUBTEMA:
KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF
HISTORIS DI INDONESIA**

NASIONALISME DALAM KONSEP KEPEMIMPINAN PROFETIK TRANSFORMATIF (Kajian Sejarah)

Zulkarnain

Pendidikan Sejarah, FIS, UNY

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang konsep kepemimpinan profetik transformatif dari sudut pandang nasionalisme. Bila dikaji dari dimensi historisitas dan normativitas, nasionalisme dalam konsep kepemimpinan profetik transformatif merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini, tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Meskipun sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepnya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif

Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling tidak ada delapan fase pertumbuhan nasionalisme bila dikaitkan dengan kepemimpinan profetik transformatif di Indonesia yakni, nasionalisme akan teritori, kebangkitan nasionalisme yang ditandai dengan gerakan Budi Utomo, kepemimpinan profetik transformatif ditandai dengan kebangkitan nasionalisme tahun 1928, gerakan revolusi fisik kemerdekaan, perkembangan nasionalisme tahun 1966, kebangkitan angkatan tahun 1970-an, kebangkitan angkatan 1980-an, angkatan 1990-an. Selain kebangkitan nasionalisme, tulisan ini juga

akan menyoroti gejala-gejala disintegrasi bangsa yang mengarah pada perpecahan dan mengancam nilai-nilai nasionalisme oleh karenanya diperlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Kata Kunci: *Nasionalisme, kepemimpinan Profetik Transformatif*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan informasi menarik oleh media masa baik itu media cetak maupun elektronik tentang ketidakmandirian bangsa kita sebagai negara berdaulat dalam mengatur tata kelola pemerintahan, pengaturan dan penguasaan sumber daya alam, serta aset-aset strategis lainnya. Ketidakmandirian pemimpin bangsa mendapat sorotan dari berbagai kalangan baik itu pengamat, pemuda, tokoh masyarakat dan dari tokoh lintas agama. Mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia sudah mendekati negara gagal, akibat pemimpin negara yang tidak mandiri, lemah, tidak berdaya dalam menghadapi intervensi asing.

Kondisi ini diperparah dengan perlakuan diskriminatif pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Gerakan-gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), NII (Negara Islam Indonesia), aksi terorisme, secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap negara, dan yang lebih meyakinkan, negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan entengnya mengklaim wilayah NKRI sebagai bagian wilayah negaranya. Para pahlawan devisa yang seharusnya diberikan pengayoman dan perlindungan oleh negara ternyata dengan sangat gampang dan tanpa pembelaan menerima hukuman mati dan hukuman pancung baik di negeri Jiran maupun di Timur Tengah. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan dan perlu perhatian dan tindakan serius dari berbagai elemen bangsa.

Sudah saatnya kita termasuk pemerintah mulai sadar dan mawas diri sekaligus bertanya, apakah mungkin seluruh persoalan kebangsaan dan nasionalisme dari perkumpulan etnik-etnik yang berbeda-beda *world-view*, karakter, budaya, agama, setelah mereka bersedia dan rela bergabung dalam sebuah negara Indonesia, lantas segala persoalan bisa dianggap selesai begitu saja....? Bukankah kita seharusnya juga menyadari, bahwa persatuan etnis dan teritorial yang telah berhasil dibangun di awal kemerdekaan hingga saat ini, baru hanya sebatas persatuan awal yang masih sangat simbolis sifat dan tingkat kesadaran nasionalismenya, yang tentu saja masih sangat rentan terhadap perpecahan. Oleh karena kalau saudara-saudara di forum seminar ini tidak mau dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki rasa nasionalisme mari simak dan dengarkan secara serius konsep nasionalisme dalam kaitannya dengan kepemimpinan profetik transformatif.

Nasionalisme dalam Kepemimpinan Profetik Transformatif

Cita-cita akan lahirnya pemimpin profetik transformatif di negeri tercinta ini sepertinya masih jauh dari harapan, pemimpin di negeri ini lebih sibuk mengurus partai politik dan melakukan politik pecitraan terhadap diri, keluarga, dan kelompoknya. Wakil wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen sebagai tumpuan harapan guna menyalurkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya juga sangat mengecewakan. Mereka baru bersuara lantang ketika kepentingan diri dan partainya terganggu oleh penguasa, namun demikian kita tidak boleh berhenti untuk bermimpi. Melalui seminar dan diskusi pada sesi paralel ini diharapkan akan lahir ide, gagasan-gagasan guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Selaku dosen di Pendidikan Sejarah, saya akan membahas Konsep Kepemimpinan Profetik Transformatif dari sudut pandang nasionalisme.

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini, tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Meskipun sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif.

Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan *urgent* pada abad XX dalam proses nation formation negara-negara nasional modern di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi proses pengintegrasian sebagai nasion atau komunitas politik. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme terbentuk *counter-ideology* terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan realitas substantive tersebut. Dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif masa penjajahan menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnya. Nasionalisme adalah tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjang bangsa teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang

diharapkan. Sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan Indonesia, sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempat kebersamaan segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama, etnik, adat-istiadat, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi politiknya yang pluralistik. Asas pluralisme yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjuangan merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan konflik.

Konsep nation mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblée nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (abad ke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaissance, timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (A. Daliman, 2006: 57). Dari sinilah makna kata nation menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoritis.

Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana berusaha memahami sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidaklah mudah mengingat, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti.

Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: "*nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*". Bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Hans Kohn, 1965: 9). Konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada *nation state* atau negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. Hasan al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282-283), berbicara tentang nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam modern mengemukakan, "...sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi siapapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. Kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya..."

Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi (Sartono Kartodirdjo, 1994: 4).

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat. Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Benedict Anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, *imagined communities*. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan (Sulfikar Amir, 2007).

Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila konsep Anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadi sumber kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edward Said terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan masyarakat non-Barat (Anderson dalam Sulfikar Amir, 2007).

Dalam bukunya, *Imagined Communities*, Anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa Eropa. Di sini letak problematika dari pandangan Anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.

Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II yang melanda negara-negara jajahan di Asia dan Afrika, yang karakternya ditandai oleh penyebaran nasionalisme melalui bahasa penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropolitan (Benedict Anderson, 1983: 49).

Berdasarkan hal itu dapat ditiesiskan bahwa nasionalisme merupakan penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama. Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubah-

an sosial dan budaya dalam masyarakat. Meskipun demikian, harus diingat bahwa nasionalisme tidak harus terbatas pada nasionalisme politik. Bahkan dalam sebuah negara bangsa pun masih ada kesadaran akan nasionalisme berdasarkan kesamaan suku, etnis, agama, atau pulau tertentu. Ini adalah bagian dari nasionalisme kultural yang tidak perlu ditakuti. Di Indonesia pun hal semacam ini dapat terjadi. Kesadaran kebangsaan orang Aceh, orang Makassar, Minahasa, Madura, Jawa, Papua, atau Sunda, dapat dipahami sebagai kesadaran nasionalisme kultural. Negara tidak perlu takut bahwa kesadaran semacam ini akan berkembang ke arah separatisme dan upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang penting negara sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar.

Jika kita simak beberapa pendapat tentang nasionalisme maka nasionalisme dalam konsep kehidupan bernegara dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: (1) kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; (2) kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; (3) kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; (4) kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*depotion*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; (5) prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatnees adn the glorification*) dari bangsanya (Sartono Kartodirdjo, 1999: 7-8).

Amerika Serikat merupakan negara kebangsaan modern (*the modern nation state*) pertama yang dibangun tidak berdasarkan keturunan dan persamaan agama, tidak pula didasarkan pada bahasa dan tradisi-tradisi kesustraan atau hukum yang sama dari suatu bangsa. Bangsa dan negara tersebut dilahirkan dari suatu usaha bersama, dalam suatu revolusi perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik, kemerdekaan perseorangan dan toleransi mengenai asal-usul ras dalam suatu "*melting-pot*". Bangsa ini dipersatukan oleh cita-cita, cita-cita kemerdekaan di bawah undang-undang, seperti dinyatakan dalam konstitusi. Konstitusi Amerika mulai berlaku pada tahun 1789, tahun meletusnya revolusi Perancis. Konstitusi tersebut mampu mempertahankan diri dari berbagai ujian jaman melebihi konstitusi-konstitusi negara manapun di seluruh dunia (Hans Kohn, 1965: 26-27).

Demikian pula halnya dengan negara republik Indonesia yang didirikan bersama dalam bentuk bangunan negara kebangsaan menurut teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modern yang sangat mirip dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep bhinneka tunggal ika (pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk sejarah. Demikian pula untuk membangun tekad kesatuan (*unity*), bangsa kita memerlukan waktu lebih dari seperempat abad dengan

dipancangkannya tiga tonggak sejarah, yakni kebangkitan bangsa dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dicanangkannya manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia (1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Baru kemudian pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu asing (A. Daliman, 2006: 62).

Pertumbuhan Nasionalisme dalam Kepemimpinan Profetik Transformatif

Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling tidak ada delapan fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia yakni sebagai berikut :

Pertama; Nasionalisme akan teritori. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diduduki dan dieksploitasi Belanda untuk kepentingannya telah melahirkan kesadaran akan sebuah tanah air (teritori) yang harus dibebaskan supaya masyarakatnya bisa membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan sejahtera. Kesadaran akan teritori ini tidak bersifat regional atau lokal terbatas pada wilayah tertentu saja yang dihuni oleh kelompok suku atau etnis yang sama – tetapi kesadaran ke-Indonesia-an. Karena itu, arti “tanah airku” dalam nasionalisme Indonesia bukan terbatas tanah air (lokalitas) tempat seseorang dilahirkan – desa tertentu atau pulau tertentu – tetapi sebuah tanah air Indonesia. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai berbangsa Indonesia sungguh menyadari diri sebagai beraneka ragam suku, agama, ras, bahkan wilayah (*territory*).

Kedua; Kebangkitan Budi Utomo. Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Republik Philipina (1898), yang dipelopori Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan Republik Cina (1911). Partai Kongres di India dengan tokoh tilak dan Gandhi (Kaelan, 2002). Sedangkan di Indonesia gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Kemudian pasca Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia, misalnya, Soepomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya, Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya (A.

Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php.id=1>, diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Ketiga; Kebangkitan tahun 1928. Kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928. Dasar inilah yang selanjutnya dijadikan pijakan dan filosofi perjuangan menuju kemerdekaan.

Keempat; Revolusi Fisik Kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan *nation state* yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan, karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika Hatta, sebagai salah seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter.

Kelima; Kebangkitan tahun 1966. Perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara terasa sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Angkatan '66 yang dipelopori kaum muda mampu merobohkan demokrasi terpimpin ala Soekarno dan politik kekuasaan yang condong pada sosialis. Angkatan muda dengan sokongan militer melahirkan rezim orde baru. Tetapi sayang beribu sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKR maupun pemuda dalam menumbang penguasa orde lama.

Keenam; Kebangkitan angkatan tahun 1970-an. Gerakan atau kebangkitan nasionalisme pada tahun 1974 dikenal dengan peristiwa Malari (Malapateka Lima Belas Januari). Gerakan ini merupakan klimaks kekesalan para tokoh dan gerakan muda atas kebijakan negara di bawah komando Pemerintahan Orde Baru yang sangat pro atau sudah dikuasai oleh pemodal asing, mereka menganggap negara tidak lagi mempunyai kemandirian di bidang ekonomi, politik,

hukum, pendidikan, dan keamanan. Gerakan ini sekaligus mengirim pesan pada penguasa orde baru agar tidak lupa pada cita-cita awal kelahiran orde baru, yakni mewujudkan kemandirian sebagai Negara berdaulat menuju kesejahteraan rakyat. Bila pemerintah yang telah diberi mandat oleh rakyat sudah melakukan tindakan di luar rel maka bersiap-siaplah berhadapan dengan kekuatan rakyat. Tahun 1970-an mahasiswa juga dihadapkan pada kekuatan yang membelenggu kebebasan akademis di kalangan kampus. Mereka memperjuangkan kebebasan akademik dan membebaskan kampus dari kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Mahasiswa menolak keras pembatasan gerakannya dalam berpolitik, dimana mahasiswa dikungkung hanya dalam ruang kuliah di lingkungan kampus. Sementara di sisi lain para tentara semakin menggurita ke dalam tatatan masyarakat sipil lewat dwifungsi ABRI (Indra dalam *Kompas*, 31 Oktober 2011).

Ketujuh; Kebangkitan angkatan 1980-an. Setelah gerakan pemuda sempat mengalami kefakuman akibat tindakan pemerintah yang represif, mengancam keselamatan jiwa kalangan pergerakan dari kaum pemuda dan mahasiswa, maka mulai tahun 1980 sampai awal tahun 1990 pemuda dan mahasiswa kembali bangkit dengan cara melakukan gerakan-gerakan perubahan menuju kebebasan berfikir, demokratisasi dan perjuangan Hak Azasi Manusia. Gerakan-gerakan kelompok ini ditandai dengan munculnya kelomok studi di kampus maupun di luar kampus, lembaga pers alternatif, forum komunikasi atau komite rakyat bersamaan dengan munculnya LSM. Berbeda dengan gerakan sebelumnya, inti kekuatan gerakan ini bukan hanya di kampus, namun di tempat-tempat yang sederhana seperti di sekretariat organisasi kepemudaan dan mahasiswa, rumah kos, gubuk petani korban penggusuran, dan di barak-barak buruh pabrik. Pendewasaan intelektual generasi ini bersifat “organik” dan jauh lebih matang karena mempunyai sarana pers. Mahasiswa, kelompok diskusi, dan aksi solidaritas terhadap warga masyarakat yang paling tidak diuntungkan oleh kebijakan penguasa Orde Baru.

Kedelapan; Angkatan 1990-an. Pada dekade tahun 1990-an mahasiswa ditekankan dan yang berdemo akan ditahan. Pada masa itu, gerakan mahasiswa lebih bersifat politis dan fisik. Pembentukan opini atau pembangunan wacana tidak diperlukan lagi, karena pada saat itu hanya ada dua pertarungan yakni pertarungan antara rezim penguasa dengan mahasiswa. Angkatan ini hadir sebagai aktor perubahan yang menumbangkan rezim otoriter di bawah penguasa Orde Baru. Gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan mencapai klimaksnya pada tahun 1998, diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Mahasiswa pun mulai gerah dengan penguasa Orba, tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa.

Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasinya mendapat simpati dan dukungan yang luar biasa dari rakyat. Mahasiswa menjadi tumpuan rakyat dalam mengubah kondisi yang ada, yakni kondisi rakyat yang

sudah bosan dengan pemerintahan yang terlalu lama, 32 tahun. Politisi di luar kekuasaan pun menjadi tumpul karena terlalu kuatnya lingkaran kekuasaan, dan dikenal dengan sebutan jalur ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar). Walaupun kalangan muda di bawah komando mahasiswa berbeda warna, berbeda almamater, berbeda ideologi, keyakinan, tetapi mereka punya kesamaan yang disatukan oleh rasa nasionalisme dan semangat membara untuk membebaskan diri dari kekuasaan yang otoriter.

Gugatan Kritis terhadap Nasionalisme

Kalau pada subpokok bahasan sebelumnya kita telah membahas semangat nasionalisme kaum muda dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dalam membebaskan negara dari kekuasaan yang otoriterian menuju negara demokrasi, kini kaum muda kembali mendapat sorotan, kaum muda dianggap telah terjerembab pada penguatan kultur radikalisme pasar bebas yang dipandu logika kapitalisme, terkontaminasi kultur atau kebudayaan barat yang acuh tak acuh, kurang peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sedangkan kaum muda yang masuk ke ranah politik dan menjadi pengendali kekuasaan di jajaran elite pemerintahan ternyata larut dalam kenikmatan kekuasaan politik transaksional yang dipandu oleh juragan pemilik modal, pembelaan terhadap rakyat kecil yang selama ini nyaring disuarakan, lambat laun sudah mulai redup, diibaratkan ular piton yang kekenyangan sehabis menelan mangsanya.

Selain sorotan terhadap kaum muda, pemimpin negara juga tidak lepas dari kritikan pedas baik dari kelompok muda yang masih mempuyai idealisme maupun dari tokoh masyarakat dan dari tokoh lintas agama. Mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia sudah mendekati negara gagal, akibat pemimpin negara yang tidak mandiri, lemah, tidak berdaya dalam menghadapi intervensi asing. Kondisi ini diperparah dengan perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Gugatan kritis ini hendaknya membuat kita merenung ulang dan belajar dari perjalanan sejarah masa lalu. Pemerintah tidak boleh skeptis, alergi terhadap kritikan dan gugatan yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menyikapi masalah-masalah kebangsaan. Pemerintah hendaknya bersikap arif menghindari tindakan-tindakan rekatif seperti menyerang balik tokoh lintas agama dengan tuduhan, "Tokoh agama yang bersuara lantang diidentikkan dengan burung gagak pemakan bangkai yang berbulu putih". Istilah seperti ini tentu menyakitkan dan akan memancing reaksi dari jutaan rakyat yang merasa pemimpinnya dilecehkan, yang ujung-ujungnya menimbulkan perpecahan dan kebencian terhadap pejabat pemerintah.

Sudah saatnya kita, termasuk pemerintah, mulai sadar dan mawas diri sekaligus bertanya, apakah mungkin seluruh persoalan kebangsaan dan nasionalisme dari perkumpulan etnik yang berbeda-beda *world-view*, karakter, budaya, agama, setelah mereka bersedia dan rela bergabung dalam sebuah negara

Indonesia, lantas segala persoalan bisa dianggap selesai begitu saja....? Bukankah kita seharusnya juga menyadari bahwa persatuan etnis dan teritorial yang telah berhasil dibangun di awal kemerdekaan hingga saat ini, baru hanya sebatas persatuan awal yang masih sangat simbolis sifat dan tingkat kesadaran nasionalismenya, yang tentu saja masih sangat rentan terhadap perpecahan (*fragile*).

Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis, saat ini ada beberapa gejala-gejala yang menjurus ke arah disintegrasi yang mengancam nasionalisme kebangsaan kita, di antaranya sebagai berikut :

1. Sifat kedaerahan yang berlebihan atau Primordialisme
Primordialisme adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan golongan berdasarkan identitas daerah, agama, ras, suku, atau golongannya. Secara etimologi, primordialisme berasal dari kata Latin prima atau primus yang artinya “yang utama.” Primordialisme merupakan sikap atau pandangan yang sempit karena lebih mengutamakan identitas atau kepentingan daerah, suku, atau budaya lokalnya dibandingkan dengan kepentingan umum atau bangsa. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah akibat otonomi daerah muncul raja raja kecil, dimana yang memegang posisi strategis di jajaran birokrasi adalah kelompok yang dekat dengan penguasa daerah, dan isu putra daerah non putra daerah terus menggelinding dan kadang-kadang menjadi pertimbangan pertama dalam penempatan seseorang dalam jajaran birokrasi. Kondisi ini bila tidak disikapi secara serius tentu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kebodohan dan Isolasi
Kebodohan dan isolasi atau tertutupan adalah juga faktor-faktor yang menghambat integrasi. Masyarakat yang bodoh biasanya memiliki pandangan yang sempit. Mereka mengisolasi diri dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mereka memandang dunia ini hanya terbatas pada lingkungan sosialnya. Di luar lingkungan sosial mereka adalah orang lain atau orang asing yang dipandang berbeda dengan mereka. Kondisi masyarakat seperti ini merupakan faktor penghambat integrasi karena akan sangat mudah dipecah-pecah oleh golongan yang berniat untuk mengadakan perpecahan atau disintegrasi. Contohnya aliran-aliran yang mengkafirkan kelompok lain dan menganggap kelompok mereka yang paling suci dan bersih.
3. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi
Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi adalah faktor yang menghambat integrasi. Kesenjangan sosial ekonomi, baik kesenjangan antar golongan masyarakat ataupun kesenjangan antar daerah, adalah faktor yang memperlemah integrasi. Apabila kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin ini terjadi, yang muncul adalah sikap prasangka dan kecemburuan dari golongan yang miskin terhadap yang kaya. Apabila kebetulan yang miskin dan yang kaya tersebut berasal dari etnis atau suku

- yang berbeda, isu yang muncul dimunculkan ke permukaan bukanlah masalah kesenjangan sosial-ekonominya melainkan soal etnis atau suku bangsa.
4. Perlakuan negara yang diskriminatif terhadap rakyat.
Kebijakan Negara terhadap daerah sering di luar batas kepatutan, daerah yang sumber daya alamnya melimpah dan sebagai penopang APBN tertinggi bagi Negara Republik Indonesia, justru kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Contoh kongkritnya adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Negara setiap tahunnya menerima royalti dari PT Neymon Nusa Tenggara (perusahaan pengelola tambang emas terbesar di Indonesia) sebesar Rp5,89 triliun. Dari jumlah itu, pemda Propinsi Nusa Tenggara Barat hanya menerima 4,57% atau sekitar Rp260 miliar. Dana 260 miliar ini didistribusikan kembali ke 10 kabupaten kota yang ada di propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga praktis kabupaten Sumbawa Barat selaku kabupaten penghasil hanya memperoleh dana bagi hasil sekitar 65 miliar. Yang lebih menyakitkan lagi ketika pembahasan Dana Alokasi Umum di Departemen Keuangan RI, Kabupaten Sumbawa Barat justru mendapat alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) terkecil jika dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, termasuk daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Alasan yang diberikan pemerintah pusat sangat-sangat tidak logis dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Sumbawa Barat, ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Pemerintah beranggapan bahwa dana alokasi umum yang diberikan memang relatif kecil karena dana yang diberikan dikurangi besaran dana royalti yang diberikan oleh negara kepada daerah penghasil. Kondisi ini juga terjadi di Kalimantan, Papua, Riau, dan beberapa daerah penghasil sumber daya alam lainnya di Indonesia.
 5. Kebijakan ekonomi negara neoliberalisme.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin negara dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis terutama di bidang ekonomi tidak pernah lepas dari intervensi asing terutama regulasi pemerintah di bidang perdagangan dan pertambangan. Sering dengan semakin cerdasnya masyarakat, suara-suara kritis sudah mulai muncul ke permukaan. Contoh yang paling sederhana adalah masyarakat dan pemerintah Kab. Sumbawa Barat. Mereka sudah mulai bersuara lantang mempertanyakan manfaat perusahaan tambang emas-tembaga yang mengeksploitasi alamnya melalui konsersium PT Neymon Nusa Tenggara, yang sebagian besar sahamnya dimiliki asing. Keberadaan perusahaan raksasa ini ternyata tidak membawa efek buat masyarakat, baik di sekitar tambang maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat hanya dijadikan tumbal sekaligus menjadi penonton ketika alamnya dieksploitasi. Masyarakat sekitar tambang kondisinya tetap miskin, sementara para bule berambut pirang berpesta pora menghambur-hamburkan dolar, pejabat-pejabat pusat yang kecipratan hidup bermewah-mewah.

Pemerintah pusat dibuat tidak berdaya dan takluk di dalam kungkungan asing. Masyarakat yang mulai gerah dengan tindakan kaum imperialisme ini, ternyata dibenturkan dengan preman-preman berambut cepak yang seharusnya melindungi rakyat. Bila hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil masyarakat Sumbawa Barat mengikuti jejak saudara-saudaranya yang ada di Papua, Aceh, dll.

Penutup

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Meskipun sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif

Untuk mencegah agar masalah disintegrasi bangsa tidak terus meluas dan mencegah terjadinya nasionalisme semu, dibutuhkan kreatifitas pemerintah dalam mengelaborasi secara dinamis melalui pendekatan-pendekatan *cross-culture understanding and accommodating*, nasionalisme haruslah didasarkan pada kesediaan dan hubungan timbal-balik, saling menghargai dan sikap-sikap ramah penuh persaudaraan dan berkeadilan. Semua itu merupakan materi, esensi, substansi dan metodologi yang dibutuhkan dalam mengisi tuntutan cita-cita kebangsaan dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial-kemanusiaan, yang perlu terus digali secara kreatif dari semboyan berbangsa dan bernegara kita: bhinneka tunggal ika.

Daftar Pustaka

- Adam, Asviwarman. 2007. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2002. *Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta: UNY.
- Amin, SM. 1967. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahm, B. 1969. *Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Frances Gouda. 2002. *Indonesia Merdeka karena Amerika*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Hans Kohn. 1965. *Nationalism: Its Meaning and History*. New York: D Van Nostrand Company.
- Hatta, Moh. 1974. *Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945*. Jakarta: Yaperna.
- Kahin, G.McT. (1963). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press
- Koentjaraningrat. (1964). *Tokoh-tokoh Antropologi*. Universitas Indonesia Press.
- _____ (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta Press.
- March Block. (1961). *Social Society*. Chicago: University of Chicago.
- Musa As'yari dalam Sarbini (2005). *Islam Tepian Revolusi; Idiologi Pemikiran dan gerakan*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Rukiyati. (2008) *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : UNY Press.
- Slamet Mulyana. (1986). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekarno. (1960). *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, Jakarta PP dan K.
- Sam Winwburg. (2006). *Berfikir Historis : Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa lalu*, Terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklef, M.C. (1993). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wineburg. (2006) *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wawan Tunggul Alam (2003), *Demi Bangsaaku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkarnain. (2009). *Jurnal Istoria Vol.7.No.1.09.(2009)*, Yogyakarta: Pendidikan Sejarah.
- Ihza Mahendra, dalam [http//setneg.go.id](http://setneg.go.id), diakses tanggal 24 Oktober 2011.

MERAIH BERKAH BUKAN RUPIAH (Kepemimpinan Profetik Transformatif Pondok)

H. Haikal

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: h_haikal2005@yahoo.com

Abstrak

Dengan aneka SDA, sumber daya alam, yang melimpah, makin mantapnya Pancasila, sebagai ideologi negara, dan pengalaman sejarah sudah sepantasnya cita-cita prok-lamasi diwujudkan. Yang terjadi kebalikannya, keadaan tetap memprihatinkan walau hampir tujuh dekade setelah merdeka perjalanan bangsa ini makin jauh dari cita-cita proklamasi. Tujuan kita berbangsa dan bernegara yang susah payah dirumuskan dan telah diperjuangkan para bapak bangsa, pelan tapi pasti, mulai dikhianati. Apalagi sejak awal dalam pidato Trisaksi Bung Karno menekankan Indonesia harus tampil dan berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Dalam kenyataan yang ada membuat sebagian rakyat mengusap air mata duka. Mengapa?

“Segala investasi yang dilaksanakan pada perkembangan dan pendidikan SDM, sumber daya manusia, yang terampil tanpa kita sadari telah dihancurkan secara sistematis dan statusnya kembali seperti kemampuan bangsa Indonesia 60 tahun lalu,” menurut Mantan Presiden BJ. Habibie pada acara Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17, pada Agustus 2012. Bahkan keadaan yang sebenarnya lebih memprihatinkan karena makin banyak tawuran, pelecehan perempuan oleh supir angkota, oleh orang tua, bahkan oleh oknum kepolisian, dan oleh para pendidik bahkan oleh wakil kepala sekolah. Sebagian peristiwa ini justru terjadi di ibukota Jakarta. Tampaknya lama bangsa ini mengabaikan *nation and character building* karena tiada pemimpin yang profetik transformatif. Pemimpin yang melayani, bukan sejenis penguasa yang mengejar hak tetapi mengabaikan bahkan melupakan kewajiban. Dalam keadaan serba memprihatinkan ini, sebaliknya pondok melakukan terobosan yang mengagumkan sehingga pakar pendidikan dari Universitas Parahiyangan, yang mengibarkan budaya Katholik, Dr. Hoofstede SJ memuji pondok yang mampu tampil sebagai *self community development*. Pondok sebagai lembaga pendidikan yang menekankan *tut wuri hangiseni*, para pendidik harus memberi isi akhlak

mulia, sebagai landasan awal pemimpin yang bermakna, yang mengedepankan meraih berkah bukan sekedar mengejar rupiah.

Kata Kunci: *berkah, pemimpin, pondok, profetik dan transformatif*

Pendahuluan

A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on. (John F. Kennedy)

Kiprah atau dinamika bangsa ini dinilai beragam pihak, baik dari mereka yang berada di jajaran atas apalagi rakyat kebanyakan, dalam keadaan yang serba memprihatinkan. Hal agak sama juga diakui pihak luar. Apabila ada penilaian menggembarakan dan bahkan rela, atau mungkin terpaksa, memberikan aneka pujian serta “mau” menyematkan bintang, karena ada beragam tujuan yang biasanya disembunyikan.

Indonesia di bawah tekanan negara adidaya telah membuatnya tak berdaya, karena wujud apa yang dikenal dengan krisis keteladanan pemimpin. Yang berkuasa benar-benar tak bermakna karena terbawa arus globalisasi yang membuat negeri ini makin terbelit korupsi. Lebih-lebih lagi Indonesia tidak hanya terseret arus globalisasi, tetapi juga arus gombalisasi. Menyedihkan lagi, karena terbukti Indonesia seakan-akan tak mampu berbuat semestinya saat ‘berhadapan’ dengan Singapura, negeri tetangga, seperti tersaji dalam beberapa kalimat berikut:

Singapura hingga kini masih menjadi surga bagi para pelaku korupsi di negeri (Indonesia) ini untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum. Selain itu negara kecil di ujung selatan Malaysia dan dapat ditempuh hanya 15 menit – dengan kapal laut – dari Batam itu menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati dan menyembunyikan uang haram hasil korupsi. Pemerintah Indonesia bak macan ompong yang hanya bisa ganas dalam mengeluarkan suara, tetapi tidak bertaring untuk memaksa negeri mungil itu memulangkan para koruptor serta segala aset yang dicuri ke tanah air.¹

Sebagai awal kajian ini sepantasnya dimulai dengan sabda Rasulullah berkaitan dengan pendidikan karakter, mudahnya dikenal sebagai akhlaqul karimah atau akhlak mulia, sesuai dengan sabda beliau: *Innama buistu liutamima makarimal akhlak* (Sesungguhnya, aku diutus [ke dunia ini] untuk menyempurnakan akhlak mulia). Hanya saja kenyataan yang ada penuh dengan serba keprihatinan berkaitan dengan akhlak, moral, atau pendidikan karakter. Salah satu sebab utamanya adanya beragam kesenjangan, dan bagi kalangan muda memudahkan lahirnya serba tawuran, kekisruhan serta sejenisnya. Salah satu contohnya tersaji dalam alinea berikut.

Kesenjangan atau tawuran ternyata merupakan suatu kenyataan yang membawa kematian. Kematian Alawy Yusianto Putra, 15 tahun, pelajar kelas X

¹ “Negara Besar Yang Mudah Ditaklukkan”, *Media Indonesia*, Senin 1 Okt. 2012, (Raja Eben Lubis/P3), p. 25.

SMA 6 Jakarta yang jadi korban tawuran dengan SMA 70 meninggalkan duka yang mendalam. Putra pasangan Tauri-Hesti ini dikebumikan pada Selasa, 25 September 2012 di Pemakaman Umum Poncol, Ciledug, Kota Tangerang. Wali kelas X, Besti Dwihari, mengatakan Alawy jago dalam pelajaran fisika. Bahkan, sebelum ajal menjemputnya, dia meraih angka tertinggi dalam ulangan fisika di sekolah. "Dia mendapat nilai 100," kata Besti dengan mata berkaca-kaca di rumah duka. Kemudian Besti melanjutkan ceritanya bahwa dia mengenal muridnya itu sebagai anak yang gemar bercanda. Berkat kehadiran Alawy, suasana kelas pelajaran fisika yang dianggap "momok" itu menjadi cair dan penuh tawa. Suasana cair membawa serba kemeriahan di kalangan para siswa, sehingga mereka mudah belajar dan cepat menangkap ilmu yang disajikan para guru. Sayang tokoh yang membawa kegembiraan kemudian menjadi korban pembunuhan akibat tawuran antar siswa.² Tampaknya serba kenyataan sejenis ini tak pernah atau sekurang-kurangnya sulit terjadi di pondok karena serba kekhasannya. Untuk itu mari kita lihat *kiprah* pondok.

Kiprah Pondok

Pondok atau pesantren atau pondok pesantren yang biasa digabungkan sebagai ponpes, adalah lembaga pendidikan yang biasa dipandang sebelah mata, terabaikan dan diberi beragam label negatif. Ponpes seperti madrasah serta aneka hal yang berkaitan dengan Islam selalunya dipojokkan. Anggapan ini tergambar dari sajian seorang alumnus pondok, yang karyanya berkaitan pondok cukup memukau dan berulang kali dicetak ulang. Bahkan sempat dibuat skenario serta ditampilkan di layar lebar dan banyak peminat yang sama menontonnya. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji lukisan berikut ini:

"Aku ingin kuliah di UI, ITB dan terus ke Jerman seperti Pak Habibie. Kala itu aku menganggap Habibie adalah seperti profesi tersendiri. Aku ingin menjadi orang yang mengerti teori-teori ilmu modern, bukan hanya ilmu *figh* dan ilmu hadits. Aku ingin suaraku didengar di depan civitas akademika, atau dewan gubernur atau rapat manajer, bukan hanya ceramah di mimbar surau di kampungku. Bagaimana mungkin aku bisa menggapai berbagai cita-cita besarku ini kalau aku masuk madrasah lagi?"³

Seandainya cita-cita A. Fuadi untuk masuk Sekolah Menengah Atas, SMA, dan dilanjutkan kuliah di Institut Tehnologi Bandung, ITB, terkabul, bisakah dia menjadi Habibie? Andaikan Fuadi menjadi alumnus ITB, mungkinkah dia lebih dikenal dibandingkan masa sekarang setelah dia digembleng dan lulus dari Pondok Madani, atau tepatnya Pondok Modern Gontor, PMG. Sudah sewajarnya apabila pesantren seakan menjadi telaga yang mampu dan masih menawarkan aneka kebeningan air kearifan untuk membenahi kembali moralitas

² <http://id.berita.yahoo.com/alawy-pelajar-sma-6-korban-tawuran-dikenal-cerdas-071910817.html>, diunduh Selasa 2 April 2013.

³ Ahmad Fuadi (2009), *Negeri 5 Menara*, Jakarta:Gramedia pp. 8-9.

dan akhlak mulia. Dalam suasana yang serba memprihatinkan berkait dengan serba kemerosotan moral, pondok telah mampu melakukan aneka terobosan. Banyak pendekar kearifan yang dihasilkan dari lumbung pesantren dan siap berjuang menegakkan nilai-nilai moral.⁴

Akhlak, bentuk jamak dari *khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, yang saat sekarang dipopulerkan sebagai karakter. Terasa sekali makna akhlak dalam kiprah umat Islam, bahkan akhlak menjadi dasar atau fondasi utama setelah kalimat tauhid dan syahadatin. Terasa makin pentingnya akhlak juga tersaji dalam salah satu ayat S. al Qalam, berikut ini. "Dan sesungguhnya engkau (ya Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur" (Q.S. al Qalam (68): 4). Lebih terasa lagi maknanya, karena ayat ini makin dikukuhkan dengan salah satu hadits berikut ini: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti (H.R. Ahmad).⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, peran karakter terasa sekali maknanya, apalagi sepanjang kiprah kaum wanita, di mana dan kapan saja. Untuk lebih jelasnya tampak dari biografi atau riwayat hidup para pejuang bangsa. Ada yang bisa melanjutkan tradisi bermakna ini, walau lebih banyak yang melupakannya. Secara tidak langsung juga terekam dari sajian berikut ini, walau banyak yang sama meragukan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji kutipan ini:

. . . si utusan khusus itu bilang sebenarnya mereka mengerti penolakan Megawati. Tetapi kemudian dia melanjutkan bahwa Ba'asyir perlu diserahkan. Kalau tidak akan terjadi sesuatu dalam pertemuan APEC. Kelihatannya itu seperti ancaman halus. Megawati menjawab, hanya ada satu cara untuk menyerahkan Ba'asyir, yaitu jika terjadi sesuatu sehingga opini masyarakat berbalik menentanginya. Mega mengatakan itu dengan tenang. Saya juga heran, dia memang bisa tegas, tapi dengan tetap kalem.⁶

Berkait dengan moral biasa mampu bertahan saat hidup dalam suasana keprihatinan, hanya benteng pertahanan ini mudah runtuh saat berkuasa apalagi dianggap mewakili rakyat seperti tersaji dalam berbagai tingkah beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Salah seorang di antara mereka mampu berbicara setelah terkena tular, atau *ngunduh wohing pakarti*. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji pengakuan berikut ini. "Tidak keruan Mas, seperti duit setan (sebanyak 500 juta) dimakan iblis."⁷ Kenyataan ini membuat sebagian rakyat telah mencipta beragam anekdot, lelucon, karena para anggota tersebut yang seharusnya memperjuangkan perbaikan hidup rakyat kebanyakan justru menjadi pene-

⁴ Mansur (2004), *Moralitas Pesantren Mereguk Kearifan dari Telaga Kehidupan*, Yogya: Safiria Insania Press, p. v.

⁵ Djasuri, "Pengajaran Akhlak", dalam *Metodologi Pengajaran Agama*, Yogya: Pustaka Pelajar, pp. 109-10.

⁶ "Frederick B. Burks: Saya Bukan Pengkhianat", *Tempo*, 23 Januari 2005, p. 94.

⁷ Nyanyian Agus Condro setelah kena serba 'musibah' akibat menerima uang pelicin dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur Bank Indonesia, BI, dengan pemberinya Nunung Nurbaiti. (Lihat Wahyu Dyatmi-ka *et. al.* (2008), "Mencari Hulu 'Rasuah' itu, *Tempo*, 7 September, p. 27).

rima suap, sehingga dibuat guyonan DPR sebagai Dewan Penyuap Rakyat atau Dewan Pemeran Rakyat serta sejenisnya.

Mudah dipahami aneka kekhasan yang terjadi telah menjadi perhatian para cendekiawan. Logisnya dengan menerima uang, segalanya jadi mudah dan meriah. Tetapi dalam kenyataan biasa tidak sejalan dengan sajian Anharudin dalam *Evolusi Manusia dalam Konsepsi Islam*. Terbukti tidak semua yang masuk akal berarti rasional, karena dalam rasio tidak terdapat unsur rasa, rasio hanya dapat menangkap sesuatu yang indrawi, sedang akal lebih dari itu, tidak hanya sekedar yang indrawi dan masih ada sesuatu yang lain.⁸ Serba kelebihan ini tampaknya kurang menjadi perhatian lembaga pendidikan umum.

Keadaan yang cukup menyedihkan ini tampaknya terus berlarut-larut dan tambah semrawut. Terbukti sampai ada kebakaran yang terjadi di lembaga pemerintahan. Kenyataan ini telah menimbulkan beragam tanggapan, marah atau tidak percaya. Menariknya ada yang serba santai seperti guyonan Lotif. A. "Bukan hanya Pemukiman padat, tapi gedung penting pemerintah aja bisa kebakaran. Apa ini azab moral buat bangsa kita sehabis banjir kemaren? Atau . . . indikasi saking panasnya politik sampe bisa ngebakar atau . . . bagian dari . . . kudeta".⁹

Untuk menyelesaikan semua kenyataan yang menyedihkan ini dicoba dengan pendidikan. Memang dengan pendidikan dapat ditanamkan aneka nilai luhur, seperti disajikan salah seorang pakar pendidikan, Noeng Muhajir¹⁰ yang menekankan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk menumbuhkan daya kreativitas anak, melestarikan nilai-nilai ilahiah dan insaniah, serta membekali anak didik dengan kemampuan yang produktif. Irama pendidikan pondok disesuaikan dengan kekhasan santri baik dengan sejenis: *bandongan* penyajian bahan yang diikuti semua santri, atau model *sorogan* yang diajarkan santri secara perseorangan.

Kepemimpinan Profetik Transformatif Pondok

Keprihatinan dan kesenjangan memberi warna pekat bagi lembaga pendidikan di Indonesia di samping aneka warna lainnya. Dana yang melimpah hanya dinikmati mereka yang berkuasa, katakanlah dinikmati mereka yang di atas dengan beragam kemudahan yang serba wah dan sulit mengucur ke bawah. Contoh mudahnya para pamong yang sedikit lega dengan adanya sertifikasi, mulai diributkan lagi dengan uji kompetensi guru dan diplesetkan sebagai uji kesabaran guru. Hal yang sejenis juga dialami dokter yang baru dilantik, dan harus membayar lagi sebesar Rp1,3 juta untuk uji kompetensi dokter. Bila benar yang bersangkutan belum kompeten, mengapa dilantik sebagai dokter. Wajah

⁸ Mansur (2004), *op. cit.*, p. 3.

⁹ Komik Lotif, "Kebakaran", *Koran Tempo*, Ahad 24 Maret, p. A 18.

¹⁰ Noeng Muhadjir (1989), *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Suatu Teori Pendidikan, Yogya: Rake Sarasen, p. 176

mengenaskan para guru, cukup mengagetkan. Apa yang telah disajikan Andrea Hirata dengan *Laskar Pelangi*. tampaknya akan berulang lagi. Lebih-lebih lagi nasib guru honor hampir tak banyak berubah, terutama sekali menimpa umumnya guru honor swasta. Semua tercermin dalam sajian aneka berita di berbagai mas media tanpa ada perubahan yang berarti bagi para guru honor tersebut. Akibatnya lahir berita ini:

Honor Tak Dibayar, 10 Guru Jadi TKW Gunakan Kapal Menuju Tawau
Senin, 28 Januari 2013 \ Larantuka, *Kompas* - Sepuluh guru honor di Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berhenti mengajar dan memilih menjadi tenaga kerja wanita secara ilegal ke Malaysia. Selama enam tahun mengajar, mereka tidak mendapat honor. Kesepuluh guru honor tersebut, lima orang mengajar di SD Inpres Demondei dan lima orang lagi di SD Watodei, Kecamatan Wotan Ulumado. Marlinda Deran (27), salah seorang guru honor, ketika dihubungi Minggu (27/1), mengatakan, dia bersama sembilan guru lain sudah tiba di Makassar dan sedang menunggu perjalanan lanjutan dengan kapal Sirimau ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. "Dari Nunukan, kami tinggal menyeberang ke Tawau, Malaysia," kata Deran yang sebelumnya mengajar di SD Inpres Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Deran mengatakan, mereka terpaksa menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ilegal karena kecewa sudah mengajar rata-rata enam tahun tetapi tak pernah mendapat honor. Ia berharap kemungkinan itulah salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).¹¹

Apa yang tersaji di pendidikan dasar, tampaknya tak banyak berbeda dengan yang terjadi di perguruan tinggi swasta (PTS). Semua ini tersaji dalam aneka media massa, seperti berita pada Ahad 17 Maret 2013. Saat ini para pengelola PTS dicemaskan dengan kasus perguruan tinggi ganda, yakni ada dua kampus yang berbeda pengelola, tetapi memiliki nama atau *brand* yang sama. Kasus kampus ganda ini diduga muncul karena verifikasi perizinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang lemah.

Kasus perguruan tinggi ganda ini dipaparkan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Edy Suandi Hamid. "Jadi, kisruh atau sengketa kesamaan nama tidak hanya terjadi pada sektor usaha. Di pendidikan tinggi juga," katanya. Pria yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengatakan bahwa salah satu kasus kampus ganda terjadi di Bali. Dia membeberkan bahwa di Pulau Dewata ada kampus yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Majapahit, di Singaraja, Bali. Nama ini dipastikan sama dengan Stikes lain di kawasan Jawa Timur. "Kasus seperti ini

¹¹ <http://cetak.kompas.com/read/2013/01/28/03260789/honor.tak.dibayar.10.guru.jadi.tkw>, diunduh pada Selasa 29 Januari 2013.

jangan sampai terjadi lagi karena jika berujung pembubaran salah satunya, bisa merugikan mahasiswa," tandasnya. Sebagai pemecahan yang nyata, Edy meminta pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud tidak asal-asalan mengeluarkan izin pendirian kampus baru. Kemdikbud diminta untuk serius mengecek apakah nama yang akan dipakai suatu kampus sudah dimiliki atau tidak oleh kampus lainnya. Menurut Edy upaya pengetatan Kemendikbud itu perlu segera dilaksanakan supaya jangan sampai mahasiswa menjadi korban. Meskipun kampus-kampus yang berpeluang mengalami nama ganda ini adalah swasta, Edy mengatakan para mahasiswanya adalah anak Indonesia juga. Mengapa yang swasta hampir selalu diperlakukan sebagai anak tiri bila dibandingkan yang negeri?

Pada mulanya belajar di perguruan tinggi cukup murah, bahkan tidak dipungut biaya kuliah. Benar-benar cukup murah segala sesuatunya, termasuk bagi para pesakit yang berobat. Bagaimana dengan studi? Biaya belajar benar-benar cukup ringan, tapi penuh persaingan serta harus datang sendiri ke Yogya bila mau mendaftar ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Seseorang harus ke Semarang apabila mau mendaftar ke Universitas Diponegoro (Undip). Saat tahun 1960-an, UGM oleh masyarakat lebih dikenal sebagai Universitas Genius Mahasiswanya karena murah tanpa biaya kuliah. Contoh mudahnya, mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada pada tahun 1963/4 hanya dikenai biaya sebanyak Rp400,00 untuk setahun tanpa dikenai biaya kuliah sepeserpun. Untuk mudahnya biaya yang dipungut dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Iuran Dewan Mahasiswa (BEM) Rp75,-
2. Uang Iuran Jajasan Universitas/Fak Rp75,-
3. Uang Iuran pelantikan (ospek) Rp150,-
4. Uang materai 3 x Rp1,- Rp3,-
5. Uang PMI Rp10,-
6. Uang ongkos administrasi, materai, dll Rp87,-

Sementara saat sekarang kuliah di UGM, dirasakan sebagian mahasiswa mencekik dan cukup membuat mahasiswanya *byayaan* untuk mencari biaya kuliahnya. Sejak Orde Baru terjadi proses pemantapan kapitalisme, dan pendidikan jadi ladang bisnis. Akhirnya, bangsa ini memakai cara berpikir Barat. Mereka asyik dengan masalah gender, Badan Hukum Pendidikan, serta sejenisnya dan utama adalah uang, dengan 'memungut' uang dari para mahasiswa untuk segala kegiatannya.¹² Bangsa Indonesia makin terpilah dengan beberapa kementerian

¹² Dikenal pula beragam modelnya, seperti program S1 dan S2 pada Sabtu-Ahad yang berlimpah para peminatnya karena umumnya mereka sudah bekerja dan punya uang melimpah sebagai pegawai swasta atau BUMD/N. (G.A. Guritno (2003), "Sarjana Akhir Pekan", *Gatra*, 20 Des., p. 21. Bahkan beberapa PTN, perguruan tinggi negeri, dan PTS mengenalkan program S3 dengan riset saja langsung menulis disertasi dan tanpa mengikuti satu macam kuliah apapun bentuknya. Tentunya dengan biaya yang mahal. Lebih menarik lagi munculnya biro konsultasi untuk membuat tugas akhir, tidak hanya skripsi, tapi juga thesis bahkan disertasi.

membuat lembaga pendidikan sendiri seperti STAN atau IPDN. Tampaknya Depdiknas tidak dapat dipercaya dengan adanya sertifikasi dan yang sejenisnya. Bangsa Indonesia makin tergantung dengan *International Monetary Fund* (IMF), sementara pendidikan makin terabaikan, sehingga membawa kejatuhan Orba. Apakah benar wujud penjajahan baru? Jelaslah telah terjadi perubahan pemerintahan dari Orba ke Orde Reformasi, tetapi kebijakan Orba dalam banyak hal masih berlanjut serta belum ada usaha sungguh-sungguh untuk mengubahnya demi kepentingan rakyat kebanyakan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan terutama keamanan.

Semua ini terjadi antara lain karena pada umumnya wanita belum begitu berperan dalam pendidikan walau dalam jumlah mereka yang terlibat makin bertambah. Tetapi semua ini hanya sekedar terpaku sisi luar saja. Seorang wanita apalagi seorang ibu, dan juga ayah, tidak menginginkan biaya pendidikan melangit akibat belitan kapitalisme karena semuanya diperhitungkan dengan serba rupiah dan mengabaikan berkah. Rupiah dengan segala bentuknya menjadi sesembahan baru sementara berkah tersisihkan karena dianggap bukan zamannya lagi.

Bukankah pada zaman penjajahan Bung Karno telah mengingatkan aneka bahaya kapitalisme? "... bangsa jang dikoenkoeng oleh kapitalisme jang terpetjah-belah di dalam kelas jang memoesoehi satoe sama lain, akan menoenjoekkan di dalam *onderwijs* (pengajaran)nja semoea perpetjah-belahan,..."¹³ Sayangnya, salah satu pesan bermakna salah seorang tokoh proklamasi ini tidak ada gemanya, atau sengaja diabaikan agar mudah terjadi aneka penyelewengan. Bagaimana dengan kaum perempuan di dunia Barat? Ada baiknya dikaji sajian berkait keadaan perempuan di dunia Barat yang disajikan cendekiawan mereka sendiri:

*Frankly, I don't think that American society has been as generous to its women as people think it has. Women are still discriminated against in most professions, and there are so many ways in which our institutions place great limitation upon their freedom. American has along way to go before it can claim to have created large numbers of truly emansipated women.*¹⁴

Apabila para pemimpin Republik Indonesia ragu berhadapan dengan para pencuri, terutama para pencuri uang negara atau koruptor, layak belajar dari sikap dan tindakan pemimpin Pondok Modern Gontor, K.H. Imam Zarkasyi. Yang dilakukan cukup tegas dan memberi malu pelakunya, hingga tak ada yang berani mengikuti jejak buruknya. Sikap bermakna Pak Zar, membuat kiprah pondok lebih bermakna dan membuat para santrinya melakukan hal-hal yang bermutu bagi kemajuan ilmu yang berterasaskan wahyu. Apa resep yang diberikan Pak

¹³ Soekarno (1965), *Dibawah Bendera Revolusi*, Djakarta: Panitia Penerbit., p. 615

¹⁴ Robert Jay Lifton (1971), *History and Human Survival*, New York: A Vintage Book, p. 258

Zar?¹⁵ Beliau merobek *syahadah* (ijazah) seorang alumnus yang akan pergi ke luar negeri karena ternyata ia membawa pulang ke rumahnya buku-buku penting milik Pondok. Beliau merobek syahadahnya dengan mengucapkan: “Kau pencuri”. Hampir tak ada reaksi apalagi gejolak yang membawa keributan, karena keberanian sikap yang sama ditunjukkan salah satu pimpinan PMG. Kiai yang mengedepankan prinsip akhlak mulia dalam kiprah hidup walau penuh beragam resiko. Semua ini tak perlu ditakuti karena ada keteladanan para ustadh dan kiai dalam serba Kenyataan hidup sehari-hari baik saat salat atau makan. Hal sejenisnya baru diamalkan beberapa puluh tahun kemudian oleh Presiden AS yang pertama berkulit berwarna dan ayah kandungnya pemeluk Islam yang cukup memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam acara makan malam ini:

Acara makan malam keluarga Obama selalu menghadirkan berbagai makanan, perilaku sopan, dan permainan bernama “mawar dan duri”. Semua anggota keluarga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, istrinya, Michelle, dan kedua anak mereka, Mallia Ann dan Natasha (Sasha), yang tahun ini berusia 11 dan 8 tahun-bergiliran menceritakan kejadian hari itu yang menyenangkan dan seperti duri-menyebalkan.¹⁶

Umumnya penduduk Indonesia beragama Islam, dan sejalan dengan firman Allah Swt, seperti tersaji dalam QS. Ali Imran [3]:110 seharusnya mereka tampil sebagai sebaik-baik umat dengan menyuruh yang ma’ruf (‘kebaikan’), mencegah yang munkar (‘kejelekan’), dan beriman kepada Tuhan seru sekalian alam. Atau lengkapnya tersaji dalam beberapa baris berikut:

رَكَانُ الْمُنْعِنُونَ وَفُورَعِ الْمَلَابِ نَوْرُمَاتِ سَانَلِلِ تَجْرُخُ أَمَّ رِي خ مَّت نُّك
هَلَلَابِ نُونِ مَّؤْتِ وَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah” (QS. Ali Imran [3]: 110)

Hanya saja antar cita dengan realita, atau harapan dengan kenyataan seringkali belum sejalan, bahkan serba menyedihkan. Walau cukup lama bangsa ini telah mampu dan merebut kemerdekaan dengan pengorbanan harta dan nyawa tetapi cita-cita proklamasi belum terjadi. Hanya semuanya seakan-akan sia-sia, tak ada artinya terutama bagi rakyat kebanyakan. Mengapa? Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa dhalim memang tidak mudah. Akibatnya dia dapat dipenjara, disiksa maupun dibunuh sebagai resiko yang harus diterima. Hanya Rasulullah Saw, telah memberi kabar gembira bagi mereka yang syahid karena tetap tegas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa dhalim.

¹⁵ K.M. Dawam Sholeh (1996), “Karakter Al-Ustadz Imam Zarkasyi dan Kebebasan Pondok Modern Gontor (Sebuah Refleksi), Amir Hamzah Wiryosukarto dkk (eds), *K.H. Imam Zarkasyi di Mata Ummat*, Ponorogo: Gontor Press, p. 855.

¹⁶ Paula Spencer (2009), “Strategi Mendidik Anak Ala Obama” *Readers Digest*, Juli, p. 71

هُرَمَ آفَ رِيَّاحِ مَامِ إِلَى إِلَاقِ لُجُرُو، بِلِ طُمِّ دَبَعِ نُبُؤِ زَمَحِ إِدَادَةِ شَلَا دِيَسِ
هَلَّتْ قَفْ هَاهُنَّو

Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berdiri di depan penguasa dhalim, dengan menyuruhnya atau melarangnya sesuai ajaran Islam, tetapi penguasa itu marah dan membunuhnya (Hadits Shahih dalam Mustadrak 'ala shahihain, imam Al Hakim No. 4884).

Dalam hadits yang lain ditegaskan:

رِيَّاحِ نَاطِلُسُ دُنْعِ قَحِ قُؤْمَلِكِ دَاهِجِ لَاصْرَفِ

Jihad yang paling afdhal adalah berkata benar di hadapan pemimpin zalim (H.R. Abu Dawud No. 4344, Ibnu Majah No. 4011, dishahihkan oleh Syaikh Al Bani).¹⁷

Serba kenyataan ini terjadi di Indonesia karena para penguasa yang tidak menjadikan Islam sebagai sandaran, undang-undang, hukum, *way of life* dan *minhajul hayah* untuk menata hidup ini, termasuk dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga kehidupan berjalan timpang, dan banyak kerusakan di sana-sini. Mengapa? Umumnya yang berkuasa lebih percaya pada serba undang-undang dan paham buatan manusia seperti komunisme, kapitalisme, liberalisme, serta sekularisme, umpamanya. Semua ini terbukti gagal total dalam menghadirkan kehidupan yang beradab, yang sesuai dengan fitrah manusia.

Dekadensi moral, bobroknya akhlak manusia, klenik, mistik, perilaku syirik, korupsi yang merajalela, pemimpin yang tidak amanah, tidak jujur, tidak tegas, dan sebagainya, itu terjadi lantaran Islam tak hadir ke tengah-tengah kita. Islam ditolak sebagai *way of life*. Seakan tempat Islam hanya di masjid, pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, dan lainnya. Tetapi Islam tak ada di bursa efek, mall, pasar, pusat-pusat pemerintahan, istana, sidang kabinet, dan sebagainya. Pantas saja kehidupan menjadi kacau.

Penutup

Semua yang disajikan ini lebih sebagai aneka contoh raja' sementara ada *khauf*, takut atau cemas, baik dengan aneka rekening gendut para perwira penegak hukum, atau terkuak pula "Rekening Gendut di Banggar." Disajikan tak ada akhlak mulia dan yang dikejar bagaimana meraih rupiah bukan berkah. Salah satu akibatnya juga terekam dalam sajian berikut.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lagi-lagi membuat kita trenyuh. PPATK menemukan aliran dana ilegal dengan nilai puluhan miliar rupiah ke rekening 10 anggota banggar. PPATK menyebut 10

¹⁷ Ibrahim Ash-Sha'igh: Berani Berkata Benar di Hadapan Penguasa Zalim <http://www.voaislam.com/muslimah/mujahid/2012/04/23/18777/ibrahim-ashshaigh-berani-berkata-benar-di-hadapan-penguasa-zalim/> diunduh Sabtu 16 Pebruari 2013. C.f. "Perintah dan Kedudukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar", *Risalah Jum'at*, Majlis Tabligh, PW Muhammadiyah DIY, p. 1.

anggota bangga terindikasi korupsi karena dana yang masuk ke rekening mereka tidak sesuai dengan postur pendapat mereka sebagai anggota dewan.¹⁸

Hal sejenis berkait dengan rekening gendut para perwira polisi, ramai disajikan oleh media massa, tv, surat kabar, dan majalah, antara lain tersaji dalam *Republika*¹⁹ dan *Tempo*²⁰. Dalam kasus Simulator Ujian SIM telah berakibat Gubernur Akademi Kepolisian non-aktif, Irjenpol Djoko Susilo dan kawan-kawannya sebagai tersangka. Djoko saat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya 196 miliar. Menariknya, PPATK telah melaporkan sejak Mei adanya rekening janggal sebesar 10 miliar.²¹ Bahkan yang cukup mengejutkan adanya sajian “Kantor Polisi Diamuk Warga”²² Dipicu tindakan polisi melepas tersangka penadah pencurian sapi, ratusan warga Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jatim, merusak kantor kepolisian setempat. Setelah diperiksa, Kapolsek Ajun Komisaris Sugianto dan Kanit Reskrimnya, Aiptu Asep, dicopot dari jabatannya, serta disel di Provost dan Kapolres Lumajang, AKBP marah besar. Serta banyak aneka kejadian lainnya, baik kapolsek yang dikeroyok rakyat karena menggerebek judi dan sejenisnya.

Serba kenyataan memprihatinkan ini perlu ditekankan pentingnya budaya meraih berkah bukan rupiah. Atau diperlukan serba keberanian belajar pada kepemimpinan profetik transformatif pondok? Siapkah kita?

¹⁸ Editorial Rekening Gendut di *Banggar Media Indonesia*, Selasa 31 Juli 2012, p. 1.

¹⁹ Lihat umpamanya Nasihin Masha (2012), “SIM, Simulator, Simsalabim, Jum’at 10 Agustus, p. 12.

²⁰ Selain sajian rekening gendut yang menghebohkan, lihat pula laporan utama *Tempo* 12 Agustus, 2012, pp.32-45 dan laporan utama *Tempo* 19 Agustus, 2012, pp.32-41.

²¹ *Koran Tempo*, Sabtu 11 Agustus 2012, p. A1

²² *Koran Tempo*, Jum’at 10 Agustus 2012, p. A9.

FIGUR PEMIMPIN TELADAN

Syakdiah

Universitas Widya Mataram

Abstrak

Sekarang ini dan ke depan Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki visi dan jiwa kepemimpinan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Pemimpin yang paling rendah resistensinya dalam masyarakat, dan yang memiliki konsistensi yaitu satunya kata dengan perbuatan, tegas dan tidak ambivalen sebagai wujud kontrak sosial dengan rakyat. Setiap zaman melahirkan kualitas pemimpinnya sendiri. Pemimpin Indonesia ke depan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkarakter pandai menjaga (*hafidzun*) hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*), maupun dalam setiap aktivitas dan perilakunya (*muraqabatullah*). Melalui *hafidzun* ini, seorang pemimpin tidak akan menjatuhkan dirinya ke dalam perilaku negatif, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia akan bekerja dengan amanah, jujur, memiliki integritas, dan komitmen terhadap kemajuan bangsa dan negara. Sifat ini hanya bisa terwujud pada diri seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) dan kecerdasan emosional (*emotional quotient*). Juga berpengetahuan (*'alimun*). Seorang pemimpin harus memiliki dan menguasai beragam disiplin ilmu untuk menunjang keberhasilan kepemimpinannya. Di antara ilmu itu seperti ilmu agama, *manajerial* dan *leadership*, ketatanegaraan, pengetahuan tentang kompleksitas problematika masyarakat, dan ilmu lainnya yang menunjang untuk kesuksesan dan keberhasilan kepemimpinannya. Dengan ilmu pengetahuan seorang pemimpin dapat memimpin secara profesional, sehingga kebijakannya akan berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya. Sifat ini hanya bisa terwujud pada seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*).

Kata Kunci : *hafidzun, hablum minallah, muraqabatullah, 'alimun, leadership*

Pendahuluan

Tahun 2014 akan menjadi tahun yang menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Rakyat Indonesia akan kembali menentukan Presiden pilihannya. Rakyat akan memilih calon yang diharapkan mampu memimpin bangsa dengan harapan akan membawa negeri ini ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik. Sebagian masyarakat bersemangat dan optimis akan terjadinya perubahan yang baik dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru. Namun sebagian lainnya merasa skeptis bahkan telah apatis dengan peluang perubahan tersebut apabila praktik demokrasi di negeri ini masih sebatas prosedural. Hal ini merupakan akibat dari krisis kepemimpinan yang berkepanjangan di Indonesia. Pemimpin yang tidak berkualitas atau bahkan tidak bermoral telah menyebabkan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (baik eksekutif : presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, maupun legislatif dan pemimpin lembaga negara lainnya). Tapi kebutuhan akan adanya perubahan tidak dapat menafikan kehadiran dan peran pemimpin yang memiliki visi dan jiwa kepemimpinan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang lebih suka banyak memberi (*giving*), bukan lebih banyak menuntut (*getting*), melayani (susah payah), bukan menikmati (senang-senang), dan memberi bukti, bukan banyak mengumbar janji saja. Pergantian pemimpin tahun 2014, maupun sesudahnya diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru di berbagai tingkatan, yang mampu membawa bangsa ini keluar dari persoalan yang semakin kompleks, salah satunya semakin kuatnya kepemimpinan bangsa, baik di tingkat nasional maupun daerah atau lokal.

Hakekat dan Definisi Kepemimpinan

Membicarakan kepemimpinan merupakan hal yang sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Indonesia menderita krisis kepemimpinan, selain krisis-krisis lainnya. Siapakah sebenarnya pemimpin itu. Pemimpin adalah diri kita sendiri, kita semua adalah pemimpin. *"Sesungguhnya keberadaan manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk menjadi pemimpin"*. Kepemimpinan sebenarnya adalah mengenai diri kita sendiri, mengenai saya dan saudara. Kepemimpinan bukan hanya urusan para penyelenggara negara, kepemimpinan adalah keseharian kita. Kepemimpinan berkaitan dengan hal-hal sederhana seperti mengantarkan anak sekolah, membacakan cerita untuk anak, membuatkan keluarga sarapan, mengisi waktu luang, membagi waktu untuk berolah raga, bekerja dan keluarga, bersilat urrahi dengan tetangga, mendengarkan keluh kesah sahabat, atau mengemudikan kendaraan di tengah kemacetan lalu lintas. Inti kepemimpinan itu ada 2, dan ini tidak bisa dibalik karena merupakan hukum alam. Tahap pertama memimpin diri sendiri, memimpin diri sendiri merupakan keharusan. Tahap kedua baru memimpin orang lain, memimpin orang lain merupakan pilihan. Kita

dapat memilih apakah akan menerima suatu jabatan atau menolaknya. Namun tidak demikian dengan memimpin diri sendiri.

Kalau kita membuka internet, akan kita jumpai ratusan definisi dan teori tentang pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin ialah seseorang yang memiliki kedudukan tertinggi dan memiliki kekuatan dalam menentukan sebuah keputusan dalam ruang lingkup dimana ia memimpin. Kepemimpinan sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan itu adalah bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, sehingga pengaruh itu yang menjadikan orang-orang yang dipimpin tadi dapat memberikan pendapat atau penilaian. Semakin baik cara seseorang mempengaruhi orang lain, maka akan semakin baik juga pemberian penilaian tentang karakter kepemimpinannya, dan hal tersebut akan berlaku juga dengan sebaliknya. Michael H. Hart dalam bukunya, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia paling berpengaruh di dunia di kalangan 100 orang manusia paling berpengaruh di dalam sejarah dunia. Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa dasar pemikirannya membuat urutan seratus tokoh yang paling berpengaruh tersebut adalah dengan melihat pengaruh dan peran tokoh-tokoh tersebut dalam perubahan peradaban manusia. Di dalam bukunya, Hart mencatumkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia saat ini. Jelas hal tersebut memiliki landasan ilmiah yang kuat, serta menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan walau banyak mengandung perdebatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketika dikaitkan antara buku karangan Michael H. Hart dengan definisi kepemimpinan di atas, maka buku ini memiliki korelasi yang kuat. Kepemimpinan adalah cara mempengaruhi orang, sedangkan buku karangan Hart adalah tentang orang yang paling berpengaruh di dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita dapat mempelajari seni mempengaruhi orang dari orang nomor satu di buku tersebut, atau secara gamblang dapat dikatakan bahwa kita dapat mempelajari tentang Kepemimpinan dari orang nomor satu di dalam buku tersebut, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. adalah pemimpin dunia yang terbesar sepanjang sejarah karena hanya dalam waktu 23 tahun (kurang dari seperempat abad), dengan korban kurang dari seribu orang. Beliau telah menghasilkan tiga karya besar yang belum pernah dicapai oleh pemimpin mana pun di seluruh dunia, sejak Nabi Adam AS. sampai sekarang. Tiga karya besar tersebut adalah pertama, Mengesakan Tuhan. Nabi Besar Muhammad SAW. telah berhasil menjadikan bangsa Arab yang semula mempercayai Tuhan sebanyak 360 (berfaham *polytheisme*) menjadi bangsa yang memiliki keyakinan tauhid mutlak atau *monotheisme* absolut. Kedua. Kesatuan ummat. Nabi Besar Muhammad SAW. telah berhasil menjadikan bangsa Arab yang semula selalu melakukan permusuhan dan peperangan antar suku dan antar kabilah, menjadi bangsa yang bersatu

padu dalam ikatan keimanan dalam naungan agama Islam. Ketiga. Kesatuan Pemerintahan. Nabi Besar Muhammad SAW. telah berhasil membimbing bangsa Arab yang selamanya belum pernah memiliki pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat, karena bangsa Arab adalah bangsa yang selalu dijajah oleh Persia dan Romawi, menjadi bangsa yang mampu mendirikan negara kesatuan yang terbentang luas mulai dari benua Afrika sampai Asia.

Kepemimpinan Profetik, yang di artikan secara tekstual sebagai kepemimpinan yang berlandaskan pada sifat-sifat kenabian, yang dalam hal ini adalah sifat-sifat yang ada pada Muhammad SAW. Kepemimpinan profetik merupakan pola kepemimpinan yang diformulasikan dari kisah yang penuh dengan hikmah ke dalam konsep ilmiah yang relevan untuk diaplikasikan di era kontemporer saat ini. Lebih sederhananya dapat didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mengambil sumber dari hikmah sejarah yang relevan dengan kondisi saat ini. Kepemimpinan bisa diartikan dengan bergerak dan berupaya memberikan arti dan mempengaruhi lingkungannya. Di sini artinya bisa diperluas menjadi kemajuan dalam pergerakan yang kita lakukan dimana kemajuan tersebut memiliki arti yang mendalam yang nantinya akan memberikan pengaruh di manapun keberadaannya. Indonesia perlu pemimpin yang memasyarakat, solutif, dan berkelanjutan. Memasyarakat, hal ini bisa diartikan dengan sifat yang bisa menyentuh seluruh elemen masyarakat. Seorang pemimpin harus memperluas pergaulan kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena memang terkadang posisi pemimpin yang berada di puncak terkesan sangat jauh dan susah dijangkau oleh masyarakat bawah, sehingga disini dibutuhkan peran aktif dari pemimpin itu untuk turun dan menyentuh semua elemen yang ia pimpin. Lalu solutif, yang dapat diartikan adalah sifat yang membawa hasil yang positif. Kepemimpinan itu harus menjadi solusi bukan masalah baru. Solusi adalah pemecahan dari sebuah masalah yang merupakan sebuah hasil positif sehingga pemimpin harus membawa atau menghasilkan suatu hal yang positif bagi orang-orang yang dipimpinya. Kemudian, berkelanjutan yang maksudnya adalah sifat yang tidak berhenti dan terus menerus. Seorang manusia yang memiliki etika yang baik dalam bertindak adalah ia yang melaksanakan suatu hal itu secara berkesinambungan atau terus menerus. Begitu juga dengan kepemimpinan, yang harus di lakukan oleh seorang pemimpin adalah bagaimana usaha dalam pencapaian visinya tetap bergerak nantinya walau pemimpinnya sudah tidak ada lagi.

Figur Pemimpin Teladan

Dalam konteks kepemimpinan, Nabi mengembangkan kepemimpinan moral dalam kehidupan politiknya, menekankan aspek moralitas (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, politik yang dijalankan Nabi berfungsi sebagai kendaraan moral dan terbukti sangat efektif. Moral yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan pemimpin adalah kemaslahatan bangsa. Tindakan pemimpin atas rakyat terikat

oleh kepentingan atau kemaslahatan umum. Jadi, pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan kelompoknya semata. Ada tiga sifat (moral) kepemimpinan Nabi SAW. Pertama, *sense of crisis*, yaitu kepekaan atas kesulitan rakyat yang ditunjukkan dengan kemampuan berempati dan simpati kepada pihak-pihak yang kurang beruntung. Berat dirasakan Nabi penderitaan orang lain. Secara kejiwaan, empati berarti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Empati dengan sendirinya mendorong simpati, yaitu dukungan, baik moral maupun material, untuk mengurangi derita orang yang mengalami kesulitan. Rasa empati diperlihatkan dengan cara kemampuan seorang pemimpin melihat dan merasakan kesulitan rakyat yang dipimpinya. Hatinya terpanggil untuk senantiasa melayani mereka yang membutuhkan pertolongan dan melakukan berbagai upaya mengangkat mereka dari jurang keterpurukan. Seorang pemimpin yang baik akan menjadikan dirinya teladan bagi siapa pun untuk melakukan hal yang sama, yaitu melayani kebutuhan rakyat. Membela kepentingan rakyat kecil bukanlah sekadar orasi politik meraih simpati publik, Nabi SAW menjadikan dirinya teladan atas apa yang diucapkannya. Di antara keberhasilan Rasulullah SAW sebagai pemimpin adalah karena ketulusan hatinya.

Kedua, *sense of achievement*, yaitu semangat yang menggebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan, amat sangat berkeinginan agar orang lain aman dan sentosa. Tugas pemimpin, antara lain, memang menumbuhkan harapan dan membuat peta jalan politik menuju cita-cita dan harapan itu. Ketiga, pengasih dan penyayang. Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah juga pengasih dan penyayang. Orang-orang beriman wajib meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu dengan mencintai dan mengasihi umat manusia. Kasih sayang (rahmah) adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang bisa berbuat baik. Kata Nabi, "Orang yang tak memiliki kasih sayang, tak bisa diharap kebaikan darinya." Tiga moral ini wajib hukumnya bagi pemimpin. Karena, tanpa ketiga moral ini, seorang pemimpin, bisa dipastikan ia tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya saja. Maka, betapa pentingnya moral pemimpin. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang sangat sopan dalam bertutur kata, jujur, tidak pernah berdusta serta luhur budi pekertinya. Hal inilah yang membuat banyak orang mengaguminya sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW dikagumi di seluruh pelosok dunia karena kepribadian beliau yang amat luar biasa. Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki kepribadian kepemimpinan yang dapat merepresentasikan nilai-nilai amanah dalam kurun waktu kepemimpinannya.

Pemimpin yang bekerja dengan amanah, jujur, memiliki integritas, dan komitmen terhadap kemajuan bangsa dan negara adalah seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) dan juga kecerdasan emosional (*emotional quotient*). Selain itu seorang pemimpin harus memiliki dan me-

nguasai beragam disiplin ilmu, sehingga kebijakan yang dibuatnya akan berorientasi pada kemaslahatan rakyat yang dipimpin. Sifat ini akan terwujud pada diri seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*). Di era kekinian konsep kepemimpinan amanah yang di terapkan Nabi baik sekali bila di terapkan melalui kebijakan-kebijakan negara. Contohnya penerapan kepemimpinan amanah dalam konsep *good governance*.

Kebijakan-kebijakan pemerintah negara seharusnya mengedepankan upaya-upaya membina kepercayaan masyarakat melalui program kegiatan optimalisasi pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program negara. Keberadaan birokrasi bersifat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. Penerapan kontrak kinerja bagi pejabat struktural di lakukan secara berjenjang untuk menjamin aparat pemerintah yang bertanggung jawab. Keterbukaan menejemen negara tercermin dalam kegiatan tender terbuka, kemudahan mendapatkan informasi pelaksanaan program-program dengan dana APBN maupun APBD, pemberian keringanan-keringanan bagi masyarakat melalui kebijakan penghapusan retribusi bagi warga kurang mampu. Sementara dalam aspek penegakan hukum, kebijakan-kebijakan kepemimpinan amanah dapat diterapkan dari kegiatan negara berupa pengupayaan peraturan negara yang bijaksana dan efektif, penyuluhan hukum terpadu pada masyarakat, pemberian dukungan kepada lembaga penegak hukum, pemberian penghargaan pada aparat dan masyarakat yang berprestasi dalam penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Dalam aspek profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan negara dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi yang harmonis dengan masyarakat, dan efisiensi belanja aparatur negara. Dan masih banyak sejumlah kebijakan kepemimpinan amanah yang bisa menyentuh kepentingan warga miskin, seperti; upaya-upaya peningkatan pelayanan pendidikan dan sekolah bermutu bagi warga miskin, pemberian beasiswa bagi siswa ekonomi lemah, peningkatan sarana kesehatan hingga ke tingkat puskesmas pembantu dan sebagainya.

Penutup

Pola kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW., dapat dijadikan rujukan yang utama dalam kehidupan umat manusia, terutama bagi yang beriman dan bertakwa, serta selalu berzikir kepada Allah SWT. Pemimpin yang *hafidzun* (yang pandai menjaga), yang mampu menjaga agamanya dengan selalu menjaga hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*), yang mampu menghadirkan Allah SWT dalam setiap aktivitas dan perilakunya (*muraqabatullah*). Melalui *hablum minallah* dan *muraqabatullah*, seorang pemimpin tidak akan menjatuhkan dirinya ke dalam perilaku negatif, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Nabi Muhammad dengan spirit religiusitas dan moralitasnya berhasil meletakkan dasar-dasar peradaban dengan membuat sebuah perjanjian yang mengatur mengenai kehidupan beragama, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini,

ikatan keadaban (*bond of civility*) ditegakkan oleh semangat universal ketuhanan untuk menegakkan sistem hukum yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Moralitas menjadi kunci penting dalam kepemimpinan yang dikembangkan oleh Nabi. Berdasarkan bukti-bukti historis, moralitas menjadi titik poros bagi pengembangan kehidupan bersama yang mampu menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika mengharapkan bangsa Indonesia mampu keluar dari krisis menuju ke arah kehidupan yang menyejahterakan, kepemimpinan yang berlandaskan kepada moralitas merupakan sebuah kebutuhan mutlak. Pada momentum pemilihan pemimpin nasional di tahun 2014 yang akan datang, kita berharap dapat tampil sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik, Insya Allah.

Referensi

- Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (Editor). 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Edisi pertama. Cetakan pertama. Penerbit Gaya Media, JIAN-UGM, MAP-UGM.
- A. Ilyas Ismail. 15 Maret 2012. *Inilah Tiga Moral Kepemimpinan Rasulullah SAW*. Hikmah, Republika Online.
- Asro Kamal Rokan. 8 Juli 2009. *Bangsa ini Memerlukan Pemimpin Ikhlas*. Resonansi, Republika.
- Bambang Purwoko. 2 April 2009. *Indonesia Mencari Pemimpin*. Kedaulatan Rakyat.
- Didit Welly Udjiyanto. 3 Februari 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Kedaulatan Rakyat.
- Didit Welly Udjiyanto. 11 Maret 2009. *Kepemimpinan Bocah Angon*. KR.
- E Kusumadmo. 20 April 2009. *Pemimpin yang Dipercaya*. Analisis. Kedaulatan Rakyat.
- H. Khairul Akmal Rangkuti. *Meneladani Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW*. [<http://akmal-muballigh.blogspot.com/2012/03/meneladani-kepemimpinan-nabi-muhammad.html>], diakses 18 Maret 2013, pukul 20.45
- Imam Nur Suharno. 24 April 2009. *Kriteria Pemimpin*. Hikmah. Republika.
- Komunitas Budaya YogyaSemesta. 5 Februari 2013. Dialog Budaya & Gelar Seni YogyaSemesta Seri-57 dengan topik : *Pancatiti Darmaning Prabu, Sumber Ajaran Kepemimpinan Bangsa*. Yogyakarta.
- Muhtadi Abdul Mun'im. 8 Juli 2009. *Memimpin dengan Hati*. Hikmah. Republika.
- Nasihin Masha. 15 Maret 2013. *Kita Belum Siap Dipimpin Orang Baik*. Resonansi. Republika Online.
- Republika. 8 Juli 2009. *Contreng Yuuk Tajuk*.
- Riyan Fajri. *Kepemimpinan Profetik (Bagian 1)*. [<http://riyanfajri.wordpress.com/2013/02/15/kepemimpinan-profetik-bagian-1/>], diakses 19 Maret 2013, pukul 20.30

- Riyan Fajri. *Kepemimpinan Profetik (Bagian 2)*. [<http://riyanfajri.wordpress.com/2013/02/16/kepemimpinan-profetik-bagian-2/>], diakses 19 Maret 2013, pukul 20.35
- Riyan Fajri. *Kepemimpinan Profetik (Bagian 3)*. [<http://riyanfajri.wordpress.com/2013/02/17/kepemimpinan-profetik-bagian-3/>], diakses 19 Maret 2013, pukul 20.40
- Riyan Fajri. *Kepemimpinan Profetik (Bagian 4)*. [<http://riyanfajri.wordpress.com/2013/02/18/kepemimpinan-profetik-bagian-4-selesai/>], diakses 19 Maret 2013, pukul 20.50
- Syamsuddin Muir. 8 Juli 2009. *Kriteria Pemimpin dalam Islam*. Republika.
- Yayat Hidayatulloh. *Model Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW*. [<http://smp3smi.wordpress.com/model-kepemimpinan-nabi-muhammad-saw/>], diakses 18 Maret 2013, pukul 20.10
- Yusuf Burhanudin. 21 Maret 2009. *Amanah Kepemimpinan*. Hikmah. Repub

PEMIMPIN GENERIK ORGANIK DI ERA MABUK DEMOKRASI

Panji Hidayat

Program Studi PGSD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Abstrak

Demokrasi melahirkan pemimpin yang ingin memimpin negeri yang indah ini, namun banyak pemimpin yang belum mempunyai jiwa kepemimpinan karena di era demokrasi ini pemimpin pemenang pemilu sangat tendensius dan kebijakannya selalu afiliatif dengan partai pengusungnya sehingga banyak sekali ironi yang menyebabkan pemerintahan ini berjalan tersendat.

Seorang pemimpin yang ideal haruslah seorang yang mempunyai kapabilitas dan profesionalitas agar dapat memimpin dengan manajemen dan sistem yang baik. Sudah begitu banyak buku manajemen dan psikologi yang ditulis oleh para ahli yang mencoba merumuskan karakteristik dari pemimpin perusahaan yang tangguh dan efektif.

Pemimpin yang negarawan atau sejati lahir dari masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas secara politik tidak harus menempuh pendidikan tinggi. Masyarakat yang cerdas secara politik bisa cukup dengan dibangun rasionalitas politiknya. Masyarakat yang cerdas politik bisa cukup dengan dibangun kesadaran politiknya. Dengan modal rasionalitas dan kesadaran politik inilah, masyarakat akan mampu memilih pemimpin sejati/negarawan. Selama proses demokrasi berlangsung yang terjadi justru pembodohan dan pendangkalan kesadaran politik masyarakat. Elite politik mengajarkan masyarakat dengan politik uang, mendidik masyarakat dengan pragmatisme dan oportunisme, mengajarkan masyarakat berperilaku korup dan bertindak amoral, membangun politik *divide et impera* varian baru. Dari itulah saatnya dimunculkan pemimpin generik organik untuk mengatasi bangsa yang sedang krisis kepemimpinan ini.

Kata kunci: *Pemimpin, generik, organik, demokrasi, dan politik*

Pendahuluan

Demokrasi banyak melahirkan para pemimpin yang ingin memimpin negeri yang kita cintai ini, namun banyak pemimpin yang belum mempunyai jiwa kepemimpinan karena di era demokrasi ini pemimpin pemenang pemilu sangat tendensius dan kebijakannya selalu afiliatif dengan partai pengusungnya sehingga banyak sekali ironi yang menyebabkan pemerintahan ini berjalan tersendat. Padahal pemimpin diangkat oleh penduduknya untuk mengemban rasa keadilan umum. Dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan pada pesta akbar lima tahunan ini menyebabkan pemimpin partai politik ingin sekali mengembalikan biaya yang digunakan saat pesta demokrasi tersebut. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan sistem pemerintahan hanya sekadar mengembalikan modal dan mencari keuntungan, sehingga janji-janji politik terabaikan malahan sudah lupa akan janji politik tersebut.

Dalam situasi kehidupan demokrasi yang carut marut, minusnya kepemimpinan negarawan, maraknya politik transaksional, dan matinya etika politik. Rakyat akhirnya harus pandai memilih pemimpin yang diharapkan. Mereka memilih para pemimpin berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan *track record*nya. Suara rakyat yang gampang dibeli atau ditukar dengan sembako dan uang recehan, karena mereka sangat tertindas dari segi ekonomi atau mungkin karena budaya fakir telah membudaya bangsa ini. Rakyat masih menjadi pemilih tradisional, yang memilih pemimpin karena faktor kekerabatan, ikatan emosional, citra politik dan politik uang.

Inilah saat era pencerahan politik yang didambakan pada tahun 2014 nanti. Sebuah tahapan historis politik yang melahirkan politik akal sehat. Sebuah periode sejarah yang melahirkan pemimpin sejati dan negarawan. Bangsa dan negara pun bisa berkembang serta maju. Masyarakat bisa hidup tenang, sejahtera dan damai. Lantas, memulai atau membangun era pencerahan politik tersebut bagaimana? Untuk memulai dan membangun era pencerahan politik tersebut, tidak ada jalan lain kecuali seluruh unsur *civil society*, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendidik/akademisi dan media massa, secara total melakukan pendidikan politik dan penyadaran politik pada masyarakat. Demokrasi bangsa tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika kualitas pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat rendah. Begitu pun, demokrasi bangsa tidak akan bisa melahirkan negarawan atau pemimpin sejati kalau masyarakat tidak punya kecerdasan politik.

Pemimpin Generik Organik

Pemimpin (Kartini Kartono: 2005) adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di bidang tertentu sehingga diharapkan mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai konsepsi dari suatu

tujuan. Dalam bahasa yang mudah di pahami, kepemimpinan adalah pengaruh. Jadi siapapun yang mempunyai kemampuan mempengaruhi, maka dia sesungguhnya adalah pemimpin, baik pengaruh itu dalam sebuah organisasi formal, maupun pengaruh itu diaplikasikan dalam sebuah kelompok non formal.

Seorang pemimpin yang ideal haruslah seorang yang mempunyai kapabilitas dan profesionalitas agar dapat memimpin dengan manajemen dan sistem yang baik. Sudah begitu banyak buku manajemen dan psikologi yang ditulis oleh para ahli yang mencoba merumuskan karakteristik dari pemimpin perusahaan yang tangguh dan efektif. Dua buku yang paling populer membahas tentang ini adalah *The 7 Habits of Highly Effective Person* (Stephen R Covey : 1989) dan *Managing People is like Herding Cats* (Warren Bennis : 1997)

Stogdill (1974) yang merupakan salah satu ahli yang banyak meneliti dalam bidang kepemimpinan menyatakan dalam bukunya *Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research* bahwa definisi kepemimpinan yang ada hampir sama dengan jumlah orang yang mendefinisikannya. Ia sendiri dalam buku yang sama mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau tindakan untuk mempengaruhi aktivitas suatu kelompok organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Locke (1997) sebagaimana dirangkum oleh Th. Agung M. Harsiwi (2003) menjelaskan kepemimpinan mencakup tiga elemen berikut.

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*relational concept*). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain (para pengikut). Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan para pengikut mereka.
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Seperti telah diobservasi oleh John Gardner (1986-1988) kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, namun sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin.
3. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan visi.

Kesuksesan pemimpin negeri ini haruslah memiliki beberapa modal sebagai bekalnya. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Di Indonesia banyak yang ingin menjadi pemimpin tetapi hanya sedikit yang memiliki jiwa seorang pemimpin. Seseorang yang ingin menjadi pemimpin, tetapi apabila tidak memiliki jiwa kepemimpinan akan sulit menjalankan kepemimpinan

tersebut. Pemimpin itu harus inspiratif, memiliki antusiasme tinggi untuk merealisasikan ide, sabar, ikhlas, patriotik atau perwira dan tentu saja memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk komunitas yang dipimpinnya. Kedua, seorang pemimpin adalah orang yang mampu mengayomi bawahannya. Akan tetapi dalam praktik di realita kehidupan sehari-hari, ternyata tidak semua orang bisa dimanage dengan baik. Sebagai seorang pemimpin harus mampu menghadapi perilaku bawahan apapun sikap-sikap, karakter, watak yang dimilikinya. Mencintai orang yang mencintainya mudah, tetapi tidak mudah bagi siapapun mencintai orang yang sulit diatur dan bahkan memusuhinya. Ketiga, sebagai seorang pemimpin harus mengetahui siapa dan akan dibawa ke mana komunitas yang dipimpinnya.

Rakyat Indonesia masih muda dan dewasa dengan metode demokrasi secara langsung. Pendidikan politik mereka masih tergolong rendah untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesadaran politik mereka pun belum terlalu cukup untuk memilih calon pemimpin sejati atau negarawan. Maka tidak mengherankan kalau proses demokrasi saat ini belum melahirkan pemimpin sejati dan negarawan.

Pemimpin yang negarawan atau sejati lahir dari masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas secara politik tidak harus menempuh pendidikan tinggi. Masyarakat yang cerdas secara politik bisa cukup dengan dibangun rasionalitas politiknya. Masyarakat yang cerdas politik bisa cukup dengan dibangun kesadaran politiknya. Dengan modal rasionalitas dan kesadaran politik inilah, masyarakat akan mampu memilih pemimpin sejati/negarawan. Selama proses demokrasi berlangsung yang terjadi justru pembodohan dan pendangkalan kesadaran politik masyarakat. Elite politik mengajarkan masyarakat dengan politik uang, mendidik masyarakat dengan pragmatisme dan oportunisme, mengajarkan masyarakat berperilaku korup dan bertindak amoral, membangun politik *divide et impera* varian baru.

Indonesia saat ini mengalami krisis kepemimpinan maka diperlukanlah pemimpin **generik organik** untuk bangsa besar ini. Makna generik adalah makna konseptual yang luas, umum, yang mencakup beberapa makna konseptual yang khusus atau sempit. Kalau ini dikaitkan dengan pemimpin adalah mereka yang mempunyai visi jangka pendek dan jangka panjang untuk kepentingan bangsa dengan melihat. Kepemimpinan generik bukanlah pemimpin yang berasal dari kekerabatan nasab politis tetapi ini lahir dari seseorang yang mampu mengubah dirinya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain dan rela mengorbankan segalanya bagi kepentingan bangsa. Pemimpin ini cenderung sederhana yang dikenal masyarakat karena shidiq, amanah, tabliq, dan fathonah tanpa ada kecenderungan pada partai tertentu. Meskipun independen tapi pemimpin yang generik mempunyai kharisma yang khas dibandingkan dengan yang lain dan telah teruji dalam masyarakat yang ampuh memberikan terapi kepemimpinan bagi bangsa yang mulai bangkit. Apakah sudah ada pemimpin generik

yang demikian, tentunya belum muncul dan pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan pemimpin yang generik? Jawabnya adalah dari pendidikan dari keluarga yang handal. Kriteria pemimpin generik adalah sebagai berikut.

1. *Life Span Development*: Pemimpin harus menganggap seluruh hidupnya sebagai rangkaian dari proses pembelajaran yang tiada henti untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuannya.
2. *Servant Oriented*: Seorang pemimpin yang baik mempunyai misi bukan karir, di mana keberhasilan adalah dapat melayani masyarakat, karena dasar yang melandasinya kepemimpinan adalah kesediaan untuk memikul beban orang lain. Seberapa besar nilai-nilai pelayanan dan sikap positif mendasari para anggotanya akan terbaca dalam konteks hubungan yang terjalin. Dalam hal inilah pemimpin menjadi suatu model bagi para anggotanya. Bagaimana ia bersikap terhadap orang lain, tidak hanya sekadar sebagai pimpinan yang memberi perintah tetapi yang terpenting adalah kemampuannya untuk menjalin secara harmonis dengan tidak hanya mengandalkan rasio semata tetapi mampu menempatkan emosi pada tempat yang semestinya (Crosby, 1996).
3. *Illuminated Positive Energy*: Energi positif yang dipancarkan akan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa menjadi *personal magnetism* yang dapat menggali informasi dari bawahannya secara langsung dan tidak tersembunyi serta menerima uneg-uneg masyarakatnya.
4. *Balancing Life*: Pemimpin efektif merupakan personal yang seimbang, *ghuluw*, mampu menguasai diri, bijak, tidak gila kerja dan menjadi budak rencana-rencana sendiri.
5. *Dilligent and Polite Man*: Sikap ini ditunjukkan dengan sikap mau mengakui kesalahan dan melihat keberhasilan sebagai hal yang berjalan berdampingan dengan kegagalan.
6. *Open Minded*: Pemimpin yang mampu dan mau melihat hidup sebagai sesuatu yang baru akan memiliki kehendak, inisiatif, kreatif, dinamis, dan cerdas.
7. *Loyal and Respecfull*: Mampu memegang teguh prinsip dan tidak mudah dipengaruhi, namun untuk hal harus dikompromikan dapat bersifat luwes.
8. *Sinergetic*: Menjadi katalis perubahan, sehingga setiap situasi yang dimasukinya selalu diupayakan menjadi lebih baik karena selalu produktif dalam cara-cara baru dan kreatif.
9. *Establised Personality*: Pemimpin harus bersedia secara teratur melatih empat dimensi kepribadian manusia, yaitu fisik, mental, emosi, dan spiritual untuk memperbarui diri secara bertahap.
10. *Open Critical and Feedback*: Mengembangkan sumber-sumber umpan balik yang bervariasi dan berharga mengenai perilaku dan kinerja mereka. Pemimpin yang efektif cenderung memiliki gaya yang terbuka terhadap kritik tidak hanya sensitif tetapi juga responsif.

Sedangkan pemimpin yang organik adalah pemimpin asli daerah yang mengembangkan *endogenous knowledge* yang mampu mengembangkan dirinya melihat perubahan yang sangat kompleks bukan karena melihat demokrasi dari negara lain tetapi memiliki cara yang lain yang senantiasa tidak menghambur-hamburkan uang rakyat demi pesta demokrasi sesaat (melihat dari budaya masyarakat setempat). Pemimpin organik adalah orang yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Memaknai kepemimpinan sebagai amanah dan bukan sebuah kendaraan: Tugas utamanya adalah membentuk iklim yang lebih baik dan berpengharapan.
2. Mengelola kepemimpinan formal dengan gaya informal: Memimpin dengan gaya informal dan jauh dari kekakuan sesungguhnya lebih efektif membentuk iklim keterbukaan. Gaya informal lebih meminimalisir jarak. Gaya informal lebih memudahkan pemimpin mendapatkan peta realitas yang obyektif dan sekaligus bisa mengukur rasionalitas dan efektivitas pengambilan sebuah keputusan.
3. Mau diangkat menjadi pemimpin berbasis kesadaran: Artinya, tumbuhnya sikap-sikap kepemimpinan pada dirinya lahir dari proses perjuangan panjang yang dilaluinya dengan ikhlas dan tabah. Semua dia lakukan demi ketercapaian visi yang luas, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain.
4. Mempunyai Kualitas diri: Menjadi seorang pemimpin berarti harus mempunyai kualitas diri yang baik, dan kepribadian yang baik. Untuk mendapatkan ini, seorang pemimpin perlu banyak mendengarkan pendapat orang lain, dan banyak belajar dari melihat masyarakat di sekitarnya.
5. Mempunyai Integritas: Integritas akan memberikan kekuatan pada kata-kata dan tindakan seorang pemimpin. Dan sebaiknya seorang pemimpin menggunakan mata hati, bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan, dan gunakan hati agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
6. Mempunyai kepedulian dan pandai berterima kasih: Memberikan *reward* kepada mereka yang berprestasi dan banyak menolong, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih, hari ini, besok, dan kemudian.
7. Belajar mencintai. Ingat pepatah dari Kahlil Gibran, bekerja adalah cinta yang mengejawantahkan. Rasa cinta penting dalam segala hal, termasuk dalam memimpin, bekerja, dan lain-lain.

Penutup

Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia tetapi juga oleh Allah, Sang Maha Pencipta. Pemimpin yang diharapkan bukanlah pemimpin *superpower* tetapi masyarakatlah yang menciptakan pemimpinnya sendiri yaitu pemimpin generik organik yang mau diangkat menjadi pemimpin karena nurani yang ingin membuat negara berubah tanpa tendensi maupun afiliasi hukum dan tanpa mengadopsi demokrasi yang sudah

dipraktikkan negara lain. Pemimpin generik organik digali dari *endogenous knowledge* yang ingin merubah nasibnya menjadi negara yang *Baladun tayyibatun warabbun ghafur* yang dicita-citakan di saat negara-negara dimabuk demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Bennis, Warren. 1997. *Managing People is like Herding Cats*. South Provo: Executive Excellence Publishing.
- Covey, Stephen R. 1989. *The 7 Habits of Highly Effective Person*. New York : Simon & Schuster.
- Crosby, P. 1996. *The Absolutes of Leadership*. San Francisco : Jossey-Bass Publisher
- Stogdill, R.M. 1974. *Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research*. New York : The Free Press.

MEMBANGUN KELUARGA SEBAGAI MADRASAH UNTUK PENGEMBLENGAN CALON PEMIMPIN BERKARAKTER PROFETIK

Muawanah Zulaikhah
Madrasah Aliyah Negeri Tempel Sleman

Abstrak

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dimana individu-individu calon pemimpin dibesarkan, oleh karena itu *shibghoh* keluarga akan dimanifestasikan dalam diri calon pemimpin. Pemimpin merupakan aktor penting dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin menuju negeri yang *baldatun toyyibatun warobbun ghafur*, sehingga karakter kepemimpinan seorang pemimpin sangat menentukan bagaimana dan ke arah mana perjalanan roda kehidupan. Tulisan singkat ini mencoba menguraikan bagaimana karakteristik pemimpin berkarakter profetik, peran keluarga dalam menggembleng calon pemimpin, dan memposisikan keluarga sebagai madrasah bagin calon pemimpin.

Karakter profetik pemimpin merupakan manifestasi dari sifat wajib bagi rasul, yakni *siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah (STAF)* dalam kehidupan kekinian dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat intelektual yang lebih familiar dengan teori-teori sosial Barat. Dengan mencoba mentransformasikan STAF ke dalam diskursus kepemimpinan kontemporer, diharapkan karakter tersebut dapat memberikan warna dan termanifestasikan dalam perikehidupan pemimpin saat ini yang sedang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Karakter pemimpin sesungguhnya terbentuk oleh pribadi (bakat), dan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan matra lingkungan yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter. Oleh karena itu, amat penting untuk membangun keluarga yang dapat berfungsi sebagai madrasah bagi individu calon pemimpin agar memiliki karakter STAF.

Kata kunci: *karakter pemimpin, STAF, keluarga, madrasah*

Pendahuluan

Maraknya berbagai fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini, dari pemimpin pada level terendah sampai level tertinggi, menandakan bahwa para pemimpin belum memiliki misi pengabdian (ibadah) sebagai *kholifah fil ardl* di muka bumi dalam rangka mencapai negeri yang sejahtera, penuh kedamaian, dan penuh keridhoan Tuhan atau dalam bahasa agamanya, sebagai negeri *baldatun thoyyibatun warobbun ghafur*. Fenomena korupsi yang semakin hari semakin memprihatinkan, kepintaran para pemimpin alih-alih digunakan untuk menyusun strategi bagaimana menyejahterakan rakyat, tetapi justru digunakan untuk membuat strategi korupsi yang semakin canggih modusnya. Para pemimpin partai politik dengan berbagai siasat tipu muslihatnya, berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan rakyat tetapi hanya menggunakan rakyat *bancikan* untuk kendaraan politiknya, apa yang dikatakan para pemimpin amat jauh kontradiktif dengan apa yang dilakukannya.

Para pemimpin yang tampil di panggung politik negeri ini telah gagal menyejahterakan masyarakat, rakyat sebagai pemilik negeri yang memiliki berbagai macam sumberdaya alam yang melimpah terpaksa harus menanggung harga listrik terus menerus naik, iklim usaha yang tidak menenangkan karena harga BBM yang selalu terancam kenaikan, harga komoditi pertanian yang tidak stabil, rakyat yang kekurangan gizi karena harga ikan di negeri yang sebagian besar wilayah laut ternyata sangat mahal, dan lain-lain. Para pemimpin negeri ini telah gagal karena menurut UNDP dalam Human Development Report 2013, dinyatakan bahwa pada tahun 2012 indeks sumberdaya manusia (HDI) berada pada urutan ke 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,629, hampir sama dengan Viet Nam negeri yang belum lama damai, yakni dengan skor 0,617.

Tidak jarang pula, para pemimpin kita menjadi pembebek atas apa yang dimaui oleh negara lain. Praktik privatisasi BUMN, pengelolaan sumberdaya-sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, merupakan tindakan naif yang mempertontonkan ketidakcerdasan para pemimpin. Fakta-fakta tersebut mempertontokan bahwa para pemimpin di negeri ini belum memiliki persyaratan sebagai pemimpin yang berkarakter khalifah, yang merupakan pewaris para nabi (profet), yang tentu memiliki sifat profetik.

Pemimpin Berkarakter Profetik

Istilah profetik penulis artikan sebagai “bersifat kenabian”. Berdasarkan tafsir tersebut maka dalam konteks diskursus kepemimpinan, pemimpin yang berkarakter profetik berarti pemimpin yang memiliki karakter STAF (*shiddiq, tabligh, amanah, dan fathanah*). Syamsul Balda (2013) membuat padanan kata karakter tersebut, yakni: (1) *Shiddiq* (selalu berkata dan bersikap jujur dan benar) sehingga ia dapat dipercaya, *Tabligh* (*accountable* dan *auditable*) mampu berkomunikasi dan bernegosiasi, *amanah* (*credible* dan *capable*) dalam menjalankan tugas-

nya, *fathanah* (*smart* dan *visioner*) dalam menyusun perencanaan, visi, misi, strategi, dan mampu mengimplementasikannya.

Fakta yang penulis uraikan pada bagian pendahuluan menunjukkan bahwa para pemimpin belum memiliki sifat STAF. Seandainya para pemimpin memiliki sifat STAF pasti mereka tidak bohong, selalu konsisten, tidak berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipraktikkan, merupakan cermin dari sifat *siddiq*, yang berarti pula tidak munafik. Pemimpin tidak korupsi, karena korupsi merupakan manifestasi dari sifat khianat (lawan dari sifat amanah). Para pemimpin juga semestinya menepati janji-janjinya, apalagi saat kampanye banyak para calon anggota legislator mengumbar janji demi untuk meraih jabatan, tetapi saat jabatan telah diraih mereka mengingkari janji-janjinya. Kesemua sifat tersebut merupakan manifestasi dari sifat munafik, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi bahwa tanda orang munafik itu ada tiga, jika berkata ia berdasuta, jika berjanji ia tidak menepati, dan jika dipercaya ia berkhianat (HR. Mutaffaun alaih). Kata Nabi: akan datang suatu zaman dimana orang menganggap amanah sebagai jarahan (HR. Turmuzi dari Abu Hurairah r.a).

Pemimpin berkarakter profetik bukanlah sesuatu yang mustahil, persoalannya adalah ketika sistem bernegara yang dipraktikkan saat ini dimana model rekrutmen pemimpin ditentukan oleh proses politik oleh partai politik maka akan sangat sulit diperoleh pemimpin profetik. Orang-orang yang berkarakter profetik tetapi tidak aktif dalam partai politik akan sangat sulit untuk menempati posisi sebagai pemimpin, sebaliknya para bromocoroh yang berkarakter munafik tetapi aktif dalam kegiatan partai politik akan lebih mudah untuk menempati kursi kepemimpinan. Untuk dapat melahirkan pemimpin yang memiliki sifat STAF, perlu ada perubahan pola rekrutmen calon pemimpin dan membenahi pendidikan (di semua lini) sehingga menghasilkan lebih banyak orang-orang yang memiliki kapabilitas sebagai pemimpin yang berkarakter profetik.

Peran Keluarga

Keluarga merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai tugas seperti umumnya sistem sosial lainnya, yakni menjalankan tugas-tugas, pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga. Keluarga mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran dan struktur organisasi yang jelas (Megawangi, 1999). Menurut Levi sebagaimana dikutip Megawangi (1999), keluarga sebagai suatu sistem dapat berfungsi apabila memenuhi persyaratan struktural sebagai berikut: *pertama*, ada diferensiasi peran dimana masing-masing anggota keluarga harus mempunyai alokasi peran. *Kedua*, alokasi solidaritas: distribusi relasi antaranggota keluarga menurut cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan. Cinta atau kepuasan menggambarkan hubungan antar anggota. Kekuatan mengacu pada keutamaan sebuah relasi relatif terhadap relasi lainnya. Intensitas adalah kedalaman relasi antaranggota menurut kadar cinta, kepedulian, ataupun ketakutan. *Ketiga*, alokasi ekonomi: distri-

busi barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Diferensiasi tugas juga ada dalam hal ini, terutama dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi dari barang dan jasa dalam keluarga. *Keempat*, alokasi politik: distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggungjawab atas setiap tindakan keluarga. Agar keluarga dapat berfungsi maka distribusi kekuasaan pada tingkat tertentu diperlukan. *Kelima*, alokasi integritas dan ekspresi, yakni distribusi teknik/cara untuk sosialisasi, internalisasi, dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntutan norma yang berlaku untuk setiap anggota keluarga.

Berangkat dari persyaratan tersebut, mungkin banyak diantara keluarga yang tidak memenuhi syarat seideal sebagaimana disebutkan di atas. Dewasa ini peran pendidikan keluarga makin berkurang, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan di masyarakat untuk sedini mungkin memasukkan anak-anak ke pendidikan formal, waktu tempuh pendidikan menjadi lebih lama, sehingga untuk menghasilkan lulusan yang dewasa dan mandiri perlu biaya dan waktu yang banyak, ironisnya justru kedewasaan fisiologis generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan yang menjadi lebih cepat daripada kedewasaan intelektual dan sosial-ekonomi yang sebenarnya lebih penting.

Berbagai alasan muncul dari para orang tua yang sibuk bekerja, sibuk mengaktualisasikan dirinya di masyarakat tetapi tidak sibuk mengurus anggota keluarganya (anak-anak). Tidak jarang orang tua yang lebih suka pada *full day school* dan menyerahkan segala sesuatunya pada sekolah, lembaga bimbingan, dan teman-temannya. Keluarga yang memperlakukan anaknya seperti itu biasanya keluarga mengalami disorganisasi. Bentuk disorganisasi lain, misalnya unit keluarga tidak lengkap, kurang komunikasi antar anggota, krisis keluarga, putusnya perkawinan orang tua (Soekanto, 1989). Akibatnya fungsi kontrol keluarga lemah dan tidak salah bila anak kemudian mengalami berbagai masalah yang berujung pada kehancuran masa depannya. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan informal dalam hal ini tidak berfungsi. Padahal apa yang diperoleh di sekolah hanyalah sebagian saja dari aspek kehidupan ini. Sekolah lebih banyak berorientasi pada pendidikan dalam aspek-aspek yang terukur (*Bloomean oriented*).

Keharmonisan sebuah keluarga sebagai organisasi dalam suatu sistem sosial sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Keluarga merupakan taman pendidikan pertama, terpenting, dan terdekat yang bisa dinikmati oleh anak (Gunaryadi, 2004). Optimalisasi fungsi pendidikan dapat diharapkan dari keluarga yang harmonis, meskipun dari keharmonisan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan usaha orang tua yang sungguh-sungguh, tetapi paling tidak ini dapat menjadi sebuah modal awal untuk proses penyadaran bagi keluarga untuk berperan secara aktif mutualistik dengan pelaku pendidikan lainnya. Penyadaran terhadap keluarga ini diperlukan mengingat bahwa ada diantara orang tua yang belum memiliki atensi terhadap proses pendidikan yang sedang dijalankan anak-anaknya.

Sekolah sebagai sebuah wadah pendidikan bagi calon pemimpin bukanlah institusi yang mampu melakukan segala-galanya, dari aspek ilmu pengetahuan, etika, seni, agama, dan setumpuk tugas lainnya. Hal ini tidak mungkin dilakukan mengingat keterbatasan waktu anak didik di sekolah. Untuk itu perlu ada pemilahan wilayah atau peta peran. Pendidikan di sekolah lebih memfokuskan diri pada pembentukan nalar intelektual dan keterampilan motoris (Danim, 2003). Sementara keluarga dan masyarakat berperan menanamkan nilai-nilai moral, etika, agama, dan aspek-aspek praktis yang ada pada masyarakat. Sayangnya, peran keluarga saat ini telah mengalami penurunan. Menurunnya atau berkurangnya peran dan fungsi keluarga merupakan akibat dari modernisasi (Megawangi, 1999).

Kesibukan masing-masing anggota keluarga (bapak dan ibu) telah menelantarkan anak. Bapak sibuk dengan pekerjaannya, sementara sang ibu yang kini telah termakan oleh faham feminisme liberal banyak yang bekerja di sektor publik sehingga banyak anak yang kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Pendidikan anak banyak diserahkan kepada pembantu atau tempat penitipan anak, ini menunjukkan ketidaknormalan fungsi keluarga. Menurut penelitian Vogell dan Bell (*dalam* Megawangi, 1999), keluarga yang tidak berfungsi normal akan menyebabkan munculnya anak-anak bermasalah. Di Barat sendiri, sebagai negara asal gerakan feminisme muncul gerakan *back to family* dengan misi memperkuat institusi keluarga untuk membangun masyarakat madani (*civil society*).

Sebagian masyarakat tidak begitu risau ketika anaknya tidak memperoleh pendidikan keagamaan yang proporsional, tetapi jika anaknya belum memperoleh pendidikan di sekolah, orang tua akan mati-matian mencarikannya. Bahkan banyak di antaranya, demi memperoleh pendidikan dari sekolah yang dianggapnya *bonafide*, orang tua rela membiarkan *aqidah* anaknya terancam, dengan membiarkan anaknya memasuki sekolah yang mempunyai misi berlawanan secara diametral dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ini berarti orang tua tidak bertanggung jawab terhadap masa depan akhirat anaknya, hanya karena khawatir terhadap masa depan dunianya. Semestinya orang tua yang memiliki keimanan dari agama manapun tidak akan rela hal itu terjadi. Inilah salah satu karakter orang tua yang terbawa arus budaya materialis tanpa landasan keyakinan kokoh (Bambang Syaeful Hadi dan Iffah Nurhayati, 2002).

Untuk langkah perbaikan diperlukan waktu yang cukup lama, karena hal ini berkaitan dengan perubahan filosofis makna keluarga yang saat ini telah tereduksi oleh berbagai paham yang berkembang di dunia. Untuk mengambil peran secara signifikan dalam pendidikan keluarga, maka keharmonisan sebuah keluarga amat diperlukan. Keluarga mempunyai nilai strategis dalam pendidikan, dengan wilayah pendidikan yang mungkin tidak tersentuh oleh pendidikan di sekolah. Keluarga dapat memberikan pendidikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat secara kontekstual dan praktis. Ukuran keberhasilan pendidikan

dalam keluarga bukan angka prestasi, tetapi kedewasaan secara sosial dan kemampuan untuk hidup bersama (*to life together*). Keluarga juga berperan penting dalam mendorong anak untuk berprestasi di sekolah. Pemberian pujian dan hukuman, harapan dan ancaman, dan kasih sayang dari keluarga merupakan bentuk perhatian yang dapat menggugah anak untuk berprestasi.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari suatu proses pendidikan diperlukan dialog dan kesepakatan antara pihak sekolah dengan keluarga. Laporan berkala dan pelibatan orang tua sebagai bentuk partisipasi keluarga dalam proses pendidikan anak di sekolah akan memberikan nuansa yang bermakna bagi anak didik bahkan bagi para gurunya. Harmonisasi peran antara keluarga dan sekolah mutlak diperlukan, bila kita ingin bersungguh-sungguh melakukan perbaikan pendidikan (Bambang Syaeful Hadi, 2006).

Keluarga Sebagai Madrasah

Kajian-kajian empiris menunjukkan bahwa peranan keluarga berkorelasi positif dan signifikan dengan prestasi belajar anak. Sebuah studi yang dilakukan Slameto (2002) di SD Laboratorium UKSW Salatiga, mendukung preposisi tersebut. Fungsi keluarga menempati posisi sentral dalam pendidikan karena di keluarga sebagian besar waktu siswa dihabiskan. Orang tua merupakan figur utama dan pertama dilihat dan ditiru oleh anak-anak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang kurang lebih menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), akan menjadi muslim, nasrani, atau majusi tergantung pendidikan orang tuanya. Menurut Idris dan Jamal (1992), peranan orang tua dalam mendidik anak sebagai calon pemimpin adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan watak, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dan disiplin. Untuk melaksanakan peran tersebut berarti orang tua harus berusaha menjadikan rumah sebagai *madrasah*.

Madrasah dalam keseharian disinonimkan dengan sekolah, tetapi sebenarnya lebih dari itu karena di dalam madrasah juga ditanamkan tata cara bermasyarakat secara aktual, pengajaran agama, dan akhlak melalui kontrol, teladan dan praktik langsung. Sejalan dengan modernitas, kecenderungan orang tua saat ini adalah menyerahkan pendidikan anak secara penuh kepada sekolah. Sekolah memang berperan sebagai *in loco parentis* atau mengambil peran orang tua, tetapi institusi sekolah tidak dapat mengambil semua peran orang tua dalam mendidik anak. Yang terjadi adalah orang tua sibuk bekerja dengan anggapan yang penting kebutuhan materi anak tercukupi, pagi sampai siang sekolah dan sorenya les/ikut bimbingan belajar, sehingga interaksi anak dengan orang tua sangat sedikit. Rumah hanya menjadi tempat berkumpul setelah masing-masing anggota keluarga sibuk dengan aktivitasnya. Bahkan tidak sedikit keluarga yang dirundung masalah, keluarga pecah, inharmonis, kebiasaan selingkuh, dan

terlalu sibuk dengan urusan materi. Menurut Gunaryadi (2004), keluarga yang demikian akan menghasilkan individu-individu yang bersikap dan berperilaku masa bodoh, kurang empati, tidak memiliki kepedulian terhadap hak orang lain, egois dan kasar.

Untuk mengoptimalkan fungsi keluarga dalam pendidikan, terlebih dahulu lembaga keluarga harus dibangun, dibina, dan dipelihara agar terjadi suasana harmonis. Dalam perspektif spiritual, target keluarga harmonis adalah menjadikan rumah sebagai surga (*baiti jannati*), dimana rumah dapat menjadi penyejuk dan penenang jiwa. Dalam suasana demikian, pendidikan anak akan dapat berjalan dengan baik.

Penutup

Pemimpin berkarakter profetik merupakan harapan semua pihak agar harapan untuk terwujudnya kehidupan yang harmonis, bahagia, sejahtera dalam kerangka negara yang *baladun thoyyibatun wa robbun ghafur*. Untuk itu setiap elemen masyarakat, khususnya keluarga sebagai satuan terkecil dalam sistem kemasyarakatan mempunyai peran strategis untuk menempa anak-anak sebagai calon pemimpin masa depan. Tidak mudah memang untuk menjadikan keluarga sebagai arena pendidikan akhlak, mengingat saat ini begitu banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga menyerahkan secara total pendidikan anaknya pada orang lain (lembaga pendidikan). Untuk itu perlu ada revolusi kesadaran bagi para orang tua untuk menjadikan rumah-rumah sebagai madrasah peradaban, madrasah yang dapat menempa anak-anak sebagai calon pemimpin masa depan agar memiliki karakter profetik.

Pola rekrutmen pemimpin yang saat ini lebih banyak melalui mekanisme politik, hendaknya perlu diubah agar dapat memberikan ruang kepada orang-orang yang memiliki sifat STAF untuk menjadi pemimpin. Kapankah negeri ini dipimpin oleh orang yang memiliki karakter profetik (STAF)? Sebuah kerinduan bersama, yang harus diupayakan secara bersama-sama, dengan menyingkirkan egosime sektarian politik, menyingkirkan ambisi-ambisi pribadi, menyingkirkan segala bentuk kezaliman. Hal yang lebih penting lagi adalah meniatkan segala perilaku kepemimpinan sebagai bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Ilaahi Robbi.

Daftar Pustaka

- Bambang Saeful Hadi dan Iffah Nurhayati, 2002. Hegemoni Budaya Industri Dalam Dunia Pendidikan Kontemporer. *Cakrawala Pendidikan*. Edisi November 2002.
- Bambang Syaeful Hadi, 2006. Harmonisasi Peran Pelaku Pendidikan Sebagai Upaya Untuk Optimalisasi Fungsi Pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*. Edisi November 2006.
- Danim, Sudarwan, 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Mebiarkan berbeda : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Jakarta : Penerbit Mizan
- Syamsul Balda, 2013. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam. Diperoleh dari [www.tnol.co.id/ kolom-komunitas/19572](http://www.tnol.co.id/kolom-komunitas/19572). Diakses tanggal 8 Mei 2013.
- UNDP, 2013. *Explanatory Note on Human Development Report 2013 Composite Indices*.

*) Penulis adalah guru PKn Madrasah Aliyah Negeri Tempel Sleman, alumni Jurusan PPKn FISE UNY, saat ini tinggal di Kompleks Taman Siswa Jatirejo, Sendangadi, Mlati Sleman

**SUBTEMA:
PERAN PENDIDIKAN DALAM
MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN
NASIONAL PROFETIK
TRANSFORMATIF**

STRATEGI MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN PROFETIK TRANSFORMATIF MELALUI PENDIDIKAN DEMOKRASI MENUJU *CIVIL SOCIETY*

Ali Imron

Program Studi Sosiologi, FIS, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: imron8@yahoo.co.id atau aimron8883@gmail.com.

Abstrak

Pertumbuhan demokratisasi pada negara-negara maju berdampak signifikan pada munculnya semangat demokrasi pada negara-negara berkembang. Motivasi demokrasi pada masa gelombang ketiga demokrasi ini membawa perubahan pada aspek kehidupan masyarakat, baik pada level makro, *middle range*, maupun mikro. Pada level makro, terjadi perubahan pada sistem sosial, terutama paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan mulai bergeser dari sistem pendidikan humanisme ke arah pendidikan bercorak kapitalis liberalis yang cenderung dehumanis. Pada level *middle range*, terjadi perubahan mendasar dalam konteks interaksi sosial yang justru mengikis solidaritas dan integrasi sosial. Sedangkan dalam level mikro, perubahan-perubahan sosial yang terjadi memunculkan individu-individu yang amoral dan semakin meninggalkan nilai-nilai profetik. Perubahan tersebut semakin amat terasa ketika dihadapkan pada model kepemimpinan yang saat ini lebih mengutamakan pada kekuasaan dan melupakan dimensi-dimensi moral dan spiritual. Nilai-nilai utama demokrasi yang menjunjung tinggi humanisme sosial mulai ditinggalkan dan kepentingan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan akan partisipasi sosial dan kesejahteraan sosial semakin dikesampingkan, sehingga cita-cita luhur demokrasi dalam mengkonstruksi *civil society* (masyarakat madani) menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam bentuk pendidikan demokrasi sebagai upaya mengkonstruksi kepemimpinan profetik transformatif dalam ruang *civil society*. Model pendidikan demokrasi yang dimaksud menitikberatkan pada upaya membangun jiwa kepemimpinan yang dilandasi nilai-nilai profetik dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Kata Kunci : *kepemimpinan, profetik transformatif, pendidikan demokrasi, civil society*

Pendahuluan

Pertumbuhan demokratisasi pada negara-negara maju berdampak signifikan pada munculnya semangat demokrasi pada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang seolah tergiring pada spirit demokrasi yang mengagungkan pada kebebasan sipil dan kesejahteraan sosial. Motivasi demokrasi pada masa gelombang ketiga demokrasi ini membawa perubahan pada aspek kehidupan masyarakat, baik pada level makro, *middle range*, maupun mikro. Pada level makro, terjadi perubahan pada sistem sosial, terutama paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan mulai bergeser dari sistem pendidikan humanisme ke arah pendidikan bercorak kapitalis liberalis yang cenderung dehumanis. Pola pendidikan keluarga sudah mulai berubah pada pola pendidikan industrial sebagai konsekuensi dari globalisasi dan modernisasi. Peran vital orangtua sebagai aktor yang utama dan pertama pada sosialisasi nilai dan norma moral sebagai esensi dari pendidikan, saat ini sudah mulai tergantikan oleh konstruksi pendidikan modern yang justru menanggalkan aspek moralitas karena mendewakan keunggulan kognitif. Pada level *middle range*, terjadi perubahan mendasar dalam konteks interaksi sosial yang justru mengikis solidaritas dan integrasi sosial. Komunitas-komunitas lokal yang berjuang untuk merevitalisasi nilai-nilai kultural yang *indigeneous* harus tergerus oleh gesekan roda-roda globalisasi yang mengunggulkan nilai-nilai kapital. Solidaritas dan integrasi sosial yang dibangun berdasarkan modal-modal sosial sudah mulai tergantikan oleh modal-modal ekonomi.

Sedangkan dalam level mikro, perubahan-perubahan sosial yang terjadi memunculkan individu-individu yang amoral dan semakin meninggalkan nilai-nilai profetik. Nilai-nilai moral yang awalnya terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga justru berbalik arah dan berubah menjadi sangat liberalis. Aspek penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain sudah tidak lagi tampak dan seolah tenggelam dalam hiruk pikuk modernitas. Perubahan-perubahan dari berbagai level tersebut semakin amat terasa ketika pendidikan ala globalisasi dan modernisasi justru memunculkan model kepemimpinan yang lebih mengutamakan pada dimensi kekuasaan dan melupakan aspek-aspek moral dan spiritual. Nilai-nilai utama demokrasi yang menjunjung tinggi humanisme sosial mulai ditinggalkan dan kepentingan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan akan partisipasi sosial dan kesejahteraan sosial semakin dikesampingkan, sehingga cita-cita luhur demokrasi dalam mengkonstruksi *civil society* (masyarakat madani) menjadi terhambat.

Pada artikel ini akan mengkaji tentang berbagai problem melemahnya nilai-nilai profetik dalam usahanya untuk mengkonstruksi pola kepemimpinan yang profetik dan transformatif. Pada penjelasan berikutnya beberapa konsep ilmuwan sosial tentang nilai-nilai profetik, bangunan demokrasi, dan perwujudan *civil society*. Pada bagian akhir akan ditawarkan solusi konkret dalam menjawab permasalahan tersebut.

Gurita Globalisasi dan Lemahnya Nilai-nilai Profetik

Globalisasi sebagai pintu utama masuknya kolonialisasi dengan menguasai pondasi kehidupan manusia melalui lintas batas bangsa meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, ideologi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya, serta agama. Sebagai sebuah proses, globalisasi melakukan transformasi nilai-nilai yang bergandengan dengan kapitalisme untuk memperkuat dominasi kapital. Penumpukan asset-asset kapital oleh globalisasi dan modernisasi menjadikan pondasi sistem atau struktur berubah total. Sebagai contoh bangunan struktur ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia misalnya, yang dahulu dibangun dengan susah payah oleh pendiri bangsa dengan pondasi nilai-nilai Pancasila yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun seiring dengan kran globalisasi dan modernisasi, pondasi itu rapuh dan tergantikan oleh peran modal asing dalam bentuk privatisasi dan komersialisasi.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada bidang ideologi dan politik. Ideologi Pancasila yang dipakai sebagai dasar berpijak dalam menjalankan roda perpolitikan di Indonesia juga sudah beralih pada ideologi kapitalis liberalis dengan orientasi utama adalah profit politik. Kondisi ini akan berdampak pada munculnya penyimpangan-penyimpangan politik, seperti Korupsi Kolusi, dan Nepotisme; praktik politik uang; premanisme politik; dan kartelisasi politik. Praktik deviasi ini justru menghasilkan pemimpin yang bertipe korup, arogan, *group centris*, bahkan “menindas” rakyatnya sendiri.

Aspek sosial, budaya, dan agama juga tidak jauh berbeda. Nilai-nilai tradisi dan kultural yang bersumber pada kearifan lokal sudah tidak lagi menggema. Nilai-nilai yang fundamental tersebut saat ini justru mengekor pada arus kuasa globalisasi (Giddens, 2009: 10). Nilai-nilai profetik yang bersumber dari nilai fundamen agama juga tidak lagi berfungsi efektif. Nilai-nilai tersebut justru dijadikan sebagai klaim penguasa atau kelompok dominan melalui wacana dan narasi representasi semu (Spivak, 1990: 20). Demokrasi yang memiliki nilai-nilai esensial untuk memenuhi hak-hak sipil justru berubah memiliki makna bahkan dimaknai sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Kepemimpinan Profetik dalam Perspektif Kuntowijoyo

Kepemimpinan profetik yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai kenabian yang tertulis di Al Qur'an. Kuntowijoyo (1993: 45), menyatakan bahwa kepemimpinan profetik membawa misi humanisasi, liberalisasi dan transendensi. *Pertama*, misi humanisasi, yaitu mengajak pada kebaikan (*ta'muruna bil ma'ruf*). *Kedua*, Misi liberalisasi yang membebaskan manusia dari belenggu keterpurukan dan penindasan (*tanhauna anil munkar*). *Ketiga*, misi transendensi sebagai manifestasi dari misi humanisasi dan liberasi, yaitu kesadaran ilahiyah yang mampu menggerakkan hati dan bersikap ikhlas terhadap segala yang telah dilakukan (*tu'minuna billah*). Tugas pemimpin profetik, *pertama*, membaca

dengan dibarengi pada penguasaan konsep, teori dan paradigma dasar. *Kedua*, purifikasi, yaitu penyucian pikiran dan perasaan dari muatan-muatan negatif. *Ketiga*, pengajaran, dilakukan dengan penguasaan epistemologi dan metodologi, serta mengajarkan ilmu pengetahuan. *Keempat*, penguasaan informasi dan masalah-masalah baru yang dinamis.

Kuntowijoyo (2007: 50), juga menyampaikan kriteria utama kesuksesan pemimpin yang berjiwa profetik. Kriteria tersebut, *pertama*, kesadaran akan peran dan fungsinya sebagai pemimpin. Untuk mencapai kriteria tersebut, pemimpin haruslah mempunyai visi dan misi yang kuat sehingga pemimpin akan memiliki legitimasi yang kokoh. *Kedua*, kepemimpinan dalam hal ilmu, dimana seorang pemimpin haruslah mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan mampu menjadikan dirinya memiliki kemampuan menentukan keputusan atau kebijakan. Ilmu akan mampu mencegah seorang pemimpin dari tindakan tergesa-gesa, sikap emosional, dan tidak sabar. *Ketiga*, pemimpin harus amanah yang diukur dari kredibilitas dan integritasnya. *Keempat*, fungsi regenerasi, yaitu pemimpin harus mampu mewariskan sifat-sifat kepemimpinan profetik. Pada dasarnya pemimpin tidak terbentuk secara tiba-tiba, namun dibentuk dalam waktu dan proses yang berkelanjutan.

Pendidikan Demokrasi dan Perwujudan *Civil Society*

Demokrasi berasal dari kata “*demos*”, yang berarti rakyat, dan “*kratos*”, yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Robert Dahl (1985: 30), sebuah demokrasi idealnya mengandung unsur, (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat yang tercakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Prinsip-prinsip dalam nilai-nilai demokrasi tersebut harus dilaksanakan dan dikontrol dengan baik. Implementasi nilai-nilai demokrasi akan lebih efektif apabila dilakukan melalui media pendidikan. Oleh karena itu, bentuk pendidikan di Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi tersebut. Strategi pengimplementasian nilai-nilai demokrasi pada medium pendidikan terutama

adalah menentukan paradigma pendidikan yang tepat. Paradigma pendidikan demokrasi yang tepat adalah *education for democratic citizenship* yang akan menghasilkan warga negara yang mau dan mampu hidup berdemokrasi serta mau dan mampu memperbaiki kehidupan berdemokrasi secara terus menerus. *Kedua*, dibutuhkan kurikulum pendidikan demokrasi yang tepat, yakni Kurikulum Berbasis Karakter. *Ketiga*, cara hidup yang demokratis harus melalui sistem pendidikan dan harus dihindari cara-cara yang doktriner. *Keempat*, pendidikan demokrasi akan efektif melalui proses belajar mengajar yang member pengalaman cara hidup yang demokratis kepada peserta didik. Dengan demikian, diharapkan dengan pengalamannya akan menimbulkan kebiasaan serta loyalitas yang demokratis. *Kelima*, organisasi-organisasi pelajar, mahasiswa, pemuda merupakan laboratorium pendidikan demokrasi untuk belajar, mengalami, dan menghayati hidup yang demokratis. *Keenam*, partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran.

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam koridor pendidikan demokrasi akan berdampak positif pada perwujudan masyarakat yang madani (*civil society*). Masyarakat yang demokratis akan mencerminkan masyarakat yang menghargai pluralitas, menjamin kemandirian warga negara dan meningkatkan kapasitas politik warga negara (Tocqueville dalam Hyden, 1997: 46). Dengan demikian, hak-hak warga negara akan terjamin tanpa mengganggu hak-hak warga negara yang lain. Harmonisasi kehidupan masyarakat akan tercermin dari pemenuhan hak-hak sipil, penguatan partisipasi aktif warga negara, serta perlindungan yang sama di bidang hukum.

Pemimpin yang bercorak profetik akan selalu menjaga norma-norma demokrasi karena sudah mengalami proses pendidikan demokrasi yang efektif. Pemimpin yang berjiwa profetik akan senantiasa menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak warga negara, menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan kontrol terhadap kebijakan pemimpin, serta melindungi semua warga negara secara hukum.

Penutup

Pertumbuhan demokratisasi pada negara-negara maju berdampak signifikan pada munculnya semangat demokrasi pada negara-negara berkembang sehingga membawa perubahan pada aspek kehidupan masyarakat. Akibat perubahan tersebut, nilai-nilai utama demokrasi yang menjunjung tinggi humanisme sosial mulai ditinggalkan, nilai-nilai profetik mulai luntur dan kepentingan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan akan partisipasi sosial dan kesejahteraan sosial semakin dikesampingkan, sehingga cita-cita luhur demokrasi dalam konstruksi *civil society* menjadi terhambat. Oleh karena itu dibutuhkan penanaman nilai-nilai profetik dan nilai-nilai demokrasi secara sinergis sejak dini melalui pendidikan demokrasi. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam koridor pendidikan demokrasi akan berdampak positif untuk melahirkan pemimpin yang memiliki jiwa profetik sehingga pada akhirnya akan mampu mewujudkan *civil society*.

Daftar Pustaka

- Dahl, R. (1985). *Tentang Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Giddens, A. (2009). *Konsekuensi-konsekuensi Modernitas*, Jakarta: Gramedia.
- Hyden, G. (1997). "Civil Society, Social Capital, and Development: Dissection of a Complex Discourse", *Studies in Comparative International Development*, Vol. 32, Issue. 1.
- Kuntowijoyo. (1993). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- (2007). *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Spivak, G. (1990). *Can the Subaltern Speak*, London: Sage Publication.

INTEGRASI NILAI PROFETIK DALAM PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GENERASI PEMIMPIN PROFETIK TRANSFORMATIF

Laila Fatmawati

Pendidikan Guru Sekolah Dasar UAD Yogyakarta

Abstrak

Bangsa Indonesia sedang mengalami degradasi kepemimpinan yang makin lama makin memprihatinkan. Berbagai fenomena krisis karakter pemimpin bangsa terjadi dewasa ini, seperti kasus korupsi yang melibatkan nama tokoh-tokoh hebat tanah air, para pemimpin yang sibuk mencari istri baru, para pemimpin yang lebih fokus minimbun kekayaan pribadi dibandingkan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menjadi tamparan hebat bagi institusi pendidikan, karena para koruptor dan para pemimpin yang tidak amanah tersebut merupakan alumni dari berbagai institusi pendidikan. Institusi pendidikan dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks, tidak hanya membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan untuk siap bersaing di kancah internasional tetapi juga harus mampu membentuk karakter mulia. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan tidak semata-mata mengembangkan potensi kognitif peserta tetapi yang paling utama adalah membentuk karakter atau akhlak mulia. Untuk membentuk peserta didik yang cerdas sekaligus berakhlak mulia, dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam pendidikan, sehingga nantinya akan lahir generasi pemimpin dengan spirit profetik transformatif yang akan membawa bangsa ini menuju bangsa yang berdaulat.

Kata kunci : *nilai profetik, pendidikan, pemimpin, transformatif.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia bisa dikatakan sedang dalam kondisi “sakit”. Berbagai permasalahan sosial sedang melanda bangsa ini, mulai dari merebaknya tindak kriminal dan kekerasan hingga menghilangkan nyawa seseorang, masalah kenakalan pelajar, masalah merebaknya pengguna narkoba di kalangan generasi muda, masalah tindakan asusila yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban, serta kasus korupsi para *elite* negeri ini yang semakin merajalela. Kasus

yang lebih memprihatinkan lagi adalah degradasi kepemimpinan. Berbagai fenomena krisis karakter pemimpin bangsa terjadi dewasa ini, seperti kasus korupsi yang melibatkan nama tokoh-tokoh hebat tanah air, para pemimpin yang sibuk mencari istri baru, hingga para pemimpin yang lebih fokus menimbun kekayaan pribadi dibandingkan memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama terutama bagi institusi pendidikan karena sebagian besar dari para pelaku tindakan amoral pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah negeri ini. Krisis multidimensi ini sejatinya bersumber dari kegagalan institusi pendidikan dalam mengembangkan karakter mulia. Selama ini pendidikan di Indonesia masih menitikberatkan pada pengembangan aspek kognitif (intelektual) dan psikomotorik (keterampilan) saja, dan kurang fokus dalam mengembangkan aspek afektif atau sikap. *Output* dari institusi pendidikan hanya mencetak generasi-generasi cerdas, terampil dan hebat, namun tidak memiliki karakter mulia.

Belum terlambat untuk memperbaiki bangsa ini. Melalui pembaharuan pendidikan dengan mengedepankan karakter bangsa diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dalam intelektual, keterampilan dan akhlak/karakter mulia. Reformasi pendidikan diharapkan mampu melahirkan sosok pemimpin bangsa yang mampu mengentaskan bangsa ini dari berbagai krisis multidimensi yaitu sosok pemimpin yang profetik transformatif.

Kepemimpinan profetik transformatif adalah model kepemimpinan yang meneladani nabi dan rasul dalam memimpin umatnya. Para nabi dan rasul merupakan orang-orang pilihan yang memiliki karakter mulia sehingga sukses membangun peradaban dan karakter para pengikutnya. Nilai-nilai profetik ini meliputi *shidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), *fathanah* (cerdas), dan takwa.

Nilai-nilai profetik yang diturunkan dari sifat-sifat nabi dapat diintegrasikan melalui pendidikan. Pengintegrasian nilai-nilai profetik ini dapat secara *integrated* dengan semua pelajaran, melalui mata pelajaran khusus ataupun kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran. Hendaknya pengintegrasian nilai-nilai profetik melalui pendidikan ini diajarkan mulai dari bangku PAUD hingga perguruan tinggi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai profetik melalui pendidikan diharapkan nantinya peserta didik dibekali olah pengetahuan tentang karakter mulia para nabi dan rasul sekaligus membiasakan peserta didik untuk meneladai dan mempraktekan dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga lama-kelamaan nilai-nilai profetik ini akan mendarah daging dan menjadi karakter, dan karakter ini akan ditularkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bila semua orang sudah memiliki karakter mulia maka akan mudah mencari pemimpin bangsa yang profetik sekaligus mampu membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukan dan mampu menuntun bangsa ini menjadi bangsa berdaulat.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan

Dalam perspektif teoritik, pendidikan sering dimaknai secara beragam. Secara etimologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogie*" yang terdiri dari kata "*pais*" berarti anak dan "*again*" berarti membimbing. Jadi *paedagogie* yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak (Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, 2001: 69). Secara etimologis, pendidikan dimaknai sebagai semua usaha yang dilakukan orang dewasa untuk membimbing anak-anak.

Sementara definisi pendidikan menurut Redja Mudyahardjo (2006: 11) "pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang". Menurut Redja Mudyahardjo, pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan hanya terjadi pada saat-saat tertentu serta tidak sembarang waktu. Pendidikan dapat berbentuk pendidikan formal, informal, maupun non formal. Kegiatan pendidikan dapat berbentuk bimbingan, pengajaran, ataupun pelatihan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang tercapuk di dalam usaha pengelolaan pendidikan baik nasional maupun tingkat satuan pendidikan.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Definisi pendidikan diatas dapat dipaparkan bahwa pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sengaja melalui proses perencanaan yang matang mulai dari silabus, RPP, media pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, materi ajar. Selain itu pendidikan melibatkan perencanaan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar secara optimal serta mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Tujuan dari pendidikan tidak semata-mata hanya meningkatkan kecerdasan intelektual siswa tapi juga harus membekali peserta didik dengan kemampuan afektif dan psikomotorik yang bermanfaat bagi dirinya sendiri sebagai individu sekaligus untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Nilai-nilai Profetik

Profetik berasal dari bahasa Inggris, "*prophet*" yang berarti nabi atau "*prophetic*" yang berarti sifat yang dimiliki nabi. Nabi adalah orang-orang pilihan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT karena mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu. Nabi merupakan manusia pilihan yang istimewa karena

memiliki akhlak sangat mulia. Nabi menjadi utusan Allah SWT di bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, oleh karenanya nabi merupakan sosok manusia yang menjadi suri tauladan. Semua sifat yang dimiliki oleh nabi patut diteladani, namun di sini pembahasan akan dibatasi menjadi 5 sifat pokok yang harus dikembangkan dalam membentuk karakter mulia melalui pendidikan. Kelima sifat tersebut adalah *shidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), *fathanah* (cerdas), dan takwa.

Sifat-sifat istimewa yang dimiliki para nabi antara lain:

1. *Shiddiq* yang berarti jujur.

Semua nabi itu selalu berkata benar tidak pernah berdusta, semua yang dikatakan nabi baik itu wahyu, berita maupun peringatan adalah benar adanya. Mustahil bagi seorang nabi untuk berkata dusta karena ia tidak akan dipercaya dalam menyampaikan wahyu dan bisa menyesatkan umatnya.

Setiap muslim harus bersikap jujur dalam setiap perbuatan, menurut Marzuki (2009:165-167) bahwa jujur dapat dilihat dalam berbagai bentuk yaitu benar dalam perkataan, benar dalam pergaulan, benar dalam kemauan, benar dalam berjanji, dan benar dalam kenyataan. Benar dalam perkataan maksudnya sebagai seorang muslim hendaknya selalu berkata jujur dalam keadaan apapun karena orang yang berkata jujur akan dikasihi Allah SWT dan dipercaya oleh masyarakat. benar dalam bergaul maksudnya dalam bergaul dengan orang lain seorang muslim dilarang berbohong, menipu, berkhianat. Benar dalam kemauan maksudnya dia akan berpegang teguh pada kemauannya, tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mendukung atau menentang. Benar dalam berjanji maksudnya setiap orang harus selalu menepati janjinya, dan benar dalam kenyataan maksudnya seorang muslim harus menampakkan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya jangan membohongi publik.

Salah satu perkataan bijak yaitu bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di manapun. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat dihargai di manapun. Tidak hanya orang muslim bahkan orang non muslim pun ingin selalu menjunjung tinggi kejujuran.

2. *Amanah* yang berarti dapat dipercaya.

Setiap orang harus meneladani sifat amanah ini, artinya bila seseorang diberi kepercayaan dia harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga rahasia yang dititipkan padanya. Ketika seseorang memiliki sifat amanah maka akan dibukakan pintu rezeki untuknya, karena banyak orang yang menaruh kepercayaan memberikan tugas kepadanya. Selain itu membuat seseorang disegani dalam pergaulan bermasyarakat, disayang oleh orang-orang disekitarnya dan yang pasti akan menjadi hamba yang dikasihi Allah SWT.

Tidak mudah menjadi orang yang amanah, karena setan akan menggoda manusia dengan berbagai cara. Banyak pemimpin di Indonesia ini yang mulai tergoda oleh rayuan setan seperti menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya

untuk meraih materi sebanyak-banyaknya. Dapat kita lihat pemberitaan yang banyak *diexpose* di media massa mayoritas menampilkan masalah korupsi para elite bangsa ini karena mereka tergoda terhadap harta dan tahta, tidak bisa amanah terhadap jabatan yang dipegang dipundaknya.

3. *Tabligh* yang berarti menyampaikan.

Nabi selalu menyampaikan apa saja yang diterimanya dari Allah baik itu wahyu, berita maupun peringatan kepada umat manusia. Sifat *taghli*h bila diimplementasikan di era modern sekarang ini dapat dimanifestasikan sebagai orang yang komunikatif. Orang yang komunikatif mampu menyampaikan hal-hal positif dengan bahasa dan tutur kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Selain itu dia tidak akan menyembunyikan berita baik.

4. *Fathanah* yang berarti dapat cerdas.

Semua nabi selalu mendapatkan banyak rintangan dan masalah ketika hendak menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oleh karena itu setiap nabi pastilah orang yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi sehingga mampu menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapinya dengan bijaksana.

Di era modern seperti sekarang ini, cerdas tentu menjadi tuntutan semua orang yang tidak ingin kalah bersaing. Orang cerdas memiliki tingkat intelektual tinggi sekaligus memiliki daya kreatifitas dan inovasi yang tinggi, mampu menciptakan penemuan-penemuan baru, selain itu dia mampu menggunakan kecerdasan yang dimilikinya untuk kemaslahatan masyarakat. orang yang cerdas harus peka terhadap semua permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan semua daya yang dia miliki.

Bila diimplementasikan di dunia pendidikan, sifat cerdas ini menjadi salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan serta memfasilitasi agar semua potensi yang dimilikinya mampu berkembang optimal sehingga kelak akan bermanfaat bagi dirinya serta masyarakat. Sifat cerdas ini memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan wawasan pengetahuan, rajin belajar untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki, melek teknologi, serta adaptif terhadap perubahan zaman.

5. *Taqwa*/Takwa

“Takwa berasal dari bahasa Arab *taqwa*, yang berasal dari kata *waqa-yaqi-wiqayah* yang artinya menjaga, melindungi, atau memperbaiki” (Marzuki, 2009: 51). Secara umum takwa didefinisikan sebagai menjalankan semua perintah Allah SWT sekaligus menjauhi semua larangan-Nya. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut hanya kepada Allah SWT. Dia akan senantiasa mengingat Allah SWT dengan berusaha keras untuk selalu mematuhi semua yang diperintahkan Allah SWT sekaligus menjauhi semua yang dilarang-Nya karena rasa takut akan siksa Allah SWT yang sangat pedih. Takwa menjadi ukuran yang digunakan untuk membedakan baik buruknya seseorang di mata Allah SWT.

3. Integrasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan

Meneladani dan menjalankan nilai-nilai profetik (shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, dan taqwa) memang tidak mudah, memerlukan proses panjang dan *keistiqomahan* dalam menjalankannya. Berawal dari niat dan kecintaan kepada para nabi serta mengharap pahala dari Allah SWT adalah kunci untuk bisa sukses meneladani nilai-nilai profetik. Bila seseorang sudah mampu menerapkan kelima nilai-nilai profetik tersebut, maka akan terbentuk karakter mulia dalam dirinya.

Untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam pendidikan tentunya harus dimulai dari mengenalnya nilai-nilai profetik terlebih dahulu pada peserta didik. Pengenalan nilai-nilai profetik ini hendaknya dilakukan sejak peserta didik duduk di bangku awal sekolah. Setelah pengenalan nilai-nilai profetik ini kemudian dilanjutkan oleh keteladanan nilai-nilai profetik yang ditunjukkan oleh para pendidik, dan terakhir adalah melalui proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Metode yang dapat dilakukan dalam mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam pendidikan antara lain:

- a. Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang PAUD dan SD kelas awal. Pengenalan dan pembiasaan nilai-nilai profetik sejak peserta didik duduk di bangku awal sekolah (PAUD hingga SD kelas awal) dapat dilakukan dengan strategi berupa *story telling* (mendongeng). “Pada hakikatnya metode *story telling* sama dengan metode ceramah, tetapi guru lebih mudah berimprovisasi” (Muchlas Samani & Hariyanto, 2012: 148). Ketika menggunakan metode *story telling* guru harus mampu berimprovisasi baik melalui intonasi suara, mimik wajah, gerak tubuh, penambahan media ajar seperti menggunakan buku dongeng, boneka tangan, serta peralatan pendukung yang lain. Suasana saat *story telling* hendaknya bernuansa nyaman bagi peserta didik, peserta didik dikondisikan untuk duduk merapat di lantai dengan posisi guru ada di tengah-tengah sambil melakukan interaksi dengan peserta didik. Kegiatan *story telling* ini mengangkat cerita tentang para nabi yang berisi keteladanan sifat-sifat beliau yang jujur, amanah, komunikatif, cerdas, dan takwa. Cerita sebaiknya tidak terlalu berat bagi anak usia dini sebab mereka akan susah mencerna makna dari cerita tersebut. Metode *story telling* ini dapat dilakukan sesuai tema pembelajaran dalam minggu tersebut. Misalnya untuk tema minggu tersebut tentang “diri sendiri”, dalam satu minggu pembelajaran hanya dilakukan metode *story telling* sebanyak satu kali dengan mengangkat tema kejujuran, dilanjutkan untuk minggu berikutnya tetap mengangkat cerita tentang kejujuran sampai minggu ke-4 masih dengan tema kejujuran. Untuk anak usia dini akan lebih baik jika dongeng menceritakan tema yang sama secara berulang-ulang agar terekam di memori mereka.

Setelah pengenalan nilai-nilai profetik melalui metode *story telling*, kemudian siswa mulai dibiasakan untuk berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah, dengan bimbingan dari guru. Sebagai contoh ketika akan dan setelah selesai makan bersama harus diawali dan diakhiri dengan berdoa seperti yang dituntunkan oleh para nabi. Doa dipimpin oleh guru kemudian siswa secara bersama-sama mengikuti. Guru juga memberikan penjelasan mengapa setiap akan makan dan setelah makan harus membaca doa terlebih dahulu.

- b. Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang SD kelas akhir dan SMP/MTs.

Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang SD kelas akhir dan SMP dapat dilakukan dengan metode *group discussion*. Metode *group discussion* ini sebaiknya dipimpin oleh guru, karena usia peserta didik yang masih membutuhkan banyak bimbingan dari guru. Metode *group discussion* ini nantinya akan membahas tentang sifat-sifat keteladanan nabi. Bisa terintegrasi dalam semua mata pelajaran atau bisa dilakukan saat pelajaran agama Islam. Melalui metode ini siswa mulai diajak untuk memahami lebih dalam lagi mengenai shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, dan taqwa. Mereka bisa bertukar pendapat dengan teman satu kelompoknya untuk menggali informasi lebih dalam lagi.

- c. Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang SMA/SMK.

Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang SMA/SMK dapat dilakukan dengan metode proyek. Metode proyek ini dilakukan selama satu semester. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 7 siswa. Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat paper mengenai shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, dan taqwa. Masing-masing kelompok membahas satu nilai profetik saja. Kemudian mereka harus mencari dari berbagai sumber mengenai penerapan nilai tersebut dalam kehidupan di era global seperti sekarang dan mampu menghubungkan sifat tersebut untuk menyelesaikan berbagai kasus sosial di Indonesia saat ini. Di akhir proyek mereka harus menceritakan paper yang mereka buat dalam berbagai media contohnya dapat berupa poster, mural, komik dan lain sebagainya. Hasil karya setiap siswa ini dipajang di lingkungan sekolah agar semua siswa bisa membaca. Selain itu untuk pembiasaan penerapan nilai-nilai profetik di SMA/SMK adalah membiasakan siswa untuk dekat dengan Al Qur'an dan Mushola. Setiap pagi sekitar 10 menit sebelum pelajaran bisa dimulai dengan membaca Al Qur'an bersama, kemudian ketika sholat dzuhur dibiasakan untuk sholat berjamaah dan ketika sholat jum'at setiap siswa tiap minggunya bergantian mengisi khutbah jum'at, selain menambah pengetahuan tentang agama juga melatih keberanian siswa untuk berbicara di depan publik. Peran guru sangat besar di sini sebagai motivator sekaligus fasilitator.

- d. Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang Perguruan Tinggi. Pengintegrasian nilai-nilai profetik pada jenjang perguruan tinggi dirasa lebih mudah, karena peserta didik merupakan manusia dewasa yang sudah bisa menggunakan nalar secara maksimal sekaligus dipandang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk jenjang perguruan tinggi, peserta didik dipandang sudah mandiri. Pengintegrasian nilai-nilai profetik di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan banyak metode, salah satunya yaitu dengan membentuk forum diskusi mahasiswa berbasis blog. Setiap kelas diharapkan memiliki satu blog kelas yang isinya membahas mengenai nilai-nilai profetik. Teknisnya setiap mahasiswa secara bergantian harus menuliskan satu buah artikel setiap minggunya ke dalam blog kelas, artikel ini berisi tentang satu nilai profetik misalnya membahas tentang *tabligh*. Ketika membahas mengenai konsep *tabligh*, dia harus menghubungkan dengan suatu konsep mata kuliah tertentu dan mencari solusi untuk memecahkan salah satu problematika. Kemudian mahasiswa yang lain harus mengomentari dan mengirimkan sumbangsih saran dan kritik terhadap tulisan tersebut. Tulisan juga harus memiliki landasan hadist dan Al Qur'an yang jelas. Manfaatnya selain mahasiswa menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai profetik mereka juga mulai membiasakan mempelajari dan menafsirkan Al Qur'an dan hadist. Metode ini akan berkembang bila ada dukungan dari universitas, misalnya menyediakan sarana hotspot di lingkungan kampus. Selain itu juga ada dosen yang menjadi pamong untuk komunitas blog kelas tersebut. Diusahakan dosen tersebut adalah dosen yang memang memahami betul mengenai nilai-nilai profetik, memiliki latar belakang pendidikan untuk mampu menafsirkan Al Qur'an dan hadist secara benar. Adanya dosen pamong ini akan menjadi solusi bila ada perdebatan panjang antara mahasiswa.

PENUTUP

Pengintegrasian nilai-nilai profetik yang meliputi *shiddiq*, amanah, *tabligh*, *fathonah*, dan *taqwa* dalam pendidikan sejak peserta didik berusia dini hingga dewasa membawa banyak dampak positif. Ketika peserta didik sudah mengenal terlebih dahulu mengenai nilai-nilai profetik, kemudian mereka mampu memahami maknanya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses pembiasaan dan peneladanan, lambat laun nilai-nilai tersebut akan terinternalisasi alam diri setiap peserta didik. Mereka akan membiasakan untuk selalu jujur, amanah, komunikatif, berpikir cerdas serta berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Pembiasaan ini akan berdampak positif bagi dirinya sebagai individu sekaligus bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika pendidikan di negeri ini sudah

mampu mencetak output dengan karakter profetik tersebut, dengan sendirinya akan terlahir pemimpin-pemimpin yang berkarakter profetik. Ketika para pemimpin berkarakter profetik mulai menjamur di negeri ini maka akan dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang madani dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. (2001). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. (2009). Prinsip Dasar Akhlak Mulia. Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika Dalam Islam. Yogyakarta: Debut Wahana Press.
- Muchlas Samani dan Hariyanto. (2012). Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosadakarya Offset.
- Redja Murdyahardjo. (2006). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PENANAMAN NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN PROFETIK PENDIDIK MELALUI MATA KULIAH MANAJEMEN PENDIDIKAN

Priadi Surya

Universitas Negeri Yogyakarta

priadisurya@uny.ac.id

Abstrak

Guru sebagai pendidik berkewajiban menjadi suri teladan bagi anak didiknya. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai perguruan tinggi penyedia calon guru yang unggul menjalankan kewajiban menanamkan nilai-nilai kepemimpinan profetik kepada mahasiswanya. Salah satu wahananya adalah melalui proses kuliah, khususnya pada mata kuliah dasar kependidikan (MDK) Manajemen Pendidikan. Dalam kajian manajemen pendidikan terdapat pokok bahasan kepemimpinan pendidikan. Nilai-nilai kepemimpinan profetik pendidik dapat ditanamkan melalui pembahasan kepemimpinan pendidikan bagi semua mahasiswa kependidikan. Penanaman dilakukan dengan pemberian wawasan teoritis terkait teori kepemimpinan dari literatur Barat dan contoh-contoh nyata kepemimpinan nabi dan rasul. Mahasiswa juga menganalisis kepemimpinan pendidikan yang dijumpainya selama menjadi peserta didik sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Setelah melalui tahapan identifikasi nilai-nilai kepemimpinan, mahasiswa merenungkan peran sebagai pendidik yang akan dijalankannya di masa datang.

Kata kunci: *nilai-nilai, kepemimpinan profetik, pendidik, manajemen pendidikan*

PENDAHULUAN

Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para pemuda penerus perjuangan. Mahasiswa sebagai satu bagian pemuda Indonesia berkewajiban menimba ilmu untuk dapat dimanfaatkan bagi kemashlahatan umat manusia. Pendidikan merupakan investasi peradaban yang dapat mengawal kehidupan dunia sesuai nilai-nilai profetik.

Upaya pendewasaan sejatinya adalah melalui pendidikan sepanjang hayat. Usia mahasiswa berada pada tingkat peralihan dari remaja akhir menuju dewasa muda. Pendidikan bagi mereka dilaksanakan tidak semata-mata *transfer of know-*

ledge, akan tetapi meningkatkan daya pikir kritis guna pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

Berbagai ideologi berkembang pada kehidupan masyarakat dewasa ini. Pendidikan dapat menjadi wahana ampuh bagi penanaman ideologi itu. Pancasila sebagai ideologi negara sudah berkali-kali berhadapan dengan ideologi asing yang tiada henti menggempur bangsa kita. Kehidupan sosial, politik dan ekonomi dihadapkan dengan neo-liberalisme, kapitalisme, dan ideologi lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profetik maupun kebangsaan Indonesia.

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya senantiasa menjaga sikap dewasa. Mahasiswa S1 kependidikan sebagai calon guru dituntut lebih dewasa daripada mahasiswa pada umumnya. Hal ini tidak lain karena mereka akan menjadi pendidik bagi anak-anak muda generasi penerus bangsa. Namun, tidak selalu demikianlah sikap mahasiswa Indonesia dewasa ini.

Beberapa gejala perilaku mahasiswa yang jauh dari nilai-nilai profetik sempat terjadi di Indonesia. Contoh di antaranya adalah tawuran antarmahasiswa maupun antara mahasiswa dengan pihak lain, pergaulan dan seks bebas, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, kelompok berandalan bermotor, maupun perilaku kriminal. Sangat disayangkan mahasiswa yang seharusnya mengedepankan intelektual malah berkelakuan buruk. Kiranya kita butuh penanaman nilai-nilai kepemimpinan profetik melalui perkuliahan, pembinaan kemahasiswaan, dan kaderisasi pemimpin.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Profetik Pendidik

Kepemimpinan profetik dengan mendasarkan pada pandangan Kuntowijoyo, bermuatan nilai humanisasi, liberasi dan transendensi. Tiga muatan ini didasarkannya pada Al Qur'an surat Ali Imron ayat 110 yang terjemahannya "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*" 1) Humanisasi sebagai derivasi dari *amar ma'ruf*, dimaknai menganjurkan atau menegakkan kebajikan, memanusiakan manusia dengan mengangkat dimensi dan potensi positif (*ma'ruf*) manusia untuk mengemansipasi manusia kepada *nur* atau cahaya petunjuk Ilahi mencapai keadaan *fitrah*. 2) Liberasi sebagai derivasi *nahi munkar*, dimaknai melarang, mencegah semua tindak kejahatan. Pemaknaan dalam kepemimpinan profetik adalah pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. 3) Transendensi sebagai derivasi dari *tu'minuna bi Allah* (beriman kepada Allah). Dalam kepemimpinan pendidikan, wahyu memandu ilmu nampaknya bisa dijadikan pegangan manusia. Apapun yang dilakukan manusia tidak akan pernah lepas dari kehendak kuasa Ilahi (Moh. Khoirur Roziqin, 2008: 21-32).

Kepemimpinan sejatinya ada pada setiap manusia. Kepemimpinan pada tingkat yang paling awal adalah memimpin dirinya sendiri. Guru sebagai pribadi pendidik yang digugu dan ditiru tentulah harus mencerminkan pribadi yang

merunut pada teladan kepemimpinan nabi. Aktualisasi kepemimpinan guru dituangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Michelle Collay (2011: 33) mengemukakan *"Some teachers offered their leadership by serving students effectively, while others were more visible in governance and decision making. ... I learned that much of school leadership was provided by teachers. And I learned that taking leadership action within the classroom was a requirement of the job."* Guru dapat menunjukkan kepemimpinannya dengan melayani siswa dengan baik, serta dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan. Mengingat kepemimpinan guru ini menjadi hal yang wajib dimiliki, maka secara akademik pun disampaikan dalam mata kuliah.

Kepemimpinan guru erat kaitannya dengan kepemimpinan pendidik. Secara nasional semboyan Tut Wuri Handayani dari Ki Hadjar Dewantara dipakai sebagai nilai-nilai kepemimpinan pendidikan. Nilai kepemimpinan Tut Wuri Handayani ini juga senada dengan konsep kepemimpinan *Bocah Angon* (bocah penggembala). Wawan Susetya (2007: 90) mengatakan *"Bocah angon* (seorang penggembala) yang mencerminkan filosofi kepemimpinan benar-benar contoh riil yang dialami oleh para Nabi dan Rasul Allah--dari Nabi Adam A.S. sampai Nabi Muhammada SAW--rata-rata adalah seorang penggembala domba (kambing). Hal itu dimaksudkan sebagai bekal latihan sebelum mereka kelak "mengembalakan" umat manusia menuju ke jalan yang benar." Profil pemimpin profetik ini mendorong dari belakang, *ngemong* (menemani) sesama umat Tuhan. Guru dapat menerapkan pola kepemimpinan profetik ini dengan bersumber nilai-nilai religius, berbudaya, dan edukatif.

Kepemimpinan profetik yang transformatif terkait dengan kepemimpinan transformasional. Nilai-nilai kenabian dengan moralitas tinggi, dimunculkan dalam kepemimpinan transformasional. Hal ini diperkuat pendapat Burns dalam Aan Komariah dan Cepi Triatna (2005: 77) mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai suatu proses yang pada dasarnya "para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat dan motivasi yang lebih tinggi". Para pemimpin adalah seorang yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi dan kinerja manusia sehingga ia berupaya mengembangkan segi kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian terhadap staf dan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi, seperti misal keserakahan, kecemburuan atau kebencian.

Sifat-sifat kepemimpinan profetik seperti nabi, nampak dijelaskan oleh Ralph Stogdill dalam *Trait Theory*. Penjelasan Susan R. Wynn (2006: 1028) *"Early proponents of the classic trait perspective suggested that certain individuals have special innate characteristics or qualities that make them leaders and it is these qualities that differentiate them from nonleaders. Fundamental to this theory was the idea that some people are born with traits that make them natural leaders."* Menurut teori ini individu-individu tertentu memiliki karakteristik bawaan khusus atau kualitas yang membuat mereka pemimpin dan inilah kualitas yang membedakan mereka dari yang

bukan pemimpin. Landasan teori ini memuat gagasan bahwa beberapa orang dilahirkan dengan sifat-sifat yang membuat mereka pemimpin secara alami. Nabi dan rasul tentulah membawa sifat kepemimpinannya sejak awal, sejak dini, sejak lahir, bahkan sejak sebelum mereka lahir sudah dinubuatkan. Kita sebagai umatnya tentulah meneladaninya.

Kepemimpinan profetik pendidik harus mentransformasikan nilai-nilai kenabian kepada pengikutnya. Nabi sebagai sosok yang diteladani sedapat mungkin diikuti pola kepemimpinannya. Senada dengan pendapat Hoy & Miskel (2001: 414) "*The source of transformational leadership is in the personal values and beliefs of leaders.*" Begitu strategisnya peran pemimpin bagi pengikutnya, sehingga nilai dan kepercayaan yang dianut pemimpin menjadi sumber dari transformasi itu. Nilai-nilai kenabian ini menjadi nilai-nilai organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Pendidik memiliki peran strategis untuk memberikan perhatian dan penanaman karakter bagi anak didik sehingga dapat memecahkan masalah dari berbagai aspek.

Penanaman Nilai-nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan

Mata kuliah Manajemen Pendidikan adalah salah satu mata kuliah dasar kependidikan yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa S1 kependidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan pokok bahasan di dalamnya yang selain bertujuan untuk memberikan wawasan teoritis kepemimpinan, juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan untuk dapat dipraktikkan.

Pokok bahasan kepemimpinan pendidikan secara umum dapat digolongkan dalam rumpun besar Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS (*social studies*). Sardiman AM (2011: 391) merangkum pendapat Barr dkk dan Udin S. Winataputra, ada tiga tradisi pedagogis dalam kajian IPS. (1) *Social studies taught as citizenship transmission*. (2) *Social studies taught as social science*. (3). *Social studies taught as reflective inquiry*. Kepemimpinan pendidikan yang memuat kepemimpinan profetik di dalamnya dapat menerapkan ketiga tradisi itu dalam perkuliahan bagi calon guru.

Mahasiswa calon guru dapat dibentuk untuk menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan profetik, dan dapat bertindak reflektif dari kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pemberian pengetahuan dapat dilakukan dengan perkuliahan dengan metode ceramah dan diskusi. Pengetahuan tentang teori-teori kepemimpinan Barat dan islami diberikan dalam *setting* kepemimpinan pendidikan. Diskusi di sela-sela ceramah dari dosen menggali wawasan dasar mahasiswa dan menggiringnya untuk berpikir reflektif. Perenungan atas situasi sosial terkini, dikaitkan dengan perannya sebagai mahasiswa dan calon guru, mengerucutkan kepemimpinan profetik sebagai jalan keluar yang dapat memecahkan permasalahan.

Perkuliahan Manajemen Pendidikan pada penyampaian pokok bahasan kepemimpinan pendidikan dapat menerapkan pembelajaran kritis. Pembelajaran kritis membentuk pendidik yang memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari ketidakadilan dan penindasan, dan menjadikan upaya tersebut sebagai bentuk orientasi spiritual kepada Tuhan.

Pembelajaran kritis yang membentuk pemimpin visioner, profetik, transformatif diterapkan dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan bagi calon guru. Bagi kaum konservatif, ketidakseimbangan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Kaum liberal, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pembelajaran tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pembelajaran juga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Jika bagi konservatif pembelajaran bertujuan untuk menjaga *status quo*, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi masyarakat di mana pembelajaran berlangsung. Dalam perspektif kritis, urusan pembelajaran adalah melakukan refleksi kritis terhadap '*the dominant ideology*' ke arah transformasi sosial. Tugas utama pembelajaran adalah menciptakan ruang agar sikap kritis sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. (Haryanto, 2010: 234)

Mata kuliah manajemen pendidikan memberikan landasan manajerial bagi calon guru. Seperti kita ketahui bahwa guru menjadi pemimpin pendidikan. Lebih daripada itu guru di masa datang adalah kandidat wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, bahkan pengawas pendidikan. Mereka itu adalah pemimpin pendidikan yang wajib menerapkan kepemimpinan profetik transformasional. Konsep *educating leaders* di bidang pendidikan yang ditawarkan Griffiths, Stout, dan Forsyth (dalam Hoy & Miskel, 2001: 419) membaginya menjadi 1) *study theoretical models*; 2) *learn the technical core of school administration*; 3) *develop problem-solving skills through the use of applied and active methods*; 4) *practice leadership under supervised conditions*; 5) *demonstrate competence*. Perkuliahan manajemen pendidikan dengan pokok bahasan kepemimpinan pendidikan sebagai wahana penanaman nilai-nilai kepemimpinan profetik dimulai dengan proses yang sederhana hingga yang rumit, dari yang mudah hingga yang susah, dari sekedar mengetahui hingga menganalisis, kreasi dan evaluasi. Semua pembelajaran ini bermuara kepada pelaksanaan kepemimpinan profetik dalam kehidupan pendidikan setiap hari.

KESIMPULAN

Kepemimpinan profetik transformatif pendidik meliputi dimensi humanisasi, liberasi dan transendensi. Nilai-nilai kepemimpinan pendidik profetik transformatif dapat ditanamkan melalui mata kuliah Manajemen Pendidikan pada pokok bahasan kepemimpinan pendidikan. Proses perkuliahan yang dapat dilakukan bagi mahasiswa calon guru pada program studi S1 kependidikan di antaranya pembelajaran kritis atau pembelajaran kesadaran kritis. Begitu pula komponen *educating leaders* yang dapat menanamkan nilai-nilai kepemimpinan profetik transformatif pendidik adalah mengaji model teoritis, mempelajari teknik utama pengelolaan sekolah, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang aktif dan aplikatif, berlatih kepemimpinan pada kondisi tersupervisi, dan mendemonstrasikan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Collay, Michelle. (2011). *Everyday Teacher Leadership: Taking Action Where You Are*. San Fransisco, CA: Jossey Bass A Wiley Imprint.
- Haryanto. (2010). *Pengembangan Kesadaran Kritis dalam Pembelajaran untuk Mewujudkan Pemimpin Visioner*. dalam *Proceeding International Conference on Educational Management, Administration and Leadership (ICEMAL) and International Seminar on Educationl Leadership*. Department of Educational Administration, Faculty of Education, Yogyakarta State University. April 30-May 2, 2010. hal 228-238.
- Hoy, Wayne K. & Miskel, Cecil G. (2001). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. 6th Edition. Boston: McGraw Hill Higher Education.
- Komariah, Aan & Triatna, Cepi. (2005). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roziqin, Moh. Khoirur. (2008). *Format Pendidikan Profetik di Tengah Transformasi Sosial Budaya: Telaah Kritis Pemikiran Kuntowijoyo*. Skripsi pada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Sardiman, AM. (2011). *Pendidikan IPS sebagai Wahana Pendidikan Karakter*. dalam Zuchdi, Darmiyati. (ed.). (2011). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*. hal. 384-405. Yogyakarta: UNY Press.
- Susetya, Wawan. (2007). *Kepemimpinan Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Wynn, Susan R. (2006). *Trait Theory*. dalam English, Fenwick W. (ed.) (2006). *Encyclopedia of Educational Leadership and Administration*. Vol. II. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.

IMPLEMENTASI SIKAP TANGGUNG JAWAB SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI PROFETIK DALAM EVALUASI PERKULIAHAN DI JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

Muhammad Nursa'ban
Jurdik Geografi-FIS-UNY,
e-mail: mnsaban@yahoo.com

Abstrak

Tujuan kajian pada tulisan ini yaitu memperoleh kategorisasi peningkatan sikap tanggung jawab mahasiswa dalam perkuliahan di Jurusan Pendidikan Geografi melalui penggunaan metode tutorial.

Kajian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan selama dua siklus. Subyek penelitian yaitu 60 mahasiswa kelas Non Reguler yang mengambil mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi pada semester gasal tahun 2012. Teknik pengumpulan data melalui angket dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui teknik univariat. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu secara kuantitatif ditunjukkan oleh setidaknya 70% mahasiswa mengalami peningkatan sikap tanggung jawab dalam kategori baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus kedua terjadi peningkatan sikap tanggung jawab mahasiswa pada perkuliahan Strategi Pembelajaran Geografi menggunakan metode tutorial melalui tahapan; 1) klarifikasi istilah, 2) definisi masalah, 3) analisis masalah, 4) merumuskan hipotesis, 5) sintesis, evaluasi, refleksi, 6) belajar mandiri, dan 7) merumuskan learning issues. Bukti-bukti peningkatan sikap tanggung jawab ditunjukkan oleh persentase peningkatan setiap aspek pada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. Peningkatan sikap tanggung jawab mahasiswa pada perkuliahan yang masuk dalam kategori "baik" dan "sangat baik" diperoleh rata-rata 81% dari jumlah mahasiswa mengalami kenaikan sikap tanggung jawab sebesar 14% dari siklus 1 dan peningkatan 39% dari kondisi awal.

Kata Kunci: *tanggung jawab, perkuliahan, tutorial, geografi*

Latar Belakang

Pendidikan diharapkan dapat menanamkan nilai kepada peserta didik melalui proses pembelajaran sehingga dapat membentuk manusia yang berkarakter. Sejalan dengan pemikiran tersebut UNESCO menetapkan 12 nilai-nilai universal

yang perlu dipelihara dan dibangun lewat dunia pendidikan. Nilai-nilai universal yang menjadi bekal keterampilan hidup manusia itu adalah kedamaian, penghargaan, cinta, kebahagiaan, kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati, toleransi, kesederhanaan, kesatuan, kerja sama, dan kebebasan (kompas.com, 17/5/2010). Artinya, setiap negara di dunia harus menyepakati bahwa pendidikan yang bernilai seperti tanggung jawab yang merupakan salah satu dari dua belas pendidikan nilai harus ditanamkan kepada semua peserta didik di dunia tidak terkecuali di Indonesia (Diane Tilman: 2004: 213). Menurut pendapat Carlotta De Lerma dalam A.G.M. Van Melsen (1992: 68) terdapat beberapa macam prinsip-prinsip penting yang harus dilakukan untuk membantu peserta didik bertanggung jawab yaitu: 1) tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri yang menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi sehingga dapat memecahkan masalahnya sendiri. 2) tanggung jawab terhadap keluarga melalui suatu teladan yang baik. 3) tanggung jawab terhadap masyarakat, dan 4) tanggung jawab terhadap tuhan melalui menjalankan ajaran Tuhan.

Proses pendidikan pada institusi pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar dan kebijakan institusinya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati secara langsung yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Dimiyati dan Mudjiono (2002: 42-50) menyatakan bahwa belajar sebagai suatu proses harus dipahami beberapa prinsipnya, antara lain: 1) Perhatian dan Motivasi, 2) Keaktifan, 3) Keterlibatan Langsung/Berpengalaman, 4) Pengulangan, 5) Tantangan, 6) Balikan dan Penguatan. Ditambahkan Dalyono (2002: 48-53) bahwa beberapa tujuan belajar antara lain: 1) Perubahan perilaku, 2) Mengubah kebiasaan, 3) Mengubah sikap, 4) Mengubah keterampilan. 5) Menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Berdasarkan ringkasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan kegiatan paling penting yang harus dilakukan oleh manusia selama hidupnya, karena melalui belajar manusia dapat melakukan suatu perbaikan dalam berbagai hal menuju kebahagiaan hidup. Dalam konteks lain pembelajaran menjadi salah satu kata kunci dalam pembentukan diri seseorang.

Setiap proses tentunya terikat oleh tanggung jawab yang tercipta lewat upaya sadar dengan tujuan keinginan menuai hasil secara baik dari tujuan yang ingin diperoleh, artinya perlu ada satu standar yang dapat dijadikan patokan untuk menilai hasil dari proses penanaman tanggung jawab selama proses tersebut berlangsung. Sikap tanggung jawab secara kebahasaan bermakna *suatu sikap seseorang yang secara sadar dan berani mau mengakui apa yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala resikonya*". Dalam artian lain, tanggung jawab meminjam

istilahnya Bung Hatta adalah integritas individual. Di samping itu, konsep sikap tanggung jawab termaktub dalam hadist Rasulullah SAW. Sebagai berikut;

Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw berkata: " Setiap kamu adalah pemimpin, dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, kepemimpinan seorang penguasa atas rakyatnya, suami atas keluarganya, istri atas anak-anak dan harta suaminya, hamba atas harta tuannya, maka ingatlah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggung jawabannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut secara implisit menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tanggung jawab, sebab dalam fitrahnya kita semua merupakan pemimpin dan akan di minta pertanggung jawabannya, tanggung jawab memiliki berbagai fase dalam aspek kehidupan kita. Bentuk tanggung jawab dalam proses perkuliahan/pembelajaran diwujudkan dalam bentuk partisipasi mahasiswa dalam proses perkuliahan. Menurut Keith Davis yang dikutip Suryobroto (2002), partisipasi didefinisikan sebagai berikut:

"Participation is defined as a mental and emotional involved at a person in a group situation which encourager then contribut to group goal and share responsibility in them". (Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Dalam penelitian ini partisipasi mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik mahasiswa dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab mencakup unsur-unsur; 1) keterlibatan mahasiswa dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, dan 2) kemauan mahasiswa untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

Tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. Partisipasi mahasiswa dapat ditumbuhkan dengan berbagai cara, antara lain memberikan pertanyaan dan menanggapi respon mahasiswa secara positif, menggunakan metode yang bervariasi yang lebih melibatkan mahasiswa sehingga pembelajar lebih aktif terlibat dalam pembelajaran.

Pada jenjang perguruan tinggi Menteri Pendidikan Nasional mengatur tentang kurikulum melalui SK No. 045/U/2002 yang dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi berbasis pada kompetensi. Peraturan tersebut berpengaruh terhadap paradigma sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, dari yang semula perkuliahan berpusat pada dosen menjadi berpusat kepada mahasiswa

(*Teacher Centered Learning (TCL)* ke *Student Centered Learning (SCL)*). Harsono dan Djoko Dwiyanto (2005: 36) menyatakan bahwa salah satu proses pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa (*student centered*) bertumpu pada proses tutorial. Metode tutorial dianggap mampu meningkatkan tanggung jawab mahasiswa dalam belajar, serta pelibatan mahasiswa secara aktif diharapkan mampu menjadi bekal untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri (Widuroyeki, 2006: 55-65).

Salah satu teknik pembelajaran dari metode tutorial yang dikembangkan oleh Jos Moust, P. Bouhuijs, Hans Schmidt (2007: 35-65) yaitu menggunakan tujuh langkah (*seven jumps*) yang pada hakikatnya menempatkan peran dan tanggung jawab pembelajar (mahasiswa) lebih besar dan sangat penting. Metode ini mengedepankan tanggung jawab yang besar dari mahasiswa sehingga mereka membiasakan diri dalam memupuk ranah afektif yang berorientasi pada nilai karakter. Secara praktis proses pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode tutorial dengan teknik *seven jumps* pada mata kuliah diintegrasikan dalam blok-blok kuliah. Penggunaan metode ini diharapkan dapat merubah keadaan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memupuk sikap tanggung jawab dan kemandirian.

Permasalahan yang diperoleh penulis melalui pengamatan ketika berlangsung perkuliahan seperti pada mata kuliah Strategi Pembelajaran sering dijumpai mahasiswa yang kesulitan bertanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan. Mereka nampak kesulitan merumuskan gagasan, belum berani menyampaikan pendapat, dan belum biasa bersaing dalam menyampaikan pendapat dengan teman lain. Penguatan atau pemaparan dari dosen mata kuliah menjadi tumpuan pengetahuan mahasiswa. Mereka sering belum mampu menangkap inti dari permasalahan dan merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya pada saat diskusi kasus hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gagasan yang keluar terbatas pada satu referensi saja bahkan terkadang kesulitan menemukan pustaka yang menunjang, belum dapat memaknai terbatas hanya hafalan semata.

Keberhasilan dalam perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk prestasi dan sikap (afektif) tanggung jawab mahasiswa yang baik dapat dipenuhi secara optimal dengan proses pembelajaran melalui salah satunya penerapan metode pembelajaran secara baik. Oleh sebab itu diperkirakan variasi tingkatan prestasi mahasiswa dipengaruhi juga oleh tanggung jawab mereka dalam proses perkuliahan dan ketepatan dalam penggunaan metode pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam upaya meningkatkan tanggung jawab mahasiswa pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi menggunakan metode tutorial. Berdasarkan kajian tersebut diharapkan dapat diketahuinya peningkatan sikap tanggung jawab mahasiswa pada perkuliahan Strategi Pembelajaran Geografi menggunakan metode tutorial di Jurusan Pendidikan Geografi.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dikembangkan Kemmis dan Taggart (1988) dengan melakukan empat tahapan pada setiap siklus. Keempat tahapan tersebut yaitu; 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, dan 4) refleksi, dan tahapan tersebut berulang-ulang sampai dua siklus untuk penelitian ini.

Variabel yang diukur yaitu sikap tanggung jawab dengan indikator penelitian sebagai berikut: 1) Keterlibatan mahasiswa dalam metode yang digunakan dalam pembelajaran. 2) Kemauan mahasiswa untuk merespon dan berkreasi dalam metode pembelajaran yang digunakan. 3) Menghargai proses diskusi, 4) Keterampilan Komunikasi, 5) Tanggungjawab, 6) Kesadaran diri/ evaluasi diri. Subjek penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa kelas non reguler semester yang mengambil mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi (SPG) pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan observasi dengan instrumen menggunakan skala data ordinal dalam empat kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Pengisian kedua instrumen menggunakan jawaban 1, 2, 3, atau 4.

Data variabel yang diperoleh dari hasil pengukuran dideskripsikan secara kuantitatif dan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu:

- $> (M_i + 1,5 S_{Bi})$: sangat baik
- $M_i - (M_i + 1,5 S_{Bi})$: baik
- $(M_i - 1,5 S_{Bi}) - M_i$: cukup
- $< (M_i - 1,5 S_{Bi})$: kurang baik

Keberhasilan penelitian tindakan kelas penelitian ini diukur dengan adanya peningkatan tanggung jawab mahasiswa ketika berlangsung pembelajaran menggunakan metode tutorial pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi. Peningkatan ini secara kuantitatif ditunjukkan oleh setidaknya 70% mahasiswa mengalami peningkatan aspek tanggung jawab dan kemandirian minimal kategori "baik".

Hasil Penelitian

Penelitian untuk mengukur variabel peningkatan tanggung jawab ini dilaksanakan dalam dua siklus yang dilakukan dalam empat pertemuan. Setiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan selama 150 menit atau setara 3 sks. Selama pelaksanaan PTK ini, disampaikan dua Kompetensi Dasar (KD) yaitu "menganalisis pengembangan kurikulum SMA" dengan materi pokok "pengembangan kurikulum", dan KD "mendeskripsikan struktur kurikulum Mata Pelajaran Geografi" dengan materi pokok "struktur kurikulum mata pelajaran geografi". Masing-masing materi pokok diselesaikan dalam waktu 2 kali pertemuan.

Berdasarkan pengumpulan data awal diperoleh gambaran hasil Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam setiap penilaian. Aspek penilaian dihitung

apabila jumlah perolehan nilai pada setiap mahasiswa setidaknya dalam kategori baik atau memiliki skor lebih dari 52,5. Gambaran persentase awal sikap tanggung jawab mahasiswa jurusan pendidikan geografi kelas NR yang mengambil mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi ditunjukkan tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata hasil penilaian awal sikap tanggung jawab

Variabel	Aspek Penilaian	Jml	%
1. Tanggung jawab	1.1. Keterlibatan dalam metode Tutorial	35	58
	1.2. Kemauan merespon dan berkreasi dalam metode Tutorial	16	27
	1.3. Menghargai proses diskusi	29	48
	1.4. Keterampilan Komunikasi	18	30
	1.5. Tanggungjawab individu	38	63
	1.6. Kesadaran diri/ evaluasi diri	14	23
Total rata-rata		25	42

Tabel 1. menyajikan gambaran bahwa baru sekitar 25 mahasiswa dari 60 mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab yang baik atau sangat baik dalam mengikuti perkuliahan. Angka tersebut masih jauh dari kondisi yang diharapkan yaitu setidaknya 70% atau 42 mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab yang baik dalam perkuliahan. Selain itu dapat diketahui bahwa kemauan merespon dan berkreasi dalam metode tutorial serta kesadaran diri dari mahasiswa masih sangat sedikit yang berkategori setidaknya baik.

Peningkatan Sikap Tanggung Jawab dalam tahapan Siklus Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada fase perencanaan di setiap siklus oleh peneliti yaitu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disisipkan langkah-langkah metode tutorial, angket penilaian sejawat, dan lembar observasi. Selain itu, menyiapkan kasus sebagai materi diskusi kelompok dan membentuk kelompok diskusi belajar dari 60 mahasiswa menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 10 mahasiswa.

2. Tahap Pelaksanaan dan Observasi Tindakan

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan 2 dilaksanakan selama 150 menit untuk setiap pertemuan dengan kompetensi dasar pada siklus 1, yaitu “menganalisis pengembangan kurikulum SMA” dengan materi pokok “pengembangan kurikulum”, dan “mendeskripsikan struktur kurikulum Mata Pelajaran Geografi” dengan materi pokok “struktur kurikulum mata pelajaran geografi” pada siklus 2.

Kegiatan perkuliahan diawali pengkondisian kelas dan apersepsi selama kurang lebih 15 menit, setelah itu dilanjutkan mendeskripsikan langkah-langkah

pelaksanaan metode tutorial melalui teknik *seven jumps*. Kegiatan perkuliahan setelah apersepsi, pada 50 menit dilakukan tahapan tutorial teknik *seven jumps* sampai langkah kelima, yaitu secara berurutan; 1) klarifikasi terminologi dan konsep yang belum dipahami, 2) mengidentifikasi dan mendefinisikan Permasalahan, 3) menganalisis permasalahan dan menawarkan penjelasan sementara, 4) menginventarisir berbagai penjelasan yang dibutuhkan melalui rumusan hipotesis, 5) menformulasi tujuan belajar melalui rumusan *learning issues*. Langkah keenam dan ketujuh dilakukan 100 menit terakhir dengan kegiatan berupa pengumpulan informasi dari berbagai referensi melalui kajian pustaka dari referensi yang telah dipersiapkan, dilanjutkan langkah ketujuh mensintesis informasi baru dan menguji serta mengevaluasinya untuk permasalahan yang sedang dikemukakan dan melakukan refleksi penguatan hasil belajar dilakukan setelah kegiatan pada langkah enam. Pada pertemuan kedua disampaikan hasil diskusi dan penguatan serta *feedback* dari dosen sekaligus melakukan refleksi kegiatan pertemuan pertama.

Berdasarkan catatan secara kuantitatif dari instrument yang digunakan hasil tindakan Siklus 1 dan 2 disajikan oleh tabel 2.

Tabel 2. Hasil penilaian sikap tanggung jawab siklus 1 dan 2

Aspek Penilaian	siklus 1		siklus 2	
	f	%	f	%
1. Keterlibatan dalam metode Tutorial	45	75	56	93
2. Kemauan m merespon dan berkreasi	42	70	46	77
3. Menghargai proses diskusi	38	63	47	78
4. Keterampilan Komunikasi	33	55	43	72
5. Tanggungjawab individu	45	75	58	97
6. Kesadaran diri/ evaluasi diri	37	62	43	72
Rata-rata	47,5	66,7	25	81

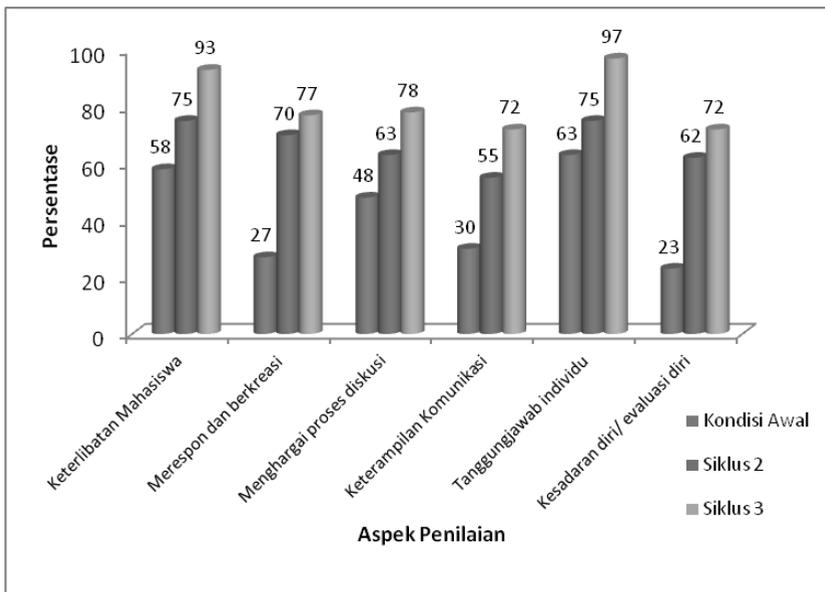
Frekuensi pada tabel 2. menunjukkan jumlah mahasiswa yang mencapai kategori baik sikap tanggung jawab sesuai kriteria aspek penilaiannya pada siklus 1 diperoleh rerata total 67%, atau mengalami peningkatan 25% dari kondisi awal sebelum diberikan tindakan. Data tersebut masih belum mencapai indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan yaitu sebesar 70%. Hasil penilaian sikap tanggung jawab pada siklus 2 diperoleh rerata total 81%, atau mengalami peningkatan sekitar 14% dari hasil penilaian siklus pertama. Data ini menggambarkan bahwa pada siklus kedua, tanggung jawab mahasiswa dalam pembelajaran telah mencapai indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan.

Aspek penilaian sikap tanggung jawab pada siklus 1 yang telah mencapai lebih dari 70% sebanyak tiga aspek yaitu; 1) keterlibatan mahasiswa dalam metode tutorial, 2) kemauan mahasiswa merespon dan berkreasi dalam metode Tutorial,

yang diperoleh melalui observasi, dan 3) tanggungjawab individu melalui instrumen angket. Pernyataan aspek tanggung jawab yang disampaikan melalui instrumen meliputi; 1) menghargai waktu secara tepat, 2) menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya, 3) menyajikan informasi yang relevan dengan permasalahan, 4) mengambil inisiatif atau membantu kelangsungan dinamika kelompok, 5) bertanggungjawab atas keakuratan informasi yang disampaikan.

Hasil penilaian pada siklus 2 terhadap aspek tanggung jawab secara keseluruhan telah melebihi 70% yang memperoleh kategori baik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat digambarkan bahwa metode tutorial memberikan kontribusi terhadap peningkatan tanggung jawab belajar mahasiswa. Berdasarkan tabel 7 digambarkan bahwa dua aspek sikap tanggung jawab mencapai lebih dari 90% yaitu keterlibatan mahasiswa dalam metode tutorial dan tanggung jawab individu. Sementara 4 aspek yang lain masih di sekitar antara 70% - 80%. Aspek dengan penilaian terendah masih relatif sama dengan siklus 1 yaitu keterampilan komunikasi dan kesadaran diri/evaluasi diri

Secara visual hasil penilaian variabel tanggung jawab pada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2 digambarkan berikut ini.



Gambar 1. Grafik penilaian tanggung jawab

3 Tahap Refleksi

Kegiatan refleksi dilakukan setelah berakhirnya tindakan dan observasi oleh kolaborator, observer, dan mahasiswa. Berdasarkan evaluasi ketercapaian target diperoleh gambaran bahwa peningkatan tanggung jawab yang mendasarkan atas 6 aspek tanggung jawab yang diukur, setidaknya pada siklus 2 secara umum, rerata total telah mengalami peningkatan dari kondisi awal sebelum diberikan tindakan dan siklus 1 sebesar 81%. Selain itu, secara keseluruhan

pada siklus 2 hasil penilaian tanggung jawab yang dinyatakan dalam 19 pernyataan dalam angket dan 3 dalam instrumen observasi telah mencapai lebih dari 70% untuk setiap aspeknya

Peningkatan yang terjadi sebesar 25% dari kondisi awal ke siklus 1, dan 14% dari siklus 1 ke siklus 2, sementara selisih siklus 2 dengan kondisi awal yaitu 39%. Pada siklus 1 terdapat tiga aspek atau sekitar (50%) yang dapat mencapai lebih dari 70%. Namun demikian, masih terdapat kekurangan terutama pencapaian target keberhasilan indikator.

Catatan pada siklus 1. ada sekitar tiga aspek yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan yaitu; 1) menghargai proses diskusi, hasilnya mahasiswa menganggap proses diskusi ini merupakan kegiatan yang membebaskan mereka untuk terlibat dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa terkadang kurang bertanggung jawab dan menghargai ketentuan diskusi dalam metode tutorial. Mereka masih mengabaikan langkah-langkah yang sudah ditentukan dan cenderung melakukan diskusi seperti biasanya. Proses diskusi berlangsung ramai, tetapi tidak terarah. Pada saat diskusi berlangsung, beberapa aktivitas yang nampak dari mahasiswa antara lain; (a) belum mendengarkan dan memperhatikan apa yang sedang diutarakan oleh temannya dengan kesungguhan. (b) Kurang menghargai nilai informasi dan sumbangan pikiran temannya. (c) belum dapat membedakan nilai informasi dari nilai personal. 2) keterampilan Komunikasi mahasiswa yang belum optimal, hal ini Nampak pada beberapa hal antara lain; (a) kesulitan berbicara secara jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti, (b) kesulitan menyatakan emosinya secara tepat dalam situasi tertentu, dan (c) sering menanggapi komunikasi non-verbal dari temannya. 3) kesadaran diri/ evaluasi diri yang dilakukan mahasiswa masih kurang, seperti Nampak pada aktivitas antara lain; (a) belum menyadari atas kelemahannya dan kekuatannya yang berkaitan dengan proses diskusi. (b) belum mau menerima kritik dari teman dengan mempertahankan diri dan cenderung menyalahkan oranglain. (c) belum mau untuk memperbaiki diri atas kritikan teman dalam konteks pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan pada siklus 2 diketahui bahwa aktivitas yang kurang pada siklus 1 telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perbandingan hasil penilaian antara kondisi awal, siklus pertama dan siklus kedua menunjukkan adanya perbaikan dan menuju ketercapaian target yang dibuat.

4. Tahap tindak lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap refleksi, maka aspek-aspek tanggung jawab pada siklus 1 rerata totalnya yang telah mencapai 70% dipertahankan dengan memberikan penguatan, sedangkan aspek-aspek yang masih kurang dilakukan beberapa langkah tindak lanjut berikutnya yaitu: 1) Dosen menginformasikan beberapa kekurangan yang diperoleh dalam evaluasi di atas kepada mahasiswa. Mahasiswa diberitahu bahwa kekurangan tersebut belum mencerminkan aspek tanggung jawab dan kemandirian dalam pembelajaran. 2) Do-

sen menegaskan kembali tentang aturan pembelajaran menggunakan metode tutorial agar mengikuti aturannya. 3) Dosen memutuskan untuk menindaklanjuti dalam siklus berikutnya.

Pada siklus 2 aspek-aspek tanggung jawab rerata totalnya telah mencapai 70% bahkan lebih. Atas dasar, hasil tindakan pada siklus 2 yang dijabarkan pada evaluasi ketercapaian target pada tahap refleksi, maka peneliti memutuskan untuk menghentikan siklus karena target pelaksanaan penelitian sudah dicapai pada siklus 2 ini.

Kesimpulan

Sikap tanggung jawab mahasiswa pada perkuliahan Strategi Pembelajaran Geografi dapat ditingkatkan menggunakan metode tutorial. Bukti-bukti peningkatan sikap tanggung jawab mahasiswa pada perkuliahan ini ditunjukkan oleh persentase peningkatan setiap aspek pada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. Peningkatan sikap tanggung jawab dalam kategori setidaknya "baik" oleh rata-rata 81% atau 49 mahasiswa sebesar 14% dari siklus 1 dan peningkatan 39% dari kondisi awal.

Daftar Pustaka

- A.G.M. Van Melsen, (1992) *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Cet. 2. Alih Bahasa, K. Bertens. Jakarta: Gramedia.
- Dalyono. M., Drs. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Diane Tilman, (2004) *Living Values Activities For Young Adults*, Alih Bahasa : Risa Praptono. Jakarta: GramediaDimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Echols, John M. dan Shadily, Hasan. (1995), *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ester Lince Napitupulu, (2010) *Pendidikan Nilai Tak Bisa Diabaikan* diunduh dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/17/18592869/Pendidikan.Nilai.Tak.Bisa.Diabaikan-5> | Senin, 17 Mei 2010 | 18:59 WIB.
- Harsono dan Dwiyanto, Djoko. (2005) .Pembelajaran Berpusat Mahasiswa. di dalam Kumpulan Naskah Pembelajaran Pusat Pengembangan Pendidikan UGM. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan PPP UGM. Hal 36.
- Jos Moust, P. Bouhuijs, Hans Schmidt. (2007). *Introduction to Problem-Based Learning*. Taylor & Francis.
- Kemmis, S. dan R. Mc Taggart. 1988. *The Action Research Planner*. Victotia: Deakin University.
- Suryobroto. (2002) *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Widuroyekti, Barokah (2006). Pendekatan Belajar Aktif dan Peningkatan Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Proses Tutorial Tatap Muka. *Jurnal Pendidikan*, Voume. 7, Nomor 1, Maret 2006, 55 – 65.

PEMIMPIN BERVISI SPASIAL UNTUK MEMBANGUN (KEMBALI) KEJAYAAN INDONESIA

Bambang Syaeful Hadi

Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY

Email: bab_saifulhadi@lycos.com

Abstrak

Kejayaan yang pernah diraih oleh nenek moyang Bangsa Indonesia yakni oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan spirit dan kaca benggala yang dapat dijadikan tolok ukur terhadap apa yang telah dikerjakan beberapa rezim yang menguasai Indonesia, sejak orde lama hingga orde reformasi. Titik tumpu pembangunan sejak jaman orde lama hingga kini, yang tidak menempatkan kelautan, pengelolaan sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, lepasnya beberapa wilayah dari pangkuan ibu pertiwi merupakan cermin dari buruknya kemampuan berpikir spasial para pemimpin negeri ini. Tulisan singkat ini mencoba untuk menguraikan urgensi kemampuan berpikir spasial pemimpin untuk membangun (kembali) kejayaan yang pernah diraih oleh nenek moyang bangsa ini.

Kemampuan berpikir spasial dicirikan oleh kemampuan untuk memahami gejala di wilayahnya dengan kemampuan *comparison, aura, region, transition, analogy, hierarchy, pattern, association*. Visi pemimpin yang didasari oleh kemampuan berpikir spasial akan memberikan warna pada kepemimpinannya pada pengelolaan wilayah selaras karakteristik fisiografis dan non fisiografis, sehingga tersusun model pembangunan yang berbasis pada kondisi aktual lingkungan, kondisi fisiografis wilayah (negara tropis, negara maritim, negara kepulauan, negara multi risiko bencana alam dan sosial, dan posisi geopolitik negara).

Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan nenek moyang memiliki luas wilayah lebih dari Indonesia saat ini. Keduanya memiliki penguasaan laut yang baik, terbukti dengan kekuatan armadanya untuk menaklukkan berbagai wilayah. Indonesia saat ini orientasi pembangunannya lebih ke darat. Fakta ini menunjukkan kekurangpahaman para pemimpin terhadap kondisi geografis wilayahnya. Daratan Indonesia yang hanya sepertiga dari lautannya justru menjadi arena perebutan kue kehidupan, sementara lautannya yang menyimpan berjuta potensi dibiarkan untuk dieksploitasi negara lain.

Pengantar

Selama masa hampir tujuh dasawarsa pembangunan negeri ini ada salah satu kelemahan yang sangat mendasar yakni kurangnya kemampuan para penyelenggara negara dalam berpikir secara spasial. Sejarah telah membuktikan bahwa para pendahulu penyelenggara negara yang dulu bernama Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah berpikir dan bertindak secara spasial. Saat itu para penyelenggara negara memahami karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan (*Archipagic State*) terbukti mereka dalam membangun dan menguasai wilayah lebih berorientasi pada maritim.

Sebagai bukti luasnya kekuasaan kedua kerajaan Bangsa Indonesia ini kedua kerajaan tersebut menurut catatan sejarah lebih luas dari luas Indonesia saat ini. Menurut *Kakawin Negara Kertagama* pupuh XIII-XV sebagaimana dikutip Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1990), daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian Kepulauan Filipina. Kedua kerajaan tersebut sangat memperhatikan pembangunan kelautan, terbukti dengan angkatan lautnya yang sangat kuat, pengelolaan dan penguasaan wilayah yang luas dan lancarnya perdagangan antar pulau, didatangi oleh para pedagang dari India, China, dan negara-negara di sekitarnya.

Penjajahan Belanda selama berabad-abad dengan politik *Devide et Impera* selalu berusaha memecah belah bagian wilayah Indonesia supaya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di samping itu Belanda berusaha mengalihkan perhatian penduduk Indonesia ke arah darat, karena Belanda menyadari bila kepulauan nusantara bersatu akan menjadi kekuatan yang besar sebagaimana terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dampaknya hingga kini pembangunan Indonesia dari zaman Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu berorientasi ke darat, kecuali pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencoba mengarahkan dan menyadarkan arti penting potensi laut bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sayangnya masa pemerintahannya tidak berjalan lama. Masa pembangunan Indonesia yang dianggap berhasil adalah di masa rezim orde baru yakni selama 32 tahun, yang tahap pembangunannya di sebut PELITA. Bila dilihat dari orientasi program pembangunan dalam setiap PELITA dalam kurun lima periode selalu menitikberatkan pada program pertanian dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia selalu berorientasi ke darat, padahal luas daratan Indonesia hanya sepertiga dari seluruh wilayah, yakni sekitar 1.922.570 km², sementara luas lautannya adalah sekitar 3.257.483 km².

Fenomena orientasi pembangunan yang selalu berorientasi ke darat, privatisasi BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, lepasnya beberapa wilayah dari pangkuan pertiwi, pengelolaan sumber-sumber daya alam kepada perusahaan asing, rendahnya pengawasan laut sehingga banyak terjadi pencurian kekayaan laut oleh nelayan asing menunjukkan lemahnya pemahaman para pe-

mimpin negeri ini terhadap kondisi geografis dan rendahnya pemahaman spasial. Untuk dapat memahami kondisi spasial wilayah, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir spasial yang memadai.

Pemimpin Cakap Berpikir Spasial

Selama ini pola rekrutmen pemimpin negeri ini lebih ditentukan oleh proses-proses politisi, sehingga persyaratan seorang pemimpin juga ditentukan oleh para politikus. Persyaratan pemimpin tidak digali berdasarkan kondisi riil dan aktual saat ini. Persyaratan akademis seorang calon presiden saja selalu berujung diperdebatkan, bukan untuk perbaikan, tetapi lebih karena kepentingan politik. Alih-alih menyusun persyaratan kepemimpinan berdasarkan cetak biru pembangunan untuk masa depan berdasarkan karakteristik kondisi fisiografis dan fisiografis Indonesia, para legislator malah lebih mementingkan kepentingan kelompoknya.

Suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini adalah memimpin negeri ini tidak memperhatikan aspek spasial negara ini, sehingga masalah lingkungan semakin menggurita, pemahaman dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam pada level yang mengkhawatirkan, dan perhatian pada wilayah laut yang minim, sehingga layaklah bila negeri ini hingga kini tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Untuk dapat mengelola wilayah yang sedemikian luas, para pemimpin negeri ini tidak boleh tidak harus memiliki kemampuan berpikir spasial.

Menurut *Association of American Geographers* (2007), ada 8 komponen kemampuan berpikir spasial fundamental, yakni:

- a. *Comparison* (kondisi dan koneksi spasial), kemampuan membandingkan bagaimana tempat-tempat mempunyai persamaan dan perbedaan. Urgensi pemimpin memiliki kemampuan ini adalah untuk membuat menyusun perlakuan terhadap suatu wilayah, perencanaan pembangunan, alokasi, penyusunan skala prioritas pengembangan wilayah, dan pengembangan wilayah (aksesibilitas fisik dan non fisik).
- b. *Aura*, (*spatial aura* merupakan zona pengaruh suatu objek ke sekitarnya) kemampuan menunjukkan efek dari kekhasan suatu daerah terhadap daerah yang berdekatan.
- c. *Region*, kemampuan mengidentifikasi tempat-tempat yang memiliki kesamaan dan mengklasifikasikannya sebagai satu kesatuan.
- d. *Hierarchy*, kemampuan untuk menunjukkan tempat-tempat yang sesuai dengan hirarki dalam sekumpulan area
- e. *Transition*, kemampuan menganalisis perubahan tempat-tempat apakah terjadi secara mendadak, gradual, atau tidak teratur
- f. *Analogy*, kemampuan menganalisis apakah tempat-tempat yang berjauhan tetapi memiliki lokasi yang sama dan karena itu mungkin memiliki kondisi dan atau koneksi yang sama

- g. *Pattern*, kemampuan untuk mengklasifikasi suatu fenomena apakah dalam kondisi berkelompok, linier, menyerupai cincin, acak, atau lainnya
- h. *Assosiation* (korelasi), kemampuan membaca terhadap suatu gejala yang berpasangan yang memiliki kecenderungan terjadi secara bersama-sama di lokasi yang sama (yang mempunyai pola spasial yang sama)

Para pemerhati dalam bidang ini, terutama dari kalangan geosains, psikologi, dan neurologi berusaha menyusun sejumlah konsep *spatial thinking* ini agar mudah diterima berbagai kalangan. Bandingkan komponen berpikir spasial yang dikemukakan AAG (dikutip oleh Gersmehl and Gersmehl) di atas dengan komponen yang dikemukakan ahli lainnya. Tampak bahwa ketiganya memiliki konsep yang hampir sama. Ketiga konsep pada tabel tersebut menjadi sangat relevan dengan konsep berpikir spasial yang dikemukakan oleh Carleton (2007), yakni berpikir spasial adalah berpikir untuk menemukan makna pada, ukuran, bentuk, orientasi, arah lokasi, atau lintasan benda, proses atau fenomena, atau posisi relatif dalam ruang beberapa objek, proses atau fenomena. Berpikir spasial menggunakan segala yang ada pada ruang sebagai sarana untuk penataan masalah, untuk menemukan jawaban, dan untuk mengekspresikan solusi.

Tabel 1. Konsep Berpikir Spasial yang diusulkan oleh Gersmehl dan Gersmehl, Golledge dkk, dan Janelle and Goodchild

Gersmehl dan Gersmehl	Golledge dkk	Janelle and Goodchild
Kondisi Lokasi koneksi perbandingan Aura Region hirarkhi transisi analogi pola Asosiasi spatial	Identitas Tempat Konektivitas Jarak Skala Mencocokkan pola Buffer Kedekatan, Klasifikasi Gradien, Profil koordinat Pola, susunan, distribusi, Order, Urutan Asosiasi Spasial, tumpang susun / dissolve interpolasi Proyeksi, Transformasi	Obyek dan bidang Lokasi jaringan jarak skala Lingkungan dan Daerah Dependensi spasial, Heterogenitas spasial

Sumber: Berdnaz and Lee, 2011

Kasus lepasnya Kepulauan Simpadan dan Ligitan, pergeseran batas negara yang cenderung menyempit, lapasnya Timur-Timor, sengketa-sengketa batas wilayah, pencurian potensi laut oleh negara lain menunjukkan bahwa penguasaan penyelenggaraan negara terhadap laut sangat rendah. Pemanfaatan potensi laut yang demikian melimpah masih belum optimal sehingga belum dapat memberi-

kan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Paparan di atas menunjukkan bahwa para penyelenggara Negara Indonesia dari rezim ke rezim tidak memiliki kecerdasan spasial. Di masa mendatang harus ada perubahan paradigma pembangunan dari darat ke maritim. Selama ini tidak ada upaya khusus untuk mengembangkan kecerdasan spasial.

Upaya yang paling strategis untuk merubah paradigma tersebut adalah melalui pendidikan sehingga siswa yang saat ini sedang dalam masa belajar kelak pada saat menerima estafet pembangunan, mereka memiliki paradigma berfikir dan cerdas secara keruangan. Diantara sekian mata pelajaran yang paling memungkinkan untuk penanaman wawasan keruangan dan pengembangan kecerdasan adalah pelajaran Geografi. Pembelajaran Geografi memungkinkan pengenalan pada karakteristik dan potensi wilayah, serta strategi pembangunan yang berorientasi ke maritim dan cerdas secara spasial. Kecerdasan spasial merupakan jenis kecerdasan yang sangat penting bagi setiap orang terutama ahli perencanaan ruang/wilayah, perancang strategi perang, kartografer, para pemimpin, para pengembang geografi regional, surveyor, dan lain-lain.

Cerdas spasial merupakan konsep kecerdasan yang dikembangkan oleh Gardner. Cerdas spasial adalah salah satu jenis kecerdasan dalam teori kecerdasan ganda. Untuk penanaman dan pengembangan kecerdasan spasial dapat dilakukan sejak usia dini sampai tiap jenjang pendidikan tinggi. Untuk itu perlu dirumuskan model dan strategi pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya kecerdasan spasial pada setiap jenjang pendidikan. hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa jenis-jenis kecerdasan berkembang pada tahap usia yang berbeda-beda, misalnya kecerdasan musikal lebih awal berkembang pada usia dini.

Upaya Meraih (kembali) Kejayaan

Upaya meraih kembali kejayaan yang pernah diraih oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad 7 sampai awal abad ke-13), dan mencapai keemasan pada masa Raja Balaputra Dewa (berdasarkan prasasti Nalanda, 860). Salah satu faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya bisa menguasai seluruh bagian barat nusantara adalah runtuhnya kerajaan Fu-Nan di Indocina. sebelumnya, Fu-Nan adalah satu-satunya pemegang kendali di wilayah perairan selat malaka. faktor lainnya adalah kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya yang mampu menguasai jalur lalu lintas perdagangan antara india dan cina. dengan kekuatan armada yang besar, kerajaan Sriwijaya kemudian melakukan ekspansi wilayah sampai ke Pulau Jawa (Jawa Dwipa) (<http://www.nttuweb.com/ntt/sejarah/>).

Kerajaan Majapahit (1293-1518) didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana (berkuasa tahun 1293-1309), mencapai masa keemasan pada saat kerajaan dipimpin oleh Hayam Wuruk (bergelar Sri Rajasanagara) yang berkuasa pada periode tahun 1350-1389) berkat dukungan dan kegigihan

mahapatih Gajah Mada dalam menaklukan berbagai wilayah di saentaro nusantara. Majapahit saat itu telah mengenal manajemen wilayah modern, wilayah-wilayah dibagi dalam beberapa teritorial, yakni (1) *Negara Agung*, atau Negara Utama, inti kerajaan. Area awal Majapahit atau Majapahit Lama selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan, mencakup wilayah dimana raja dapat secara aktif mengaturnya; (2) *Mancanagara*, area yang melingkupi *Negara Agung*. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi, area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi, yang kemungkinan membentuk persekutuan atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit; (3) *Nusantara*, adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka harus membayar upeti tahunan (Rosita Dellios, 2003).

Bila dianalisis lebih jauh, wilayah kerajaan Majapahit yang sedemikian luas di wilayah yang berbentuk kepulauan, dan sarana transportasi yang ada untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain berupa kendaraan air, maka dipastikan bahwa kekuatan utama kerajaan Majapahit adalah pada angkatan lautnya. Kalau dibandingkan dengan sejarah kekuasaan kerajaan Inggris yang berhasil melakukan penaklukan berbagai wilayah juga pada kekuatan angkatan lautnya. Kondisi wilayah nusantara yang merupakan negeri kepulauan (*archipelagic state*) seharusnya membuat pemimpin negeri ini untuk belajar pada kesuksesan para pemimpin nenek moyang.

Pada saat alat transportasi berkembang pesat, yang dapat digunakan untuk mendukung kontrol wilayah, tampaknya membuat para pemimpin lupa untuk memperhatikan laut. Paradigma negara maritim telah ditinggalkan, alasannya mata pencaharian sebagian besar rakyat pada masa orde lama dan orde baru adalah pertanian, sehingga titik tumpu pembangunan adalah di bidang pertanian. Mereka lupa kalau wilayah Indonesia sebagian besar berupa laut. Paradigma pembangunan yang berorientasi daratan (baca pertanian) saja, menganggap laut sebagai pemisah antar pulau. Untuk mengatasi persepsi dan paradigma yang berorientasi darat ini, The Habibie Center, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Dewan Maritim Indonesia, memperkenalkan paradigma baru yakni paradigma wilayah benua maritim. Inti paradigma ini memandang wilayah Negara kepulauan sebagai satu benua, karena dilihat dari sejarah geologinya berjuta tahun sebelum es mencair menjadi laut, pulau-pulau tersebut merupakan satu benua yang tidak terpisah-pisah (Gondwana). Karena pulau-pulau saat ini telah terpisah oleh perairan, maka penyatunya adalah dasar laut, sehingga menjadi benua dasar laut yang harus dikelola secara terpadu. Tetapi karena luasnya benua laut ini, maka wilayah benua maritim Indonesia dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang dinamakan wilayah kemaritiman.

Dalam wilayah kemaritiman terdapat berbagai wilayah seperti DAS, wilayah homogen, wilayah nodal, mungkin beberapa wilayah metropolitan, yang berinteraksi melalui laut. Dengan paradigma ini, maka laut bukan sebagai pemi-

sah, tetapi laut sebagai penyatu. Laut mengintegrasikan antar wilayah darat (Son Diamar dalam Jakub Rais, 2004).

Praktik otonomi daerah saat ini, yang mendsarkan pengelolaan wilayah berbasis satuan wilayah kabupaten juga mencerminkan lemahnya pemahaman para pemimpin terhadap aspek spasial. Satuan pengelolaan kabupaten menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan, berbagai bencana dan keke-
ringan, persaingan tidak sehat antar wilayah, konflik regional, dan lain-lain. Otonomi dengan basis wilayah kabupaten lebih berorientasi pada memudahkan pengaturan dan wilayah administrasi tanpa memperhatikan kondisi fisiografis antar wilayah, dan perhatian terhadap dampak dari kondisi wilayah yang tidak dikelola atas dasar satuan DAS. Kabupaten-kabupaten yang berada pada satu DAS tetapi tidak dikelola atas dasar karakteristik DAS akan membawa keru-
sakan yang lebih parah, karena pembangunan yang dilaksanakan tidak selaras alam (biofisikal).

Pada saat ini mau tidak mau, kalau negara ini menginginkan untuk meraih kembali kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, maka orientasi pembangunan negara agraris-maritim ini harus lebih banyak ke laut. Persoalan tabal batas negara, yang sebagian besar tapal batas ini terletak di laut harus diselesaikan secepatnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal batas ini adalah pemberian tanda dan pengawasan yang cukup dari suatu negara, dimana pengawasan ini dapat pula didukung oleh rakyat. Tanpa pengawasan dan batas yang memadai maka batas ini akan menjadi tidak bermakna. Apalagi region Indonesia yang banyak berbatasan dengan negeri lain ditambah pula dengan garis pantai yang panjang, sehingga kemungkinan terjadi penyusupan/ infiltrasi darsangat besar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut tentang batas laut Indonesia secara konkrit dan peningkatan pengamanan laut Indonesia yang saat ini masih sangat rendah. Pasalnya, tidak jelas siapa sebenarnya yang bertugas melakukan pengamanan laut. Yang terjadi malah tumpang tindih tugas antar instansi, sehingga perompakan, *illegal fishing*, penyusupan tentara dan nelayan negara tetangga tidak ada yang secara intensif mengurusnya.

Kondisi rendahnya pengamanan laut Indonesia lebih disebabkan persoalan internal dalam penanganan pengamanan laut. Saat ini, pengamanan laut diko-
ordinasikan dalam suatu badan koordinasi pengamanan laut (Bakortanal) yang terdiri dari TNI AL, Bea cukai, polisi perairan (Pol-Air), dan beberapa instasi yang terkait. Namun karena Bakortanal bentuknya koordinasi, inilah yang menjadi masalah karena masing-masing instansi sering berjalan sendiri-sendiri. Khususnya, yang menyangkut masalah logistik dan operasional, sehingga malah tidak ada koordinasi dalam pengamanan laut. Oleh karena itu lebih baik Bakortanal tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga diberikan tambahan kekuatan menjadi satuan komando, sehingga tugasnya lebih terintegrasi dalam operasional. Siapa saja bisa memimpin dan tidak harus TNI AL agar lebih terjamin kepastian hukum dalam pengamanan laut.

Untuk menghindari berbagai permasalahan di laut, dari sekedar pencurian sumberdaya kelautan sampai pada klaim wilayah laut oleh negara lain, sebaiknya para pemimpin negeri ini mengutamakan kekuatan pengamanan laut. Saat ini, dengan wilayah laut yang sangat luas, yang mengelilingi kira-kira 13.000 pulau (menurut survei terakhir yang dilakukan oleh Kementerian KKP, data sebelumnya menyebutkan jumlahnya 17.480 pulau), Indonesia harus memperkuat sumberdaya manusia dan institusi yang menangani laut. Kepemilikan armada aktif (pemukul, patroli, pendukung, lainnya) jumlahnya belum proporsional dengan luas wilayah yang harus diamankan. Indonesia hanya memiliki 148 kapal perang, 2 kapal selam, 317 kapal patroli. Untuk meraih kejayaan, para pemimpin harus memperhatikan laut.

Penutup

Kejayaan kerajaan nenek moyang Bangsa Indonesia dilandasi oleh pemahaman para pemimpinnya yang tahu betul kondisi teritorial nusantara yang sebagian besar berupa lautan. Mereka mempunyai kemampuan berpikir spasial, atas dasar kemampuan tersebut, maka penguasaan laut merupakan syarat mutlak untuk menguasai wilayah lainnya. Penaklukan demi penaklukan wilayah, dilakukan melalui kekuatan angkatan laut.

Para pemimpin negeri nusantara ini harus belajar dari sejarah, bagaimana perhatian para pemimpin masa lalu yang menguasai laut, tetapi bukan berarti meninggalkan daratan. Negeri agraris-maritim ini harus dikelola oleh para pemimpin yang memahami kondisi spasial wilayah Indonesia, yang memiliki daratan yang subur dan lautan yang memiliki sumberdaya yang melimpah. Akankah negeri yang kaya sumberdaya alam ini, tetap merana, tetap terkungkung kemiskinan karena pemimpinnya tidak bervisi spasial? *Wallohu a'lam bishshowab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Berdnarz, Robert S and Lee, Jongwon, (2011). The Component of Spatial Thinking: empirical evidence. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, International Conference: Spatial Thinking and Geographic Information Sciences.
- Dellios, Rosita (2003). "Mandala: from sacred origins to sovereign affairs in traditional Southeast Asia". Bond University Australia. Diakses pada 10-4-2013.
- Gersmehl, Philip J. and Gersmehl, Carol A.(2007) 'Spatial Thinking by Young Children: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability"', *Journal of Geography*, 106: 5, 181 – 191.
- Poesponegoro, M.D., Notosusanto, N. (editor utama), (1990). *Sejarah Nasional Indonesia*. Edisi ke-4. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.

Yakub Rais (ed), (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
Yakub Rais, 2006. Pulau-pulau Kecil itu Kapan Punya nama?. *Samudra - Edisi 35*
- Thn IV - Februari- 2006. Hal 22-23.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit>

<http://www.nttuweb.com/ntt/sejarah/>

MENANAMKAN JIWA KEPEMIMPINAN DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI

Enung Hasanah
SMA Negeri I Depok

Abstrak

Indonesia saat ini sedang dilanda krisis moral dan kepemimpinan. Hal ini perlu diantisipasi dengan menanamkan jiwa kepemimpinan generasi muda, sebab setiap anak merupakan bibit bagi masa depan bangsa kita. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Bagaimanakah cara menanamkan jiwa kepemimpinan pembelajaran ekonomi, 2) Jiwa kepemimpinan apa yang dapat ditanamkan melalui pembelajaran ekonomi?

Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) Cara menanamkan jiwa kepemimpinan peserta didik dalam pembelajaran ekonomi yaitu dengan memberikan berbagai kesempatan dan pilihan bagi peserta didik supaya memahami inti pembelajaran dan melatih mereka untuk dapat menyelesaikan masalah ekonomi di masyarakat, 2) Jiwa kepemimpinan yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran ekonomi adalah kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan dan melatih kepercayaan diri.

Kata kunci: *pembelajaran, ekonomi, jiwa kepemimpinan*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang subur secara alamiah. Namun, kenyataannya kemiskinan masih saja tinggi, hingga maret 2010 saja jumlah penduduk miskin masih sebesar 31.020.000 jiwa (13,33%). Tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-111 dari 182 negara. Selain itu, tindakan para koruptor tidak kalah meresahkan bangsa ini. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang dilanda krisis moral dan kepemimpinan. Alam demokrasi di Indonesia yang memberi kebebasan kepada setiap rakyatnya, kini malah dijadikan ajang pembenaran pendapat pribadi oleh para (oknum) pemimpin (penguasa) maupun rakyat biasa demi kepuasan pribadinya.

Indonesia kini memerlukan pemimpin hebat sekelas Jenderal Sudirman yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi bangsa ini. Untuk itu diperlukan upaya-upaya konkrit yang dapat menghasilkan generasi penerus

yang berkualitas yang mampu meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa secara lebih baik.

Pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk membangun jiwa kepemimpinan generasi muda. Melalui pendidikan, para pemuda akan mendapatkan berbagai pengalaman hidup yang dapat mematangkan kepribadian dan cara berfikirnya. Secara ideal, proses pendidikan harus mampu memberi penguatan-penguatan positif terhadap perkembangan potensi peserta didik baik dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor secara inkoheren. Ketiga aspek tersebut seyogyanya dikemas dalam kegiatan pembelajaran aktif yang bersinergi dengan penanaman budaya karakter bangsa.

Mata Pelajaran Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang dipelajari peserta didik tingkat SMA yang fokus pembahasannya mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Sementara itu, belajar ilmu sosial merupakan pendidikan afektif melalui latihan profesional, pengalaman hidup, dan nilai-nilai sosial serta nilai kepribadian yang akan menuntun kita dalam mengambil keputusan (Brown, Keen & Dyball, 2005: 256). Dengan demikian mata pelajaran ekonomi memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menanamkan jiwa kepemimpinan, baik dari segi materi maupun proses pembelajaran.

Kepemimpinan

Pemimpin bukanlah orang yang tahu segalanya (Stevenson, 2006:184). Para pemimpin bisa saja tidak memiliki keterampilan praktik dalam politik atau pun bisnis, tetapi mereka mampu memberikan pandangan jauh ke depan dan mampu membuat orang yang dipimpinnya semakin menjadi berhasil dengan mengikuti arahan dari sang pemimpin.

Seorang pemimpin mampu mengambil keputusan tanpa keraguan. Dengan demikian kepemimpinan/leadership memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti dari manajemen.

McCauly, Moxley, & Velsor (1998: 14) menyatakan bahwa peran dan proses kepemimpinan membutuhkan pembaharuan, harus mampu mengatasi kesulitan, konflik, dan kekecewaan. Kepemimpinan itu sendiri adalah tantangan yang terus dikembangkan. Kemampuan memimpin adalah kemampuan yang berasal dari, dan untuk dirinya sendiri melalui pengalaman yang sudah dilalui dalam hidupnya maupun dari orang lain. Berdasarkan hal itu, jelaslah bahwa kepemimpinan adalah sifat yang sangat kompleks.

Di dunia ini, ada orang-orang yang telah menjadi pemimpin besar tetapi memiliki ambisi pribadi terlalu banyak atau keserakahan, sehingga kepemimpinannya hancur bahkan bisa berakhir di penjara. Maka kemampuan memimpin, bukanlah sekedar mampu mengatur orang lain dan lingkungannya, melainkan

juga harus mampu mengatur dan memimpin diri sendiri berdasarkan moralitas dan keyakinan terhadap Tuhan.

Kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan untuk membuat orang bersemangat tentang tujuan dan membimbing mereka untuk mencapainya. Pemimpin sering bergantung pada orang lain untuk mencapai tujuan. Tapi para pemimpin memiliki bakat dan merupakan orang-orang inspiratif dan bermanfaat.

Kepemimpinan memerlukan tanggungjawab yang sangat besar. Seorang pemimpin harus menghormati orang-orang yang mengikuti dia dan mengakui bahwa seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa adanya orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin yang baik harus mendengarkan saran dan menghargai mereka yang bekerja keras.

Terdapat banyak teori dan tipe kepemimpinan. tetapi model kepemimpinan dalam makalah ini menekankan bagaimana membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kharismatik. Sebab model kharismatik ini memiliki beberapa keunggulan dibanding model lain.

Robert House menyampaikan teorinya bahwa kepemimpinan yang efektif menggunakan memiliki kharisma, memiliki keyakinan diri, mampu mempengaruhi, dan menampilkan moralitas tinggi untuk meningkatkan karismatiknya. Dengan kharismanya pemimpin transformational akan menantang bawahannya untuk melahirkan karya istimewa. Langkah yang dilaksanakan pemimpin ini biasanya membicarakan dengan pengikutnya bagaimana pentingnya kinerja mereka, bagaimana bangga dan yakinnya mereka sebagai anggota kelompok, bagaimana istimewanya kelompok yang akan menghasilkan karya luar biasa (<http://cybermanado.blogspot.com/2012/04/leadership-teori-kepemimpinan>).

Menurut Bass & Avilio (Conger & Kanungo, 1998: 14) bahwa terdapat empat ciri utama tipe pemimpin kharismatik transformational yaitu: kharismatik dan mampu mempengaruhi orang lain, inspiratif, memiliki karakter intelektual, dan memiliki pertimbangan individual.

Kharisma menyangkut dua hal penting yaitu perilaku pemimpin dan reaksi pengikutnya, seperti kepercayaan terhadap kemampuan pemimpinnya. Inspiratif merupakan kemampuan untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Karakter intelektual yaitu kemampuan untuk berfikir *smart* (berpikir kritis), serta pertimbangan individu artinya kemampuan dirinya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya.

Menanamkan jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran ekonomi.

Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia. Tujuan dan definisi pendidikan ekonomi adalah untuk menganalisis bagaimana barang-barang dan jasa dapat diproduksi dan didistribusikan guna memenuhi kebutuhan manusia (Sunal & Haas, 1993: 311). Ekonomi tidak hanya berbicara tentang individu sebagai bagian dari sebuah sistem ekonomi, konsumen, sebuah usaha, perserikatan, dan pasar produksi, tetapi juga

tentang seluruh bagian konstitusi sistem ekonomi dalam suatu negara, yang menjelaskan bagaimana seorang individu dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara umum (Ellis, 1998: 36). Selain itu, dengan adanya ilmu ekonomi diharapkan dapat membentuk suatu sistem produksi dan distribusi yang dapat bekerja lebih baik di bawah komando pemerintah sebagai pemilik kebijakan. Jadi mata pelajaran ekonomi itu merupakan satu set pengetahuan dan cara pikir mengenai kehidupan bermasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Ekonomi sebagai suatu pengetahuan terdiri dari konsep, generalisasi, dan teori-teori yang dibangun oleh orang-orang yang berusaha untuk memperpanjang nilai guna sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal yang terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kunci terpenting dalam pembelajaran ekonomi adalah bagaimana sistem berpikir manusia supaya dapat mengambil keputusan ekonomi di antara beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan yang diambil diharapkan merupakan keputusan ideal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat umum. Dengan demikian, *output* dari proses pembelajaran ekonomi secara ideal adalah dapat menghasilkan para pemimpin muda yang mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan ekonomi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kekuatan diri, keyakinan, dan moralitas yang tinggi.

Lalu bagaimana implementasinya dalam pembelajaran ekonomi? Pembelajaran yang efektif bukanlah sekedar mentransfer pengetahuan melainkan mampu menciptakan sesuatu perubahan yang positif melalui berbagai proses belajar yang didasari oleh keyakinan guru itu sendiri (Nemser, S.F. & Buchmann, M., 2005: 223-224). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Brown (2006: 2) bahwa *Evidence for the interconnection of these beliefs is scarce, yet there is a recurring theme that what teachers believe about one area of instruction (e.g., teaching or curriculum) impacts on practices and conceptions in other important domains (assessment or learning).*

Guru harus yakin bahwa mengajar merupakan komitmen jangka panjang untuk mengerahkan segala kemampuan kita untuk membantu orang muda mengembangkan segi intelektual, emosi, dan perilaku (Partin, 2005: 22). Supaya potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal, mereka perlu kesempatan belajar dengan strategi yang bervariasi (Doel & Shardlow, 2005:9). Penerapan berbagai strategi pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang efektif (Voltz, Sims, & Nelson, 2010: xvii).

Melalui perpaduan beberapa metode pembelajaran aktif yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter budaya bangsa, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengadakan pengamatan, pengklasifikasian, penafsiran, peramalan, penerapan, perencanaan, penelitian berdasarkan nilai moral yang dijadikan pedoman sikap dan mengkomunikasikan hasil pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Berdiskusi dengan sportif, belajar dengan sungguh-sungguh ataupun menghargai pendapat orang lain, mengemukakan pendapat dengan pertimbangan

an moralitas, dan berusaha memahami makna pembelajaran bagi kehidupan nyata, merupakan bagian dari proses belajar untuk memiliki jiwa kepemimpinan.

Keterampilan mengambil keputusan ekonomi

Pokok permasalahan dalam ekonomi adalah *scarcity*. Setiap orang setiap hari dituntut untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan guna mengatasi kelangkaan, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Tindakan ini tentunya bertujuan supaya tidak mengakibatkan biaya peluang yang terlalu besar. Biaya peluang merupakan kesempatan yang ditinggalkan karena memilih hal yang lain.

Seorang pemimpin yang transformatik harus mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan moralitas yang tinggi dan harus mampu meyakinkan orang lain bahwa apa yang diputuskannya adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini guru dapat mengajari peserta didik untuk melakukan beberapa langkah sebelum mengambil keputusan yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif, membuat kriteria, dan menetapkan konsekuensi yang akan terjadi apabila mengambil keputusan tertentu.

Langkah-langkah tersebut merupakan proses belajar untuk memiliki karakter intelektual yang tinggi yaitu berlatih berpikir kritis. Pengertian kemampuan berpikir kritis sampai sekarang masih banyak yang memperdebatkan. Namun melihat tujuannya intinya sama yaitu menunjuk pada kemampuan seseorang menggunakan akal dan pikirannya dalam menyelesaikan suatu masalah dan mengambil keputusan. Meskipun Bloom, mengatakan bahwa kemampuan berpikir masih berada dalam ranah kognitif (Sudjana, 2000, h:128). Tetapi kemampuan berpikir merupakan ranah kognitif tingkat paling tinggi. Dalam hal ini, Sudjana mengelompokkan kemampuan berpikir sebagai keterampilan intelek. Keterampilan intelek berhubungan dengan kegiatan untuk memecahkan masalah, menyelenggarakan penelitian, melakukan perencanaan, mengerjakan soal-soal statistik dan matematik, membuat proposal dan lain-lain. Keterampilan intelek lebih menekankan pada peningkatan kemampuan berpikir rasional. Kemampuan berpikir rasional sangat penting bagi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan.

Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih konkrit melalui, 1) Melakukan investigasi tentang permasalahan yang familiar dengan peserta didik. 2) Menggunakan tabel pengambilan keputusan yang memuat alternatif pilihan dan konsekuensi yang akan diterima atas keputusan yang diambil Menurut (Sunal & Haas, 1993: 319).

Berikut ini adalah contoh tabel pengambilan keputusan dan konsekuensi yang harus ditentukan oleh peserta didik secara berkelompok pada materi biaya peluang. Misalnya guru menyodorkan tentang rencana pemetintah untuk menaikkan tarif dasar listrik. Kemudian peserta didik diarahkan untuk bekerja secara kelompok menganalisis kemungkinan baik atau tidaknya kebijakan tersebut bagi masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Tabel 1.1
Tabel konsekuensi pengambilan keputusan
Haruskah Tarif Dasar Listrik di Indonesia dinaikkan

Alternatif	Konsekuensi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Ya		
Tidak		

Tabel 1.1 menunjukkan sebuah tantangan bagi peserta didik dalam hal memprediksi akibat dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam tabel tersebut juga meliputi tanggapan negatif juga positif tentang kebijakan tersebut. Setelah peserta didik melengkapi tabel, kemudian mereka akan berdiskusi tentang penting tidaknya dan peluang tentang kebijakan pemerintah tersebut.

Pengambilan keputusan akhir, sangatlah penting, sebagai sebuah latihan menjadi seorang pemimpin, bukan hanya melatih intelektual. Memberi kesempatan peserta didik untuk mengambil keputusan dan mengenalkan peserta didik untuk hidup dengan segala konsekuensi atas pilihannya merupakan hal penting dan nilai kepemimpinan yang realistis.

Tabel pengambilan keputusan ini, kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok peserta didik. Proses presentasi tersebut merupakan bentuk proses pembelajaran yang menanamkan kepercayaan diri dan proses berlatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik bagi peserta didik. Kebiasaan berbicara di depan umum, mempresentasikan materi hasil penemuan sendiri di depan kelas, akan dapat mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin yang kharismatik. Dengan keberanian untuk tampil di muka kelas, maka mental peserta didik akan terlatih untuk menjadi orang yang percaya diri. Meske demikian, rasa percaya diri itu perlu dibarengi dengan rasa hormat kepada orang lain. Sebagaimana diungkapkan Stevenson bahwa beberapa orang memang ada yang terlahir dengan memiliki kemampuan alami sebagai pemimpin. Setiap orang akan mendengarkan mereka dengan antusias. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kepemimpinan natural, dia bisa membanggunya melalui proses pendidikan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang didengarkan orang lain, dapat dilatih melalui latihan komunikasi, belajar bagaimana supaya orang lain antusias dan mau mendengarkan visi anda, yaitu dengan memperlakukan orang lain secara hormat (2006: 186).

Teori dari Stevenson ini bukanlah hal yang baru, memperlakukan orang lain secara terhormat sama dengan menghormati diri sendiri. Maka dalam proses pembelajaran para guru harus selalu mengingatkan dan memberi contoh bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang sesuai dengan tuntutan moral dan etika di masyarakat.

Penutup

Menanamkan jiwa kepemimpinan bukanlah hal yang mudah, karena kepemimpinan merupakan sesuatu yang kompleks. Tetapi, jiwa kepemimpinan dapat dibina dan ditanamkan pada peserta didik sebagai generasi calon pemimpin masa depan melalui proses pembelajaran yang benar yaitu dengan memberi contoh konkrit, dan memadukan berbagai strategi pembelajaran aktif di kelas.

Proses pembelajaran hendaknya mampu melibatkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik secara seimbang. Melalui proses pembelajaran aktif, peserta didik akan terlatih untuk selalu memiliki kepercayaan diri, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat, sebagaimana seorang pemimpin sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, G.T.L. (2006: 2). *New teaching and teacher issues: Integrating teachers conceptions, asesment, teaching, learning, curricullum, and evicacy*. Nova Science Publisher, Inc. New York.
- Brown, V. A., Meg K., & Dyball, R.(2005). *Lessons from the past, learning for the future. Social learning in environmental management towards a sustainable future*. UK and USA: Earthscan.
- Conger, J.A. & Kanungo, R.N. (1998). *Charismatic leadership: in organization*. USAGE Published. India.
- Dimitriadis, G. & Kamberelis, G. (2006), *Theory For Education*, New York: Routledge.
- Ellis, A.K. (1998). *Teaching and learning elementary social studies*. Library of Congress Cataloging in- Publication owner. USA.
- McCauley, C.D, Moxley, R.S, & Velsor, E.N. (1998). *The Center for creative leadership handbook of leadership development*. Josess-Bass. California.
- Media Indonesia, 19 Februari 2011.
- Nemser, S.F. & Buchmann, M. (2005), "Knowing, Thinking and Doing in Learning to Teach", *Teacher Thinking and Professional Action*, New York: Routledge, pp. 223-224.
- Ronald L. Partin (2005), *Kiat Nyaman Mengajar di Dalam Kelas*, Indonesia: PT. Indeks.
- Stevenson, Nancy. (2006). *Young Person's Character Education Handbook*. JIST Publishing, Inc. America.
- Sudjana, D. 2000. *Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Sunal, C.S. & Haas, M.E. (1993). *Social studies and the middle schol student*. Harcourt Brace College Publishers. Tokyo.

PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMBELAJARAN IPS

Supardi

Dosen Jurusan Pendidikan IPS FIS UNY

Email : pardi_uny@yahoo.com HP: 081226916503

Abstrak

Kepemimpinan merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Negara yang tangguh selalu ditopang oleh kepemimpinan yang unggul. Kesiapan melahirkan kepemimpinan yang tangguh merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Kepemimpinan tidak cukup dipelajari, tetapi perlu ditanamkan, dialami dan dibiasakan sejak dini. Kepemimpinan akan terbentuk seiring perjalanan hidup individu atau masyarakat. Pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat potensial sebagai media pengembangan kepemimpinan anak. Pembelajaran IPS adalah salah satu mata pelajaran potensial untuk mengembangkan pendidikan kepemimpinan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji; 1) Bagaimana nilai strategis IPS sebagai mata pelajaran yang potensial dalam mengembangkan kepemimpinan? 2) Bagaimana strategi melaksanakan pendidikan kepemimpinan melalui pembelajaran IPS?

Kata Kunci: *kepemimpinan, pendidikan IPS*

Pendahuluan

Carut marut masalah sosio kebangsaan akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran akan kelangsungan negeri yang merdeka sejak tahun 1945. Korupsi menjadi fenomena dari Jakarta hingga pedalaman Papua, kebiasaan menghamburkan uang rakyat menjadi tradisi para wakil rakyat dari Senayan sampai Tabanan. Kecenderungan para pemegang kendali negara hanya sebagai penguasa dan pengusaha, menyebabkan bangsa ini terus dalam keterpurukan, bahkan nyaris menjadi negeri gagal. Para pemimpin lebih banyak mengurus daripada mengurus, lebih mementingkan status daripada peran, menunjukkan lemahnya bangsa ini. Ibarat tubuh manusia, Indonesia sedang mengalami penyakit ganas, dalam stadium lepas. Celaknya, pada saat bangsa sedang terpuruk, para tokoh dan pemimpin banyak yang saling menyalahkan. Bahkan masyarakat dibuat semakin

bingung, saat vonis yang dijatuhkan pengadilan kepada koruptor masih disamar-kan dengan berbagai pembelaan.

Masyarakat tidak dapat lagi membedakan mana yang salah dan siapa yang benar. Mereka tidak dapat lagi memilih mana yang akan mengayomi dan mana yang hanya akan mengelabui. Sekali lagi, masyarakat sulit mencari benang merah dari semua masalah pelik di negeri ini. Bahkan tidak sadar penyakit akut yang sekarang sedang diderita.

Duapuluh tahun silam, Koentjaraningrat pernah memberikan peringatan keras akan penyakit akut yang diderita bangsa Indonesia. Secara tegas Koentjaraningrat (1994:56) menyatakan “*Beberapa penyakit mental akut bangsa Indonesia yakni mental-mental tamak, feodal, tahayul, tidak amanah, bermental terjajah, korup, tidak disiplin, suka menyepelkan, suka menerabas, riya, meremehkan mutu, tidak percaya diri, lari dari tanggungjawab.*” Ungkapan tersebut bukan sekedar sinisme, asumsi atau apriori. Kepakaran dan kejelian Koentjaraningrat dalam menelisik secara objektif tidak diragukan lagi. Celakanya, penyakit tersebut menggerogoti bagai kanker ganas yang menyerang seluruh sel penting manusia.

Kebingungan dan kegelisahan masyarakat pada saat ini, tidak lepas dari krisis kepemimpinan yang melanda negeri ini. Kegelisahan ini juga mendorong berbagai komponen bangsa berikhtiar untuk memecahkan masalah tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang potensial peranannya dalam mengembangkan kepemimpinan yang amanah. Karena itu, salah satu sekolah menjadi institusi penting yang peranannya besar dalam melahirkan para pemimpin. Upaya pengembangan kepemimpinan di sekolah dilakukan melalui berbagai strategi baik ekstrakurikuler maupun kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu pelajaran yang potensial dalam penanaman jiwa kepemimpinan anak.

Hakikat Kepemimpinan

Apakah hakekat kepemimpinan/*leadership*? Siapakah pemimpin, apakah pemimpin itu sama dengan penguasa, manajer, direktur, dan sebagainya? Apakah kepemimpinan itu dapat dipelajari dan diajarkan? Gibson, Ivancevich, dan Donnelly dalam Wibowo (2011) mendefinisikan tentang kepemimpinan bahwa “*Leaders are agents of change, persons whose act affect other people more than other people's acts affect them*”, atau pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya. Sweeney dan McFarlin (2002) yakni: “*Leadership involves a set of interpersonal influence processes. The processes are aimed at motivating sub-ordinates, creating a vision for the future, and developing strategies for achieving goals*”, yang dapat diartikan bahwa kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.

Definisi kepemimpinan di atas, memiliki makna bahwa kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka sesungguhnya pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan kajian di atas, maka sesungguhnya yang dikedepankan pemimpin bukanlah menggunakan kekuasaannya, tetapi menggunakan pengaruhnya. Kepemimpinan dapat dimiliki siapa pun, dan diterapkan dimanapun.

Apakah kepemimpinan dapat diajarkan? Untuk menjawab ini tentu harus melihat ketrampilan atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki pemimpin? Kepemimpinan bukan sekedar merupakan kompetensi yang dapat dilihat. Namun demikian, dalam sistem kepemimpinan modern, setidaknya setiap pemimpin memiliki unsur-unsur ketrampilan dasar yang sama. McDonald-Mann dalam McCauley (1998: 110) mengidentifikasi empat kecakapan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau yang memiliki jiwa kepemimpinan yang diuraikan menjadi 16 ketrampilan yakni;

<i>Leadership Capacity</i>	<i>Skills</i>
<i>Ability to interact socially</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>conflict management</i> 2. <i>negotiation</i> 3. <i>influencing</i> 4. <i>team building</i> 5. <i>active listening</i> 6. <i>ability to give feedback</i> 7. <i>communication</i> 8. <i>adaption</i>
<i>Creativity</i>	<ol style="list-style-type: none"> 9. <i>ability to see alternate solutions</i> 10. <i>ability to question assumptions</i> 11. <i>ability to explore ambiguity</i>
<i>Critical evaluation and sistematic thinking</i>	<ol style="list-style-type: none"> 12. <i>ability to think analytically</i> 13. <i>ability to detect problems</i> 14. <i>problem solving</i>
<i>Empowerment</i>	<ol style="list-style-type: none"> 15. <i>ability to motivate others through participate decision making</i> 16. <i>goal setting</i>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kepemimpinan dapat diajarkan atau dilatihkan, karena seseorang memiliki jiwa kepemimpinan dapat dilihat melalui kecakapan yang dimilikinya. Keenambelas ketrampilan yang diidentifikasi McDonald sebagai ciri-ciri seorang leader yang dapat dilihat indikatornya. Dengan demikian, keenambelas ketrampilan tersebut sangat mungkin untuk

dikembangkan. Kemampuan melakukan manajemen konflik, melakukan negosiasi, mempengaruhi orang lain, kerja tim, aktif mendengarkan, kemampuan memberikan komunikasi umpan balik sebagai kompetensi sosial seorang leader merupakan ketrampilan yang mudah dilihat dan dikembangkan. Contoh pengembangan ketrampilan ini misalnya ingin mengembangkan ketrampilan manajemen konflik, dapat dilatih melalui berbagai studi kasus, sehingga individu terbiasa melakukan manajemen konflik. Demikian halnya dalam melakukan negosiasi, dapat dilakukan latihan melalui bermain peran atau penugasan lainnya. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan nilai-nilai yang dapat dipelajari.

Untuk mengembangkan ketrampilan dasar leadership di atas McDonald-Mann dalam McCauley (1998: 113-116) menawarkan lima metode yakni; *lecture, case study, role-play, behavioral role-modeling, and simulation*. Kecuali *lecture*, keempat metode lainnya lebih menekankan pada upaya membiasakan individu berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorong penyelesaian leader. *Lecture* merupakan metode yang menekankan pada penanaman jiwa kepemimpinan melalui ceramah atau presentasi. Hal ini dapat dilakukan terutama untuk memberikan dorongan kuat agar individu mampu mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Sedangkan 3 metode lainnya lebih menekankan pada latihan pemecahan masalah. Sebagai contoh, dalam melakukan studi kasus, pelatihan dapat dikembangkan dengan menghadapkan seseorang pada kasus-kasus aktual dan terdekat. Demikian halnya dalam metode *role play*, juga menekankan bagaimana individu menyelami perannya sebagai leader. *Behavioral role-modeling* dan *simulation* juga merupakan metode yang memiliki kemiripan.

Pendidikan IPS dan Pendidikan Kepemimpinan

Bagaimana hubungan pembelajaran IPS dengan pendidikan kepemimpinan? Untuk melihat bagaimana kemungkinan melaksanakan pendidikan kepemimpinan dalam pembelajaran IPS, perlu menelaah hakikat pembelajaran IPS itu sendiri. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Menengah Pertama. Mahood dkk., (1991: 10) mendefinisikan IPS, "*The Social Studies are comprised of those aspects of history, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and colleges*". Somantri (2004:44) menyatakan bahwa IPS adalah "Suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan". Dengan demikian pelajaran IPS berbeda dengan pelajaran ilmu-ilmu sosial, seperti IPS yang didefinisikan *National Council for Social Studies NCSS*.

"Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion,

and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences (Savage and Armstrong, 1996)

Sebagai *synthetic discipline*, IPS mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS bukan sekedar mensistesisikan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

National Council for Social Studies (NCSS) menegaskan bahwa IPS mempunyai tujuan informasi dan pengetahuan (*knowledge and information*), nilai dan tingkah laku (*attitude and values*), dan tujuan ketrampilan (*skill*): sosial, bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan ketrampilan intelektual (*Jarolimec, 1986:5-8*). Menurut Awan Mutakin (1998), tujuan IPS adalah untuk mengembangkan siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi tema-tema 1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan, 2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan, 3) Sistem Sosial dan Budaya, dan 4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. Tema-tema tersebut menggambarkan bahwa IPS merupakan pelajaran yang selalu berkaitan dengan masalah sosial yang dekat dengan lingkungan siswa.

Rumusan tujuan ruang lingkup mata pelajaran IPS di atas menekankan bahwa IPS memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial, memiliki mental positif dalam arti memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang diyakini, dan terampil mengatasi berbagai masalah sehari-hari. Dengan demikian IPS sangat potensial untuk mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan.

Pendidikan Kepemimpinan dalam Pembelajaran IPS

Pembelajaran meliputi beberapa kegiatan penting yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Pendidikan kepemimpinan dalam IPS tidak menjadi materi tersendiri, tetapi terintegrasi dengan ketiga kegiatan pembelajaran di atas. Karena itu, dalam pengembangan pendidikan kepemimpinan dalam IPS harus memperhatikan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Di dalam kegiatan perencanaan, hal yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan pengembangan bahan ajar. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran menjadi sarana paling efektif untuk mengembangkan pendidikan kepemimpinan. Penilaian pembelajaran, diarahkan pada penilaian multi aspek dan multi metode yang dapat memotivasi pengembangan softskill siswa.

1. Pengembangan bahan ajar

Dalam mengembangkan bahan ajar, guru dapat memperhatikan materi-materi yang potensial dalam penanaman pendidikan kepemimpinan. Dalam pembelajaran IPS, materi potensial dapat dilihat dari konsep-konsep penting dalam IPS yakni sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi.

Karakteristik konsep sejarah adalah mempelajari tentang kehidupan manusia masa lalu. Materi potensial dalam penanaman nilai-nilai kepemimpinan dalam konsep sejarah adalah mempelajari peranan para tokoh pada masa lalu. Sebagai contoh materi tentang sejarah tokoh-tokoh pada masa kerajaan dan kebangkitan nasional merupakan materi yang sangat dekat dengan nilai-nilai kepemimpinan. Modeling melalui pelajaran para tokoh masa lalu dapat menggugah semangat kepemimpinan siswa.

Dalam konsep-konsep sosiologi, materi yang potensial untuk penanaman nilai-nilai kepemimpinan misalnya tentang konsep interaksi sosial, penyimpangan sosial, pranata sosial, dan sebagainya. Strategi penyelesaian berbagai masalah sosial merupakan materi strategis dalam mengembangkan ketrampilan kepemimpinan. Bagaimana menyikapi pengangguran, kemiskinan, penyimpangan sosial, dan sebagainya mendorong siswa menemukan berbagai alternatif pemecahan. Resolusi konflik dan pemecahan masalah tersebut berarti telah mengembangkan ketrampilan kepemimpinan siswa.

Konsep-konsep geografi juga dapat dikembangkan sebagai materi untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Mengembangkan materi tentang lingkungan hidup, penanganan bencana alam, mengatasi masalah pesatnya pertumbuhan penduduk merupakan sarana potensial mengembangkan keterampilan kepemimpinan anak.

Ilmu Ekonomi memiliki konsep-konsep penting terutama berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Berfikir kreatif menjadi ruh penting dalam konsep ilmu ekonomi sebagai bagian materi pembelajaran IPS. Bagaimana strategi mengembangkan sumber daya dan mengorganisasi kegiatan ekonomi merupakan contoh potensi pembelajaran kreativitas dalam konsep ekonomi.

Beberapa contoh nilai-nilai dalam konsep mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di atas memiliki hubungan atau keterkaitan. IPS memiliki sifat keterpaduan yang menggambarkan hubungan interelasi dan integrasi antara berbagai konsep ilmu sosial tersebut untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Karena itu pembelajaran IPS akan lebih bermakna apabila berbagai materi yang disebutkan di atas diajarkan secara terpadu.

Pengembangan bahan ajar dilakukan secara bervariasi menyesuaikan materi, karakteristik anak, dan lingkungan belajar. Berbagai jenis media pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung bahan ajar yang berkualitas.

2. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran, merupakan kunci penting dalam menanamkan pendidikan kepemimpinan di sekolah. Metode pengembangan ketrampilan dasar leadership McDonald-Mann dalam McCauley (1998: 113-116) yang meliputi ; *lecture, case study, role-play, behavioral role-modeling, and simulation* dapat diadopsi dalam berbagai metode pembelajaran IPS. Melalui metode pembelajaran yang dikembangkan, siswa sekaligus berlatih mengembangkan ketrampilan dasar kepemimpinan.

Studi kasus terhadap masalah-masalah sosial seperti, bagaimana mengatasi masalah tawuran merupakan contoh melaksanakan metode pembelajaran untuk melatih keterampilan *leadership*. Dalam kegiatan studi kasus tersebut, siswa mengidentifikasi latar belakang masalah, dampak terjadinya masalah, dan menemukan penyelesaian masalah. Dalam kegiatan ini tentu menekankan *student-centered learning* dan *community learning*, yang secara tersembunyi telah melatih dasar-dasar keterampilan kepemimpinan.

Bermain peran juga merupakan metode sangat efektif untuk mengembangkan ketrampilan kepemimpinan anak. Metode ini melatih siswa menjiwai peran yang sangat potensial untuk mengembangkan jiwa dan perasaan anak. Berperan menjadi raja, akan mengajak anak seolah-olah menjadi raja. Karena itu akan tersentuh jiwa sebagai seorang raja yang berwibawa, cerdas, dan bijaksana. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi *habit* dan mendorong anak untuk belajar IPS bukan sekedar mempelajari materinya, tetapi lebih menekankan pada penggunaan konsep IPS dalam memecahkan masalah kehidupannya.

Selain metode bermain peran, beberapa contoh metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan misalnya *debate, jigsaw, diskusi, inquiry, simulasi, dan simulasi*. Metode debat misalnya dapat dipadu dengan simulasi untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Demikian halnya metode pembelajaran diskusi, dapat dilakukan dengan mendorong siswa mencari masalah, merumuskan masalah, dan mencari penyelesaian.

3. Penilaian Pembelajaran

Pengembangan penilaian dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, lebih menekankan penilaian proses daripada hasil. Karena itu penilaian pembelajaran yang dilakukan bersifat multiaspek dan multiteknik. Penilaian bukan hanya menekankan penilaian kognitif, tetapi juga menekankan afektif dan psikomotorik. Karena itu teknik yang digunakan adalah tes dan nontes.

Penilaian non tes menjadi perangkat paling penting dalam memantau kemajuan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Berpadu dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran, penilaian dapat dilakukan melalui observasi kegiatan pembelajaran, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Penilaian melalui pengamatan dapat dilakukan terutama untuk mendorong siswa

melakukan resolusi konflik terhadap masalah-masalah sosial. Sebagai contoh bagaimana pandangan siswa terhadap perkawinan sejenis, perilaku terorisme, atau pembuatan senjata pemusnah massal.

Penilaian produk dapat dilakukan guru dengan mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis pada proyek. Sebagai contoh guru dapat menugaskan siswa untuk menyusun proyek bagaimana cara mengatasi konflik antarke-lompok masyarakat. Penilaian proyek sangat dekat dengan penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio guru dapat merekam proses pencapaian hasil belajar siswa secara objektif melalui bukti atau dokumen hasil tugas para siswa.

Kesimpulan

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukanlah kemampuan yang dapat diperoleh secara instan. Pemimpin memiliki latar belakang sendiri munculnya sebagai pemimpin. Munculnya seorang pemimpin dapat karena latar belakang agama, keturunan, politik, kekuatan fisik, dan sebagainya. Pemimpin memiliki peran penting dalam perjalanan organisasi. Karena itulah, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin seperti kemampuan berinteraksi, kreativitas, berfikir sistematis dan melakukan evaluasi kritis, serta melakukan pemberdayaan. Keempat ketrampilan atau kemampuan dasar kepemimpinan ini dapat dipelajari dan dilatihkan.

Pendidikan kepemimpinan dapat dilakukan melalui pembelajaran IPS dengan; *pertama* mengemas materi yang terintegrasi dengan nilai-nilai kepemimpinan seperti memunculkan tokoh, pemecahan masalah, dan kreativitas. *Kedua*, menggunakan metode pembelajaran yang melatih siswa untuk mengembangkan kepemimpinan seperti studi kasus, bermain peran, diskusi, dan simulasi. *Ketiga*, menggunakan penilaian yang memotivasi siswa seperti penilaian proses dan portofolio. Hasil pendidikan kepemimpinan secara keseluruhan tidak dapat dilihat secara langsung, akan tetapi indikator ketrampilan kepemimpinan dapat dilihat dan terus dikembangkan dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Jarolimek, John, (1982), *Social Studies in Elementary Education*, Mav Millan, London.
- Kuntjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mahood, Wayne, et.al., (1991), *Teaching Social Studies in Middle and Senior High Schools*, Macmillan, Toronto.
- McCauley, Cynthia., Russ S. Moxley, Ellen Van Velsor (ed). (1998). *The Center fo Creative Leadership Handbook of Leadership Development*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.

- Martorella, Peret H. (1994), *Social Studies for Elementary School Children*, Mac Millan, New York.
- M. Numan Somantri, (2001), *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Rosda, Bandung.
- Udik Budi Wibowo. (2011). "Teori Kepemimpinan" dalam *Makalah*. Pembekalan Ujian Dinas Tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta Tanggal 14 Juni 2011.

BERMULA PADA GURU: KECERDASAN INTELEKTUAL, KecERDASAN SPIRITUAL, DAN KecERDASAN HUMANIS

Rias Antho Rahmi Suharjo

Abstrak

Seorang pemimpin profetik transformatif idealnya memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan humanis. Kecerdasan-kecerdasan itu ada dan mewujudkan dalam diri seseorang karena bentuk dan tempaan dengan melalui rentetan proses yang panjang. Bukan hanya kemaren sore, tetapi mungkin dari ribuan sore sebelumnya, proses itu bermula.

Program wajib belajar di Indonesia pada akhirnya menempatkan guru sebagai orang tua kedua siswa. Dalam hal ini, guru berpotensi dan berkontribusi besar dalam mendampingi generasi muda Indonesia dalam berproses untuk dapat menjadi manusia seutuhnya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita nasional.

Seorang guru, dalam mendampingi anak didiknya berproses, harus pula memiliki niat yang tulus dan cita-cita yang besar. Seorang guru tidak sebatas mengajar, tetapi juga mendidik. Guru idealnya tidak hanya mendidik intelektualitas dan mental siswanya, tetapi juga mempertajam nurani dan rasa untuk mendapatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan humanis yang optimal, serta menata hati dan semangat anak didiknya untuk berjuang meraih cita-cita hebat mereka.

Di sinilah guru berperan sebagai ujung tombak langkah bangsa membentuk generasi-generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan profetik transformatif. Guru yang menyayangi murid-muridnya dan mengajar dengan penuh kesadaran akan membukakan jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih kokoh, serta membantu proses lahirnya pemimpin-pemimpin dengan karakter profetik transformatif di Indonesia tercinta ini.

Kata Kunci: *Guru, pendampingan, kecerdasan, pemimpin, cita-cita*

Seorang pemimpin profetik idealnya memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan humanis. Ketiga kecerdasan tersebut dapat dikaitkan dengan kecerdasan dalam berlogika, kecerdasan dalam manajemen hati, dan kecerdasan dalam bersikap. Apabila seseorang dapat memadukan

ketiga kecerdasan tersebut, dapat menyeimbangkannya, niscaya akan menjadi orang yang bijaksana.

Seorang pemimpin profetik hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sebagaimana salah satu dari empat sifat yang dimiliki nabi Muhammad SAW yaitu *fathonah* yang berarti cerdas. Bagaimana bisa seorang pemimpin dapat memberikan solusi-solusi atas permasalahan negerinya jika ia tidak dibekali dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual tidak harus memiliki gelar akademis yang panjang. Kecerdasan intelektual adalah mengenai bagaimana ia mampu berlogika, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dan yang dengan secara cerdas memikirkan solusi atas suatu permasalahan.

Kecerdasan spiritualitas yang dimaksud merupakan kecerdasan yang berkenaan dengan manajemen hati (emosi), berkenaan dengan bagaimana seseorang mampu menata dan menjaganya. Berikut ini merupakan kutipan dari pernyataan Hendrawan (2009: 169) tentang pentingnya seorang pemimpin profetik memiliki kecerdasan spiritual.

Spiritualitas adalah kecerdasan yang mampu menggagas mengapa kita hidup, merumuskan tujuan-tujuan kehidupan, dan memberikan alas an-alasannya yang tertinggi, sehingga kita mampu memanfaatkan emosi dan pikiran kita secara lebih bernilai (Hendrawan, 2009: 169).

Pemimpin profetik dapat dikatakan 'harus' memiliki kecerdasan spiritual ini dikarenakan:

Pemimpin profetik mengarahkan pengaruh kepemimpinannya pada dimensi hati manusia ini, tujuannya adalah mengarahkan hati menuju hakikatnya yang lurus, yakni mempunyai perasaan yang mendalam tentang kedekatan dengan Allah, rasa tanggung jawab, kesadaran akan pengawasan Allah, dan pemeliharaan diri dari kejahatan... . Sumber kekuatan kepemimpinan profetik ini adalah kesehatan spiritualnya, yaitu kesehatan jiwa dan ruhani-nya (Hendrawan, 2009: 158).

Kecerdasan yang ketiga yang hendaknya dimiliki oleh para pemimpin profetik adalah kecerdasan humanis. Kecerdasan humanis ini adalah kecerdasan yang menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri. Manajemen sikap yang baik terhadap orang lain dan diri sendiri dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman ini dikarenakan adanya hubungan-hubungan dan sikap-sikap baik yang ditunjukkan oleh pemimpin kepada berbagai suku dan budaya serta penghargaan atas eksistensinya.

Kecerdasan-kecerdasan itu ada dan mewujud dalam diri seseorang karena bentukan dan tempaan dengan melalui rentetan proses yang panjang. Ibarat membuat sebuah wayang, dimulai dari menyembelih lembu hingga menyungging bahan, membentuk seorang pemimpin profetik tidaklah instan. Berbagai

peristiwa yang dialami, yang ditangkap dengan kecerdasan dan rasa, akan menjadi pelajaran yang mendewasakan hati dan pikirannya.

Untuk memiliki karakter pemimpin profetik seperti di atas, membutuhkan proses dan tahap yang panjang. Proses itu memerlukan waktu sekian tahun lamanya, yang tentunya tidak cukup dua tiga tahun. Proses itu bahkan dapat bermula sejak ia kecil, di mana sikap dan karakternya itu mulai dibentuk, oleh orang-orang dekat dan lingkungan mereka.

Di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bersama, terdapat program wajib belajar 9 tahun. Bahkan, saat ini pemerintah telah merintis program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar yang memakan waktu belasan tahun tersebut kemudian secara otomatis menempatkan guru dalam posisi yang strategis untuk menjadi orang tua kedua siswa.

Selama sedikitnya 12 tahun itu, siswa hidup dengan bimbingan dan dampingan guru. Guru menjadi sosok pendamping proses bagi tumbuh kembang psikis dan ideologis siswa. Sebagai pendamping proses, tentu saja guru tidak boleh tinggal diam dan berpangku tangan terhadap apa yang terjadi pada anak didiknya. Guru-guru yang bertanggung jawab dan menyadari betul profesinya pasti akan turun tangan dalam membentuk dan mendidik siswanya untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia.

Seorang guru, dalam mendampingi anak didiknya berproses, hendaknya memiliki niat yang tulus dan cita-cita yang besar. Guru idealnya tidak hanya mendidik intelektualitas dan mental siswanya, tetapi juga mempertajam nurani dan rasa untuk mendapatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan humanis yang optimal, serta menata hati dan semangat anak didiknya untuk berjuang meraih cita-cita hebat mereka.

Kedua posisi guru seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai orang tua kedua siswa dan sebagai pendamping proses, mengantarkan guru sebagai sosok yang berkontributor besar dalam membentuk generasi muda Indonesia menjadi manusia seutuhnya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita nasional.

Di sinilah guru berperan sebagai ujung tombak langkah bangsa membentuk generasi-generasi yang memiliki karakter kepemimpinan profetik. Guru yang menyayangi murid-muridnya dan mengajar dengan penuh kesadaran akan membukakan jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih kokoh, serta membanu proses lahirnya pemimpin-pemimpin dengan karakter profetik di Indonesia tercinta ini.

Di tangan para guru inilah, salah satunya, karakter pemimpin profetik dicetak. Lalu guru seperti apa yang dapat mencetak dan menghasilkan kader-kader pemimpin berkarakter profetik ini? Sedikitnya ada tiga sikap yang hendaknya dimiliki guru, agar anak didiknya memiliki karakter kepemimpinan profetik. Ketiga sikap tersebut adalah profesionalitas, keteladanan, serta kebi-

jaksanaan. Sikap bijaksana yang dimaksud adalah bijaksana dalam memandang serta menyikapi perbedaan dan bukan untuk meruncingkannya.

Apapun pekerjaannya, profesionalitas menjadi tuntutan demi keberhasilan dan terwujudnya cita-cita, begitu juga dengan profesi guru. Guru hendaknya mampu bekerja secara professional. Tugas pokok guru adalah mencerdaskan anak bangsa. Salah satu modal pemimpin profetik adalah cerdas. Dengan demikian diharapkan, dengan profesionalisme kerjanya, guru dapat menciptakan kader-kader bangsa yang cerdas.

Sikap kedua yang hendaknya dimiliki oleh guru adalah keteladanan. Guru menjadi teladan bagi para muridnya. Keteladanan ini bahkan akan diperlukan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan keteladanan dari orang tuanya (Wijanarko, 2006: 41). Tidak semua orang tua siswa memiliki sikap yang dapat diteladani bagi anaknya. Apabila keadaan demikian, darimana lagi siswa akan mendapatkan keteladanan jika bukan dari gurunya.

Keteladanan itu penting karena dengan keteladanan, pelajaran, ajaran, dan aturan menjadi nyata serta mudah dimengerti karena ada contohnya (Wijanarko, 2005: 41). Dengan keteladanan, siswa akan termotivasi untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh gurunya karena sang guru telah memberi contoh yang baik.

Ukuran keteladanan guru harus diukur lebih luas dari sekedar kepatuhannya (Surakhmad & Sularto, 2009: 332). Tidak hanya karena mematuhi tugas-tugas fungsionalnya saja seorang guru dikatakan teladan, tetapi juga dalam hal-hal lain. Apabila guru tidak bisa diteladani maka wibawanya akan turun (Zarkasi, 1999: 79). Apabila guru telah turun wibawa, bagaimana bisa siswa akan mempercayai dan menjalankan apa yang ia amanatkan kepada anak didiknya. Oleh karena itu hendaknya guru menjaga dirinya baik-baik dengan cara menjaga lisan dan perbuatannya. Guru-guru yang berkasus akan diremehkan anak didiknya, dan tidak menutup kemungkinan jika sikap bahkan aibnya akan ditiru oleh anak didiknya. Oleh karena itu, di mana pun guru berada, hendaknya guru dapat menjaga sikap dan lisannya.

Sikap ketiga yang hendaknya dimiliki oleh guru adalah bijaksana dalam memandang dan menyikapi perbedaan. Hendaknya guru dapat memberikan dan menunjukkan berbagai sudut pandang dalam menyikapi perbedaan. Tidak dianjurkan bagi seorang guru untuk membatasi sudut pandang siswa, atau menyikapi permasalahan dari satu sudut pandang saja. Baik untuk mengajarkan siswa supaya adil dan luas dalam memberikan sudut pandang terhadap suatu permasalahan. Guru hendaknya dapat menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang arif dari sebab perbedaan itu ada.

Di Indonesia ini, pendidikan akan pluralitas penting diajarkan. Toleransi dan menghargai bukan sekedar pelajaran tetapi hendaknya diterapkan dengan sungguh. Bukan sekedar sebagai formalitas pelajaran, tetapi lebih kepada kete-

ladanan. Keteladanan ini adalah tentang bagaimana ucapan, sikap, dan pemikiran guru yang dikemukakan di muka kelas dan kehidupannya sehari-hari.

Guru hendaknya dapat meleraikan dan bijak menyikapi perbedaan dan bukan meruncingkannya. Guru yang seperti ini adalah guru-guru universal. Hicks dalam Steiner (1996) membicarakan tentang dua bentuk tradisi global teacher, yaitu tradisi humanistik dan persamaan (penghargaan) sebagai berikut.

The first is the humanistic learner-centred tradition which focuses on the development and fulfillment of each individual. The second is concerned with building greater equality in society by highlighting and challenging existing inequalities of race, gender, class and disability.

The global teacher not only aims for high academic standards but also ensures that her classroom is run along democratic lines, that there is a multicultural and global dimension to her teaching, that issues of justice and fairness are raised when appropriate and that children feel they are being empowered as citizens of tomorrow (Steiner, 1996: 37-38).

Guru memegang solusi dari permasalahan bangsa (Rizali, dkk., 2009: 2). Bermula pada guru lah, salah satunya, karakter bangsa dibentuk. Bukan semata-mata tugas guru memang. Akan tetapi mengingat dua hal di atas, bahwa guru sebagai orang tua kedua siswa dan pendamping proses, mau tidak mau seorang guru turut mendapat peran yang besar dalam mengarahkan dan membentuk karakter anak bangsa. Hal ini memang merupakan suatu tugas yang besar dan bukanlah tugas yang remeh. Akan tetapi tugas ini akan menjadi ringan, hanya jika dilakukan dengan sepenuh hati dan kasih sayang.

Dengan upaya yang sungguh dan niat yang ikhlas, semoga pekerjaan besar guru ini akan membuahkan hasil yang dicita-citakan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orangtua atau guru yang sempurna, tetapi orangtua atau guru yang punya kemauan akan menjadi orangtua atau guru yang baik (Wijanarko, 2005: 41). Upayakan juga untuk tidak lekas puas atas apa yang dikerjakan dalam mendidik karena hal itu merupakan pertanda keengganan untuk berproses menjadi lebih baik (Roqib, 2009: 45).

Semoga dengan adanya guru-guru yang bertanggung jawab atas profesinya, guru-guru yang mengajar dengan keteladanan, serta guru-guru yang dengan bijak membuka wacana siswanya akan berbagai sisi dalam memandang persoalan, kelak akan bermunculan generasi-generasi bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa berkarakter profetik. Kiranya memanglah layak dan tidak berlebihan apabila menaruh harapan yang besar terhadap guru-guru, yang memang handal, untuk mencetak generasi bangsa yang diharapkan itu. Guru, yang mana sebagai orang tua kedua siswa dan pendamping proses siswa, pasti bisa mengemban tugas mulia ini dengan berbekal ilmu, keteladanan, dan kasih sayangnya.

Daftar Pustaka

- Hendrawan, Sanerya. 2009. *Spiritual Management*. Jakarta: P.T. Mizan.
- Rizali, Ahmad, Indra Djati Sidi, Satria Dharma. 2009. *Dari guru Konvensional Meuju Guru Profesional*. Jakarta: Grasindo.
- Roqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Steiner, Miriam. *Developing the Global Teacher: Theory and Practice in Initial Teacher Education*. Trantham Books.
- Surakhmad, Winarno, St. Sularto. 2009. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wijanarko, Jarot. 2005. *Mendidik Anak: Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zarkasi, Effendi. 1999. *Khutbah Jumat Aktual*. Jakarta: Gema Insani.

MULTILINGUALISME DAN PEMIMPIN PROFETIK TRANSFORMATIF

Margana

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Menguasai aneka bahasa atau yang dikenal dengan multilingualisme merupakan salah satu properti sebagai pemimpin profetik transformatif. Dikatakan demikian karena bahasa merupakan salah satu alat komunikasi tulis maupun lisan antara pemimpin dan pengikutnya. Dengan bahasa, para pemimpin dapat mengendalikan pengikutnya untuk mengikuti ide-ide atau wawasan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan dan mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini merujuk pada teori tentang hubungan bahasa dan kekuasaan. Berdasarkan teori tersebut, bahasa memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kekuasaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa penguasaan aneka bahasa, yakni bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa asing merupakan alat untuk mengemban amanah sebagai pemimpin yang dapat diterima oleh semua kelompok yang memiliki latar belakang sosial budaya, termasuk multi kebhahasaan. Dengan menguasai lebih dari satu bahasa tersebut, para pemimpin dapat melakukan pemilihan bahasa yang sesuai dengan konteksnya (topik, partisipan, dan seting) sehingga miskonsepsi dan miskomunikasi dapat diminimasi. Penyebab terjadinya konflik antara pemimpin dan pengikutnya ditengarai oleh ketidakmampuan para pemimpin memilih bahasa yang tepat dalam melakukan tindak komunikasi antar sesama. Tanpa penguasaan bahasa yang memadai, eksistensi dan kewibawaan pemimpin akan pudar seiring dengan perjalanan waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini memerikan berbagai isu terkait dengan multilingualisme yang mencakup makna multilingualisme, pentingnya multilingualisme bagi seorang pemimpin profetik transformatif, dan kesantunan berbahasa yang sesuai dengan konteksnya.

Kata kunci: *Multilingualisme, Kepemimpinan, Pemilihan Bahasa*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, perasaan, pesan yang diwujudkan dalam dua jenis bahasa, yakni bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal menggunakan sistem lambang atau bunyi sebagai pengungkap pesan. Bahasa verbal ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan diartikan sebagai sistem bunyi yang memiliki makna sedangkan bahasa tulis merujuk pada penggunaan sistem lambang sebagai pengungkap pesan. Selanjutnya, bahasa non-verbal merupakan jenis bahasa yang menggunakan gerakan tubuh pengungkap pesan kepada lawan tutur. Bahasa non-verbal ini biasa digunakan untuk memperjelas atau melengkapi bahasa lisan sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh mitra tutur. Kedua jenis bahasa tersebut memiliki peranan penting dalam konteks kepemimpinan karena kedua bahasa tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengungkap pesan dalam praktik-pratik komunikasi antara para pemimpin dan orang yang dipimpin.

Penjenisan bahasa verbal dan non-verbal tersebut terjadi pada setiap bahasa termasuk bahasa lokal (Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Dayak, Melayu, dan sebagainya), bahasa pertama (bahasa Indonesia), bahasa asing (bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dsb). Selanjutnya, berbagai bahasa tersebut memiliki aturan-aturan kebahasaan tersendiri yang bersifat independen yang merupakan ciri khas dari suatu bahasa. Aturan-aturan tersebut mencakup aturan sistem pengucapan, pengejaan, penulisan, aturan gramatika, ataupun aturan makna. Hal ini mengimplikasikan bahwa aturan kebahasaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia berbeda dengan aturan kebahasaan yang digunakan dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, dalam pembentukan frasa benda, bahasa Indonesia menggunakan hukum diterangkan-menerangkan (DM) sedangkan dalam bahasa Inggris menerapkan hukum menerangkan-diterangkan (MD). Sistem pengucapan dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan dalam sistem penulisan. Sebaliknya, sistem pengucapan dalam bahasa Inggris berbeda dengan sistem penulisan. Permasalahan ini yang menyebabkan kesulitan bagi para pembelajar bahasa kedua.

Sehubungan dengan jenis bahasa (verbal dan non-verbal), bahasa verbal merupakan bahasa yang lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan di antaranya adalah bahwa bahasa verbal mudah pelajari dan memiliki aturan kebahasaan yang jelas. Di samping itu, bahasa verbal mudah dimengerti, dan praktis untuk digunakan dalam berbagai tindak tutur dengan latar yang berbeda. Sebaliknya, bahasa non-verbal belum memiliki aturan yang jelas baik dalam sistem gerak, sistem makna, dan sebagainya. Namun demikian, perlu disadari bahwa kedua jenis bahasa tersebut perlu dimengerti dan dikuasai oleh para calon pemimpin profetik transformatif karena kedua jenis bahasa tersebut memiliki peranan yang luar biasa dalam konteks kepemimpinan. Dengan kata lain, dengan menguasai kedua jenis bahasa

tersebut, para pemimpin mampu mengendalikan, mempengaruhi, dan mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya.

Penguasaan satu jenis bahasa, misalnya bahasa ibu atau bahasa pertama tidaklah cukup bagi calon pemimpin profetik transformatif di Abad 21 ini. Dengan kata lain, para calon pemimpin tidak cukup hanya menguasai bahasa lokal dan/atau bahasa pertama saja. Para calon pemimpin pada Abad 21 dituntut menguasai aneka bahasa yang mencakup bahasa lokal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dengan menguasai tiga bahasa tersebut atau yang dikenal dengan istilah aneka bahasa atau multilingual, para calon pemimpin memiliki ruang gerak atau ruang komunikasi yang lebih luas dibandingkan dengan menguasai satu bahasa saja yang hanya menjadikannya sebagai pemimpin lokal. Dengan menguasai aneka bahasa di antaranya bahasa lokal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris (jika perlu mereka menguasai banyak bahasa asing lain), para calon pemimpin tersebut dapat berterima di berbagai tindak tutur karena mereka menjadi bagian berbagai masyarakat tutur yang berbeda bergantung pada konteks tutur yang mereka inginkan. Mereka secara fleksibel dapat memilih bentuk kode sesuai konteks komunikasinya (Wardhaugh, 2010).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, penguasaan aneka bahasa (multilingualisme) dapat dijadikan salah satu indikator untuk memilih pemimpin profetik transformatif menuju bangsa yang berdaulat. Dengan penguasaan aneka bahasa, calon pemimpin tersebut mampu menyebarkan berbagai gagasan, ajaran, wawasan kemajuan dan sebagainya dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya masyarakat yang dipimpinnya. Dengan penguasaan aneka bahasa, calon pemimpin tersebut juga mampu mentransfer pandangan-pandangan kemajuan kepada khalayak sasaran untuk mengeluarkan mereka dari tirai kapitalisme menuju masyarakat religius dan berkarakter.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, makalah ini mengulas berbagai isu kebahasaan yang dihubungkan dengan figur seorang pemimpin profetik transformatif. Isu-isu tersebut mencakup esensi multilingualisme, bahasa dan kekuasaan, pertimbangan pemilihan bahasa dalam tindak tutur, aturan berbahasa, dan prinsip-prinsip kesantunan dalam berbahasa. Masing-masing isu diuraikan dalam sub-bahasan berikut.

Pentingnya Multilingualisme

Sebelum mendiskusikan lebih lanjut perihal multilingualisme, definisi istilah tersebut perlu dibatasi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman makna multilingualisme yang disebabkan perbedaan sudut pandang dalam memaknai istilah tersebut. Menurut Oestreicher dalam Margana (2012), istilah bilingualisme atau multilingualis merujuk pada kemampuan penutur dalam mengaktifkan dua bahasa tanpa adanya interferensi ataupun hambatan ketika penutur berpindah dari bahasa satu ke dalam bahasa lain. Definisi senada disampaikan oleh Oksaar dalam Romaine (1995) yang mengatakan bahwa bilingualisme

adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggunakan dua bahasa secara bebas sebagai alat komunikasi dan mempertukarkan kedua bahasa tersebut jika diperlukan. Baetens-Beardsmore (Margana, 2004; 2009; 2012) mengatakan bahwa bilingualism merujuk pada kemampuan penggunaan dua bahasa atau lebih. Kemampuan penggunaan dua bahasa tersebut boleh sama atau tidak sama tergantung pada faktor-faktor yang berpengaruh. Pendapat tersebut dipertegas oleh Hornby dalam Margana (2012) yang mengatakan bahwa bilingualism merujuk pada berbagai tingkatan kemampuan dalam mengaktifkan dua bahasa atau lebih yang dimiliki oleh penutur bahasa mulai dari tingkat pemula sampai dengan tingkat lanjut. Selanjutnya, tingkat kemampuan pemula merujuk pada penggunaan salah satu keterampilan berbahasa (*macro skills*), misalnya membaca, berbicara, menulis atau kemampuan menyimak (Macnamara, 1967, 1969). Dalam tingkat kemampuan lanjut, aneka bahasawan mampu menguasai keterampilan bahasa makro dan keterampilan bahasa mikro yang digunakan dalam berbagai tindak komunikasi.

Sehubungan dengan tingkat kemampuan berbahasa tersebut, multilingualisme dibedakan menjadi dua jenis, yakni multilingualisme tidak setara (*imbalanced multilingualism*) dan multilingualisme setara (*balanced multilingualism*) (Saunders dalam Margana (2004, 2012). Jenis pertama diartikan sebagai kemampuan menguasai lebih dari dua bahasa, namun penguasaan ketiga bahasa tersebut tidak seimbang dalam arti terdapat bahasa yang lebih dominan dikuasai dibandingkan yang lainnya. Sebaliknya, multilingualisme setara diartikan sebagai kemampuan menguasai lebih dari dua bahasa yang kemampuan terhadap bahasa tersebut setara. Sehubungan dengan penjenisan ini, seorang pemimpin yang profetik transformatif idealnya memiliki jenis multilingualisme setara dalam pengertian bahwa pemimpin tersebut secara aktif menguasai ketiga bahasa tersebut. Penguasaan ketiga tersebut dapat diukur melalui penguasaan keterampilan berbahasa (*listening, reading, speaking, dan writing*) (Saunders, 1988) dan komponen kebahasaan (kosakata, gramatika, pengucapan, pengejaan, dan sebagainya) untuk masing-masing bahasa yang dikuasai (Margana, 2013).

Penguasaan lebih dari dua bahasa memiliki berbagai keuntungan bagi pemimpin profetik transformatif. Keuntungan tersebut adalah (1) memiliki berbagai masyarakat tutur, (2) memiliki fleksibilitas untuk berkomunikasi di berbagai arena komunikasi, (3) memiliki banyak wawasan budaya dari berbagai bahasa, (4) memiliki kepekaan terhadap aneka bahasa, (5) menumbuhkan kesadaran antar budaya (*intercultural awareness*), (6) memiliki berbagai *language repertoire*, (7) menumbuhkan kepercayaan diri, (8) meningkatkan kredibilitas, dan sebagainya.

Peal dan Lambert dalam Romaine (1995) mengemukakan bahwa dengan menguasai aneka bahasa seorang anakbahasawan memiliki fleksibilitas mental, superioritas dalam pembentukan konsep, dan *a more diversified set of mental*. Lebih lanjut, menguasai aneka bahasa memberikan keuntungan secara kognitif

dan metakognitif (Garcia, 2007; Margana, 2013). Menurut Segalowitz dalam Saunders (1988: 17-20), keuntungan kognitif bagi seorang anekabahasawan meliputi (1) *greater awareness of the arbitrariness of language*, (2) *ability to separate of meaning from sound*, (3) *greater adeptness at evaluating non -emperical contradictory statements*, (4) *greater adeptness at divergent thinking*, (5) *greater adeptness critical thinking*, (6) *greater linguistic and cognitive creativity*, (7) *greater social sensitivity*, dan (8) *greater facility at concept formation*. Secara metakognitif, menguasai lebih dari dua bahasa memperkuat kemampuan mengenali bentuk-bentuk kebahasaan. Dengan menggunakan *meta-linguistic awareness*, seorang anekabahasawan mampu mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang ada pada setiap bahasa yang dikuasai untuk membangun kesadaran tata bunyi, tata kata, tata kalimat, dan tata makna.

Bahasa, Kekuasaan, dan Fungsi Bahasa

Dalam kajian linguistik, terdapat perdebatan tentang hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Pandangan konvensional menyebutkan bahwa bahasa dan kekuasaan tidak memiliki hubungan sama sekali. Bahasa merupakan ilmu yang bersifat mandiri. Pandangan ini dapat dibenarkan manakalabahasanya dipahami sebagai kajian struktur internal yang ada dalam sistem kebahasaan. Dengan kata lain, bahasa hanya dipandang sebagai tata bahasa yang hanya berkenaan dengan pengetahuan aspek-aspek kebahasaan seperti tata bunyi, tata kata, tata kalimat, tata makna sedangkan kekuasaan hanya dipahami sebagai bagian dari politik belaka.

Jika pelajari secara mendalam, bahasa berkaitan erat dengan kekuasaan. Pandangan ini bertumpu pada pemikiran bahwa bahasa tidak dapat lepas dari struktur sosial masyarakat sebagai penutur bahasa (Wardhaugh, 2010). Dengan kata lain, bahasa bersinergi dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai variabel seperti budaya, strata sosial, dan sebagainya yang merupakan faktor eksternal bahasa (Wardhaugh, 2010). Masing-masing variabel memiliki keterkaitan dengan bahasa. Sebagai contoh, dalam bahasa Jawa terdapat klasifikasi bahasa yang ditinjau dari kriteria tingkatannya yaitu bahasa Jawa *Ngoko* dan *Krama*. Sementara bahasa Jawa *Krama* dapat dipilah lagi menjadi *Krama Madya* dan *Krama Inggil* yang penggunaan untuk masing-masing jenis berbeda satu sama lainnya. Bahasa Jawa *Ngoko*, misalnya digunakan untuk orang yang sudah akrab dikenal, dan biasanya oleh orang yang lebih muda usianya serta lebih rendah derajat atau status sosialnya. Sebaliknya, bahasa Jawa *Krama* dipergunakan oleh pihak-pihak yang berinteraksi yang belum saling mengenal, dan digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tinggi umur serta status sosialnya. Hal ini jelas bahwa bahasa memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan. Dengan menggunakan bahasa seseorang dapat memutarbalikkan suatu kebenaran. Bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk meligitimasi kekuasaan.

Mengacu pada sinergi antara bahasa dan kekuasaan, seorang pemimpin profetik transformatif harus menyadari begitu pentingnya menguasai berbagai

bahasa yang dapat digunakan dalam berbagai konteks situasi dalam rangka mengemban amanah sebagai seorang pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin berada dalam konteks formal, pemilihan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang tepat dibandingkan bahasa Jawa. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin hendak berkomunikasi dengan masyarakat pedesaan, penggunaan bahasa Jawa *Krama* adalah pemilihan bahasa yang tepat karena hal itu sesuai dengan konteks situasi yang ada. Selanjutnya, dalam konteks internasional, tentunya seorang pemimpin tidak memilih bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi melainkan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris dalam konteks komunikasi antar negara merupakan pilihan yang tepat mengingat bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional yang digunakan sebagai alat komunikasi antar negara.

Sehubungan penggunaan bahasa tersebut di atas, seorang pemimpin perlu juga mengetahui fungsi-fungsi bahasa dalam tindak komunikasi. Fungsi-fungsi bahasa tersebut mencakup berbagai fungsi di antaranya adalah (1) fungsi fatik, (2) fungsi konatif, (3) fungsi konatif, (4) fungsi puitik, (5) referensial, dan (6) fungsi metalingual (Jakobson dalam Sudaryanto, 1990). Fungsi fatik merujuk pada fungsi bahasa yang digunakan untuk menjalin hubungan antar penutur. Fungsi ini perlu dipahami oleh seorang pemimpin profetik transformatif untuk mempererat hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Fungsi konatif diartikan sebagai fungsi bahasa yang berkenaan dengan mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan apa yang dikehendaki. Fungsi ini juga sangat penting bagi pemimpin profetik transformatif dalam rangka mentransformasi wawasan, gagasan, dan ajaran yang disampaikan kepada para pengikutnya. Fungsi puitik merujuk pada fungsi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan slogan-slogan yang bertujuan mempengaruhi orang lain menangkap pesan yang tertera dalam untaian kata dalam slogan. Fungsi referensial diartikan sebagai fungsi bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek, situasi, atau konsep. Fungsi metalingual adalah fungsi bahasa yang digunakan untuk mempelajari bahasa itu sendiri.

Berbeda dengan pandangan fungsi bahasa tersebut di atas, Halliday dalam Sudaryanto (1990:17) mengemukakan tiga fungsi bahasa, yakni (1) fungsi ideasional, (2) fungsi interpersonal, dan (3) fungsi tekstual. Fungsi ideasional diartikan sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, pengalaman, wawasan, dan sebagainya. Fungsi interpersonal merujuk pada fungsi bahasa sebagai alat untuk menjalin hubungan interpersonal dengan mitra tutur, mengungkapkan peran-peranan sosial. Fungsi tekstual diartikan sebagai alat membentuk mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi. Fungsi tekstual ini pada hakikatnya berperan sebagai instrumental bagi fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Ketiga fungsi bahasa tersebut juga perlu dipahami oleh pemimpin profetik transformatif untuk melakukan tindak komunikasi lisan ataupun tulis.

Aspek-Aspek dalam Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi tulis maupun lisan, pemahaman aspek-aspek komunikasi merupakan permasalahan yang pelik. Dikatakan demikian karena ketidaktahuan aspek-aspek komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan polemik yang berakibat pada turunnya kredibilitas seorang pemimpin. Untuk itu, seorang pemimpin harus berhati-hati dalam melakukan tindak komunikasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa seorang pemimpin yang menguasai aneka bahasa perlu memahami berbagai pertimbangan dalam melakukan tindak tutur untuk menghindari kesalahpahaman tentang pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus mempertimbangkan konteks ketika dia melakukan interaksi. Konteks tersebut setidaknya mengacu pada tiga hal, yakni setting komunikasi, topik, dan partisipan (Wardhaugh, 2010; Margana, 2012).

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, berikut ini disampaikan uraian tentang aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan pemilihan bahasa yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang berinteraksi termasuk di dalamnya para pemimpin profetik transformatif dengan mengacu *the ethnography of speaking* sebagaimana diulas oleh Hymes dalam Bratt dan Richard (2003) dan Wardhaugh (2010).

Menurut Hymes dalam Wardhaugh (2010), para penutur perlu memahami aspek-aspek yang ada dalam setiap huruf *SPEAKING*. Huruf pertama *S* mengacu pada *setting* dan *scene*. Kata *setting* merujuk pada *di mana* dan *kapan* komunikasi itu terjadi sedangkan *scene* merujuk pada *abstract psychological or cultural setting*. Hal ini mengimplikasikan bahwa seorang pemimpin perlu memperhatikan latar sebagai salah satu konteks komunikasi dengan pengertian *kepadasiapa* dia melakukan tindak tutur dan *di mana* dia melakukan tindak tutur. Di samping itu, seorang pemimpin perlu juga memperhatikan suasana psikologis dan kondisi kultural yang dimiliki oleh mitra tutur. Huruf kedua *P* merujuk pada partisipan atau pihak-pihak yang berinteraksi. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang pemimpin perlu mengetahui latar belakang mitra tutur termasuk di antaranya adalah latar belakang pendidikan, sosial-ekonomi, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Huruf ketiga *E* adalah *ends* atau tujuan dari komunikasi. Seorang pemimpin perlu memperhatikan tujuan tindak komunikasi sehingga apa yang disampaikan berkaitan dengan pilihan-pilihan bahasa yang digunakan. Huruf keempat *A* mengacu pada *act sequence* yang diartikan sebagai pesan yang disampaikan atau kata-kata yang digunakan bertautan dan berhubungan dengan topik pembicaraan. Untuk itu, seorang pemimpin perlu memonitor bentuk-bentuk bahasa yang digunakan mulai dari awal pembicaraan sampai dengan akhir pembicaraan. Huruf kelima *K* mengacu pada *key* yang diartikan sebagai *tone*, perilaku, keadaan emosi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Konteks kelima ini berkenaan cara penyampaian bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam melakukan tindak komunikasi Huruf keenam *I* merujuk pada instrumentalitas yang diartikan sebagai bentuk komunikasi (lisan, tulis, telegrafik, non-

verbal). Berkaitan dengan konteks ini, seorang pemimpin perlu memperhatikan pemilihan bentuk-bentuk komunikasi yang sesuai dengan aspek-aspek lain. Dengan kata lain, pemimpin perlu menentukan apakah dia menggunakan komunikasi lisan atau tulis dalam melakukan tindak komunikasi, bersemuka atau tidak bersemuka, dan sebagainya. Huruf ketujuh *N* adalah *norms of interaction and interpretation* yang diartikan sebagai norma-norma dalam berinteraksi. Aspek ini perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin agar tidak terjadi benturan yang disebabkan oleh ketidaktahuan norma-norma yang dimiliki oleh mitra tutur. Huruf terakhir *G*, yaitu *genre* yang diartikan sebagai jenis-jenis teks sebagai wadah untaian kata-kata yang digunakan dalam komunikasi. Jenis-jenis *genre* tersebut mencakup *nasehat, laporan, prosedur*, dan sebagainya.

Aspek-aspek komunikasi sebagaimana diejawantahkan pada setiap huruf tersebut perlu dipahami dan digunakan oleh pemimpin profetik transformatif ketika dia melakukan tindak tutur. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalin hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin, memelihara kredibilitas, memperoleh legitimasi, dan mempertahankan eksistensi sebagai seorang pemimpin. Di samping itu, pemahaman terhadap aspek-aspek komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh miskonsepsi atau kesalahpahaman antara pemimpin dan orang yang dipimpin.

Kesantunan dalam Berbahasa

Dalam melakukan tindak tutur, seorang pemimpin perlu memperhatikan prinsip-prinsip kesopanan dalam berbahasa. Hal ini dilakukan mengingat seorang pemimpin menjadi panutan dan menjadi kiblat bagi para pengikutnya. Oleh karena itu, pemahaman prinsip kesopanan dalam berkomunikasi menjadi sesuatu hal yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin yang profetik transformatif. Holmes (1992:297) mengatakan bahwa '*...what is or is not considered polite in any community therefore involves assessing social relationship, along the dimension of social distance or solidarity, and relative power or status*'. Kutipan ini menegaskan bahwa kesopanan berbahasa bergantung pada hubungan sosial dari pihak-pihak yang berinteraksi dalam kaitannya dengan jarak sosial (solidaritas) dan kekuasaan (status).

Sehungan dengan hal tersebut di atas, seorang pemimpin perlu memahami teori maksim atau aturan kesopanan berbahasa sebagaimana disampaikan oleh Grice (1975). Teori tersebut terdiri dari empat maksim yang perlu diperhatikan seorang pemimpin ketika dia melakukan tindak komunikasi. Keempat maksim tersebut adalah (1) maksim kualitas, (2) maksim kuantitas, (3) maksim relevansi, dan (4) maksim cara. Maksim kualitas diartikan sebagai prinsip dalam berkomunikasi untuk memberikan informasi yang benar. Maksim ini dapat dipilah menjadi dua kategori, yaitu (a) jangan menyampaikan sesuatu yang dipercayai tidak benar, dan (a) jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada bukti yang cukup. Maksim kuantitas merujuk pada jumlah tuturan yang digunakan dalam tindak

komunikasi. Maksim ini dipilah menjadi dua kategori, yakni (a) memberikan informasi se jelas mungkin dan (b) memberikan informasi yang tidak melebihi dari yang dipersyaratkan. Maksim relevansi diartikan sebagai keterkaitan tuturan yang disampaikan dengan topik pembicaraan. Maksim cara dapat diukur dengan empat kategori, yakni (a) menghindari ketidakjelasan, (b) menghindari ambiguitas, (c) memberikan informasi yang ringkas, dan (d) menghindari ketidakberaturan dalam penyampaian pesan.

Sehubungan dengan maksim kesantunan berbahasa, Gunarwan (1992) mengajukan tiga kaidah untuk mengukur kesantunan berbahasa. Ketiga kaidah tersebut adalah (1) ketidakterpaksaan, (2) ketaktegangan, dan (3) Kesekawanan. Kaidah pertama mengandung makna bahwa interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin hendaknya mengkondisikan ketidakterpaksaan dan menghindari keangkuhan seorang pemimpin. Untuk melakukan kaidah pertama ini, seorang pemimpin perlu memilih bentuk bahasa yang tepat. Kaidah kedua merujuk pada penciptaan suasana yang benar-benar kooperatif dan berlangsung secara demokratis. Kaidah ketiga merujuk pada penciptaan kesejajaran antara pemimpin dan yang dipimpin untuk memelihara hubungan harmonis dan menimbulkan rasa senang dan hormat kepada pemimpin.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, seorang pemimpin yang profetik transformatif perlu memperhatikan keempat maksim kesantunan tersebut sebagai prinsip yang mengatur hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral dalam melakukan tindak tutur (Grice dalam Rustono, 1999:66). Penggunaan keempat maksim merupakan salah satu cara untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi sosial bagi seorang pemimpin. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemimpin merupakan panutan masyarakat dalam bertingkah laku dan berbahasa.

Berbeda dengan Grice (1975), Leech (1992) mengemukakan 6 maksim untuk memenuhi kesantunan dalam berbahasa yang dapat diaplikasikan oleh seorang pemimpin ketika dia melakukan tindak tutur. Maksim tersebut adalah (1) maksim ketimbangrasaan (*tact maxim*), (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*), (3) maksim keperkenaan, (4) maksim kerendahatian, (5) maksim kesetujuan, dan (6) maksim kesimpatian. Maksim ketimbangrasaan memiliki dua indikator, yaitu meminimalkan biaya kepada pihak lain dan memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain. Maksim kemurahan dibedakan menjadi dua indikator, yakni meminimalkan keuntungan bagi dirinya dan memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain. Maksim keperkenaan juga dipilah menjadi dua indikator, yakni meminimalkan sifat menjelek-jelekan orang lain dan memaksimalkan pujian kepada orang lain. Maksim kerendahan hati memiliki dua indikator, yakni meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. Maksim kesetujuan memiliki dua indikator, yakni meminimalkan ketidaksetujuan kepada diri sendiri dan memaksimalkan kesetujuan kepada pihak lain. Maksim kesimpatian dapat diukur dengan dua indikator, yakni meminimalkan

antipati kepada mitra tutur dan memaksimalkan simpati kepada mitra tutur. Berikut disampaikan contoh-contoh penerapan maksim tersebut di atas dalam konteks interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin.

1. Maksim Ketimbangraasaan

Tindak Tutur	Uraian
<p>(1) B : Selamat, pagi Ibu. Boleh saya bawa tas, Ibu? P : Terima kasih, mas tidak usah karena tasnya tidak terlalu berat. Lain kali aja.</p> <p>(2) B : Selamat, pagi Ibu. Boleh saya bawa tas, Ibu? P : Ya, silahkan. Ini baru namanya bawahan.</p>	<p>Dalam tingkat kesantunan tuturan, jawaban P1 meminimalkan kerugian dari mitra tutur dan memaksimalkan keuntungan pada mitra tutur. Sebaliknya, pada tuturan P2 memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan memaksimalkan kerugian kepada mitra tutur. Untuk itu, tuturan P2 perlu dihindari oleh seorang pemimpin agar tidak berhutang budi dengan bawahannya.</p>

2. Maksim Kemurahaan Hati

Tindak Tutur	Uraian
<p>(1) B : Ibu, maaf ini ada sedikit uang transport untuk kunjungan kemarin. P : Terima kasih atas pemberiaan. Tapi tolong uang ini untuk disumbangkan saja.</p> <p>(2) B : Ibu, maaf ini ada sedikit uang transport untuk kunjungan kemarin. P : Kok hanya, sedikit. Jauh sekali, masalahnya.</p>	<p>Dalam tingkat kesantunan tuturan, jawaban P1 memaksimalkan keuntungan mitra tutur dan meminimalkan keuntungan pada diri sendiri. Sebaliknya, pada tuturan P2 memaksimalkan keuntungan diri sendiri dan meminimalkan keuntungan kepada orang lain. Untuk itu, tuturan P2 perlu dihindari oleh seorang pemimpin agar tidak menurunkan kredibilitas.</p>

3. Maksim Keperkenanan

Tindak Tutur	Uraian
<p>(1) B : Pak makan siang sudah siap. Tapi menunya seadanya, pak. P : Terima kasih. Ini sudah terlalu banyak sekali bagi saya.</p> <p>(2) B : Pak makan siang sudah siap. Tapi menunya seadanya, pak. P : Gimana ini, harusnya bervariasi.</p>	<p>Dalam tingkat kesantunan tuturan, jawaban P1 meminimalkan penjelekan terhadap pihak lain dan memaksimalkan pujian kepada orang lain. Sebaliknya, pada tuturan P2 meminimalkan penjelekan kepada diri sendiri dan memaksimalkan pujian kepada diri sendiri.</p>

4. Maksim Kerendahan Hati

Tindak Tutur	Uraian
<p>(1) B : Pak silahkan masuk. Mohon maaf pak, masih banyak tumpukkan buku.</p> <p>P : Gak, apa-apa. Tempat saya lebih parah lagi.</p>	<p>Dalam tingkat kesantunan tuturan, jawaban P1 memaksimalkan penjelekan terhadap diri sendiri dan meminimalkan pujian pada diri sendiri. Sebaliknya, pada tuturan P2 meminimalkan penjelekan kepada diri sendiri dan memaksimalkan pujian kepada diri sendiri.</p>
<p>(2) B : Pak silahkan masuk. Mohon maaf pak, masih banyak tumpukkan buku.</p> <p>P : Kok. Bisa. Saya tidak biasa duduk di tempat yang berserakan seperti ini. Tempat saya tertata rapi.</p>	

5. Maksim Kesetujuan

Tindak Tutur	Uraian
<p>(1) B : Pak, menurut saya ruang kuliah sebelah barat, perlu dipasang AC. Kasihan para mahasiswa.</p> <p>P : Boleh, juga. Coba diajukan, ya.</p>	<p>Dalam tingkat kesantunan tuturan, jawaban P1 meminimalkan ketidakesetujuan antaradiri sendiri dan pihak lain dan memaksimalkan kesetujuan antaradiri sendiri dan pihak lain. Sebaliknya, pada tuturan P2 memaksimalkan kesetujuan kepada diri sendiri dan meminimalkan kesetujuan kepada mitra tutur.</p>
<p>(2) B : Pak, menurut saya ruang kuliah sebelah barat, perlu dipasang AC. Kasihan para mahasiswa.</p> <p>P : Saya setuju sekali. Itu memang yang saya pikirkan selama ini.</p>	

6. Maksim Kesimpatian

Tindak Tutur	Uraian
<p>(1) B : Ibu, mohon maaf saya terlambat karena saya mengantarkan ibu saya ke rumah sakit.</p> <p>P : Gak.. apa-apa. Gimana keadaan Ibu? Baik-baik aja khan?</p>	<p>Dalam tingkat kesantunan tuturan, jawaban P1 memaksimalkan simpati kepada mitra tutur. Sebaliknya, pada tuturan P2 memaksimalkan antipati dan meminimalkan simpati.</p>
<p>(2) B : Ibu, mohon maaf saya terlambat karena saya mengantarkan ibu saya ke rumah sakit.</p> <p>P : Semua orang mengalami sakit.</p>	

Merujuk pada contoh-contoh tersebut di atas, seorang pemimpin perlu memahami maksim kesopanan dalam tindak tutur untuk menghindari ketidakharmonisan hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Hal ini perlu dilakukan agar suasana kepemimpinan bersifat demokratis dan memberikan keteduhan kepada orang-orang yang dipimpinnya.

Kesimpulan

Merujuk pada uraian tersebut di atas, seorang pemimpin profetik transformatif dituntut menguasai aneka-bahasa atau yang disebut multilingualisme. Pernyataan ini didasarkan ada suatu teori yang mengatakan bahwa multilingualisme memberikan berbagai keuntungan kognitif dan metakognitif sebagaimana disampaikan di atas. Dengan menguasai aneka-bahasa tersebut, seorang pemimpin diharapkan dapat melakukan amanahnya sebagai pemimpin yang berterima dalam bermasyarakat.

Selanjutnya, seorang pemimpin juga perlu memahami aspek-aspek yang menentukan tindak komunikasi sebagaimana diwujudkan pada setiap huruf yang ada kata *SPEAKING*. Di samping itu, pemimpin yang baik harus memiliki kesantunan berbahasa dengan memperhatikan (1) maksim kualitas, (2) maksim kuantitas, (3) maksim relevansi, dan (4) maksim cara. Selain empat maksim tersebut, seorang pemimpin juga perlu memperhatikan (1) maksim ketimbang-rasaan (*tact maxim*), (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*), (3) maksim keperkenaan, (4) maksim kerendahatian, (5) maksim kesetujuan, dan (6) maksim kesimpatian ketika yang bersangkutan melakukan tindak tutur.

Daftar Pustaka

- Baetens-Beardsmore, H. (1987). *Bilingualism: Basic Principles*. England: Multilingual Matters.
- Bratt, C.P, & Richard, G.T. (2003). *Sociolinguistics: The Essential Readings*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Garcia, Ofelia. (2007). Bilingual Education. *The Handbook of Sociolinguistics*. Coulmas, Florian (ed). Blackwell Publishing, 1998. Blackwell Reference Online, 28 December 2007.
- Grice, H.P. (1975). 'Logic and conversation' In Cole, P. & Morgan, J. (eds.) *Syntax and Semantics, Volume 3*. New York: Academic Press. pp. 41-58.
- Gunarwan, Asim. 1992. *Presepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Kelo, pok Etnik di Jakarta dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed) Bahasa Budaya*. Jakarta: Lembaga Bahasa Atma Jaya. Hlm 179-205.
- Halliday, M. A. K. (1975). *Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language*. London: Edward Arnold.
- Holmes, Janet. (1992). *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Longman Group Limited.

- Hornby, P. A. (1977). *Bilingualism: Psychological, sosial and educational implications*. New York: Academic Press.
- Leech, G. (1992). *Principles of Pragmatics*. New York: Addison Wesley Longman Publishing.
- Macnamara, J. (1967): "The bilingual's linguistic performance: A psychological overview". *Journal of Sosial Issues*, 23, 59-77.
- Margana. (2004). The functions of codeswitchingpractised by English teachers and students of Junior High Schools of Yogyakarta.*Proceeding International Conference at National University of Singapore*.
- — — — —. (2009). Analisis gramatika alih kode dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya di prodi PBI. *Diksi*, 134-142.
- — — — —. (2012). Alihkode dalam pengajaran hahasa Inggris di SMA di Yogyakarta. Yogyakarta: *Disertasi Universitas Gadjah Mada*.
- — — — —. (2013). Theoretical Justification of Bilingual Education Program in Indonesia.*The Third FLLT International Seminar Proceedings*, Thamatsat University Thailand , 772-784.
- Oksaar, E. (1970). Bilingualism.In T.A. Sebeok, (Ed.), *Current Trends in Linguistics* (pp.437-449). Den Haag: Linguistics in Western Europe.
- Romaine, S. (1995).*Bilingualism* (Second edition). Oxford, UK: Basil Blackwell Ltd.
- Rustono. 1999. *Pokok-PokokPragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Saunders, G. (1988). *Bilingual Chirdren From Birth to Teens*.Clevedon: Multilingual Matters, Ltd.
- Saunders, G. (1988). *Bilingual Chirdren Guidance for the Family*. Clevedon: Multilingual Matters, Ltd.
- Sudaryanto. (1990). *Menguak Fungsi Hakiki Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wardhaugh, R. (2010). *An Introduction to Sociolinguistics*.Massachusetts: Blackwell Publishers.

